



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



Sejarah Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Ekonomi

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Sejarah Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Ekonomi

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-01-4 (PDF)



Sejarah Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Ekonomi

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-623-8642-01-4

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah-Nya yang melimpah, yang telah memungkinkan penyelesaian penulisan buku yang berjudul *“Sejarah Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Ekonomi “*

Dalam buku ini akan membahas pentingnya memahami sejarah disiplin seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, audit, pajak, dan keuangan. Penulis menyoroti bahwa pengetahuan tentang sejarah disiplin tersebut membantu dalam menganalisis keputusan bisnis di berbagai negara, menghindari kesalahan masa lalu, dan menemukan inspirasi. Bab 1 ini membahas pentingnya mempertimbangkan ulang akuntansi zakat dalam konteks agribisnis, dengan fokus pada penggunaannya untuk mengukur kinerja bisnis dan memenuhi kewajiban agama. Bab ini akan menjelajahi sejarah dan evolusi akuntansi zakat pertanian, serta praktiknya saat ini dalam konteks bisnis dan agama. Selanjutnya dalam bab 2 membahas penyusunan dan penyajian laporan arus kas berdasarkan IAS 7 dengan pendekatan historis. Fokusnya adalah transformasi laporan arus kas dan pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan. Analisis meliputi usulan perubahan dari beberapa dokumen, termasuk pandangan awal IASB pada 2008, draft Exposure Draft pada 2010, Exposure Draft ED/2012/1 pada 2012, makalah diskusi dari Dewan Pelaporan Keuangan Inggris pada 2016, dan Exposure Draft ED/2019/7 pada 2019. Tujuannya adalah meningkatkan komunikasi keuangan.

Bab 3 membahas praktik akuntansi dengan mempertimbangkan isu kelembagaan seperti tekanan ekonomi, sistem hukum, budaya, dan pandemi global. Dalam bab ini menggunakan konsepsi isomorfisme untuk menjelaskan faktor kelembagaan yang mempengaruhi perkembangan peraturan dan praktik akuntansi di Malaysia. Pada bab ke 4 membahas perkembangan teknologi yang mempengaruhi sektor jasa, khususnya sektor keuangan. Terjadi perubahan besar dalam pemasaran jasa keuangan dan produk perbankan, dengan penekanan pada pendekatan yang berpusat pada nasabah dan penerapan CRM (Customer Relationship Management). Dalam bab ini juga menyoroti pentingnya manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, dengan penekanan pada implikasi CRM bagi bank-bank Turki dan masa depan sektor perbankan. Selanjutnya dalam bab ke 5 ini membahas perkembangan industri perbankan sejak awal berdirinya Republik. Dilakukan upaya untuk memajukan industri perbankan nasional melalui pembentukan Bank Sentral. Seiring dengan globalisasi dan deregulasi keuangan, industri perbankan mengalami pertumbuhan signifikan, tetapi juga mengalami krisis keuangan. Melalui reformasi perbankan, untuk menguatkan ekonomi dan berintegrasi dengan pasar global.

Dalam bab ke 6 ini meneliti pengaruh nilai-nilai dari keluarga dan sekolah terhadap keputusan dan perilaku lulusan sekolah keuangan dalam kehidupan kerja mereka. Hasilnya menunjukkan dominasi nilai rasionalisme dan profesionalisme, dengan perbedaan nilai tergantung pada karakteristik demografi seperti gender, usia, pendidikan, status perkawinan, dan pengalaman kerja, tetapi tidak ada perbedaan dalam nilai sentralisasi. Selanjutnya dalam bab 7 membahas perbedaan antara ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) dan SCG (Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan) sebagai faktor penting dalam tata kelola perusahaan. SCG dilihat sebagai ciri utama tata kelola perusahaan, sementara ESG dapat menjadi bagian dari

SCG. Bab ini menyoroti pentingnya kedua faktor tata kelola dan mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan risiko terkait dengan penerapan ESG dan SCG. Bab 8 ini membahas sejarah kewirausahaan sebelum revolusi industri, dengan penekanan pada konsep kewirausahaan. Dalam bab ini akan mengeksplorasi model kewirausahaan yang disukai oleh mereka dan struktur kemitraan yang dibangun dalam kerangka sumber daya yang tersedia pada masa itu. Selanjutnya bab 9 akan membahas mengenai pentingnya pemahaman sejarah perkembangan ekonomi dalam memahami perkembangan bisnis kontemporer. Perekonomian dunia saat ini adalah hasil dari sejarah masyarakat manusia, dan pemahaman ini dapat memberikan gambaran tentang evolusi selanjutnya menuju Industri 5.0. Meskipun perbedaan dasar hukum bisnis dan sistem sosial-politik, ekonomi bisnis dibangun untuk pertumbuhan dan kedewasaan yang tepat, menjadi struktur sosial-ekonomi yang stabil.

Dalam bab ke 10 ini membahas pentingnya bank sentral dalam kehidupan ekonomi negara. Bank sentral berperan dalam menjalankan kebijakan moneter dan menyediakan sumber daya pendanaan untuk penyelenggaraan negara. Dalam bab ini juga akan mengulas proses pembentukan Bank Sentral serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi negara, dengan meneliti laporan keuangan 5 tahun pertama sejak pendiriannya. Selanjutnya dalam bab 11 akan membahas evolusi sistem perpajakan dari pendekatan tradisional ke yang lebih modern, menyoroti permasalahan utama seperti ketidakseimbangan internasional dalam struktur pajak. Praktik akuntansi masih terpengaruh oleh regulasi perpajakan, namun menunjukkan kemajuan sesuai dengan tujuannya. Dalam bab 12 ini membahas sejarah panjang perjalanan manusia mulai dari zaman primitif hingga perkembangan pariwisata modern. Fokus utama adalah pada perkembangan pariwisata, dengan penekanan pada kekayaan budaya dan monumen bersejarah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, bab tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan, seperti rasa ingin tahu dan kebutuhan gizi, serta bagaimana perubahan sejarah telah memengaruhi dinamika sektor pariwisata

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai sejarah akuntansi, manajemen, ekonomi, dan bisnis. Semoga buku ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaca dalam memahami sejarah akuntansi, manajemen, ekonomi, dan bisnis. Terima kasih.

Semarang, Mei 2024
Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PERKEMBANGAN AKUNTANSI ZAKAT PERTANIAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Pengertian Zakat	2
1.3. Pentingnya Akuntansi Zakat	3
1.4. Masalah Akuntansi Zakat Pertanian Dan Peternakan	13
1.5. Aset Dan Tujuan Bisnis	14
1.6. Kesimpulan	15
BAB 2 LAPORAN ARUS KAS: PENDEKATAN HISTORIS SESUAI IAS 7	16
2.1. Pendahuluan	16
2.2. Tinjauan Literatur Pada IAS 7 Laporan arus kas	19
2.3. Analisis usulan perubahan laporan arus kas	20
2.4. Kesimpulan	42
BAB 3 PERUBAHAN DALAM TATA KELOLA DAN PRAKTIK AKUNTANSI	43
3.1. Pendahuluan	43
3.2. Tinjauan Peraturan Akuntansi Malaysia	45
3.3. Tantangan Dalam Peraturan Akuntansi Malaysia	50
3.4. Gambaran Umum Praktik Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.....	51
3.5. Faktor Kelembagaan Dan Praktik Akuntansi	58
3.6. Kesimpulan	61
BAB 4 PENTINGNYA CRM PERBANKAN	62
4.1. Pendahuluan	62
4.2. Pemasaran Hubungan	63
4.3. CRM Sebagai Strategi Manajemen Baru	66
4.4. Kesimpulan Dan Pembahasan	75
BAB 5 SEJARAH, EVALUASI, DAN PERAN DALAM PERBANKAN	77
5.1. Pendahuluan	77
5.2. Konsep Dan Deskripsi Perbankan Bankacilik Kavrami Dan Tanimi	78
5.3. Gambaran Umum Sektor Perbankan Turki	81
5.4. Sejarah Perkembangan Perbankan Di Dunia	82
5.5. Sejarah Perkembangan Sistem Perbankan	89
5.6. Kesimpulan	115
BAB 6 PENELITIAN TENTANG NILAI KERJA LULUSAN SEKOLAH KEUANGAN	117
6.1. Pendahuluan	117
6.2. Sastra	117
6.3. Penelitian	119
6.4. Temuan	122
6.5. Kesimpulan Dan Rekomendasi	131

BAB 7	PRIORITAS ORGANISASI DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	134
7.1.	Pendahuluan	134
7.2.	Tinjauan Pustaka	137
7.3.	Perbedaan Tata Kelola Perusahaan Dan Lingkungan Sosial	149
7.4.	Teori Terkait	150
7.5.	Kesimpulan	151
BAB 8	MODEL KEWIRAUSAHAAN DAN STRUKTUR KEMITRAAN DI ERA KLASIK	153
8.1.	Pendahuluan	153
8.2.	Kewirausahaan Di Era Klasik.....	154
8.3.	Pemodelan Kewirausahaan Dan Kemitraan Bisnis Di Era Klasik.....	158
8.4.	Pembahasan Dan Kesimpulan	162
BAB 9	SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI BISNIS	164
9.1.	Pendahuluan	164
9.2.	Terbentuknya ekonomi bisnis kontemporer	165
9.3.	Siklus hidup Perusahaan.....	169
9.4.	Ekonomi bisnis kontemporer dan masa depannya	178
9.5.	Kesimpulan	186
BAB 10	PROSES PENDIRIAN BANK SENTRAL	187
10.1.	Pendahuluan	187
10.2.	Kebijakan Moneter Abad Kesembilan Belas Hingga Tahun Pertama	190
10.3.	Pembentukan Bank Sentral	196
10.4.	Kesimpulan	209
BAB 11	PERSPEKTIF SEJARAH TENTANG PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI	210
11.1.	Pendahuluan	210
11.2.	Informasi Umum Tentang Pajak	210
11.3.	Latar Belakang Sejarah	211
11.4.	Struktur Sistem Perpajakan Saat Ini	216
11.5.	Dua Masalah Mendasar Sistem Perpajakan	218
11.6.	Hubungan Antara Peraturan Pajak Dan Akuntansi	221
11.7.	Kesimpulan	222
BAB 12	TINJAUAN SEJARAH PARIWISATA	224
12.1.	Pendahuluan	224
12.2.	Periode Perkembangan Sektor Pariwisata	224
12.3.	Pengembangan Manajemen Akomodasi	227
12.4.	Pengembangan Layanan Makanan Dan Minuman	227
12.5.	Sejarah Perkembangan Transportasi Dalam Hal Pariwisata	228
12.6.	Kesimpulan	229
DAFTAR PUSTAKA	230

BAB 1

PERKEMBANGAN AKUNTANSI ZAKAT PERTANIAN

1.1 PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting bagi negara-negara berkembang karena mempekerjakan sebagian besar penduduk global, dan merupakan sumber utama pangan dan pendapatan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Menjelajah ke bidang pertanian, misalnya melalui bisnis pertanian (dalam hal ini agribisnis), adalah salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan yang penting bagi pembangunan ekonomi banyak negara. Terlebih lagi, pertanian telah menjadi sumber produksi pangan yang penting bagi umat manusia sejak zaman dahulu dan oleh karena itu, tidak boleh diabaikan.

Berpartisipasi dalam pertanian dan merambah bisnis sangat dianjurkan dalam Islam. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya pertanian dan bisnis. Pertanian sebagai profesi atau pendapatan melalui pertanian adalah upaya terhormat dari sudut pandang Islam. Hal ini disebabkan umat Islam yang terlibat dalam produksi pangan tidak hanya mengurus dirinya sendiri, namun juga masyarakat lainnya. Dari sudut pandang ekonomi Islam, fungsi produksi diatur oleh konsep penghidupan (al-Rizq) serta sumber pendapatan yang halal (halal) dan haram. Selain itu, pertanian dalam Islam dipandang dalam Islam sebagai kewajiban masyarakat muslim (fardhu al-Kifayah) dalam menjamin ketahanan pangan dan ini dipandang sebagai pekerjaan yang sangat penting yang akan memberikan pendapatan dan sumber pendapatan.

Umat Islam wajib membayar zakat setelah mereka mencapai jumlah minimum yang dapat dinilai (nisab) dan ini termasuk bisnis. Penghitungan zakat tergantung pada sumber penghasilan dengan persentase tertentu yang dipotong. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya sekedar membagi harta antara si kaya dan si miskin, namun juga merupakan salah satu bentuk kewajiban agama (ibadah) dan menyucikan harta seseorang. Untuk keperluan penelitian, bab ini fokus pada bisnis zakat hasil pertanian dan peternakan. Karena potensi ekonominya dan meningkatnya tren merambah ke bidang agribisnis, penting untuk melihat bagaimana akuntansi zakat digunakan secara formal.

Selain itu, karena pembayaran zakat didasarkan pada kewajiban agama, maka penghitungannya harus dilakukan dengan benar dan transparan melalui pencatatan keuangan yang benar. Pentingnya pencatatan keuangan dalam pengelolaan bisnis disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, bab ini mengkaji pentingnya akuntansi zakat terutama bagaimana penggunaannya—tidak hanya untuk kinerja bisnis, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban agama. Ditelusuri juga perkembangan akuntansi zakat dan penerapannya khususnya pada bidang agrobisnis. Bab ini bersifat kualitatif dan menggunakan penelitian dokumen sebagai sumber utama analisis makalah terkait, artikel jurnal dan sumber terbitan lainnya serta sumber primer Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits.

Bab ini disusun sebagai berikut. Setelah pengenalan, bagian 1.2 akan menjelaskan tentang zakat. Bagian 1.3 menyoroti pentingnya akuntansi zakat sementara Bagian. 1.4 bagaimana zakat secara tradisional dihitung dan digunakan hingga saat ini. Bagian 1.5 memaparkan permasalahan perumusan akuntansi Zakat pada bidang pertanian dan peternakan dan bagian 1.6 menyarankan rekomendasi untuk penelitian di masa depan. Akhirnya, beberapa kesimpulan diambil.

1.2 PENGERTIAN ZAKAT

Zakat artinya menyucikan. Zakat merupakan sedekah wajib sebesar 2,5% dari total kekayaan setiap muslim yang mampu secara finansial dan setelah mencapai nisab, jumlah tersebut akan diserahkan kepada masing-masing penerima zakat (asnaf). Dalam Islam, itu adalah rukun Islam ketiga dan salah satu ibadah tertinggi (ibadah) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Lebih lanjut, Al-Qardawi (1999) menggarisbawahi bahwa kata zakat diulang sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan ibadah, bersamaan dengan perintah salat, disebutkan sebanyak 27 kali. Hoque (2022) menjelaskan bahwa "Zakat didasarkan pada filosofi bahwa konsentrasi sumber daya/kekayaan masyarakat di tangan segelintir orang merupakan negasi terhadap kesejahteraan sosial dengan kesetaraan dan keadilan sosial". Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran.

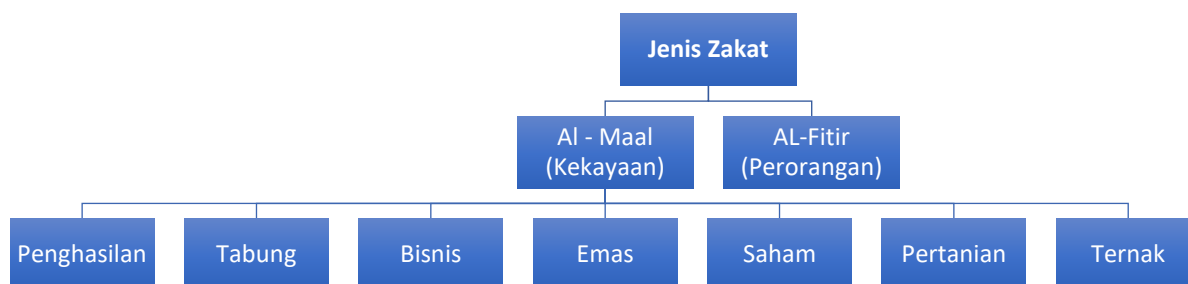
Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"Dalam kekayaan orang kaya ada bagiannya bagi orang miskin".

(Adz-Dhariyat 51:19)

Tujuan utama zakat adalah untuk mentransfer sebagian kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pengentasan kemiskinan. Zakat bisnis dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan di kalangan pengusaha muslim, karena dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek sosial yang bertujuan mengangkat masyarakat kurang mampu (Hoque 2022). Jadi, untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ada berbagai jenis barang zakat seperti yang dirangkum pada Gambar 1.1. Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua, yaitu harta kekayaan (al-maal) dan zakat perorangan (al-fitr). Zakat pada bidang usaha, pertanian, dan peternakan termasuk dalam kategori kekayaan.

Konsep zakat bisnis tergolong baru, apalagi zakat agribisnis. MASB (2006) mendefinisikan zakat bisnis sebagai "kontribusi wajib yang dinilai berdasarkan aset bisnis yang dimiliki oleh suatu entitas yang memenuhi persyaratan tertentu dan untuk didistribusikan kepada kategori penerima manfaat tertentu." Hoque (2022) menjelaskan bahwa jumlah zakat bagi pengusaha muslim adalah kekayaan bersih usaha yang dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat dinilai dan dibayarkan berdasarkan aset lancar bersih suatu bisnis, terlepas dari apakah laba telah diperoleh atau belum merupakan pendapatan.



Gambar 1.1 Barang-barang zakat. Sumber Migdad (2019)

1.3 PENTINGNYA AKUNTANSI ZAKAT

Akuntansi Islam telah dibahas dan diteliti oleh para sarjana di bidang tersebut (Ahmed et al. 1994; Kamla et al. 2006; Napier 2009; Napier dan Haniffa 2011; Alam 2022). Referensi Al-Qur'an yang tersemat pada ayat terpanjang memberikan petunjuk dan panduan pencatatan transaksi Al Baqarah-282;

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengontrak suatu utang dalam jangka waktu tertentu, maka tulislahlah. Dan hendaklah seorang ahli Taurat menuliskannya di antara kamu dengan adil. Janganlah ada juru tulis yang menolak untuk menulis sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya. Maka biarlah dia menulis dan biarlah yang mempunyai kewajiban mendiktekannya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak meninggalkan sesuatu pun darinya. Namun jika yang mempunyai kewajiban itu terbatas pemahamannya atau lemah atau tidak mampu mendikte, maka biarlah walinya mendiktekan dengan adil. Dan hadirkanlah dua orang saksi dari antara orang-orangmu. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara mereka yang kamu jadikan saksi, sehingga jika salah satu dari perempuan itu berbuat salah, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah para saksi menolak ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu-jemu menuliskannya, baik kecil maupun besar, sesuai dengan ketentuannya. Hal itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai dalil serta lebih besar kemungkinannya untuk mencegah keragu-raguan di antara kalian, kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang kalian lakukan di antara kalian sendiri. Sebab [maka] tidak ada salahnya bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan jadilah saksi ketika Anda membuat kontrak. Jangan sampai ada juru tulis yang dirugikan atau saksi mana pun. Sebab jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya hal itu merupakan kedurhakaan yang berat di dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah mengajarimu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(Al-Baqarah 2:282)

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kewajiban antara dua pihak yang mengakibatkan timbulnya utang, maka transaksi itu harus dicatat secara tertulis untuk menjaga keadilan sesuai dengan pengertian dan pengetahuan juru tulis (akuntan). Hal ini juga membenarkan praktik untuk memastikan

bahwa bukti tersedia untuk mencerminkan kewajiban para pihak dan digunakan jika diperlukan, ketika ada perselisihan mengenai transaksi. Bertentangan dengan pandangan bahwa akuntansi Islam harus didasarkan pada akuntansi kas, ayat ini menunjukkan bahwa transaksi yang mengakibatkan kewajiban seperti hutang harus dicatat, yang berarti akuntansi akrual dapat diterima. Dari sudut pandang zakat, pencatatan kewajiban dan kekayaan seseorang atau suatu badan akan membantu dalam menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Untuk menjaga kualitas informasi akuntansi, diharapkan bukti-bukti yang dicatat harus mempunyai karakteristik tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Di antara karakteristik yang diusulkan (Napier dan Haniffa 2011) adalah kesesuaian peristiwa ekonomi dengan syariah, relevansi informasi yang dicatat, pemahaman, materialitas, keandalan, dan representasi yang tepat. Agar suatu peristiwa layak untuk direkam, syarat utamanya adalah kegiatan tersebut harus sesuai dengan syariat. Jika peristiwa tersebut melibatkan kegiatan yang dilarang seperti riba, meskipun mempunyai nilai moneter, menurut syariat, hal tersebut tidak mempunyai nilai sebenarnya dan oleh karena itu tidak boleh dicatat dalam rekening. Demikian pula, jika barang-barang tersebut tidak diperoleh melalui cara yang tepat, seperti barang curian, maka barang-barang tersebut tidak akan dicatat sebagai aset atau akumulasi kekayaan entitas karena barang-barang tersebut tidak memiliki nilai apa pun. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, harta yang dikumpulkan dari pencurian tidak diakui sebagai kekayaan yang dikenakan zakat.

Informasi yang dicatat juga harus relevan dengan masing-masing transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menjamin hak-hak para pihak dalam kontrak dirinci dengan baik. Relevansi informasi akan memperjelas kepada semua pihak dalam kontrak kewajiban dan hak yang diharapkan. Dalam menentukan besaran zakat, hanya diperlukan informasi yang relevan untuk mencapai jumlah yang adil (Napier dan Haniffa 2011). Pemahaman atas informasi yang tercatat berkontribusi pada kemudahan referensi bagi semua pihak dalam kontrak, dimana laporan tersebut jelas sebagai bukti atas kewajiban yang dibuat. Demikian pula dalam menentukan besaran zakat, semua pihak dapat dengan mudah memahami cara menghitung besarnya karena informasi yang tercatat dapat dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu, hal ini juga mengurangi kemungkinan salah satu pihak memiliki ekspektasi yang berbeda dari kontrak yang disepakati.

Materialitas di sisi lain menunjukkan, tidak hanya bobot atau nilai yang dibawa oleh ukuran kuantitatif yang diberikan pada transaksi, namun juga semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Contoh yang baik adalah pengungkapan aset dalam perjalanan dan risiko yang dihadapi entitas. Pengungkapan informasi ini dapat mengubah keputusan pengguna. Dalam zakat, pengungkapan tujuan dan kegunaan suatu harta dapat menyebabkan harta tersebut dimasukkan atau dikeluarkan dari perhitungan atau bahkan dikenakan persentase yang berbeda. Dalam zakat pertanian misalnya (Mohd Shukri bin Hanapi 2014), tanaman yang dikonsumsi oleh petani tidak termasuk dalam zakat dan jika tanaman tersebut ditanam dengan irigasi yang baik oleh petani, maka akan dikenakan biaya yang lebih rendah.

Keandalan berkaitan dengan kebenaran informasi yang dicatat. Dalam menentukan besaran zakat, penting bagi pencatatan untuk menunjukkan kekayaan sebenarnya dari seseorang sehingga jumlah yang harus dibayarkan dapat ditentukan secara akurat. Jika informasi mengenai aset atau kekayaan disembunyikan dan tidak dapat diakses, maka sulit untuk memastikan keadilan. Misalnya saja, kurangnya transparansi dapat mengakibatkan jumlah pembayaran yang dibayarkan lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, sehingga berdampak buruk pada hak-hak penerima. Sebaliknya, jika informasi yang disembunyikan itu menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka hal ini akan menjadi tidak adil bagi orang tersebut, karena ia sebenarnya tidak boleh dikenakan zakat.

Yang terakhir, representasi setia menunjukkan kualitas informasi yang bebas dari kesalahan atau salah saji. Informasi yang tercatat harus ditangani dengan cermat, menggunakan mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa Akuntan telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah segala kemungkinan atau peluang kesalahan. Mirip dengan hal di atas, hal ini akan menjaga keadilan baik bagi pembayar maupun penerima zakat dalam memperoleh jumlah yang benar untuk dikumpulkan. Hal ini termasuk penilaian yang tepat atas aset atau kekayaan yang dikenakan zakat (Ahmed dkk. 2016).

Akhyar Adnan dan Barizah Abu Bakar (2009) menjelaskan bahwa wacana zakat dan akuntansi zakat tidak hanya terbatas pada kajian agama saja tetapi juga pada isu-isu sosial ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan. Perkembangan industri perbankan dan keuangan Islam telah menjamin formalisasi perhitungan dan pelaporan zakat untuk industri tersebut yang dikeluarkan oleh The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Ini adalah penghitungan zakat dan pengungkapan akuntansi pertama yang diformalkan dan distandarisasi yang diperlukan untuk entitas Islam. Namun hal ini hanya terfokus dan ditujukan untuk industri keuangan syariah dan bukan untuk lembaga atau korporasi syariah lainnya. Namun perusahaan lainnya mengikuti perhitungan zakat bisnis dan telah dipraktikkan di yurisdiksi masing-masing berdasarkan praktik akuntansi yang dipandu oleh otoritas zakat masing-masing. Menyadari bahwa tidak ada praktik akuntansi formal atau standar akuntansi zakat pertanian yang mencakup ternak dan hasil pertanian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah perkembangan di wilayah tersebut dan memberikan lebih banyak wawasan untuk masa depan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan hal yang penting dan mempunyai peranan yang signifikan di negara-negara berkembang. Menurut Bank Dunia (n.d.), UKM mewakili sekitar 90% dunia usaha dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia dan UKM formal menyumbang hingga 40% pendapatan nasional (PDB) di negara-negara berkembang. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak usaha kecil tidak menyimpan catatan akuntansi yang lengkap karena kurangnya pengetahuan di bidang akuntansi dan biaya untuk mempekerjakan akuntan profesional. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diatasi karena akan menimbulkan permasalahan dalam perhitungan dan pembayaran zakat usaha. Hal ini lebih lanjut didukung oleh Mohamad Ibrahim dkk. (2016) bahwa

pencatatan keuangan yang tidak lengkap akan mempengaruhi kegiatan usaha karena hukum bisnis mengharuskan adanya pencatatan keuangan yang lengkap untuk keperluan audit, pinjaman bank, perhitungan pajak perusahaan serta mempengaruhi perhitungan zakat usaha.

Alasannya dijelaskan oleh Abd Moen dkk. (2012), pengelolaan keuangan dan pencatatan akuntansi dipraktikkan secara informal oleh usaha kecil. Sibanda dan Manda (2016) mengungkapkan bahwa indikator terbesar kegagalan usaha kecil adalah kurangnya pengelolaan arus kas dan menyebabkan mereka tertinggal dalam pembayaran kepada krediturnya. Oleh karena itu, dengan adanya pencatatan keuangan yang baik dan sistematis akan memungkinkan usaha kecil untuk berkembang dan mempermudah proses pembayaran zakat usaha. Namun perlu diperhatikan bahwa pencatatan keuangan untuk perlakuan akuntansi zakat berbeda dengan akuntansi konvensional.

Akuntansi Zakat Tradisional

Meskipun bidang zakat sangat luas, namun masih kurangnya cakupan mengenai pentingnya akuntansi zakat khususnya untuk agribisnis, dan sebagian besar literatur menyoroti pentingnya membayar zakat produk pertanian bagi umat Islam ketika mereka aktif berpartisipasi di sektor pertanian.

Kebutuhan Informasi Akuntansi

Meninjau kembali pentingnya akuntansi dalam Islam, penting untuk mengakui kebutuhan informasi yang dihasilkan dari bidang akuntansi untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam memastikan distribusi sumber daya ekonomi yang adil dalam masyarakat dan negara (Napier dan Haniffa 2011) . Agar dapat melaksanakan zakat wajib secara efektif di suatu negara, para pemulung perlu memastikan bahwa kekayaan masing-masing telah terakumulasi hingga nisab (tingkat) tertentu yang menjamin pemiliknya untuk membayar zakat.

Tanpa informasi akuntansi yang tepat, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena zakat itu sendiri memiliki beberapa parameter yang perlu dipenuhi sebelum dapat dipungut. Oleh karena itu akuntansi zakat menjamin penyediaan informasi yang relevan untuk penilaian zakat untuk memastikan masing-masing aset yang dapat dizakatkan dinilai dengan benar, menentukan bahwa semua kondisi terpenuhi (Hamat 2014). Dalam makalahnya, Hamat (2014) juga mempromosikan gagasan bahwa akuntansi zakat tidak hanya menjadi catatan statis informasi keuangan historis, namun juga harus memasukkan aspek berkelanjutan yang mencerminkan lingkungan saat ini, kebutuhan masyarakat dan konteks lokal, dan informasi tersebut. harus selalu ditinjau tepat waktu untuk mencerminkan situasi terkini.

Hal ini membuka jalan bagi inovasi akuntansi zakat pertanian dan peternakan sebagaimana pandangan klasik sebelumnya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan sifat harta pada saat ini, besarnya zakat dan juga pembebasan biaya. Praktek seperti ini sudah tidak asing lagi karena sudah dikembangkan pada masa Khulafa Rashidin (Hamat 2014), dimana Khalifah Umar telah memungut zakat kuda (untuk ternak) dan juga zakat untuk kacang tanah, zaitun dan kapas (untuk pertanian). Hal ini semakin menunjukkan evolusi dan perkembangan akuntansi zakat bahkan pada masa pemerintahan Khulafa Rasyidin.

Zakat Pertanian

Kewajiban zakat pertanian dikutip dari ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Berdonasilah dari yang terbaik dari apa yang telah Anda usahakan dan dari apa yang Kami hasilkan untuk Anda dari bumi. Jangan memilih barang-barang yang tidak berharga untuk disumbangkan, yang mana Anda sendiri hanya akan menerimanya dengan mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mandiri lagi Maha Terpuji.

(Al Baqarah 2:67)

Ayat tersebut menyoroti sumbangan (Zakat) dari hasil bumi (pertanian) yang dilimpahkan kepada umat. Dalam menafsirkan ayat ini diturunkan empat pandangan pokok dalam mengidentifikasi masing-masing hasil bumi yang akan dikenakan zakat. Pandangan pertama berfokus pada empat hasil utama yaitu gandum, jelai, kurma dan kismis yang telah disebutkan dalam Hadits Nabi. Ibnu Majah dan al Daraqutni meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa "*Rasulullah (p) hanya memberlakukan zakat pada gandum, jelai, kurma, dan kismis.*" Versi Ibnu Majah menambahkan "*jagung.*"

Pandangan kedua yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Shafie menganggap produk-produk tersebut dapat dimakan dan dapat dilestarikan. Oleh karena itu, hal ini membuka lebih banyak produk yang termasuk dalam kategori ini karena mencakup bahan makanan pokok utama seperti gandum, jelai, jagung, biji-bijian, dan juga beras. Pandangan ketiga menyatakan bahwa produk yang tidak mudah rusak, yang dapat diawetkan dan diukur, akan dikenakan zakat. Para ulama yang berpandangan ini memasukkan produk-produk seperti biji-bijian, kapas, wijen, buah-buahan dan sayur-sayuran pilihan sebagai produk yang wajib zakat sepanjang memenuhi kriteria tidak mudah rusak dan dapat diawetkan. Pandangan terakhir berasal dari pemikiran mazhab Hanafi yang memperoleh konotasi harafiah dari ayat tersebut dimana mereka menganggap segala hasil bumi yang berasal dari bumi dikenakan zakat asalkan diusahakan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Rangkuman klasifikasi yang diperoleh para ulama tersebut dapat diringkas sebagai berikut (Tabel 1.1). Nisab hasil bumi untuk dipungut zakatnya adalah 5 wasq (satuan takar berat yang digunakan pada zaman Nabi). Ini telah dikonversi secara kontemporer oleh para ulama menjadi setara dengan 825 L atau 652,8 kg. Ada juga pertanyaan mengenai perjalanan waktu (hawl) apakah hal ini juga dapat diterapkan dalam mengakses zakat pertanian. Mayoritas ulama sepakat bahwa hakikat waktu tidak berlaku pada zakat pertanian, karena zakat tersebut dipungut pada setiap panen, bukan berdasarkan waktu.

Tarif zakat yang dikenakan atas hasil bumi dinyatakan sebesar 10% jika tanaman tersebut dibudidayakan secara alami dan disiram melalui hujan atau uap. Namun jika hasil panen kemudian diusahakan dan diiri dengan irigasi yang dilakukan oleh petani, maka dikenakan zakat sebesar 5%. Terdapat perdebatan mengenai persoalan apakah zakat dipungut tanpa dikurangi biaya usaha tani seperti sewa tanah, pembibitan, pemupukan dan panen. Mayoritas berpendapat bahwa biaya-biaya ini harus dipotong sebelum zakat

dipungut. Namun hal ini diserahkan kepada masing-masing daerah dan tradisi untuk memutuskan karena mungkin terdapat perbedaan dalam tradisi dan adat istiadat, yang dapat mempengaruhi pandangan apakah biaya harus dikecualikan atau dimasukkan.

Zakat Peternakan

Zakat ternak dari teks klasik difokuskan pada unta, sapi, dan domba. Diberikan pedoman mengenai besaran zakat yang akan dikeluarkan dan tingkat zakat (nisab) masing-masing kategori hewan. Terdapat beberapa perselisihan mengenai nisab, namun hal ini tidak akan dibahas panjang lebar dalam tulisan ini. Bagian ini akan merinci penilaian zakat masing-masing dan yang terpenting adalah kriteria hewan yang akan diberikan sebagai zakat.

Dalam mengakses zakat peternakan, penting juga untuk memastikan bahwa semua ternak tersebut memenuhi beberapa syarat. Pertama, syarat nisab yang menetapkan jumlah minimal zakat hewan ternak. Tidak ada perselisihan pada nisab unta yang ditetapkan sebanyak 5 ekor dan domba yang ditetapkan sebanyak 40 ekor domba. Namun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab mengenai nisab sapi, berkisar minimal 5 atau 32 atau 50. Kedua, ternak tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan (hawl) yaitu satu tahun. Periode yang ditentukan akan menjadi ukuran waktu satu tahun telah berlalu dari penilaian zakat sebelumnya dan jika ada pertumbuhan setelahnya, akan dikenakan zakat.

Tabel 1.1 Pandangan Ulama Islam (Fuqaha')

No.	Inti dari pandangan	Fuqaha'					
		Madzhab Abu Hanifah	Abu Yusuf bin Muhammad	Hassan Basri, Thawri & Sya'bi	Madzhab Malik bin Anas	Madzhab al-Syafi'iy	Madhub Ahmad bin Hanbal
1	Jenis tanaman dengan teks yang jelas dan eksplisit			√			
2	Setiap tanaman yang tumbuh di bumi/ditanam dengan tujuan untuk mengambil hasil bumi	√	√				√
3	Tahan lama dan tahan lama jika disimpan		√	√	√	√	
4	Buah kering				√		√
5	Isian					√	
6	Makanan pokok/pokok					√	
7	Terlepas apakah itu makanan	√					√

	pokok atau lainnya						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Syarat ketiga menyatakan bahwa ternak digembalakan secara alami dan dimaksudkan untuk berkembang biak dan menambah berat badan. Tujuan utama mereka adalah untuk reproduksi, pemerahan dan pertumbuhan. Hal ini membawa pada syarat keempat bahwa ternak tidak boleh digunakan untuk keperluan jasa lain seperti berkuda, kegiatan pertanian seperti bercocok tanam tanah atau panen dan mengangkut muatan. Pada dasarnya apabila hewan ternak tersebut digunakan selain untuk pembibitan dan pertumbuhan, maka hewan tersebut tidak termasuk dalam penilaian zakat.

Zakat Unta

Unta disebutkan secara khusus dalam Hadits Nabi untuk zakat ternak seperti dikutip berikut ini. Anas meriwayatkan bahwa Abu Bakar, orang yang jujur, menulis pesan ini ketika dia diutus:

“Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ini adalah kewajiban sedekah yang dibebankan kepada umat Islam oleh Rasulullah (P), sebagaimana diperintahkan kepadanya oleh Tuhan. Siapa pun yang diminta membayar menurut aturan ini harus memberikannya, dan siapa pun yang diminta membayar lebih harus menolak. Untuk setiap 24 ekor unta atau kurang, zakatnya adalah domba. Untuk setiap lima ekor unta dibutuhkan satu ekor domba. Ketika mereka mencapai usia 25 hingga 35 tahun, diperlukan seekor unta betina, yang berusia satu hingga dua tahun. Dari umur 36 sampai 45 tahun, ada seekor unta betina berumur dua sampai tiga tahun. Jika sudah mencapai umur 46 sampai 60 tahun, maka ada satu ekor unta betina yang berumur tiga sampai empat tahun yang akan dikawinkan. Jika mereka mencapai umur 61 sampai 75 tahun, maka akan lahir seekor unta betina berumur empat sampai lima tahun. Jika jumlahnya mencapai 76 sampai 90, maka ada dua ekor unta betina yang berumur dua sampai tiga tahun. Jika jumlahnya mencapai 91 sampai 120, maka ada dua ekor unta betina yang berumur tiga sampai empat tahun. Jika jumlahnya lebih dari 120 ekor, maka untuk setiap 40 ekor ada seekor unta betina yang berumur dua sampai tiga tahun, dan untuk setiap 50 ekor ada satu ekor unta betina yang berumur tiga sampai empat tahun. Barangsiapa yang mempunyai empat ekor unta, tidak wajib zakat, kecuali ia dengan sukarela, namun jika jumlahnya mencapai lima ekor, maka wajib mengeluarkan satu ekor domba sebagai zakatnya.”

Hal ini dapat diringkas sebagai berikut (Tabel 2.2).

Zakat Sapi

Sama halnya dengan unta, sapi juga secara khusus disebutkan dalam hadis Nabi sebagai salah satu hewan ternak yang akan dipungut zakatnya. Bukhari, dalam kumpulan Sahihnya, meriwayatkan dari Abu Dzar *“Aku datang kepada Nabi dan dia berkata ‘Aku bersumpah demi Dia yang memegang jiwaku di tangan-Nya,’ atau ‘Aku bersumpah demi yang tidak ada Tuhan selainnya’. Tidaklah seorangpun yang mempunyai unta, sapi atau domba dan tidak membayar haknya kecuali pada hari kiamat akan diinjak-injak olehnya dalam keadaan terbesar dan terberatnya. Mereka akan menginjak-injak dia dengan kuku*

mereka dan memukulnya dengan tanduk mereka, dan ketika orang terakhir telah selesai dengan dia, maka orang pertama akan dibawa kembali hingga penghakiman diberikan kepada semua orang.”

Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penilaian zakat sapi. Dinyatakan bahwa nisabnya harus mencapai 50 sebelum zakat jatuh tempo. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sapi meskipun lebih kecil dari unta sebenarnya lebih besar dan lebih berharga daripada domba. Sedangkan domba yang menetapkan nisab 40. Oleh karena itu, jika penetapan nisab 50 pada sapi, maka hal tersebut tidak adil. Namun hal ini dapat dimaklumi karena pada masa Nabi disebutkan bahwa sapi hanya ada di Yaman, sehingga tidak ada angka yang jelas mengenai nishabnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh, dapat disepakati bahwa jika kita mengikuti pembahasan para ulama sebelumnya, mungkin dapat disetujui pada pandangan pertama bahwa keheningan dalam nisab memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk putusan jumlahnya dengan mempertimbangkan konteks lokal dan sesuaikan dengan panduan yang diberikan untuk zakat unta dan domba. Disepakati juga bahwa nisab sapi yang disepakati secara anonim adalah 30, sehingga tidak dikenakan zakat bagi yang di bawahnya.

Tabel 1.2 Nisab pada unta

Jumlah unta		zakat yang harus dibayarkan
Dari	Ke	
5	9	1 domba
10	14	2 domba
15	19	3 domba
20	24	4 domba
25	35	1 ekor unta betina berumur antara 1 dan 2 tahun
36	44	1 ekor unta betina berumur antara 2 dan 3 tahun
45	60	1 ekor unta betina berumur antara 3 dan 4 tahun
61	75	1 ekor unta betina berumur antara 4 dan 5 tahun
76	90	2 ekor unta betina berumur antara 2 dan 3 tahun
91	120	2 ekor unta betina berumur antara 3 dan 4 tahun
121	129	3 ekor unta betina, umur 2–3 tahun
130	139	1 ekor unta betina umur 3–4 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2–3 tahun
140	149	2 ekor unta betina umur 3–4 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2–3 tahun
150	159	3 ekor unta betina, umur 3–4 tahun
160	169	4 ekor unta betina, umur 2–3 tahun
170	179	1 ekor unta betina berumur 3–4 tahun dan 3 ekor unta betina berumur 2–3 tahun
180	189	2 ekor unta betina berumur 3–4 tahun dan 2 ekor unta betina berumur 2–3 tahun

190	199	3 ekor unta betina berumur 3–4 tahun dan 1 ekor unta betina berumur 2–3 tahun
200	209	4 ekor unta betina umur 3–4 tahun atau 5 ekor unta betina umur 2–3 tahun

Berkaca dari hal di atas, maka disarankan agar nisab sapi mengikuti minimal 5 dan dikumpulkan dalam bentuk domba yang serupa dengan unta. Untuk di atas 30 maka setiap sepuluh akan dikenakan biaya satu ekor sapi. Mengacu pada nisab tanggal 30, berikut diturunkan (Tabel 1.3).

Zakat Domba

Zakat domba mengikuti uraian yang diberikan kepada Anas dari Abu Bakar ketika diutus. Berikut panduan zakat domba:

Tabel 1.3 Nisab pada sapi

Tidak ada sapi		zakat yang harus dibayarkan
Dari	Ke	
30	39	1 ekor sapi berumur satu tahun
40	59	1 ekor sapi, berumur dua tahun
60	69	2 ekor sapi, berumur satu tahun
70	79	1 ekor sapi berumur satu tahun dan 1 ekor sapi berumur dua tahun
80	89	2 ekor sapi, berumur dua tahun
90	99	3 ekor sapi, berumur satu tahun
100	109	1 ekor sapi berumur dua tahun dan 2 ekor sapi berumur satu tahun
110	119	2 ekor sapi berumur dua tahun dan 1 ekor sapi berumur satu tahun
120		3 ekor sapi berumur dua tahun atau 4 ekor sapi berumur satu tahun

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ini adalah kewajiban sedekah yang dibebankan kepada umat Islam oleh Rasulullah (P), sebagaimana diperintahkan kepadanya oleh Tuhan. Siapa pun yang diminta membayar menurut aturan ini harus memberikannya, dan siapa pun yang diminta membayar lebih harus menolak. Dalam sedekah domba, jika mereka digembalakan secara alami, tidak dipungut biaya, dan berjumlah antara 40 hingga 120 ekor domba, ada satu domba yang jatuh tempo. Untuk lebih dari 120 dan hingga 200, ada dua ekor domba. Untuk lebih dari 200 hingga 300 ada tiga ekor domba. Bagi yang lebih dari 300, besarnya zakatnya adalah satu ekor domba untuk setiap 100 ekor atau sebagiannya. Jika seseorang memiliki kurang dari 40 ekor domba yang digembalakan secara alami tanpa biaya, maka tidak ada sedekah kecuali orang tersebut ingin menjadi sukarelawan.

Hal ini dapat diringkas sebagai berikut (Tabel 1.4).

Akuntansi zakat hewan ternak di atas didasarkan pada acuan klasik dan sejak itu dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan hewan lain, misalnya kuda pada masa kepemimpinan Umar Al Khatab. Menarik untuk dicermati, selain adanya syarat-syarat yang

dikenakan pada hewan ternak dalam mengakses zakat, juga terdapat syarat-syarat bagi hewan yang dizakatkan (Al-Qardawi 1969). Syarat pertama adalah memastikan bahwa hewan yang dipilih untuk dizakati harus bebas dari segala cacat, baik penyakit, patah tulang, usia tua, dan cacat baik sejak lahir maupun karena kecelakaan.

Hal ini bertujuan agar hewan yang dipilih dalam keadaan baik dan sehat untuk diberikan kepada penerima zakat. Syarat kedua, hewan yang dipilih untuk zakat harus memenuhi persyaratan gender seperti yang disebutkan khusus untuk unta. Sedangkan untuk sapi dan domba, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, namun tetap mengutamakan pemberian yang berjenis kelamin betina karena akan bermanfaat bagi penerimanya. Para ahli yang acuh tak acuh terhadap gender sapi dan domba berpendapat bahwa hal ini lebih disebabkan oleh nilai pasar dibandingkan gender.

Syarat ketiga adalah umur hewan yang akan dizakatkan. Disepakati bahwa usia yang ditentukan secara klasikal harus diikuti karena bermanfaat bagi pembayar dan penerima zakat. Maklum, jika hewan tersebut masih terlalu muda kemungkinan untuk bertahan hidup mungkin lebih rendah, apalagi jika sudah tua mungkin sudah dalam tahap berkembang biak. Syarat terakhir adalah kualitas hewan yang akan dikeluarkan zakatnya. Telah dipandu bahwa hewan tersebut harus memiliki kualitas rata-rata di antara kawanannya. Mengambil yang terbaik dari ternak dapat menyebabkan kerugian bagi pembayar dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak di masa depan.

Informasi pertama dalam mengakses zakat peternakan lebih bersifat kuantitatif, yang mengacu pada akuntansi yang mudah diperoleh melalui catatan stok beredar pemilik, yang selanjutnya dapat diverifikasi dengan penghitungan fisik stok. Namun syarat kedua mengenai umur, kesehatan, jenis kelamin dan kualitas ternak lebih bersifat kualitatif dan perlu dijaga dengan baik. Sistem pencatatan yang ada saat ini khususnya yang dicatat dalam catatan mungkin tidak memiliki informasi ini. Oleh karena itu, hal ini akan memberikan tantangan bagi pembayar dan pemungut untuk mengakses hewan yang diberikan untuk zakat tanpa adanya informasi tersebut. Hal ini membawa pentingnya menangkap informasi kualitatif melalui akuntansi zakat untuk mengakses zakat dan mengevaluasi masing-masing aset yang dapat dizakatkan.

Tabel 1.4 Nisab domba

Tidak ada domba		zakat yang harus dibayarkan
Dari	Ke	
1	39	Tidak ada
40	120	1 domba
121	200	2 domba
201	300	3 domba
301	400	4 domba
401	500	5 domba

1.4 MASALAH AKUNTANSI ZAKAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Dengan meneliti kebutuhan untuk mengakses, mengevaluasi dan menghitung zakat yang harus dibayar, penting bahwa informasi akuntansi zakat dapat memenuhi kebutuhan ini. Akuntansi zakat khususnya pertanian dan peternakan belum menjadi pusat perhatian jika dibandingkan dengan zakat usaha, tabungan dan pendapatan. Mengingat hal tersebut, ke depannya ada baiknya kita memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam akuntansi zakat, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Kriteria Peternakan

Dalam membayar zakat hewan ternak, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Status kesehatan hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya belum pernah dilaporkan dalam laporan keuangan atau dijadikan informasi yang relevan untuk akuntansi. Selain itu, umur ternak juga diperlukan untuk menjamin keabsahan pembayaran zakat. Demikian pula, usia belum menjadi praktik umum yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun, ini adalah informasi penting sebagai bagian dari pembayaran zakat yang dapat diterima. Memasukkan informasi tersebut memerlukan diskusi lebih lanjut terutama dalam akuntansi peternakan. Baik pihak pembayar maupun pengumpul zakat harus menyepakati apa yang harus dimasukkan dalam laporan dan ke mana harus melaporkannya.

Pengurangan Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan mengoperasikan peternakan dan kegiatan pertanian merupakan tantangan lain yang harus diatasi. Kondisi produksi membedakan besaran zakat berdasarkan kegiatan yang dilakukan, apakah sepenuhnya mengandalkan sumber daya alam atau sampai batas tertentu menggunakan sumber daya buatan seperti irigasi. Sekali lagi, hal ini perlu dicatat dengan benar, dan dibagi serta dialokasikan secara tepat. Persentase sumber daya alam yang digunakan juga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikenakan pada hewan ternak dan hasil pertanian.

Di sisi lain, terdapat permasalahan subsidi atau bantuan pemerintah dalam penyiapan lahan, penyediaan bibit, pupuk dan irigasi. Dalam kasus seperti ini, pandangan klasik mengenai penggunaan sumber daya alam mungkin tidak akurat. Walaupun irigasi dibuat, namun sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah atau penyedia sumber daya. Hal ini kemudian tidak akan menjadi bagian dari biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Penilaian dan Konversi ke Setara Kas

Pertanyaan lain yang perlu diingat adalah diperbolehkannya mengkonversi zakat menjadi uang tunai daripada memberikan hewan ternak atau hasil pertanian. Maksudnya zakat yang wajib dikeluarkan untuk unta yang berumur dibawah 35 tahun adalah dipungutnya domba. Jika peternak tidak beternak domba, berarti harus membeli domba untuk dizakati. Jika mereka punya uang, mereka lebih memilih untuk membayar zakat daripada membeli domba.

Dalam membolehkan pembayaran dengan uang tunai, berapa nilai yang diharapkan dari zakat tersebut, apakah akan mengikuti nilai pasar atau mungkin nilai negosiasi dalam perolehan ternak atau hasil pertanian. Hal ini menciptakan peluang untuk penilaian tersebut

digunakan sebagai bagian dari penilaian aset untuk tujuan akuntansi zakat untuk hewan ternak atau hasil pertanian. Jika hal ini dapat diterima, maka akan menarik untuk melihat perlunya penilaian berkala atas aset-aset yang dizakati untuk mencerminkan nilai pasar saat ini dan keadaan setempat.

1.5 ASET ATAU TUJUAN BISNIS

Dapat diterima bahwa zakat pertanian dan peternakan akan dikenakan pada hasil panen dan hewan masing-masing dan bukan pada aset bisnis lainnya (Al-Qardawi 1969). Hal ini terlihat dari perintah bahwa zakat akan berupa hasil budidaya dari bumi, sedangkan hewan ternak akan ditenakkan. Oleh karena itu, zakat pada usaha yang tidak bergerak di bidang pertanian atau peternakan akan diperlakukan berbeda dengan perhitungan berdasarkan pendekatan modal kerja bersih atau aset bersih sebagaimana yang distandarisasi secara formal untuk industri keuangan Islam oleh AAOIFI (Mohd Shukri bin Hanapi 2014).

Hal ini kemudian memerlukan standar khusus akuntansi zakat untuk pertanian dan peternakan untuk diperhatikan dan dipertimbangkan untuk memudahkan pembayar dan pengumpul dalam menentukan jumlah zakat. Hal ini juga akan berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan lebih lanjut kelayakan standar dan praktik akuntansi zakat yang dinamis dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan perkembangan terkini di komunitas masing-masing. Telah diamati bahwa negara, komunitas, dan daerah yang berbeda mempunyai kebiasaan dan tradisi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi penilaian, praktik, dan pencatatan informasi akuntansi untuk zakat pertanian dan peternakan.

Peraturan

Peraturan dari lembaga ini memainkan peran penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam masyarakat yang mereka awasi. Selain memperkenalkan pedoman dan standar khusus untuk praktik akuntansi zakat atau pertanian dan peternakan, regulator juga diharapkan memperbaiki penilaian pasar saat ini, praktik dan norma yang dapat diterima yang dapat mempengaruhi pembayar, pengumpul, dan penerima zakat. Oleh karena itu regulator diharapkan dapat memandu dan menegakkan standar yang diperkenalkan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dengan secara aktif memastikan peraturan dan panduan yang relevan dengan pasar dan masyarakat, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensinya dan memberikan keadilan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan arahan yang jelas dalam prosesnya.

Cara Menangkap Kualitas Hasil Pertanian dan Peternakan

Telah ditegaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam zakat pertanian dan peternakan, kualitas hasil bumi dan hewan menjadi pertimbangan dalam mengakses zakat dan juga untuk menilai pembayaran zakat sesuai dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan (Al-Qardawi 1969). Hal ini kemudian menjadi kebutuhan untuk memastikan, semua informasi kualitatif dicatat dalam rekening pembayar dan pengumpul untuk menjaga bahwa kewajiban zakat telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Kegagalan untuk menyediakan dan menyimpan

informasi tersebut akan mengakibatkan tidak efektifnya pembayaran zakat yang juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi pembayar dan penerima.

Pencatatan informasi ini dalam laporan keuangan entitas dan pengungkapan yang diperlukan perlu didiskusikan baik oleh akuntan maupun ulama fiqh agar konsisten dengan informasi yang diperlukan. Cara pencatatan dan pengungkapan serta akses terhadap informasi ini juga diperlukan.

1.6 KESIMPULAN

Pada bab ini telah diulas mengenai tradisi penghimpunan zakat pertanian dimana zakat dibayarkan berdasarkan nisab dan hawl. Seiring dengan meningkatnya tren masyarakat yang merambah ke bidang agribisnis, sangat penting bagi pengusaha muslim untuk memiliki pengetahuan tentang pembayaran zakat karena ini merupakan kewajiban agama, sehingga diperlukan pencatatan keuangan yang baik dalam pembayaran dan pengumpulan zakat dan hal ini dapat terlihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, syarat untuk memiliki pencatatan keuangan yang baik selalu ada dalam doktrin Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa cara pencatatan dan pengungkapan serta akses terhadap informasi tersebut juga diperlukan dalam Islam. Sejumlah standar dan pedoman akuntansi telah dikembangkan namun fokus pada zakat masih langka, terutama untuk agribisnis. Standar dan pedoman tersebut harus sejalan dengan semangat zakat dalam Islam yang sebenarnya.

Studi ini menyadari permasalahan dan tantangan seperti menyajikan biaya eksplisit untuk mencerminkan kualitas komoditas yang dapat dizakati, biaya pengurangan, dan penilaian serta konversi ke setara kas, karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat zakat yang dikenakan pada hewan ternak dan hasil pertanian. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan dalam upaya memberikan penilaian yang adil dan tepat terhadap zakat kekayaan perusahaan berdasarkan praktik yang berlaku saat ini. Misalnya, standar khusus akuntansi zakat untuk pertanian dan peternakan khususnya untuk agribisnis. Badan pengatur diperlukan karena berperan penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam komunitas yang mereka awasi, khususnya pengusaha muslim. Yang terakhir, metode penilaian tentang cara menangkap informasi kualitatif di rekening pembayar dan pengumpul perlu dikembangkan untuk menjaga agar kewajiban zakat telah dipenuhi dengan baik guna menjaga keadilan baik bagi pembayar maupun penerima zakat. Semua upaya ini diperlukan untuk memastikan praktik akuntansi zakat pertanian saat ini dan masa depan memenuhi kinerja bisnis dan kewajiban agama.

BAB 2

LAPORAN ARUS KAS: PENDEKATAN HISTORIS SESUAI IAS 7

2.1 PENDAHULUAN

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) mengatur penyusunan dan penyajian informasi keuangan entitas yang bertanggung jawab secara publik untuk tujuan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman dalam konteks global. Dalam hal ini, satu set laporan keuangan lengkap berdasarkan IFRS memerlukan penyusunan dan penyajian laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas, beserta pengungkapan laporan keuangan. Mengenai laporan keuangan lengkap, penyusunan dan penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta laporan perubahan ekuitas diatur oleh IAS 1 Penyajian Laporan Keuangan versus IAS 7 yang mengatur kebijakan akuntansi penyusunan dan penyajian laporan arus kas (IASB 2020).

Secara historis, IAS 7 telah dirancang untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan perubahan posisi keuangan (laporan sumber dan penggunaan dana) yang menunjukkan perubahan modal kerja bersih. Namun pada tahun 1992, rancangan eksposur IAS 7 disiapakan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk menggantikan laporan perubahan posisi keuangan dengan laporan arus kas. Oleh karena itu, standar yang ada ini telah berlaku sejak tahun 1994. Laporan arus kas berkaitan dengan pelaporan kas dan setara kas, bukan sekedar pelaporan kas yang konsisten dengan penyajian pada laporan posisi keuangan.

Dalam hal ini, jumlah kas yang tersedia termasuk kas dan giro versus setara kas yang terdiri dari investasi jangka pendek (tiga bulan atau kurang), sangat likuid dengan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan (IAS 7.6), adalah bagian dari pemenuhan komitmen tunai jangka pendek (IAS 7.7). Dalam konteks tersebut, setara kas mencakup beberapa hal berikut: “cek yang tidak memiliki tanggal penerusan”, “dana likuid tipe B”, “piutang dari transaksi reverse repo”, “deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari tiga bulan”, “pemerintah obligasi dan surat perbendaharaan negara yang sisa jatuh temponya kurang dari tiga bulan”, dan “piutang dari pasar uang.

Sejak awal, IAS 7 mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar entitas berdasarkan tiga aktivitas bisnis yaitu operasi, investasi, dan pendanaan (IAS 7.10). Dalam hal ini,

1. aktivitas operasi terdiri dari aktivitas penghasil pendapatan utama entitas dan aktivitas lain yang bukan bagian dari aktivitas investasi atau pendanaan (IAS 7.6) dan sebagian arus kas dari aktivitas operasi meliputi (a) kas yang diterima dari penjualan barang dan pemberian layanan; (b) uang tunai yang diterima dari royalti, provisi, komisi, dan pendapatan lainnya; (c) uang tunai yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang

dan jasa; (d) uang tunai yang dibayarkan kepada dan atas nama karyawan; (e) pembayaran tunai atau pengembalian pajak penghasilan; dan (f) uang tunai yang diterima dan dibayarkan dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan transaksi atau perdagangan (IAS 7.14);

2. aktivitas investasi mencakup perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas (IAS 7.6) dan sebagian arus kas dari aktivitas investasi mencakup (a) kas yang diterima untuk penjualan atau kas yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya, (b) kas yang diterima untuk penjualan atau kas yang dibayarkan untuk perolehan instrumen utang atau ekuitas, (c) kas yang dibayarkan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain dan uang tunai yang diterima dari pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut; Dan
3. aktivitas pendanaan mencakup aktivitas yang mengakibatkan perubahan ukuran dan komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas (IAS 7.6) dan beberapa arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup (a) kas yang diterima dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya, (b) uang tunai yang dibayarkan kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham perusahaan, (c) uang tunai yang diterima dari penerbitan seperti pinjaman, obligasi, hipotek dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, (d) pembayaran tunai atas jumlah yang dipinjam; dan (e) pembayaran tunai untuk liabilitas sewa dari sudut pandang penyewa.

Bagian operasi dari laporan disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung dibandingkan bagian investasi dan pembiayaan hanya disusun dengan metode langsung. Dalam konteks ini, metode langsung memberikan peluang untuk melaporkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Oleh karena itu, metode langsung dianggap sebagai pendekatan yang berguna untuk memprediksi arus kas masa depan dalam literatur yang ditulis oleh Krishnan dan Largay (2000), Orpurt dan Zang (2009), Bradbury (2011), Farshadfar dan Monem (2013), dan Clacher dkk. (2013).

Dalam konteks ini, (1) Krishnan dan Largay (2000) mengamati bahwa hasil mereka menunjukkan bahwa menggunakan metode langsung data arus kas bersama dengan pendapatan dan data akrual lainnya meningkatkan akurasi prediksi arus kas; (2) Orpurt dan Zang (2009) menentukan bahwa peningkatan keinformatifan harga saham dari metode langsung memberikan kesempatan kepada investor untuk memperkirakan pendapatan dan arus kas masa depan; (3) Bradbury (2011) menganalisis apakah penerapan metode langsung lebih baik daripada penerapan metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dan menentukan bahwa (a) metode langsung menghasilkan prediksi yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan di masa depan dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan harga saham, (b) metode langsung menurunkan asimetri informasi, dan (c) rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas operasi yang menyertai metode langsung memberikan informasi yang berguna; (4) Farshadfar dan Monem (2013) menyatakan bahwa (a) kemampuan prediktif arus kas operasi agregat dalam meramalkan arus kas masa depan ditingkatkan dengan memilah arus kas operasi ke dalam komponen-komponennya dan (b) kas yang diterima dari pelanggan

dan kas yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan memberikan gambaran yang utuh dalam meningkatkan kemampuan prediksi komponen arus kas secara umum; dan (5) Clacher dkk. (2013) menentukan bahwa laporan arus kas yang disusun dengan metode langsung adalah nilai yang relevan sebelum dan sesudah adopsi IFRS di Australia.

Di sisi lain, Kent dan Birt (2021) mengevaluasi keadaan di mana metode langsung diharapkan lebih berguna di pasar Australia dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti Krishnan dan Largay (2000) dan Orpurt dan Zang (2009) yang sebagian besar mengevaluasi metode langsung dan tidak langsung dari perspektif pasar. Dalam konteks ini, Kent dan Birt (2021) memperkirakan bahwa metode langsung memberikan informasi yang lebih bernilai relevan dalam keadaan berikut: (1) ketika laba memiliki kualitas yang lebih rendah (laba kurang permanen atau entitas melaporkan kerugian), (2) entitas berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. keadaan yang lebih stabil (diproksikan dengan perubahan absolut yang kecil pada akrual/ arus kas operasi), dan (3) ketika arus kas/ akrual diukur dengan lebih banyak kesalahan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Dibandingkan dengan metode langsung, metode tidak langsung tidak memberikan peluang pelaporan karena laba atau rugi disesuaikan dengan mempertimbangkan dampak dari (a) perubahan persediaan dan piutang dan hutang operasi selama periode tertentu; (b) pos-pos non-kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, dan laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan; dan (c) semua item lain yang efek kasnya adalah arus kas investasi atau pendanaan (IAS 7.20), untuk menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Dari kedua metode tersebut, metode tidak langsung adalah metode yang paling disukai dalam menyusun dan menyajikan laporan arus kas berdasarkan IAS 7 di negara-negara berikut: Belgia, Brasil, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Kuwait, Belanda, Norwegia, Oman, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris mempertimbangkan penelitian (Akdog˘an dan Öztürk 2015; Lourenço et al. 2015, 2018). Oleh karena itu, ini juga disebut format laporan arus kas tradisional versus metode langsung yang banyak disukai di Australia, Chili, dan Selandia Baru.

Selain itu, IAS 7 tidak mensyaratkan jadwal rekonsiliasi laba rugi terhadap arus kas bersih dari aktivitas operasi jika metode langsung diadopsi (IASB 2020b). Dalam konteks seperti itu, IAS 7 Dewan Standar Akuntansi Australia (AASB 107) telah mewajibkan jadwal tersebut dari tahun 2004 hingga 2010 (AASB 2004, 2007, 2009, 2010) dengan mengintegrasikan kebijakan akuntansi tersebut ke dalam teks AASB 107. Pada tahun 2011, Namun; AASB juga menghapus persyaratan tersebut agar sejalan dengan IAS 7 IASB (AASB 2011). IAS 7 juga memberikan alternatif pilihan kebijakan akuntansi dalam melaporkan bunga dan dividen yang diterima serta bunga dan dividen yang dibayarkan (IAS 7.33, 7.34) untuk perusahaan selain lembaga keuangan. Pilihan kebijakan ini mempengaruhi komparabilitas informasi keuangan terkait arus kas untuk analisis antar perusahaan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Klasifikasi arus kas terkait bunga dan dividen

Bunga diterima	Operasi atau investasi
Bunga dibayarkan	Operasional atau pembiayaan
Dividen diterima	Operasi atau investasi
Dividen dibayarkan	Operasional atau pembiayaan

Dalam konteks IAS 7, tujuan bab ini adalah untuk menganalisis usulan perubahan selama periode tertentu dalam sejarah mengenai penyusunan dan penyajian laporan arus kas untuk meningkatkan efektivitasnya menuju komunikasi keuangan yang lebih baik. Untuk tujuan ini;

- (1) Makalah diskusi tentang pandangan awal Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2008 [singkatnya DP (2008)];
- (2) Draft staf dari Exposure Draft Presentasi Laporan Keuangan IFRS X yang diterbitkan oleh staf IASB pada tahun 2010 [disingkat ED (2010)];
- (3) Exposure Draft ED/2012/1 Penyempurnaan Tahunan IFRS Siklus 2010–2012 yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2012 [disingkat ED (2012)];
- (4) Makalah Diskusi staf Dewan Pelaporan Keuangan (FRC) Inggris (UK) yang diterbitkan pada tahun 2016 [singkatnya FRC (2016)], dan;
- (5) Exposure Draft ED/2019/7 Presentasi Umum dan Pengungkapan yang dikeluarkan oleh IASB pada tahun 2019 [singkatnya ED (2019)] telah diperhitungkan.

2.2 TINJAUAN LITERATUR PADA IAS 7 LAPORAN ARUS KAS

Dalam hal laporan arus kas, ada beberapa makalah penelitian yang membahas penyusunan dan penyajian laporan ini berdasarkan IAS 7. Mereka memberikan observasi terkait pernyataan ini dari praktik pasar modal seperti Mechelli (2009), Pekdemir dan Kepçe Yönet (2010), Bond dkk. (2012), dan Brabcová (2019). Mechelli (2009) menganalisis pelaporan laporan arus kas berdasarkan IAS 7 di Italia untuk tahun 2005 yang terdiri dari adopsi pertama kali IAS 7 di negara ini. Penerapan metode langsung atau tidak langsung, keragaman titik tolak metode tidak langsung seperti laba bersih, laba sebelum pajak, “laba sebelum bunga, dividen, dan pajak”, klasifikasi dividen dan bunga yang diterima dan dibayarkan, dan pajak yang dibayarkan dianalisis. Selain itu, Pekdemir dan Kepçe Yönet (2010) menganalisis praktik IAS 7 di Turki untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 dalam konteks yang sama. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat tingkat heterogenitas yang tinggi yang dapat melemahkan komparabilitas dan ketidakpatuhan terhadap IAS 7 yang dapat meningkatkan risiko informasi keuangan yang menyesatkan.

Obligasi dkk. (2012) menganalisis pengaruh integrasi metode tidak langsung ke dalam teks IFRS versi Australia antara tahun 2006 dan 2009 dan mengamati apakah beberapa perusahaan beralih dari metode langsung ke metode tidak langsung dan apa alasan di balik perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Di antara kesembilan perusahaan tersebut, semuanya beralih ke metode tidak langsung khususnya pada tahun 2008, namun dua di antaranya menyatakan alasan mereka sebagai berikut: (1) “Perubahan penyajian ini lebih

efektif menyampaikan hubungan antara kinerja keuangan dan arus kas operasi”, dan (2) “Grup yakin bahwa metode penyajian arus kas tidak langsung memberikan informasi yang lebih relevan karena menghasilkan peningkatan komparabilitas laporan arus kas grup dengan laporan arus kas grup sejenisnya”.

Brabcová (2019) menganalisis pelaporan laporan arus kas berdasarkan IAS 7 di Republik Ceko dengan mempertimbangkan laporan keuangan entitas tercatat untuk tahun 2015 dan 2016. Makalah ini membandingkan temuan terkait penyajian laporan arus kas berdasarkan metode langsung dan tidak langsung, bunga dan dividen yang diterima, bunga dan dividen yang dibayarkan, pengaruh perubahan mata uang asing, rekonsiliasi ke neraca serta pemisahan masing-masing elemen kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, dan arus kas berdasarkan segmen. buku ini menyatakan bahwa entitas mengadopsi persyaratan wajib secara umum, namun mereka tidak menyiapkan pengungkapan sukarela seperti arus kas berdasarkan segmen.

Berbeda dari makalah-makalah tersebut, tinjauan ini berfokus pada usulan perubahan laporan arus kas untuk memenuhi tujuan keterpaduan, pemilahan, likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta keterbandingan dalam kerangka komunikasi keuangan yang lebih baik dan analisis perubahan tersebut secara komparatif.

2.3 ANALISIS USULAN PERUBAHAN LAPORAN ARUS KAS

Pada bagian bab ini, diskusi dan draft paparan yang telah diterbitkan untuk menyempurnakan penyajian laporan keuangan dianalisis dalam konteks laporan arus kas.

DP (2008): Pandangan Awal Penyajian Laporan Keuangan

Pada tahun 2001, IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) Amerika Serikat (AS), memulai sebuah proyek pelaporan kinerja keuangan dan melaksanakan proyek-proyek tersebut secara independen satu sama lain (IASB 2008, hal. 19). Namun pada tahun 2004, mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek tersebut untuk memastikan konvergensi IFRS ke dalam Standar Akuntansi Keuangan AS. Proyek bersama ini memiliki tiga tahap (IASB 2008, hal. 19). Fase pertama (fase A) dari proyek ini mengintegrasikan pelaporan pendapatan komprehensif ke dalam IAS 1 (2007), yang menyebabkan perubahan dalam penyusunan dan penyajian laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

Oleh karena itu, IAS 1 sebagian besar sejalan dengan Pernyataan No. 130 tentang Pelaporan Laba Komprehensif (PSAK 130). Tahap kedua (fase B) dari proyek ini mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyajian dan tampilan informasi dalam laporan keuangan. Untuk tujuan ini, IASB menyiapkan dan menerbitkan DP (2008): Pandangan Awal Penyajian Laporan Keuangan. bagian bab ini menganalisis usulan-usulan yang diajukan DP (2008) secara umum dan membahas usulan-usulan tersebut dengan memberikan contoh pada laporan arus kas.

Analisis DP (2008) dalam konteks Laporan Arus Kas

Mengenai usulan terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan, seperti agregasi dan disagregasi informasi pada setiap laporan keuangan utama, penetapan total dan

subtotal, serta peninjauan kembali penggunaan metode langsung atau tidak langsung dalam menyajikan arus kas dari operasi (IASB 2008, hal. 19), DP (2008) mengembangkan tiga tujuan yang berisi alasan di balik usulan tersebut: (1) keterpaduan, (2) disagregasi, dan (3) likuiditas dan fleksibilitas keuangan (IASB 2008, hal. 30–31).

Dalam konteks tujuan keterpaduan, DP (2008) berpendapat bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus disajikan sedemikian rupa sehingga mengungkapkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara holistik dan kohesif dengan membangun hubungan yang jelas antara keduanya. Item di seluruh laporan keuangan dan menampilkan data dengan cara yang secara jelas mengaitkan informasi terkait di seluruh laporan (IASB 2008, hal. 30). Oleh karena itu, demi menghilangkan inkonsistensi penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, DP (2008) menekankan bahwa laporan arus kas merupakan satu-satunya laporan yang melaporkan informasi keuangan dengan mengelompokkannya secara terpisah menurut kegiatan usaha, dan hal ini juga harus berlaku dalam menyajikan laporan laba rugi dan laporan laba rugi. pendapatan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan sehingga pendapatan operasi dan arus kas operasi dapat dibandingkan satu sama lain, dan aset operasi dan liabilitas operasi dapat dianalisis satu sama lain untuk tujuan menganalisis kesehatan keuangan bisnis organisasi.

Dalam konteks tujuan disagregasi, DP (2008) berpendapat bahwa disagregasi informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga berguna dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas (IASB 2008, hal.30). Untuk tujuan ini, item tambahan harus ditambahkan ke dalam laporan keuangan untuk menjelaskan komponen posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas (IASB 2008, hal. 31). Misalnya, jika biaya tertentu seperti biaya sewa atau utilitas signifikan terhadap kinerja keuangan suatu entitas, maka pemilahan item-item tersebut dibandingkan dengan agregasi dapat membantu pengguna informasi keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas.

Dalam konteks tujuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan, DP (2008) berpendapat bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memberikan kesempatan kepada pengguna informasi keuangan untuk menganalisis kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban terkait aktivitas operasi dan pendanaan. serta berinvestasi dalam peluang bisnis (IASB 2008, hal. 31).

Untuk mencapai tujuan tersebut, DP (2008) mengajukan usulan berikut dalam konteks laporan keuangan dan khususnya dalam konteks laporan arus kas sehubungan dengan laporan posisi keuangan (IASB 2008, hal. 74):

1. Laporan keuangan suatu organisasi bisnis kecuali laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dibagi menjadi lima bagian (IASB 2008, p. 35):
 - a. bagian bisnis,
 - b. bagian pembiayaan,
 - c. bagian ekuitas,
 - d. bagian pajak penghasilan, dan

- e. bagian operasi yang dihentikan. Dalam konteks ini, format laporan posisi keuangan tradisional mengklasifikasikan aset, dan liabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan lancar dan tidak lancar (IAS 1.60) versus format laporan posisi keuangan yang diusulkan, aset dan liabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan lancar dan tidak lancar dan berdasarkan bagian usaha, bagian pembiayaan, bagian pajak penghasilan, dan bagian operasi yang dihentikan. Dengan mempertimbangkan bagian-bagian ini, format laporan posisi keuangan tradisional dan yang diusulkan (Tabel 2.2) disajikan di bawah ini.
2. Dibandingkan dengan laporan posisi keuangan tradisional yang mengklasifikasikan aset dan liabilitas, dengan mempertimbangkan perbedaan lancar dan tidak lancar daripada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (IASB 2008, p. 121), usulan laporan posisi keuangan melaporkan aset dan liabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan jangka pendek dan jangka panjang serta aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (IASB 2008, hlm. 108–109).
 3. Bagian bisnis dari laporan posisi keuangan yang diusulkan mencakup aset dan liabilitas operasi bisnis entitas yang berkelanjutan seperti memproduksi barang atau menyediakan jasa dan perubahan terkait (IASB 2008, hal. 37). Untuk meningkatkan transparansi, dua kategori disiapkan untuk melaporkan informasi keuangan dalam bagian bisnis:
 - (a) kategori operasi dan
 - (b) kategori investasi (IASB 2008, hal. 38). Dalam laporan posisi keuangan yang diusulkan, kategori operasi mencakup aset dan liabilitas operasi yang terkait dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan beban utama entitas versus kategori investasi mencakup aset dan liabilitas investasi yang tidak terkait dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan beban utama entitas. kegiatan. Sebaliknya, aset dan liabilitas ini menghasilkan keuntungan seperti bunga dan dividen.

Sesuai dengan usulan laporan posisi keuangan, (1) usulan laporan arus kas mengalokasikan arus kas masuk dan arus keluar yang berkaitan dengan aset dan liabilitas operasi dan investasi ke dalam bagian bisnis dan (2) arus kas yang berkaitan dengan aset dan liabilitas pendanaan dialokasikan ke dalam bagian pendanaan dibandingkan dengan laporan arus kas tradisional yang melaporkan arus kas dengan mempertimbangkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (IASB 2008, hal. 35) (Tabel 2.3).

Tabel 2.2 Format laporan posisi keuangan tradisional dan yang diusulkan

Format tradisional	ta yang sesuai (2008)
Laporan posisi keuangan	Laporan posisi keuangan
Aktiva	Bisnis
• Klasifikasi aset tanpa memperhatikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan	• Aset dan liabilitas operasi • Menginvestasikan aset dan liabilitas
Kewajiban	Pembiayaan

• Klasifikasi liabilitas tanpa memperhatikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan	• Pembiayaan aset • Kewajiban pembiayaan
	Pajak penghasilan
	Operasi yang dihentikan
Ekuitas	Ekuitas

Tabel 2.3 Format laporan arus kas tradisional dan yang diusulkan

Format tradisional	ta yang sesuai (2008)
Laporan arus kas	Laporan arus kas
Kegiatan operasi	Bisnis
• Arus kas operasi dari operasi yang dilanjutkan • Arus kas operasi dari operasi yang dihentikan	• Arus kas operasi • Investasi arus kas
Kegiatan investasi	Pembiayaan
• Investasi arus kas	• Arus kas aset pembiayaan • Arus kas kewajiban pendanaan
Kegiatan pendanaan	Pajak penghasilan
• Pembiayaan arus kas	Operasi yang dihentikan
	Ekuitas

4. Laporan posisi keuangan tradisional melaporkan kas dalam aset lancar versus laporan posisi keuangan yang diusulkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset keuangan (IASB 2008, hlm. 109, 121). Oleh karena itu, “bunga yang diterima atas kas” dilaporkan di bagian pendanaan dalam laporan arus kas yang diusulkan agar sejalan dengan laporan posisi keuangan yang diusulkan (IASB 2008, hal. 111) (Tabel 2.6).
5. Laporan posisi keuangan tradisional mengungkapkan sumber pendanaan non-pemilik dalam liabilitas lancar dan tidak lancar, termasuk liabilitas sewa (IASB 2008, hal. 121) versus laporan posisi keuangan yang diusulkan menunjukkan sumber pendanaan tersebut kecuali untuk liabilitas sewa dalam bagian pembiayaan dan kewajiban sewa pada bagian operasi dengan juga mempertimbangkan perbedaan lancar dan tidak lancar (IASB 2008, p. 108).
Sejalan dengan usulan laporan posisi keuangan, usulan laporan arus kas melaporkan (1) arus kas yang berkaitan dengan liabilitas sewa pada bagian operasi, (2) arus kas yang berasal dari sumber pembiayaan non-pemilik kecuali liabilitas sewa pada bagian pembiayaan. bagian, dan (3) arus kas dari sumber pembiayaan pemilik di bagian ekuitas dibandingkan dengan laporan arus kas tradisional yang melaporkan sumber pembiayaan pemilik dan non-pemilik, termasuk kewajiban sewa di bagian pembiayaan (Tabel 2.5 dan 2.6) .
6. Laporan posisi keuangan tradisional, aset pajak penghasilan kini dan tangguhan, serta liabilitas dalam konteks kini dan tidak lancar (IASB 2008, p. 121) versus laporan posisi

keuangan yang diusulkan memiliki bagian terpisah dalam pelaporan pajak dengan mempertimbangkan laporan kini dan perbedaan tidak lancar (Tabel 2.2). Dalam hal ini, laporan arus kas tradisional biasanya melaporkan pajak yang dibayarkan di bagian operasi (IAS 7.35). Namun, laporan arus kas yang diusulkan melaporkan pembayaran jumlah pajak tersebut dalam bagian tersendiri agar sejalan dengan laporan posisi keuangan yang diusulkan (Tabel 2.3).

7. Dibandingkan dengan laporan posisi keuangan tradisional yang melaporkan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dalam aset lancar serta kewajiban dari aset tersebut dalam kewajiban lancar berdasarkan IFRS 5 (IASB 2008, p. 121; 2020d), usulan laporan posisi keuangan melaporkan perubahan aset dan liabilitasnya dalam bagian tersendiri yang berjudul “operasi yang dihentikan” (Tabel 2.2). Sejalan dengan usulan laporan posisi keuangan, usulan laporan arus kas juga melaporkan arus kas dari aset dan liabilitas tersebut dalam bagian terpisah, bukan dalam bagian operasi seperti dalam format tradisional (Tabel 2.3).
8. Untuk menetapkan hubungan keuangan antara laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas, DP (2008) menyatakan bahwa kategori operasi laporan arus kas harus disusun berdasarkan laporan arus kas langsung. metode untuk tujuan memenuhi tujuan keterpaduan, disagregasi, dan likuiditas serta fleksibilitas keuangan (IASB 2008, hal. 76).
 Dalam konteks ini, penerapan metode langsung memberikan kesempatan kepada pengguna informasi keuangan (1) untuk membangun hubungan antara informasi tentang aset dan liabilitas operasi, pendapatan dan beban operasi, serta arus masuk dan arus kas operasi melalui tujuan keterpaduan.; (2) untuk mengamati arus kas masuk dan arus keluar operasi secara terpisah untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas operasi masa depan suatu entitas melalui tujuan pemilahan; dan (3) menganalisis hubungan arus kas masuk dan arus keluar operasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan cukup kas dari operasi untuk membayar utang, berinvestasi kembali dalam operasi dan melakukan pembayaran dividen kepada pemilik melalui tujuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan.
9. Sejalan dengan kategori operasi pada usulan laporan posisi keuangan yang mencakup aset operasi, kategori operasi pada usulan laporan arus kas juga mencakup arus kas dari investasi pada aset operasi seperti pembelian atau penjualan saham. item aset tetap (IASB 2008, hal. 74) dibandingkan dengan laporan arus kas tradisional yang melaporkan arus kas tersebut dalam bagian investasi (Tabel 2.5 dan 2.6).
10. Untuk memenuhi tujuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan, DP (2008) berpendapat bahwa setara kas harus dikeluarkan dari kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan yang diusulkan karena investasi jangka pendek termasuk setara kas mungkin mempunyai beberapa risiko harga. perubahan karena perubahan tak terduga dalam lingkungan kredit atau persepsi kualitas kredit penerbit (IASB 2008, hal. 57). Sejalan dengan usulan ini, usulan laporan arus kas juga menyatakan jumlah uang tunai saja.

11. Dalam hal pelaporan bunga yang diterima dan dibayarkan serta dividen yang diterima dan dibayarkan untuk perusahaan selain lembaga keuangan, DP (2008) mengusulkan tidak ada pilihan kebijakan akuntansi untuk meningkatkan komparabilitas informasi keuangan (Tabel 2.4).
12. Karena DP (2008) lebih memilih metode langsung dalam pelaporan arus kas operasi, maka DP juga mengusulkan jadwal rekonsiliasi laba atau rugi atau laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi (IASB 2008, hal. 77).

Tabel 2.4 Klasifikasi arus kas terkait bunga dan dividen berdasarkan DP (2008)

	Format tradisional	DP yang sesuai (2008)
Bunga diterima	Operasi atau investasi	Pembiayaan
Bunga dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan
Dividen diterima	Operasi atau investasi	Berinvestasi
Dividen dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan

Pengamatan terhadap Laporan Arus Kas Contoh

DP (2008) memberikan dua contoh laporan arus kas: (1) format tradisional (Tabel 2.5) dan (2) format yang diusulkan (Tabel 2.6). Pengamatan berikut dikumpulkan di bawah ini:

1. Format tradisional melaporkan arus kas dalam tiga bagian dibandingkan format laporan arus kas yang diusulkan dalam lima bagian.
2. Format tradisional tidak mengklasifikasikan aktivitas operasi dan investasi berdasarkan judul utama, sedangkan format yang diusulkan mengklasifikasikan aktivitas operasi dan investasi berdasarkan judul utama "bisnis".
3. Format tradisional melaporkan arus kas operasi dengan metode tidak langsung dan memberikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebanyak Rp.139.459 melalui rekonsiliasi dari laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi versus format yang diusulkan lebih memilih metode langsung untuk memenuhi keterpaduan, disagregasi serta likuiditas dan tujuan fleksibilitas keuangan.
4. Dibandingkan dengan format tradisional, format yang diusulkan menyediakan arus masuk dan arus keluar terkait bagian operasi dengan mengadopsi pendekatan terpisah. Misalnya, daripada hanya melaporkan "total kas yang dikumpulkan dari pelanggan", laporan tersebut memilah "total kas yang dikumpulkan dari pelanggan sebanyak Rp.2.812.742 dengan mempertimbangkan profil pelanggan entitas: (a) kas yang diterima dari pelanggan grosir sebanyak Rp.2.108.754, dan (b) kas diterima dari pelanggan ritel sebesar Rp.703.988.
5. Format tradisional dan format yang diusulkan melaporkan arus kas investasi dan pendanaan dengan metode langsung.
6. Dibandingkan dengan format tradisional, arus kas dari investasi pada aset operasi disajikan pada bagian operasi. Oleh karena itu, belanja modal sebesar Rp.54.000, hasil pelepasan aset tetap sebesar Rp.37.650 dipindahkan dari bagian investasi ke bagian operasi.

7. Dibandingkan dengan format tradisional, format yang diusulkan melaporkan “pendapatan dari penerbitan kembali saham treasury” sebanyak Rp.84.240 di bagian ekuitas dan bunga yang diterima atas uang tunai sebesar Rp.86.190, hasil penerbitan utang jangka pendek sebanyak Rp.162.000, pembayaran bunga sebesar Rp.84.514, dan dividen dibayar sebesar Rp.86.400 pada bagian pembiayaan.
8. Dibandingkan dengan format tradisional, format yang diusulkan melaporkan arus kas bersih dari operasi yang dihentikan sebesar Rp.12.582 dan pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp.281.221 pada bagian spesifiknya.

Tabel 2.5 Format tradisional laporan arus kas (dalam satuan Rp.x)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2010
KEGIATAN OPERASI	
Laba bersih	538.469
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasi dari operasi yang berkelanjutan:	
Keuntungan dari penjualan investasi	(18.250)
Pendapatan dari investasi	(31.260)
Keuntungan yang direalisasikan atas lindung nilai arus kas	(3.996)
Keuntungan dari penjualan dan pelepasan properti, pabrik, dan peralatan	(22.650)
Kerugian dari operasi yang dihentikan, bersih	21.060
Penyusutan dan amortisasi	279.120
Pengeluaran non tunai lainnya	54.066
Perubahan item modal kerja yang dipilih	
Peningkatan piutang dagang dan piutang lain-lain	(417.267)
Penurunan persediaan	60.250
Penurunan uang muka dari pelanggan	(244.605)
Peningkatan utang usaha	80.556
Perubahan aset dan liabilitas lainnya	(143.452)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI OPERASI YANG BERLANJUT	152.041
KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(12.582)
KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI	139.459
KEGIATAN INVESTASI	
Belanja modal	(54.000)
Hasil dari pelepasan properti, pabrik, dan peralatan	37.650
Hasil penjualan aset keuangan	56.100
Penyelesaian lindung nilai arus kas	3402
KAS BERSIH DARI KEGIATAN INVESTASI	43.152
KEGIATAN PENDANAAN	
Pendapatan dari penerbitan utang jangka pendek	162.000

Dividen tunai dibayarkan	(86.400)
Hasil dari penerbitan kembali saham treasury	84.240
Pembayaran tunai atas kewajiban sewa	(33.500)
KAS BERSIH DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN	126.340
Pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap uang tunai	3209
KENAIKAN BERSIH KAS	312.161
Uang tunai di awal tahun	861.941
Uang tunai di akhir tahun	1.174.102

ED (2010): Draft Staf Penyajian Laporan Keuangan

Mengikuti DP (2008), ED (2010) disiapkan oleh staf IASB dan FASB untuk mengembangkan standar penyajian laporan keuangan sebagai bagian dari proyek bersama dewan. Subbagian bab ini menganalisis usulan-usulan yang diajukan ED (2010) secara umum dan membahas usulan-usulan tersebut dengan memberikan contoh pada laporan arus kas.

Analisis Perbandingan ED (2010) dan DP (2008) dalam konteks Laporan Arus Kas

ED (2010) mencerminkan keputusan kumulatif dan tentatif yang dibuat oleh dewan pada pertemuan gabungan mereka pada bulan April 2010. Dalam konteks ini, isu-isu berikut diusulkan dalam rancangan ini:

1. Sejalan dengan DP (2008), ED (2010) juga mengadopsi tujuan keterpaduan laporan keuangan. Untuk tujuan ini, metode langsung adalah satu-satunya perlakuan akuntansi yang diperbolehkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi berdasarkan ED (2010).
2. Sesuai dengan DP (2008), rancangan ini tidak hanya mewakili (a) bagian usaha, (b) bagian pembiayaan, (c) bagian pajak penghasilan, (d) bagian operasi yang dihentikan pada laporan posisi keuangan, dan laporan posisi keuangan. arus kas, tetapi juga memperkenalkan bagian transaksi multi-kategori untuk mencatat transaksi multi-kategori seperti kombinasi bisnis.
3. Karena alasan di balik perubahan laporan arus kas didasarkan pada perubahan laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan analisis perbedaan antara usulan laporan arus kas DP (2008) dan ED (2010). beserta analisis perbedaan usulan laporan posisi keuangan DP (2008) dan ED (2010).

Tabel 2.6 Usulan format laporan arus kas berdasarkan DP (2008)(dalam satuan Rp.x)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2010
BISNIS	
Pengoperasian	
Uang tunai diterima dari pelanggan grosir	2.108.754
Uang tunai diterima dari pelanggan ritel	703.988
Total uang tunai yang dikumpulkan dari pelanggan	2.812.742
Pembayaran tunai untuk barang	

Pembelian bahan	(935.544)
Tenaga kerja	(418.966)
Overhead—transportasi	(128.640)
Pensiun	(170.100)
Overhead—lainnya	(32.160)
Total uang tunai yang dibayarkan untuk barang	(1.685.409)
Uang tunai dibayarkan untuk aktivitas penjualan	
Periklanan	(65.000)
Upah, gaji, dan tunjangan	(58.655)
Lainnya	(13.500)
Total kas yang dibayarkan untuk aktivitas penjualan	(137.155)
Pembayaran tunai untuk kegiatan umum dan administrasi	
Upah, gaji, dan tunjangan	(332.379)
Kontribusi untuk program pensiun	(170.100)
Belanja modal	(54.000)
Pembayaran sewa	(50.000)
Penelitian dan Pengembangan	(8478)
Penyelesaian remunerasi berbasis saham	(3602)
Lainnya	(12.960)
Jumlah kas yang dibayarkan untuk kegiatan umum dan administrasi	(631.519)
Arus kas sebelum aktivitas operasi lainnya	358.657
Kas dari aktivitas operasi lainnya	
Pelepasan properti, pabrik, dan peralatan	37.650
Penjualan piutang	8000
Penyelesaian lindung nilai arus kas	3402
Jumlah kas yang diterima untuk aktivitas operasi lainnya	49.052
Kas bersih dari aktivitas operasi	407.709
Berinvestasi	
Penjualan aset keuangan	56.100
Dividen diterima	54.000
Kas bersih dari aktivitas investasi	110.100
KAS BERSIH DARI KEGIATAN USAHA	517.809
PEMBIAYAAN	
Bunga diterima secara tunai	8619
Total kas dari aset pendanaan	8619
Pendapatan dari penerbitan utang jangka pendek	162.000
Bunga dibayarkan	(83.514)
Dividen dibayarkan	(86.400)
Total kas dari liabilitas pendanaan	(7914)
KAS BERSIH DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN	705
Perubahan kas dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak dan ekuitas	518.514

PAJAK PENGHASILAN	
Pajak tunai dibayar	(281.221)
Perubahan kas sebelum operasi dihentikan dan ekuitas	237.293
OPERASI YANG DIHENTIKAN	
Pembayaran tunai dari operasi yang dihentikan	(12.582)
KAS BERSIH DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(12.582)
Perubahan kas sebelum ekuitas	224.711
EKUITAS	
Hasil dari penerbitan kembali saham treasury	84.240
KAS BERSIH DARI EKUITAS	84.240
Pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap uang tunai	3209
PERUBAHAN UANG TUNAI	312.161
Uang tunai awal	861.941
Mengakhiri uang tunai	1.174.102

Tabel 2.7 Perbandingan format laporan posisi keuangan

ta yang sesuai (2008)	edisi (2010)
Laporan posisi keuangan	Laporan posisi keuangan
Bisnis	Bisnis
<ul style="list-style-type: none"> • Aset dan liabilitas operasi • Menginvestasikan aset dan liabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Aset dan liabilitas operasi • Kewajiban keuangan operasional • Menginvestasikan aset dan liabilitas
Pembiayaan	Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan aset • Kewajiban pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Utang • Ekuitas
Pajak penghasilan	Pajak penghasilan
Operasi yang dihentikan	Operasi yang dihentikan
Ekuitas	

4. Sejalan dengan DP (2008), bagian bisnis dibagi menjadi dua kategori dalam rancangan laporan posisi keuangan dan rancangan laporan arus kas: (a) kategori operasi dan (b) kategori investasi (Tabel 2.7). Namun dibandingkan dengan DP (2008); rancangan laporan posisi keuangan mengusulkan subkategori berjudul keuangan operasi yang mencakup liabilitas keuangan operasi seperti kewajiban sewa dalam kategori operasi karena ED (2010) menganggap bahwa aktivitas keuangan operasi berkaitan langsung dengan aktivitas operasi suatu entitas serta aktivitas tersebut menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi entitas. Sesuai dengan rancangan laporan posisi keuangan ED (2010), (a) arus kas dari aktivitas operasi juga mencakup arus kas dari liabilitas keuangan operasi, namun pelaporan arus kas tersebut tidak memiliki subkategori dalam bagian operasi rancangan laporan arus kas (IASB 2010a, hal. 21) (Tabel 2.8).

5. Dibandingkan dengan DP (2008), rancangan laporan posisi keuangan membawa kas ke aset lancar operasi daripada melaporkannya di aset pembiayaan pada bagian pembiayaan. Oleh karena itu, item pembiayaan hutang dan pembiayaan ekuitas digabungkan dalam satu bagian yang menghasilkan kategori hutang dan kategori ekuitas yang mengarah pada pengamatan gambaran lengkap tentang aspek pembiayaan entitas dalam hal pelaporan sumber pembiayaan pemilik dan non-pemilik (Tabel 2.7). Sejalan dengan rancangan laporan posisi keuangan ED (2010), arus kas dari aktivitas pendanaan melaporkan arus kas terkait pembiayaan utang dan ekuitas dalam satu bagian (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Perbandingan format laporan arus kas

ta yang sesuai (2008)	edisi (2010)
Laporan arus kas	Laporan arus kas
Bisnis	Bisnis
<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas operasi • Investasi arus kas 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas operasi • Investasi arus kas
Pembiayaan	Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas aset pembiayaan • Arus kas kewajiban pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas pendanaan utang/ekuitas
Pajak penghasilan	Pajak penghasilan
Operasi yang dihentikan	Operasi yang dihentikan
Ekuitas	

6. Sejalan dengan DP (2008), kas dilaporkan dalam rancangan laporan posisi keuangan, bukan kas dan setara kas. Selain itu, ED (2010) menekankan bahwa kas tidak termasuk investasi jangka pendek, termasuk setara kas dalam rancangan laporan posisi keuangan dengan menyatakan bahwa “kas tidak termasuk 'investasi jangka pendek' terlepas dari likuiditas atau kedekatannya dengan jatuh tempo. ”. Dalam konteks ini, investasi jangka pendek termasuk setara kas diklasifikasikan pada bagian investasi pada rancangan laporan arus kas (Tabel 2.10).
7. Sejalan dengan DP (2008), ED (2010) menerapkan kebijakan pelaporan yang sama untuk pajak dan operasi yang dihentikan (Tabel 2.8).
8. Sesuai dengan DP (2008), ED (2010) melaporkan pembelian dan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan belanja modal dalam kategori operasi pada rancangan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas karena aset tersebut digunakan sebagai bagian dari bisnis sehari-hari suatu entitas.
9. Sejalan dengan DP (2008), ED (2010) menyatakan bahwa aset dan liabilitas investasi digunakan untuk menghasilkan return dan dapat menghasilkan return bagi entitas seperti bunga, dividen, royalti, pendapatan ekuitas, keuntungan, atau kerugian. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas investasi ekuitas dan bunga yang diterima atas investasi utang dilaporkan pada bagian investasi dalam laporan arus kas.

10. Dalam hal pelaporan bunga yang diterima dan dibayarkan serta dividen yang diterima dan dibayarkan untuk perusahaan selain lembaga keuangan, ED (2010) mengusulkan tidak ada pilihan kebijakan akuntansi untuk meningkatkan komparabilitas informasi keuangan (Tabel 2.9 dan 2.10) (IASB 2010a , hal. 21–24).
11. Dibandingkan dengan DP (2008), ED (2010) mengusulkan penyusunan jadwal rekonsiliasi dari pendapatan operasional (laba atau rugi dari aktivitas operasi) daripada dari laba bersih ke arus kas dari aktivitas operasi

Tabel 2.9 Klasifikasi arus kas terkait bunga dan dividen berdasarkan ED (2010)

	Format tradisional	ta yang sesuai (2008)	edisi (2010)
Bunga diterima	Operasi atau investasi	Pembiayaan	Berinvestasi
Bunga dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan
Dividen diterima	Operasi atau investasi	Berinvestasi	Berinvestasi
Dividen dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan

Tabel 2.10 Usulan format laporan arus kas berdasarkan ULN (2010)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
BISNIS	
Pengoperasian	
Uang tunai dikumpulkan dari pelanggan	2.812.742
Uang tunai dibayarkan untuk tenaga kerja	(810.000)
Pembayaran tunai untuk bahan	(935.544)
Kontribusi tunai untuk program pensiun	(340.200)
Arus kas keluar operasi lainnya	(260.928)
Pembayaran tunai untuk sewa	(50.000)
Belanja modal	(54.000)
Pelepasan properti, pabrik, dan peralatan	37.650
Penjualan piutang	8000
Kas bersih dari aktivitas operasi	407.709
Berinvestasi	
Perubahan bersih dalam investasi jangka pendek	(300.000)
Bunga diterima	8619
Dividen diterima	54.000
Penjualan surat berharga	56.100
Kas bersih dari aktivitas investasi	(181.281)
KAS BERSIH DARI KEGIATAN USAHA	226.428
PEMBIAYAAN	
Pendapatan dari penerbitan utang jangka pendek	162.000
Bunga dibayarkan	(83.514)

Dividen dibayarkan	(86.400)
Hasil dari penerbitan kembali saham treasury	84.240
KAS BERSIH DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN	76.326
Arus kas bersih dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak	302.754
PAJAK PENGHASILAN	
Total uang tunai yang dibayarkan untuk pajak penghasilan	(281.221)
Perubahan kas sebelum operasi dihentikan dan pengaruh nilai tukar mata uang asing	21.533
OPERASI YANG DIHENTIKAN	
Arus kas bersih dari operasi yang dihentikan	(12.582)
Pengaruh devisa	3210
Ganti uang tunai	12.161
Uang tunai awal	61.941
Mengakhiri uang tunai	74.102

Pengamatan terhadap Laporan Arus Kas Teladan

ED (2010) memberikan contoh laporan arus kas yang sebagian diturunkan dari contoh yang disajikan dalam DP (2008) untuk memberikan perbandingan. Oleh karena itu, pengamatan berikut dikumpulkan dengan membandingkan contoh-contoh yang diberikan dalam DP (2008) (Tabel 2.6) dan ED (2010) (Tabel 2.10):

1. Penerimaan kas dari pelanggan sebanyak Rp.2.812.742 yang dilaporkan secara terpisah pada penerimaan kas (a) dari pelanggan grosir dan (b) dari pelanggan eceran pada DP (2008), digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kesatuan dalam ULN (2010).
2. Pembayaran tunai untuk tenaga kerja sebesar Rp.810.000 yang dilaporkan secara terpisah dalam pembayaran tunai (a) untuk barang, (b) untuk aktivitas penjualan, dan (c) untuk aktivitas umum dan administrasi di DP (2008), digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kesatuan. item baris di ED (2010).
3. Pembayaran tunai untuk bahan sebanyak Rp.935.544 yang dilaporkan secara terpisah pada pembayaran tunai untuk barang di DP (2008), dilaporkan sebagai satu item baris dalam ULN (2010).
4. Kas yang dibayarkan untuk iuran program pensiun sebesar Rp.340.200 yang dilaporkan secara terpisah dalam pembayaran tunai (a) untuk barang, dan (b) untuk aktivitas umum dan administrasi di DP (2008), digabungkan dan dilaporkan sebagai satu item baris dalam ED (2010).
5. Arus kas keluar operasi lainnya sebesar Rp.260.928 yang dilaporkan terpisah dalam pembayaran tunai (a) barang, (b) aktivitas penjualan, dan (c) aktivitas umum dan administrasi di DP (2008), digabung dan dilaporkan sebagai satu kesatuan. item baris di ED (2010).
6. Dalam DP (2008), pembayaran tunai untuk sewa sebesar Rp.50.000 yang dilaporkan secara terpisah dalam pembayaran tunai untuk aktivitas umum dan administrasi, dilaporkan sebagai satu item baris dalam ED (2010) tanpa subkategori pembiayaan

operasional diberikan dalam subkategori pembiayaan operasional. rancangan laporan posisi keuangan.

7. Belanja modal sebesar Rp.54.000 yang dilaporkan tersendiri dalam kas yang dibayarkan untuk aktivitas umum dan administrasi, serta pelepasan aset tetap sebesar Rp.37.650 dan penjualan piutang sebesar Rp.8000 yang dilaporkan tersendiri dalam kas dari aktivitas operasi lainnya dilaporkan sebagai item baris tunggal di ED (2010).
8. Penerimaan bunga sebesar Rp.86.190 yang dilaporkan pada bagian pembiayaan pada DP (2008), dialihkan ke pelaporan pada bagian investasi pada ULN (2010).
9. Bagian Ekuitas sebesar Rp.84.240 yang diusulkan dalam DP (2008), digabungkan dengan bagian Pembiayaan dalam ULN (2010).

ED (2012): Perbaikan Tahunan IFRS Siklus 2010–2012

ED (2012) membahas klarifikasi pelaporan bunga yang dibayarkan pada laporan arus kas atas jumlah bunga yang dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan aset kualifikasian yang perolehan, konstruksi, atau produksinya memerlukan jangka waktu yang cukup lama (lebih lanjut). dari satu tahun). Aset tersebut mencakup (a) persediaan, (b) pabrik, (c) fasilitas pembangkit listrik, (d) aset tidak berwujud, (e) properti investasi, dan (f) pabrik pembawa.

Berdasarkan IAS 23 (IASB 2020c), kapitalisasi bunga diperlukan jika bunga tersebut dapat diatribusikan secara langsung ke aset kualifikasian dan bunga yang dibayarkan yang dikapitalisasi menurut IAS 23 tercermin dalam laporan arus kas; namun, tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan bunga kapitalisasi yang dibayarkan tersebut diklasifikasikan dalam laporan arus kas berdasarkan IAS 7 atau IAS 23. Untuk melaporkan kapitalisasi pembayaran bunga pada laporan arus kas, ED (2012) mengusulkan hal berikut dengan mempertimbangkan sifat aset dasar yang mana pembayaran bunga dikapitalisasi: jika aset kualifikasian adalah aset operasi seperti sebagai inventaris, bunga yang dikapitalisasi yang dibayarkan dilaporkan di bagian operasi dibandingkan jika aset yang memenuhi syarat adalah aset investasi seperti properti, pabrik, dan peralatan, aset tidak berwujud atau properti investasi, bunga yang dikapitalisasi yang dibayarkan dilaporkan di bagian investasi.

DP (2016): Makalah Diskusi Staf Dewan Pelaporan Keuangan Inggris

Untuk meningkatkan penyusunan dan penyajian laporan arus kas berdasarkan IAS 7 dan dengan demikian mengarah pada peningkatan kegunaan laporan keuangan, staf FRC Inggris menyiapkan DP pada tahun 2016 (FRC 2016). Subbagian ini menganalisis usulan-usulan tersebut dan memberikan contoh pernyataannya.

Analisis DP (2016) dalam konteks Laporan Arus Kas

DP (2016) mengajukan usulan mengenai permasalahan berikut (FRC 2016): (1) kegunaan informasi tentang arus kas, (2) klasifikasi arus kas, (3) setara kas dan pengelolaan sumber daya likuid, (4) rekonsiliasi aktivitas operasi, dan (5) metode langsung atau tidak langsung.

Kegunaan Informasi Arus Kas

Menurut IAS 7, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan uang tunai dilaporkan di tempat lain dalam laporan keuangan dan bukan di

laporan arus kas (IAS 7.43). Pelaporan transaksi non-tunai tersebut mencakup (a) perolehan aset baik melalui pembiayaan utang atau sewa; (b) akuisisi suatu entitas dengan menerbitkan saham; dan (c) konversi utang menjadi ekuitas.

Dalam konteks ini, DP (2016) mengusulkan pelaporan transaksi operasi yang tidak memerlukan penggunaan uang tunai selain transaksi investasi dan pendanaan tersebut, sehingga pelaporan seluruh transaksi yang dilakukan bersifat transparan. Tidak memerlukan penggunaan uang tunai dipastikan dan gambaran holistik mengenai transaksi suatu entitas disediakan.

Klasifikasi Arus Kas

Dalam konteks klasifikasi arus kas, DP (2016) menganalisis lima isu: (1) definisi aktivitas operasi, (2) pelaporan pembayaran tunai untuk memperoleh aset tetap dalam arus kas dari aktivitas investasi, (3) pengungkapan arus kas agregat yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi secara terpisah dari peningkatan yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi, (4) pelaporan arus kas dari dividen dan bunga yang diterima dan dibayarkan, dan (5) pelaporan pajak yang dibayarkan dalam arus kas dari aktivitas operasi.

- ▶ Menurut IAS 7, aktivitas operasi adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama entitas dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi atau pendanaan (IAS 7.6).

Dalam konteks ini, DP (2016) menolak dimasukkannya “aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan pendanaan” pada bagian operasi laporan arus kas karena bagian operasi tersebut tidak hanya mencakup item kas operasi, tetapi juga kas non-operasional. dan sulit untuk mengklasifikasikan item kas (FRC 2016, hal. 15). Dengan demikian, bagian operasi menyimpang dari tujuan utamanya yaitu melaporkan transaksi tunai dengan pelanggan, karyawan, dan pemasok. Untuk mengatasi masalah ini, DP (2016) mengusulkan agar definisi aktivitas operasi harus dipersempit menjadi pelaporan kas yang diterima dan dibayarkan dari aktivitas operasi serta item non-operasional, dan item yang tidak termasuk dalam kategori investasi dan pendanaan harus dilaporkan dalam bagian tambahan yang terpisah dari pernyataan ini sehingga bagian operasi benar-benar mencerminkan arus kas dari aktivitas operasi (FRC 2016, hlm. 15–16).

- ▶ Sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010), DP (2016) mengusulkan agar pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap yang saat ini dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas investasi (IAS 7.16(a)) harus diklasifikasikan dalam bagian operasi karena aset tersebut mendukung aktivitas operasi. Hal ini akan membantu menghitung arus kas bebas sebagai ukuran yang digunakan ketika menilai arus kas yang tersedia untuk membayar dividen (FRC 2016, hal. 16; IASB 2019b, hal. 46).
- ▶ Menurut IAS 7, pengungkapan arus kas agregat yang mewakili peningkatan kapasitas operasi (ekspansi) secara terpisah dari yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi (penggantian) diharapkan. Namun, DP (2016) menyarankan agar arus kas keluar yang terkait dengan “ekspansi” dan “penggantian” harus dilaporkan. Dalam konteks ini, DP (2016) menawarkan dua opsi:

- pembayaran tunai terkait belanja modal pengganti dilaporkan di bagian operasi versus pembayaran tunai terkait belanja modal ekspansi dilaporkan di bagian investasi, namun DP (2016) menganggap bahwa klasifikasi ini rumit dan memerlukan analisis yang bijaksana untuk mengklasifikasikan pengeluaran sebagai perluasan versus;
4. seluruh belanja modal terlepas dari penggantian atau perluasan dilaporkan di bagian operasi, oleh karena itu pelaporan tersebut cukup mudah dan pengungkapan terpisah untuk menyatakan jumlah penggantian dan perluasan dianjurkan.
- Untuk meminimalkan keberagaman pelaporan dividen yang diterima dan dibayarkan serta bunga yang diterima dan dibayarkan, DP (2016) mengusulkan cara meminimalkan keberagaman pelaporan bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan sebagai berikut:
- ❖ Dividen yang dibayarkan: Pengklasifikasian dividen yang dibayarkan pada bagian operasi harus dibatalkan karena dividen dibayarkan kepada pemberi modal. Oleh karena itu, sebaiknya hanya diklasifikasikan pada bagian pembiayaan saja.
 - ❖ Dividen yang diterima: Pengklasifikasian dividen yang diterima, dan pembayaran lain yang diterima dari investasi pada bagian operasi harus dibatalkan karena diterima oleh perusahaan investor. Oleh karena itu, mereka sebaiknya hanya diklasifikasikan pada bagian investasi.
 - ❖ Bunga yang diterima: DP (2016) mengusulkan klasifikasi bunga yang diterima dengan mempertimbangkan sifat aktivitas daripada pilihan kebijakan akuntansi. Jika bunga yang diterima berkaitan dengan penerimaan kas dari pelanggan, komponen bunga yang dikumpulkan tersebut harus dilaporkan pada bagian operasi laporan. Sebaliknya, bunga yang diterima terkait investasi akan dilaporkan pada bagian investasi.
 - ❖ Bunga yang dibayarkan: Jika bunga yang dibayarkan berkaitan dengan pembayaran tunai untuk liabilitas keuangan, komponen bunga yang dibayarkan tersebut harus dilaporkan pada bagian pembiayaan dalam laporan. Selain itu, jika aset operasi dibeli melalui pembiayaan utang, maka pinjaman yang diterima dan pembayaran kepada kreditur harus dilaporkan dalam aktivitas pendanaan, namun harga pembeliannya harus dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas operasi (Tabel 2.11).
5. Menurut IAS 7, arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diklasifikasikan dalam arus kas dari aktivitas operasi jika tidak dapat diidentifikasi secara spesifik dengan aktivitas pendanaan dan investasi.

Tabel 2.11 Klasifikasi arus kas terkait bunga dan dividen berdasarkan DP (2016)

	Format tradisional	ta yang sesuai (2008)	edisi (2010)	DP yang sesuai (2016)
Bunga diterima	Operasi atau investasi	Pembiayaan	Berinvestasi	Operasi atau investasi

Bunga dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan
Dividen diterima	Operasi atau investasi	Berinvestasi	Berinvestasi	Berinvestasi
Dividen dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan

Dalam konteks ini, DP (2016) menentang pengalokasian arus kas pajak ke bagian-bagian terpisah karena alokasi ini relatif rumit dan sewenang-wenang, dan investor lebih memilih untuk membuat analisis dasar sebelum pajak. Oleh karena itu, pelaporan pajak yang dibayarkan tidak boleh berada dalam bagian operasi dan harus berada pada bagian tersendiri dalam laporan arus kas sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010).

Setara Kas dan Pengelolaan Sumber Daya Cair

Sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010), DP (2016) lebih memilih pelaporan kas dibandingkan kas dan setara kas. Menurut IAS 7, setara kas terdiri dari investasi jangka pendek dan sangat likuid yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah tertentu dan memilikirisiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Mengenai konsep “investasi jangka pendek”, IAS 7.7 mendefinisikan “jangka pendek” sebagai tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan investasi tersebut.

Namun, DP (2016) berargumentasi bahwa mendefinisikan investasi mana yang mendekati kas untuk memenuhi syarat dimasukkan dalam “setara kas” adalah hal yang sewenang-wenang karena menekankan bahwa tidak ada alasan yang jelas mengapa jatuh tempo tiga bulan lebih baik dibandingkan dengan dua atau dua bulan. empat. Selain itu, DP (2016) berpendapat bahwa konsep “risiko perubahan nilai yang tidak signifikan” bersifat subyektif untuk didefinisikan karena beberapa risiko perubahan harga yang disebabkan oleh, misalnya, perubahan mendadak dalam lingkungan kredit atau persepsi kualitas kredit penerbit.

Karena permasalahan yang disebutkan di atas, DP (2016) mengusulkan agar laporan arus kas harus fokus pada kas daripada kas dan setara kas untuk tujuan pengelolaan likuiditas entitas. Oleh karena itu, sumber daya likuid hanya boleh mencakup aset yang siap dikonversi menjadi uang tunai tanpa batasan dan bagian terpisah harus dikhususkan untuk pengelolaan sumber daya likuid beserta persyaratan pengungkapan yang diperlukan untuk (a) kebijakan entitas dalam pengelolaan sumber daya likuid; Dan (b) aset yang dianggap sebagai sumber daya likuid, dan perubahannya.

Rekonsiliasi Aktivitas Operasi

Dalam persyaratan IAS 7 yang ada, jadwal rekonsiliasi tidak diperlukan jika bagian operasi laporan arus kas disusun dengan metode langsung seperti yang dinyatakan sebelumnya tetapi disajikan pada bagian operasi laporan ini dengan metode tidak langsung. Jadwal tersebut dapat dimulai dengan item baris mana pun dalam laporan laba rugi seperti laba sebelum pajak atau laba setelah pajak.

Penyesuaian yang diperlukan dilakukan terhadap laba sebelum dan sesudah pajak dengan mempertimbangkan (a) pos-pos yang tidak mewakili arus kas seperti penyusutan; (b) hal-hal yang berhubungan dengan bagian “investasi” dan “pembiayaan” dan bukan bagian operasional; dan (c) perubahan modal kerja. Jadwal ini penting karena menetapkan hubungan antara ukuran kinerja operasi dan perolehan kas operasi, dan memberikan informasi mengenai perubahan modal kerja. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas laba, laba masa depan, dan arus kas serta efisiensi pengelolaan sumber daya dapat dianalisis.

Dalam konteks ini, DP (2016) mengusulkan agar dilakukan rekonsiliasi antara pendapatan operasional dan arus kas dari aktivitas operasi sejalan dengan ED (2010). Karena jumlah item berkurang dalam penyesuaian pendapatan operasional, rekonsiliasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pemahaman. Karena rekonsiliasi tidak memberikan informasi mengenai arus kas entitas, DP (2016) menyarankan agar rekonsiliasi disajikan sebagai pengungkapan tambahan dan bukan dalam laporan itu sendiri.

Metode Langsung atau Tidak Langsung

Bahkan jika IAS 7 saat ini mengizinkan metode langsung dan metode tidak langsung, DP (2016) menentang argumen yang mengizinkan atau mewajibkan pilihan kebijakan akuntansi tertentu atau pembatalan metode langsung meskipun metode tidak langsung adalah metode tradisional. Sebaliknya, hal ini menyarankan perdebatan mengenai informasi mana yang lebih rinci dan signifikan mengenai komponen arus kas dari aktivitas operasi seperti penerimaan kas dari pelanggan dan jumlah modal kerja, yang perlu diungkapkan dalam hal relevansi dan kegunaannya.

Pengamatan terhadap Laporan Arus Kas Contoh

DP (2016) memberikan contoh laporan arus kas yang diturunkan dari contoh yang disajikan pada IAS 7 untuk memberikan perbandingan. Oleh karena itu, pengamatan berikut dikumpulkan dengan membandingkan contoh-contoh yang diberikan dalam IAS 7 (Tabel 2.12) dan DP (2016) (Tabel 2.13); Contoh yang diberikan dalam IAS 7 dan format yang diusulkan didasarkan pada metode tidak langsung dalam melaporkan arus kas operasi.

1. DP (2016) menentang pembahasan standar akuntansi yang mewajibkan atau memperbolehkan metode langsung atau metode tidak langsung serta melarang metode langsung, namun secara implisit mengusulkan metode tidak langsung dengan jadwal rekonsiliasi melalui (Tabel 2.13 dan 2.14).
2. DP (2016) sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010) dalam hal pelaporan arus kas dari investasi aset operasi pada bagian operasi menuju pelaporan informasi arus kas bebas, namun juga mengusulkan untuk menyatakan subtotal sebelum arus kas bersih dari aktivitas operasi yang diberi judul “kas yang dihasilkan dari operasi, sebelum belanja modal” tahun 3050 untuk mengamati dengan jelas kas yang dihasilkan dari operasi.
3. Dibandingkan dengan DP (2008) dan ED (2010), DP (2016) tidak mengusulkan dimasukkannya kewajiban sewa pada bagian operasi. Mereka tetap di bagian pembiayaan.

Tabel 2.12 Laporan arus kas versi tradisional berdasarkan IAS 7

Laporan arus kas untuk entitas selain lembaga keuangan
--

Arus kas dari aktivitas operasi		
Keuntungan sebelum pajak	3.350	
Tambahkan: depresiasi	450	
Tambahkan: kerugian selisih kurs	40	
Dikurangi: pendapatan investasi	500	
Tambahkan: beban bunga	400	
	3.740	
Dikurangi: kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain	500	
Tambahkan: penurunan persediaan	1.050	
Deduct: penurunan utang usaha	1.740	
Kas yang dihasilkan dari operasi	2.550	
Bunga dibayarkan	(270)	
Pajak penghasilan dibayar	(900)	
Kas bersih dari aktivitas operasi		1.380
Arus kas dari aktivitas investasi		
Akuisisi anak perusahaan X setelah dikurangi kas yang diperoleh	(550)	
Pembelian barang APD	(350)	
Hasil penjualan peralatan	20	
Bunga diterima	200	
Dividen diterima	200	
Kas bersih dari aktivitas investasi		(480)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil penjualan modal saham	250	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	250	
Pembayaran kewajiban sewa	(90)	
Dividen dibayarkan	(1.200)	
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		(790)
Kenaikan bersih kas dan setara kas		110
Kas dan setara kas pada awal periode		120
Kas dan setara kas pada akhir periode		230

Tabel 2.13 Usulan laporan arus kas berdasarkan DP (2016)

Laporan arus kas untuk entitas selain lembaga keuangan		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Kas yang dihasilkan dari operasi, sebelum belanja modal	3.050	
Pembelian barang APD	(350)	
Hasil penjualan peralatan	20	
Kas bersih dari aktivitas operasi		2.720
Arus kas keluar yang berkaitan dengan pertahanan pengambilalihan		(500)

Arus kas dari aktivitas investasi		
Akuisisi anak perusahaan X setelah dikurangi kas yang diperoleh	(550)	
Bunga diterima	200	
Dividen diterima	200	
Kas bersih dari aktivitas investasi		(150)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil penjualan modal saham	250	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	250	
Pembayaran kepada penyedia pembiayaan utang	(270)	
Pembayaran kewajiban sewa	(90)	
Dividen dibayarkan	(1.200)	
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		(1.060)
Pajak penghasilan dibayar		(900)
Peningkatan bersih sumber daya likuid		110
Pengelolaan sumber daya cair		
Pembelian investasi jangka pendek	(180)	
Penjualan investasi jangka pendek	85	
Kas bersih yang diinvestasikan dalam sumber daya cair		(95)
Peningkatan uang tunai		15
Kas di awal periode		25
Kas pada akhir periode		40

4. Sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010), DP (2016) mengusulkan untuk melaporkan pajak yang dibayarkan pada bagian tersendiri dalam laporan arus kas.
5. Investasi jangka pendek, termasuk setara kas, dilaporkan dalam bagian tersendiri yang berjudul "pengelolaan sumber daya likuid".
6. Sejalan dengan DP (2008) dan ED (2010), DP (2016) mengusulkan untuk melaporkan kas daripada kas dan setara kas dalam laporan arus kas.
7. Bunga yang dibayarkan sebesar 270 dipindahkan dari bagian operasi ke bagian pembiayaan.

Tabel 2.14 Rekonsiliasi laba dan arus kas dari aktivitas operasi

Keuntungan dari aktivitas operasi (laba operasi)		3.790
Pendapatan dan pengeluaran non tunai	450	
Depresiasi		450
Perubahan modal kerja:		
Dikurangi: kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain	(500)	
Tambahkan: penurunan persediaan	1.050	
Deduct: penurunan utang usaha	(1.740)	
		(1.190)
Kas yang dihasilkan dari operasi, sebelum belanja modal		3.050

ED (2019): Presentasi dan Pengungkapan Umum

ED (2019) diterbitkan untuk meningkatkan cara informasi dikomunikasikan dalam laporan keuangan, dengan fokus pada pelaporan kinerja tentang laporan laba rugi tetapi juga mengusulkan beberapa amandemen terhadap laporan arus kas. Dalam konteks ini, usulan amandemen laporan arus kas dianalisis di bawah ini beserta contoh laporannya.

Analisis ED (2019) Ditinjau dari Laporan Arus Kas

ED (2019) mengusulkan amandemen terkait laporan arus kas berikut ini.

1. Bagian operasi dengan metode tidak langsung menggunakan laba operasi sebagai titik awal, bukan laba atau rugi, untuk memahami bagaimana laba atau rugi operasi diubah menjadi arus kas operasi. Hal ini sejalan dengan ED (2010) dan DP (2016).
2. Pada bagian operasi, “ arus kas dari operasi ” diganti dengan “ arus kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan ”.
3. Pilihan kebijakan akuntansi untuk melaporkan dividen serta bunga yang diterima dan dibayarkan dihilangkan. Dalam hal ini, ED (2019) sejalan dengan ED (2010) dalam kerangka pemikiran berikut untuk perusahaan selain lembaga keuangan: (a) pembayaran dividen merupakan bagian dari pembiayaan yang bersifat , (b) bunga yang diterima dan dividen yang diterima biasanya berkaitan dengan pendapatan dari investasi, dan (c) bunga yang dibayarkan mengacu pada biaya perolehan pembiayaan. Selain itu, ED (2019) sebagian sejalan dengan DP (2016) karena klasifikasi bunga yang diterima bergantung pada sifat kegiatan dalam DP (2016) seperti yang disebutkan sebelumnya (Tabel 2.15).
4. Dibandingkan dengan ED (2012), ED (2019) mengusulkan klasifikasi bunga yang dikapitalisasi yang dibayarkan di bagian pendanaan dalam laporan arus kas untuk menghindari potensi alokasi sewenang-wenang antara aktivitas operasi dan investasi (IASB 2019a, hal. 72; 2019b , hal. 47) serta konsisten dengan bunga yang dibayarkan yang diakui sebagai beban dalam laba rugi.

Tabel 2.15 Klasifikasi arus kas terkait bunga dan dividen berdasarkan ED (2019)

	Format tradisional	ta yang sesuai (2008)	edisi (2010)	ta yang sesuai (2016)	Edisi (2019)
Bunga diterima	Operasi atau investasi	Pembiayaan	Berinvestasi	Operasi atau investasi	Berinvestasi
Bunga dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan
Dividen diterima	Operasi atau investasi	Berinvestasi	Berinvestasi	Berinvestasi	Berinvestasi
Dividen dibayarkan	Operasional atau pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan

Pengamatan terhadap Laporan Arus Kas Contoh

ED (2019) memberikan contoh laporan arus kas yang diturunkan dari contoh yang disajikan pada IAS 7 untuk memberikan perbandingan. Oleh karena itu, pengamatan berikut dikumpulkan dengan membandingkan contoh-contoh yang diberikan dalam IAS 7 (Tabel 2.12) dan ED (2019) (Tabel 2.16):

1. Laba sebelum pajak sebesar 3350 dari laporan arus kas tradisional digantikan oleh laba operasi sebesar 3290 pada laporan arus kas ED (2019) sebagai titik awal baru dari proses rekonsiliasi.
2. Karena perubahan titik awal proses rekonsiliasi, kerugian selisih kurs, pendapatan investasi, dan beban bunga tidak menjadi bagian dari rekonsiliasi.
3. Bunga yang dibayarkan sebesar 270 yang dilaporkan pada bagian operasi ditransfer ke bagian pembiayaan.
4. Pajak yang dibayar dilaporkan di bagian operasi tetapi item baris baru “kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan” diusulkan sebelum pajak dibayar sehingga investor dapat membuat analisis dasar sebelum pajak sejalan dengan DP (2016).
5. Berbeda dengan usulan DP (2008), ED (2010), dan DP (2016), ED (2019) mengusulkan pelaporan kas dan setara kas.

Tabel 2.16 Usulan laporan arus kas pada ED (2019)

Laporan arus kas untuk entitas selain lembaga keuangan		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba usaha	3290	
Tambahkan: depresiasi	450	
	3740	
Dikurangi: kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain	500	
Tambahkan: penurunan persediaan	1050	
Deduct: penurunan utang usaha	1740	
Kas dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	2550	
Pajak penghasilan dibayar	(900)	
Kas bersih dari aktivitas operasi		1650
Arus kas dari aktivitas investasi		
Akuisisi anak perusahaan X setelah dikurangi kas yang diperoleh	(550)	
Pembelian barang APD	(350)	
Hasil penjualan peralatan	20	
Bunga diterima	200	
Dividen diterima	200	
Kas bersih dari aktivitas investasi		(480)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil penjualan modal saham	250	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	250	
Pembayaran kewajiban sewa	(90)	

Bunga dibayarkan	(270)	
Dividen dibayarkan	(1200)	
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		(1060)
Kenaikan bersih kas dan setara kas		110
Kas dan setara kas pada awal periode		120
Kas dan setara kas pada akhir periode		230

2.4 KESIMPULAN

Bab ini memberikan perspektif untuk menyempurnakan laporan arus kas yang dilaporkan berdasarkan IAS 7 melalui (1) Makalah Diskusi mengenai pandangan awal Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2008, (2) staf draft Exposure Draft IFRS X Financial Presentasi Pernyataan yang dikeluarkan oleh staf IASB pada tahun 2010, (3) Exposure Draft ED/2012/1 Annual Improvement to IFRSs 2010–2012 Cycle yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2012, (4) Makalah Diskusi staf Inggris FRC yang diterbitkan pada tahun 2016, dan (5) Exposure Draft ED/2019/7 General Presentation and Disclosure yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2019.

Beberapa perubahan diusulkan terhadap desain laporan arus kas untuk komunikasi keuangan yang lebih baik guna memenuhi tujuan keterpaduan, disagregasi, serta likuiditas dan fleksibilitas keuangan, namun upaya tersebut tidak berubah menjadi kebijakan akuntansi IFRS. Oleh karena itu, laporan arus kas masih melaporkan arus kas masuk dan arus keluar dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan daripada bagian tambahan lain yang diusulkan. Metode langsung dan tidak langsung berlaku untuk pelaporan arus kas operasi, dan jadwal rekonsiliasi belum ditawarkan pada ED terakhir (2019). Untuk tujuan analisis arus kas bebas, arus kas dari investasi ke aset operasi tidak dialihkan dari investasi ke aset operasi meskipun ada beberapa upaya dalam DP (2008), ED (2010), dan DP (2016), namun penghapusan dividen yang dibayarkan dari arus kas operasi telah diusulkan sebagai kontribusi positif terhadap perhitungan arus kas bebas (IASB 2019b, hal. 46).

Selain itu, usulan penghapusan opsi kebijakan akuntansi atas bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan serta pelaporan kapitalisasi bunga yang dibayarkan pada bagian pembiayaan akan memberikan keterbandingan dan konsistensi pelaporan informasi arus kas jika ED (2019) disetujui oleh IASB. sebagai standar.

BAB 3

PERUBAHAN DALAM TATA KELOLA DAN PRAKTIK AKUNTANSI

3.1 PENDAHULUAN

Perubahan dalam tata kelola dan praktik akuntansi di Indonesia telah melibatkan beberapa tahap evolusi yang signifikan. Pada awalnya, praktik akuntansi di Indonesia mungkin lebih bersifat tradisional dan kurang terstandarisasi, dengan sedikitnya regulasi yang mengatur praktik tersebut. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan globalisasi, kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik dan transparansi meningkat. Ini mengarah pada pembentukan lembaga-lembaga pengatur seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Kemudian, Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional (IFRS) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperluas akses ke pasar keuangan global. Perubahan lain termasuk peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi dalam praktik akuntansi, seperti sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik. Selain itu, semakin pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan telah mendorong pengembangan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk meningkatkan tata kelola korporat dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, sejalan dengan perkembangan global dalam bidang akuntansi.

Adopsi Standar Akuntansi Internasional (IFRS)

Keputusan Indonesia untuk mengadopsi standar akuntansi internasional (IFRS) merupakan langkah penting dalam menstandarisasi praktik akuntansi dengan standar internasional. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan Indonesia, tetapi juga memperluas akses ke pasar keuangan global karena investor lebih percaya pada pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan standar internasional.

Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran kunci dalam memperbaiki praktik akuntansi di Indonesia. Penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik telah mempermudah proses pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan manusia dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengembangan Kerangka Kerja Pelaporan Keberlanjutan

Kehadiran kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi telah menanggapi kebutuhan akan tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan perusahaan dan regulator tentang pentingnya faktor-faktor non-finansial dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Meningkatnya Tata Kelola Korporat

Perubahan dalam tata kelola korporat, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan, telah menjadi fokus utama dalam menghadapi tuntutan pasar global dan meningkatnya ekspektasi investor.

Keselarasannya dengan Standar Internasional

Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan tata kelola korporat dan praktik akuntansi di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar internasional, memperbaiki reputasi pasar modal Indonesia, dan meningkatkan daya tarik bagi investor asing serta domestik. Dengan demikian, perubahan-perubahan ini mencerminkan transformasi yang signifikan dalam praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan global.

Kita juga Sejak kemerdekaan bersejarah dari Inggris pada tahun 1957, sistem akuntansi di Malaysia telah mengalami kemajuan dari ketergantungan pada peraturan dan praktik akuntansi Inggris hingga disahkannya Companies Act 1965 dan Accountants Act 1967, yang mengarah pada pendirian Institut Malaysia Akuntan (MIA). Selanjutnya, amandemen dilakukan terhadap anggaran dasar dan peraturan, dan Undang-Undang Pelaporan Keuangan tahun 1997 dibentuk, untuk mengatur praktik akuntansi dengan lebih baik, sebagaimana dipengaruhi oleh perkembangan domestik, global dan regional.

Ada banyak singgungan dalam literatur terhadap gagasan bahwa akuntansi adalah produk dari lingkungan di mana akuntansi beroperasi (Tahat et al. 2018; Ali 2007; The Committee to Strengthen the Accountancy Profession [CSAP], 2014; Almujaheed et al. 2017, Alon dan Dwyer 2016; Phang dan Mahzan 2013; Olamide dan Temitope 2016). Interaksi faktor kelembagaan, lingkungan, ekonomi dan politik, latar belakang budaya dan krisis pandemi global berpengaruh dalam pengembangan praktik akuntansi dan kerangka pelaporan keuangan. Di Malaysia, evolusi besar praktik dan peraturan akuntansi pasca kemerdekaan mencakup amandemen Companies Act 1965 pada tahun 1985, pencabutan Companies Act 1965 dan berlakunya Companies Act 2016 yang baru, pengaktifan MIA pada tahun 1987 dan berlakunya Undang-Undang Pelaporan Keuangan tahun 1997, yang mengarah pada pembentukan Financial Reporting Foundation (FRF) dan Malaysian Accounting Standards Board (MASB).

Dalam bab ini, peraturan akuntansi mengacu pada otoritas terkait yang mengatur praktik akuntansi. Sedangkan praktik akuntansi mengacu pada profesi akuntansi, standar dan kerangka konseptual yang dijelaskan secara rinci pada bagian selanjutnya. Konsep isomorfisme teori institusional digunakan untuk menggambarkan pengaruh faktor kelembagaan dalam perkembangan peraturan dan praktik akuntansi Malaysia sejak kemerdekaannya pada tahun 1957. Bagian selanjutnya dari bab ini akan mencakup gambaran umum peraturan akuntansi Malaysia; tantangan dalam peraturan akuntansi Malaysia; gambaran umum praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Malaysia; faktor kelembagaan yang mempengaruhi perkembangan peraturan dan praktik akuntansi serta kesimpulannya.

3.2 TINJAUAN PERATURAN AKUNTANSI

Tinjauan peraturan akuntansi di Indonesia melibatkan pemahaman terhadap kerangka regulasi yang mengatur praktik akuntansi di negara tersebut. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci tentang tinjauan peraturan akuntansi di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar: Landasan hukum utama yang mengatur praktik akuntansi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk pengaturan praktik bisnis dan keuangan di Indonesia, termasuk akuntansi.
2. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar yang lebih khusus mengatur praktik akuntansi di Indonesia. PP ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan laporan keuangan hingga standar akuntansi yang harus diikuti oleh entitas bisnis di Indonesia.
3. Standar Akuntansi Keuangan: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seperangkat standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. SAK ini mencakup berbagai topik seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset, liabilitas, dan ekuitas, serta penyajian laporan keuangan.
4. Pedoman Akuntansi: Selain SAK, terdapat juga Pedoman Akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengatur praktik akuntansi di sektor pasar modal Indonesia. Pedoman ini mencakup standar dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
5. Lembaga Pengatur: Selain itu, ada beberapa lembaga pengatur lainnya yang berperan dalam mengatur praktik akuntansi di Indonesia, seperti Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan dalam mengeluarkan regulasi dan pedoman terkait akuntansi.
6. Perubahan dan Penyesuaian: Tinjauan peraturan akuntansi di Indonesia juga mencakup pemahaman tentang perubahan dan penyesuaian yang terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini termasuk adopsi standar akuntansi internasional (IFRS) dan revisi peraturan akuntansi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memenuhi tuntutan pasar global.

Dengan memahami tinjauan peraturan akuntansi di Indonesia ini, praktisi akuntansi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Malaysia yang terdiri dari Federasi Malaya, Sabah dan Sarawak mewarisi prinsip regulasi dari profesi akuntansi di Inggris (CSAP 2014). Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, dan bergabung dengan koloni Inggris di Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963 untuk membentuk Federasi Malaysia. Tahun pasca-kemerdekaan tahun 1958 merupakan tahun penggabungan, berdasarkan Undang-

undang Perusahaan (1940–1946), sebuah badan akuntansi yang mengatur dirinya sendiri, yaitu Asosiasi Akuntan Publik Bersertifikat Malaya. Dengan terbentuknya MIA pada tahun 1967, peran regulasi MICPA beralih ke bantuan teknis bagi badan regulasi Malaysia, yang bertugas mendefinisikan lanskap bisnis dan keuangan negara tersebut (MICPA n.d.).

(a). Keterlibatan Badan Akuntansi Profesional

Perkembangan standar akuntansi di Malaysia dipengaruhi oleh badan akuntansi profesional Malaysia, yaitu MIA dan MICPA. Sebelum pembentukan MASB, standar akuntansi dikembangkan oleh MIA dan MICPA. Sebagai hasil dari pengembangan badan-badan penetapan standar ini, standar pelaporan telah meningkat dari waktu ke waktu meskipun sebagian besar masih didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perusahaan tahun 1965 (Tong 2019). Ketika Undang-Undang Pelaporan Keuangan disahkan pada bulan Maret 1997, kedua badan profesi tersebut berhenti menerbitkan standar akuntansi yang menandakan perpindahan proses penetapan standar akuntansi Malaysia dari badan akuntansi sektor swasta ke badan hukum publik (Tong 2019).

(i) Asosiasi Akuntan Publik Malaysia (MICPA)

Profesi akuntansi dan perkembangan ekonomi Malaysia memiliki hubungan formal sejak tahun 1958 ketika Asosiasi Akuntan Publik Malaya (MACPA) didirikan sebagai badan akuntansi yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan Ordonansi Perusahaan (1940–1946). Pada tahun 1968, MACPA mengeluarkan pedoman akuntansi pertama yang menangani contoh akun perusahaan. Selanjutnya, asosiasi tersebut menjadi Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) pada tanggal 6 Juli 1964 dan akhirnya berganti nama menjadi Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) pada tanggal 29 Januari 2002 (MICPA n.d.). Merupakan badan akuntansi swasta yang mengatur praktik para anggotanya yang menyandang gelar Akuntan Publik Bersertifikat (CPA).

Pada tahun 1978, MICPA diterima sebagai anggota Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC). IASC didirikan pada tahun 1973 dan bertanggung jawab atas penetapan Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan penerbitan pedoman yang disebut Standing Interpretations Committee (SIC) (Arshad n.d.). Kebijakan ekonomi baru (NEP) yang diterapkan pemerintah pada tahun 1971 mengakibatkan peningkatan kepemilikan Bumiputra¹ di perusahaan-perusahaan besar dan pengurangan kepemilikan asing, yang menyebabkan banyak merger dan pengambilalihan perusahaan. MICPA diminta turun tangan atas nama pemerintah yang prihatin dengan kurangnya aturan dan pedoman pelaporan dan akuntansi bagi perusahaan. Peran tunggal MICPA dalam menetapkan standar berlangsung lama, hingga MIA bergabung pada tahun 1985 (Sood 2006).

(ii) Institut Akuntan Malaysia (MIA)

Profesi akuntansi Malaysia diatur oleh Undang-undang Akuntan tahun 1967, yang disahkan setelah pembentukan negara tersebut pada tahun 1963. Berdasarkan Undang-undang ini, MIA didirikan pada tahun 1967 sebagai badan akuntansi nasional yang mengatur, mengembangkan, mendukung dan meningkatkan

integritas, status dan kepentingan akuntan. profesi di Malaysia. Pasal 22 UU tersebut mengatur bahwa seseorang yang menjadikan dirinya sebagai akuntan tanpa menjadi anggota MIA melakukan pelanggaran. Keberadaan isomorfisme koersif dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, yang menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan profesi akuntansi dengan hanya memperbolehkan individu yang kompeten untuk menjalankan profesi tersebut.

Meskipun didirikan berdasarkan undang-undang, MIA tetap tidak aktif dan fokus terutama pada pendaftaran akuntan di Malaysia hingga tahun 1987. Namun, pada tahun 1987, operasi MIA ditingkatkan menjadi badan akuntansi nasional dan mulai mengeluarkan standar akuntansi. (Tong 2019). Awalnya, semua standar yang sebelumnya dikembangkan oleh MICPA diadopsi oleh MIA. Sebagai anggota Dewan IASC dan Komite Sektor Publik IFAC, MIA terlibat aktif dalam penetapan standar global (Sood 2006). Setelah melalui proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa IAS yang diadopsi dari IASC sesuai dengan lingkungan Malaysia, MIA mulai merilis standar akuntansinya sendiri (Sood 2006).

Meskipun penerapan IAS menghasilkan pengungkapan informasi perusahaan yang lebih komprehensif, beberapa persyaratan pelaporan lokal terkait industri lokal tertentu seperti budidaya perikanan dan asuransi tidak dipenuhi. Oleh karena itu, MICPA dan MIA bekerja sama dan mengeluarkan standar akuntansi yang dikenal dengan Malaysian Accounting Standards (MASs). Contoh standar ini adalah MAS 1 Laba Per Saham, MAS 6 Akuntansi Goodwill dan MAS 8 Akuntansi Biaya Pra-Tanaman. Proses penerapan IAS dan pengembangan MAS berlanjut hingga tahun 1997 ketika MASB didirikan untuk mengambil alih peran penetapan standar di Malaysia dan pada tanggal 31 Desember 1996, 24 IAS, 8 MAS, dan 8 buletin teknis telah diterbitkan (Tong 2019, Arshad n.d.).

(b) Keterlibatan Otoritas Terkait

Profesi akuntansi di Malaysia juga diatur oleh Companies Commission of Malaysia (CCM) dan Audit Oversight Board (AOB) (IFAC 2021b). CCM adalah badan hukum yang dibentuk dari penggabungan antara Registry of Companies (ROC) dan Registry of Business (ROB) pada bulan April 2002. Namun, tidak seperti peran regulasi langsung MIA atas profesinya, CCM diberdayakan oleh Undang-Undang Akuntan 1967, CCM mengatur perusahaan dan bisnis melalui administrasi dan penegakan beberapa undang-undang yang mencakup Companies Commission of Malaysia Act 2001, Companies Act 2016, Interest Schemes Act 2016, Registration of Businesses Act 1956, Limited Liability Partnerships Act 2012, Trust Companies Undang-undang tahun 1949 dan Undang-undang Dana Kootu (Larangan) tahun 1971, dan peraturan perundang-undangan tambahan lainnya. Oleh karena itu CCM, melalui kegiatan penegakan hukum dan pemantauan yang komprehensif, merupakan otoritas utama dalam peningkatan tata kelola perusahaan.

AOB, didirikan berdasarkan Undang-Undang Komisi Sekuritas Malaysia tahun 1993, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 untuk mengawasi profesi akuntansi melalui kerangka

pengawasan audit yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan auditan entitas kepentingan publik dan dana jadwal. di Malaysia (SC n.d.). Badan pengatur lainnya termasuk Bank Sentral Malaysia (CBM), Komisi Sekuritas (SC), dan Bursa Efek Malaysia (Bursa Malaysia).

Regulator dan badan profesional bekerja sama secara erat untuk mempromosikan dan mengakui keunggulan dalam pelaporan perusahaan. Contoh bagaimana perusahaan didorong untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang berguna dan relevan bagi pengguna informasi keuangan adalah dengan mengadakan kompetisi untuk berbagai penghargaan keterbukaan, seperti National Annual Corporate Report Awards (NACRA) yang diselenggarakan bersama oleh Bursa Malaysia, MIA dan MICPA.

(c) Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB) dan Financial Reporting Foundation (FRF)

Sebelum tahun 1997, laporan keuangan di Malaysia hanya berfokus pada akuntansi dan pelaporan penatagunaan tradisional. Namun kecenderungan pelaporan ini mulai berubah ketika pemerintah Malaysia menyetujui Undang-Undang Pelaporan Keuangan tahun 1997. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Financial Reporting Foundation (FRF) dan Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB) didirikan pada tahun 1997.

FRF, sebagai badan perwalian, bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja MASB, pengaturan keuangan dan pendanaan, dan sebagai sumber pandangan awal bagi MASB mengenai standar dan pernyataan yang diusulkan. MASB, sebaliknya, diberi mandat untuk menerbitkan standar akuntansi di Malaysia, mengambil alih tanggung jawab dari MICPA dan MIA. Menurut Sood (2006), pergeseran penetapan standar mewakili perubahan sikap berbagai kelompok di Malaysia mengenai penetapan standar. Temuan Sood (2006) menunjukkan adanya perasaan campur aduk di antara kelompok kepentingan. Beberapa akuntan bersikeras bahwa dewan tersebut harus berada dalam yurisdiksi MIA, sementara yang lain mempertanyakan kompetensi dewan untuk menegakkan standar akuntansi.

Namun, Sood (2006) menemukan bahwa secara umum semua sepakat bahwa memiliki badan independen untuk mengembangkan standar akuntansi di Malaysia adalah ide yang bagus. Anggota MASB yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan antara lain seorang ketua, akuntan jenderal, penasihat dari MA, Komisi Perusahaan Malaysia (CCM), MIA, dan enam anggota lainnya dengan keahlian di bidang akuntansi, hukum, bisnis dan keuangan, dan FRA 1997 menetapkan bahwa setidaknya lima dari anggota tersebut adalah anggota MIA. Oleh karena itu, partisipasi pihak-pihak lain dan berbagai masukan mereka dalam proses penetapan standar bersama dengan dukungan hukum yang kuat untuk penegakan standar akan mengarah pada pengembangan standar akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Kerangka peraturan akuntansi dirancang dengan tujuan menghasilkan informasi berkualitas tinggi dan andal untuk memenuhi kebutuhan pengguna eksternal. Pada kenyataannya, hal ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Di Malaysia, Pasal 27 FRA 1997 mewajibkan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Act untuk mematuhi standar akuntansi yang dikeluarkan dan diadopsi oleh MASB (Arshad n.d.)

Perbaikan dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Malaysia menarik lebih banyak calon investor ke pasar modal.

(d) Companies Act 1965 dan Amandemennya

Sebelum Malaysia (saat itu Malaya) mencapai kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957, Ordonansi Perusahaan (amandemen) tahun 1940, 1946, dan 1956 menjadi peraturan pelaporan keuangan pertama yang terdokumentasi dan terus memainkan peran utama dalam mengatur pelaporan keuangan setelah Malaysia merdeka. kemerdekaan Malaysia (Tong 2019). Setelah Malaysia merdeka, sektor pertanian merupakan penyumbang angkatan kerja terbesar selama Rencana Lima Tahun Pertama (1956–1960). Rencana Lima Tahun kedua (1961–1965) berfokus pada pembangunan pedesaan yang mencakup investasi untuk infrastruktur dan layanan sosial. Menanggapi semakin canggihnya perekonomian, Companies Act, 1965 dibentuk dan Companies Ordinances dihapuskan.

Ali (2007) melaporkan bahwa akuntansi di Malaysia tampaknya telah meningkat setelah resesi ekonomi pada tahun 1985–86, namun sebelum Krisis Keuangan Asia pada kuartal ketiga tahun 1997, dengan amandemen besar terhadap Companies Act 1965, aktivasi MIA dan pembahasan tentang pendirian MASB. Undang-Undang Perusahaan direvisi secara substansial pada tahun 1985 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 1986. Tujuan keseluruhan dari amandemen tersebut adalah untuk menarik orang asing agar berinvestasi di negara tersebut, dengan menekankan perlunya individu yang terlibat dalam perusahaan agar lebih bertanggung jawab kepada kelompok minoritas. pemegang saham, termasuk orang asing (Ali 2007). Oleh karena itu, Undang-Undang Perusahaan yang diamandemen memuat persyaratan pengungkapan yang lebih komprehensif.

Namun, Ali (2007) menemukan bahwa revisi Undang-Undang Perusahaan tahun 1965 hanya bersifat dangkal karena tekanan untuk perubahan yang berasal dari resesi ekonomi terkait langsung dengan munculnya sistem akuntansi “modern” – namun tidak terkait dengan administrasi yang efektif dan tepat. istrasi dalam lingkungan sosial Malaysia. Hal ini menciptakan kebutuhan akan perubahan “struktural” (bukan perubahan mendalam) pada sistem akuntansi.

Undang-Undang Perusahaan tahun 1965 yang asli diganti dengan Undang-Undang Perusahaan tahun 2016 yang baru pada bulan April 2016 setelah RUU Perusahaan tahun 2015 disetujui di Parlemen. Berdasarkan Undang-undang baru ini, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang disetujui yang dikeluarkan oleh MASB dan dengan demikian menghilangkan konflik antara Undang-undang lama dan standar akuntansi yang disetujui. Selain itu, Jadwal Kesembilan dari Undang-Undang yang asli telah dihapus, yang berarti bahwa Undang-undang Perusahaan yang baru tidak lagi mengatur perlakuan akuntansi dan persyaratan pengungkapan untuk pelaporan keuangan.

3.3 TANTANGAN DALAM PERATURAN AKUNTANSI MALAYSIA

Permasalahan yang diangkat dalam Laporan Bank Dunia tentang Ketaatan Standar dan Kode dalam Akuntansi dan Audit (ROSC AA) yang dirilis pada tahun 2012 menandai dimulainya kemungkinan perkembangan penting dalam kerangka peraturan profesi, 55 tahun setelah

kemerdekaan. MIA kembali menjadi pusat perhatian setelah peninjauan kerangka peraturan dan struktur tata kelola MIA yang terungkap (1) persepsi identitas MIA yang terpecah menghambat efektivitasnya, (2) efektivitas Dewan MIA dipertanyakan, (3) kepemimpinan MIA dalam pendidikan akuntansi kurang memiliki visibilitas, (4) distorsi identitas akuntan, (5) tantangan dalam penegakan standar dan aturan profesional, (6) kurangnya kompetensi teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik akuntansi, (7) aturan praktik akuntan perlu dimodernisasi dan (8) kebutuhan untuk memperkuat pendanaan untuk pengembangan akuntansi.

Sebagai bagian dari rencana aksi negara untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam ROSC AA, Komite Penguatan Profesi Akuntansi di Malaysia (CSAP) dibentuk, dengan anggota yang berasal dari beberapa regulator, termasuk MIA. CSAP (2014) menyatakan tantangan yang diuraikan dalam laporan ini “menandakan perlunya pengaturan ulang total tata kelola profesi akuntansi di Malaysia”. Lima belas rekomendasi diajukan, tujuan utamanya adalah “untuk merombak struktur tata kelola profesi akuntansi, mengganti MIA dengan struktur baru dengan sistem checks and balances yang lebih baik”. Hal ini menghasilkan rekomendasi pertama untuk “sebuah badan pengawas baru (selanjutnya disebut sebagai ‘NRB’) dibentuk di Malaysia”.

Namun, penyerahan kewenangan regulasi MIA kepada NRB merupakan “gagasan yang tidak mengenakan bagi mereka yang lebih memilih lembaga tersebut untuk tetap seperti apa adanya” (Oh 2017). Sejak saat itu, MIA telah bersikap proaktif, termasuk membentuk satuan tugas CSAP internal yang bertemu setidaknya sebulan sekali (Lee 2018). Dalam wawancara dengan Presiden MIA saat itu, Salihin Abang, dan Wakil Presiden, Dato' Narendra Kumar Jasani, VP menyatakan bahwa 13 rekomendasi telah diadopsi atau sedang dalam proses penerapan, dengan dua rekomendasi yang masih tertunda, yaitu kerangka kompetensi untuk lulusan akuntansi lokal dan kerangka peraturan. Terhadap hal ini, Presiden saat itu menambahkan, “Pada akhirnya, MIA masih dapat mempertahankan fungsi regulasinya. Jika Anda ingin mengubah peran MIA, maka Anda harus mengubah Undang-Undang Akuntan tahun 1967. Berdasarkan Undang-undang Akuntan tahun 1967, kami adalah pengatur profesi akuntansi di Malaysia. Dengan mandat ini, dan peran yang ditetapkan oleh parlemen, kami adalah kustodian mengurus seluruh profesi di Malaysia”.

Sentimen untuk mempertahankan MIA sebagai peraturan perundang-undangan profesi juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan saat itu, dalam pidato utamanya di Konferensi Akuntan Internasional MIA pada bulan Oktober 2018, ketika ia berkata, “pemerintah ingin memperkuat kewenangan MIA dan sedang mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang tersebut untuk lebih memberdayakan regulasi dan penegakan profesi”. Sampai saat ini, UU Akuntan yang baru belum disahkan. Menyusul laporan CSAP pada tahun 2016, Komisi Sekuritas (SC) ditugaskan oleh Menteri Keuangan untuk membentuk komite implementasi (IC) untuk merancang amandemen Undang-undang Akuntan tahun 1967. MIA adalah salah satu dari beberapa pemangku kepentingan yang diwakili di IC .

3.4 GAMBARAN UMUM PRAKTIK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Secara umum, praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berikut adalah gambaran umum praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia:

1. **Standar Akuntansi Keuangan (SAK):** SAK adalah seperangkat standar yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Standar ini mencakup berbagai topik seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, penyajian laporan keuangan, dan topik lainnya yang relevan dengan akuntansi keuangan.
2. **Prinsip-prinsip Akuntansi:** Praktik akuntansi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk prinsip keterbandingan, konsistensi, kehati-hatian, dan realisasi.
3. **Pelaporan Keuangan:** Pelaporan keuangan di Indonesia biasanya dilakukan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh SAK.
4. **Auditor Eksternal:** Perusahaan di Indonesia umumnya wajib mengaudit laporan keuangannya oleh auditor eksternal yang independen. Auditor ini bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. **Penyusunan Laporan Tahunan:** Setiap perusahaan di Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk perusahaan publik.
6. **Transparansi dan Keterbukaan:** Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia juga mendorong transparansi dan keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya.

Secara keseluruhan, praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia didasarkan pada standar yang telah ditetapkan dan diatur oleh otoritas yang berwenang, dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai contoh lain Di Malaysia pasca kemerdekaan, pengaruh kuat lembaga dan praktik akuntansi Inggris (UK) terlihat jelas seiring dengan perkembangan akuntansi dan praktik akuntansi yang dapat ditelusuri ke MACPA, sekarang MICPA. Tidaklah salah untuk mengatakan bahwa sebagai satu-satunya badan akuntansi profesional yang tumbuh di Malaysia, 20 anggota pendiri lokal sebagian besar terdiri dari, jika tidak semuanya, akuntan yang telah dilatih di bawah bimbingan perusahaan akuntan Inggris.

Selanjutnya, pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Malaysia diwajibkan menurut undang-undang untuk mematuhi persyaratan pengungkapan minimum yang

ditetapkan dalam Jadwal Kesembilan Undang-undang Perusahaan tahun 1965. Undang-undang Perusahaan tahun 1965 dan Undang-undang Akuntan tahun 1967 yang kemudian, juga didasarkan pada undang-undang dan peraturan. dikembangkan di United Kingdom (UK). Penerapan formal standar akuntansi yang berbasis di Inggris pada tahun 1979, dimulai dengan penerapan Standar Akuntansi Internasional (IAS), yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC), yang didirikan pada tahun 1973 dan kemudian digantikan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional. Accounting Board (IASB) pada tahun 2001.

Malaysia dalam bentuk MICPA bergabung sebagai associate member pada tahun 1975 dan kemudian bergabung dengan MIA pada tahun 1995 hingga 2000 (Wikipedia 2021a). Namun IAS tersebut tidak memadai karena kebutuhan akuntansi dan pelaporan industri tertentu seperti akuakultur dan asuransi tidak ditangani, sehingga menyebabkan dikeluarkannya Standar Akuntansi Malaysia (Malaysian Accounting Standards/MASs) yang dikembangkan sendiri di Malaysia pada tahun 1980an, yang dilakukan bersama oleh MIA dan MICPA.

Setelah pembentukan undang-undang MASB pada tahun 1997, perusahaan-perusahaan Malaysia harus mematuhi standar akuntansi yang disetujui MASB, yang terdiri dari Standar Pelaporan Keuangan Malaysia (MFRS) dan Interpretasi IC Komite Interpretasi, dan Standar Pelaporan Entitas Swasta Malaysia (MPERS). UKM Malaysia dapat memilih untuk mematuhi MFRS atau MPER. Pernyataan teknis juga dikeluarkan untuk melengkapi standar akuntansi yang disetujui MASB, dalam memastikan laporan keuangan menyajikan pandangan yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Permasalahan yang timbul dari praktik-praktik yang ada dan yang mungkin berbeda serta perlunya penerapan dan implementasi MFRS secara konsisten untuk kepentingan pasar modal menyebabkan pembentukan Komite Penerapan dan Implementasi MFRS (MAIC) oleh MASB pada bulan Januari 2019.

(a) Konvergensi ke IFRS

Di Malaysia, inisiatif untuk melakukan konvergensi dengan IFRS sejalan dengan perkembangan penetapan standar global, dimulai ketika standar MASB diubah namanya menjadi standar pelaporan keuangan (FRS) pada tahun 2005. Penomoran standar tersebut sesuai dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB kecuali untuk beberapa modifikasi. Pada tahun 2006, 21 standar pelaporan keuangan (FRS) telah diterbitkan oleh MASB yang diadopsi dari IFRS dan IAS baru yang diterbitkan oleh IASB. Standar FRS, juga dikenal sebagai kerangka FRS, telah diwajibkan bagi entitas non-swasta untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka.

Pada tanggal 1 Agustus 2008, MASB menyatakan niatnya untuk mencapai konvergensi penuh FRS yang berlaku di Malaysia dengan IFRS yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 2012 untuk semua entitas selain entitas swasta, yang berarti kepatuhan penuh terhadap IFRS baik dari segi konten dan waktu penerapannya. Hal ini merupakan cerminan komitmen Malaysia terhadap satu bahasa pelaporan keuangan global.

Untuk bergerak menuju konvergensi penuh, MASB mengeluarkan kerangka Standar Pelaporan Keuangan Malaysia (MFRS) yang baru pada bulan November 2011, yang

sepenuhnya konsisten dengan kerangka IFRS. Standar akuntansi dalam kerangka baru ini diubah namanya menjadi standar MFRS pada tanggal 1 Januari 2012. Kepatuhan terhadap kerangka MFRS berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012, untuk semua entitas selain entitas swasta, kecuali yang tercakup dalam Perjanjian MFRS 141 Pertanian dan Interpretasi IC 15 untuk Konstruksi Real Estate (IC 15), termasuk induknya, investor signifikan dan ventura (Arshad n.d.).

Tujuan utama konvergensi adalah untuk menutup kesenjangan antara standar pelaporan keuangan (FRS) dan IFRS, menjadikan laporan keuangan lebih transparan dan dapat dibandingkan. Dalam studi mereka tentang evolusi standar akuntansi di Nigeria, Olamide dan Temitope berpendapat bahwa penerapan IFRS “dipicu oleh rasa memiliki suatu negara karena IFRS telah diterapkan di lebih dari 122 negara”. Beberapa literatur lain menyetujui penerapan atau konvergensi dengan IFRS sebagai hal yang diperlukan untuk lingkungan akuntansi dan pelaporan yang terus berkembang.

Setelah pengumuman konvergensi penuh, beberapa penelitian melihat tantangan yang dihadapi oleh entitas dalam hal kompleksitas standar, kurangnya keahlian teknis di antara para pembuat dan auditor, pasar modal lokal yang belum berkembang, panduan yang tidak memadai untuk penerapan IFRS untuk pertama kalinya, kurangnya pengetahuan praktis tentang penerapan standar, biaya konvergensi, dan akuntansi nilai wajar yang bermasalah.

Konvergensi penuh MFRS di Malaysia dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB dicapai pada tahun 2012 yang menandai kemajuan standar pelaporan di Malaysia karena telah membawa pelaporan keuangan di Malaysia bersama-sama dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi IFRS dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelaporan keuangan di Malaysia). Menurut Laporan Tahunan FRF dan MASB (2018), untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, semua entitas non-swasta di Malaysia kini diharuskan menggunakan satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang diterima secara global, yaitu Kerangka MFRS.

(b) Pengembangan Standar Pelaporan Badan Swasta Malaysia (MPERS)

Untuk meringankan beban kepatuhan yang dikenakan IFRS kompleks pada entitas swasta, MASB memperkenalkan Standar Pelaporan Entitas Swasta (PERS) pada tahun 2006. Akibatnya, mulai tahun 2006, terdapat kerangka pelaporan keuangan dua tingkat: kerangka FRS dan kerangka pelaporan keuangan dua tingkat. Kerangka Kerja Standar Pelaporan Entitas Swasta (PERS) (Tong 2019). Entitas swasta adalah “perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Act 2016 yang tidak diwajibkan untuk menyiapkan atau mengajukan laporan keuangan apa pun berdasarkan hukum apa pun yang dikelola oleh SC atau CBM; dan bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan asosiasi atau, atau dikendalikan bersama oleh, suatu entitas yang diwajibkan untuk menyiapkan atau menyampaikan laporan keuangan apa pun berdasarkan hukum apa pun yang diatur oleh SC atau CBM”.

Pada bulan Februari 2006, entitas swasta di Malaysia dikecualikan dari kepatuhan terhadap MFRS namun dapat memilih untuk menerapkan kerangka PERS. PERS adalah

seperangkat standar akuntansi yang diterbitkan atau diadopsi oleh MASB untuk diterapkan oleh semua entitas swasta. Namun, karena adanya kesenjangan besar antara IFRS yang digunakan oleh entitas non-swasta dan PER oleh entitas swasta, MASB menerbitkan Standar Pelaporan Entitas Swasta Malaysia (MPERS) pada bulan Februari 2014, yang didasarkan pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional IASB. untuk entitas kecil dan menengah (IFRS untuk UKM) dengan sedikit perubahan dan adaptasi. MPERS adalah standar mandiri dengan 35 bagian yang membahas semua aspek pelaporan keuangan oleh entitas swasta. Dengan demikian, entitas swasta mempunyai pilihan untuk secara sukarela mengadopsi kerangka MFRS yang digunakan oleh entitas publik atau melakukan transisi wajib ke kerangka MPERS yang baru paling lambat tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu, dengan diadopsinya kerangka kerja MPERS yang baru pada tahun 2016, pelaporan entitas swasta di Malaysia menjadi setara dengan pelaporan global saat ini.

Upaya signifikan yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Malaysia telah meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, yang berkontribusi terhadap efisiensi operasi keuangan dan pasar modal dengan mengalokasikan modal untuk tujuan ekonomi produktif sekaligus mempromosikan pasar keuangan dan modal. kepercayaan diri.

(c) Pengembangan Kerangka Konseptual

Selain mengembangkan dan menerbitkan standar, MASB juga menerbitkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan kerangka ini didasarkan pada kerangka IASB. Kerangka Konseptual menjelaskan tujuan dan konsep pelaporan keuangan bertujuan umum. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk membantu MASB mengembangkan standar (standar) MFRS yang didasarkan pada konsep yang konsisten; membantu penyusun untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika standar memungkinkan pilihan kebijakan akuntansi dan untuk membantu semua pihak untuk memahami dan menafsirkan standar (IFRS Foundation n.d.).

Kerangka asli Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tahun 2007 dikeluarkan oleh MASB, serupa dengan kerangka IASB untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pada bulan November 2011, kerangka kerja asli digantikan oleh Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Malaysia (MFRS). Kemudian pada tahun 2018, Kerangka Konseptual pelaporan keuangan yang direvisi diterbitkan oleh MASB. Hal ini identik dengan Kerangka Konseptual IASB yang direvisi untuk pelaporan keuangan. Kerangka Konseptual 2018 segera berlaku efektif untuk MASB dan Komite Interpretasinya. Kerangka Konseptual bukanlah sebuah standar, namun ketika tidak ada standar MFRS yang berlaku untuk suatu transaksi, entitas pelapor dapat merujuk pada Kerangka Konseptual untuk mengembangkan atau memilih kebijakan akuntansi yang sesuai untuk transaksi atau peristiwa tersebut.

(d) Akuntansi dan Pelaporan transaksi keuangan yang Sesuai Syariah

Menurut Muhammad dkk. (2016), MASB terlibat aktif dalam pembentukan standar akuntansi Islam di awal tahun 2000an untuk memastikan kelancaran pelaporan Lembaga Keuangan Islam (IFI). Perdebatan mengenai standar Islam memunculkan dua isu terpisah yaitu; (1) prihatin dengan IFI sehubungan dengan kebutuhan penyusun akan bantuan dalam menyiapkan laporan keuangan mereka untuk transaksi yang berbeda dari sistem perbankan konvensional; (2) Akuntan Muslim khawatir apakah perlakuan akuntansi yang diberikan dalam IFRS konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Penelitian lebih lanjut oleh Mohammed et al. (2019) mengungkapkan bahwa diperlukan pedoman atau standar yang tepat bagi IFI dalam kerangka IFRS untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka menawarkan produk kepatuhan syariah yang disetujui oleh Dewan Penasihat Syariah, tanpa memerlukan standar akuntansi Islam tertentu.

Standar akuntansi yang disetujui oleh MASB yang berlaku untuk transaksi Islam yang dilakukan oleh entitas juga tunduk pada Undang-Undang Pelaporan Keuangan tahun 1997. Namun, Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang diadopsi oleh MASB mungkin tidak secara khusus menangani transaksi keuangan Islam di negara tersebut. mencapai kesimpulan mereka. Sebagai konsekuensinya, komite tetap ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada dewan mengenai apakah standar akuntansi yang disetujui saat ini atau yang diusulkan dapat diterapkan pada transaksi keuangan Islam.

Komite tetap terdiri dari perwakilan dari profesi akuntansi, akademisi regulator serta profesi takaful dan perbankan. Fungsi komite tetap ini meliputi: (1) mengidentifikasi permasalahan teknis yang berkaitan dengan keuangan Islam untuk ditinjau dan didiskusikan; (2) mengidentifikasi berbagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan dengan melakukan penelitian dan benchmarking; (3) memberikan rekomendasi yang jelas kepada dewan mengenai penerapan standar akuntansi yang disetujui untuk transaksi keuangan Islam; (4) membantu dewan dalam bidang berikut:

- Mempersiapkan dokumen yang relevan dengan pelaporan keuangan Islam untuk disetujui dewan.
- Membawa tantangan pelaporan keuangan Islam dan kemungkinan solusinya ke IASB baik secara langsung atau tidak langsung melalui Asian-Oceanian Standard-setters Group (AOSSG) atau badan lainnya.
- Menyiapkan dokumentasi dan rekomendasi masalah akuntansi keuangan Islam untuk Dewan Penasihat Syariah CBM atau SC, bila diperlukan.

MASB pada tahun 2001 menerbitkan MASB i-1 (kemudian berganti nama menjadi FRS i-1), Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam. Hal ini ditarik karena MASB menghentikan kebijakan penerbitan standar akuntansi Islam dan berpendapat bahwa standar tersebut sebagian besar serupa dengan standar konvensional yang diterbitkan. Pada tanggal 15 September 2009, MASB mengeluarkan pernyataan prinsip i-1 (SOP i-1) Pelaporan Keuangan dari Perspektif Islam, yang menegaskan bahwa

standar akuntansi yang disetujui MASB berlaku untuk transaksi dan peristiwa keuangan yang sesuai dengan syariah, kecuali syariah melarangnya. itu (FRF MASB 2020b).

Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi dimana terdapat larangan syariah, persyaratan MASB tidak perlu dipenuhi, dan “MASB akan mengeluarkan panduan alternatif”. Selain itu, jika permasalahan akuntansi Islam tidak dibahas dalam standar yang ada, panduan diberikan dalam FRS 108 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan Akuntansi, dan SOP i-1 agar manajemen dapat menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi. yang memastikan informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan (FRF MASB 2020c).Panduan pelengkap yang telah diterbitkan mencakup rilis teknis, seperti yang diberikan pada Tabel 3.1.

(e) Implikasi COVID-19 terhadap Praktik Akuntansi dan Pelaporan

Deteksi penyakit baru virus Corona (COVID-19) di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, yang diikuti dengan pengumuman oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi di seluruh dunia pada bulan Maret 2020, telah menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang berdampak buruk (Wikipedia 2021c). Untuk mengekang penyebaran pandemi ini, pemerintah Malaysia memprakarsai perintah pengendalian pergerakan (MCO) yang mulai berlaku pada 18 Maret 2020. MCO tersebut mencakup serangkaian karantina, penutupan lembaga pendidikan, perintah untuk membatasi atau menanggukkan operasional bisnis, antara lain -pembatasan perjalanan negara bagian dan internasional.

Tabel 3.1 Rilis teknis MASB untuk transaksi sesuai syariah (TR i)

Rilis teknis	Judul TR i	Tanggal berlaku
TR saya-1	Akuntansi zakat dalam bisnis	1 Juli 2006
TR i-2	Ijarah	2006, dan ditarik
TR i-3	Penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah	2009, dan diarsipkan
TR i-4	Kontrak Sal yang sesuai syariah	2010, dan diarsipkan

Meskipun kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, dan beberapa dunia usaha bahkan mendapatkan manfaatnya, pembatasan kontrol pergerakan (MCO) mempunyai kelemahan. MCO ditambah dengan lockdown yang diberlakukan oleh banyak negara, terputusnya rantai pasokan barang-barang dari negara-negara yang terkena dampak, dilema lembaga keuangan dan peminjam yang timbul karena ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya telah memberikan dampak yang parah pada hampir semua dunia usaha, baik secara langsung. atau secara tidak langsung.

Pemerintah Malaysia juga telah menerapkan beberapa langkah untuk memberikan bantuan sementara kepada individu dan perusahaan yang terkena dampak buruk secara sosial dan ekonomi, salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Tindakan Sementara

untuk Mengurangi Dampak Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) 2020 pada 23 Oktober 2020. Undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan kewajiban kontrak secara damai tanpa melalui proses hukum, membatasi, meskipun untuk sementara, opsi pemulihan utang dan penegakan kewajiban kontrak terhadap pihak yang gagal bayar yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban.

Karena sebagian besar transaksi bisnis diformalkan melalui pembuatan kontrak, dampak mitigasi UU COVID-19 terasa di beberapa bidang akuntansi, seperti konsesi sewa untuk aset yang disewakan, pengakuan pendapatan, perkiraan kerugian kredit karena ketidakmampuan memenuhi pembayaran pinjaman yang dijadwalkan. , kewajiban imbalan pasti kepada karyawan. Transaksi kontraktual yang belum pernah terjadi sebelumnya pada akhirnya menimbulkan tantangan dalam akuntansi dan pelaporan kinerja keuangan badan usaha, termasuk usaha kecil menengah (UKM).

Di Malaysia, dampak COVID-19 pertama kali menjadi masalah pelaporan keuangan pada kuartal bulan Juni dengan Pelaporan Keuangan Interim MFRS134 yang mewajibkan pengungkapan “sifat dan jumlah perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim sebelumnya pada tahun keuangan berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan pada tahun keuangan sebelumnya”. Tingginya tingkat ketidakpastian mempengaruhi ekspektasi pengguna laporan keuangan dalam memprediksi kinerja keuangan di masa depan dan menekankan pentingnya penggunaan estimasi dan penilaian yang realistis.

Penilaian ulang asumsi dan estimasi sangat penting karena kelayakan dasar pengukuran yang digunakan pada periode sebelumnya dan pengungkapannya dipertanyakan. Misalnya, dasar kelangsungan hidup dalam kaitannya dengan MFRS 101 Penyajian Laporan Keuangan tidak dapat diterapkan ketika bisnis dihadapkan pada penghentian yang akan datang, perlunya mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dalam menentukan estimasi penurunan nilai aset karenaantisipasi masa depan yang lebih lemah. permintaan atas barang dan jasa dan ketergantungan yang lebih besar pada input yang tidak dapat diobservasi karena tidak tersedianya atau penurunan input yang dapat diobservasi di pasar untuk pengukuran nilai wajar suatu aset atau liabilitas.

Untuk memastikan profesi akuntansi tetap tangkas dan tangguh dalam beradaptasi terhadap kompleksitas dan ketidakpastian yang meningkat akibat krisis pandemi, MIA telah “mengembangkan halaman web khusus untuk menyediakan sumber daya, pembaruan, dan panduan penting, termasuk informasi dari otoritas terkait” (MIA 2021). Badan pengatur bisnis lainnya, seperti CBM, bursa saham, Companies Commission of Malaysia (CCM), Inland Revenue Board (IRB), juga telah memberikan panduan dan langkah-langkah bantuan sementara untuk meringankan kesulitan yang disebabkan oleh krisis ini. Misalnya, CBM mengumumkan moratorium pinjaman untuk individu, UKM dan korporasi, dan CCM telah mengizinkan perusahaan untuk mengajukan perpanjangan untuk menyerahkan laporan keuangan mereka kepada BAE.

Demikian pula dengan pembuat standar akuntansi, MASB, berbagai badan akuntansi seperti MICPA, firma akuntansi seperti Grant Thornton, PwC, KPMG telah memberikan panduan teknis dan informasi relevan terkini untuk membantu entitas dalam pelaporan

keuangannya. Pada tanggal 5 Juni 2020, MASB mengubah MFRS 16 Sewa, konsesi sewa terkait COVID-19 untuk membantu penyewa lebih mudah memperhitungkan konsesi sewa terkait COVID-19, seperti liburan sewa dan pengurangan sewa sementara atau penangguhan pembayaran sewa. Pada tanggal 6 April 2021, amandemen selanjutnya terhadap MFRS 16 Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah tanggal 30 Juni 2021, memperluas kebijakan praktis yang diberikan pada tahun 2020 untuk konsesi sewa yang jatuh tempo pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022 (FAF MASB 2020e).

Para pembuat akun di Malaysia juga dipandu oleh dokumen implementasi dan artikel yang diterbitkan oleh mitra internasional MASB, IASB. Sampai saat ini panduan terkait COVID-19 yang dikeluarkan oleh MASB dan IASB mendukung implementasi yang tersedia bagi praktisi akuntansi seperti yang diberikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Panduan terkait COVID-19 MASB

Tanggal pengeluaran	Judul
MASB mengeluarkan panduan	
25 Maret 2020	COVID-19: Instrumen keuangan MFRS 9: pertimbangan kerugian kredit ekspektasian
9 Juni 2020	Persyaratan Tanya Jawab dalam MFRS yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh entitas pelapor di Malaysia sehubungan dengan dampak COVID-19
20 Oktober 2020	Pengakuan pendapatan penjualan properti residensial pada saat berlakunya RUU COVID-19 2020
IASB mendukung implementasi	
<i>Dokumen pendidikan</i>	
27 Maret 2020	IFRS 9 dan COVID-19 memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan instrumen keuangan IFRS 9 mengingat ketidakpastian saat ini akibat pandemi COVID-19
10 April 2020	IFRS 16 dan COVID-19 Akuntansi konsesi sewa terkait COVID-19 menerapkan IFRS 16 Sewa
13 Januari 2021	Kelangsungan hidup—fokus pada persyaratan pengungkapan dalam standar IFRS yang relevan untuk penilaian kelangsungan hidup yang mungkin melibatkan tingkat penilaian yang lebih besar dari biasanya dalam lingkungan ekonomi yang tertekan saat ini akibat pandemi COVID-19
<i>Artikel</i>	
28 Oktober 2020	Penerapan standar IFRS pada tahun 2020—dampak COVID-19

3.5 FAKTOR KELEMBAGAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI

Bab ini menjelaskan faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi perkembangan peraturan dan praktik akuntansi dengan menggunakan teori kelembagaan. Teori institusional telah digunakan secara luas untuk menjelaskan praktik akuntansi. Konsepsi teori institusional yang digunakan dalam bab ini adalah isomorfisme. Isomorfisme adalah praktik yang memaksa

satu komponen untuk beradaptasi dengan komponen lain dalam populasi yang berbagi keadaan terkait. Mekanisme isomorfisme dikategorikan menjadi koersif, normatif, dan mimetik. Isomorfisme koersif adalah jenis kekuatan institusional yang paling banyak dikutip. Tekanan formal adalah praktik peraturan di mana badan pengawas mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan, memeriksa kepatuhan dan menjatuhkan hukuman jika diperlukan. Tekanan formal mungkin datang dalam bentuk penegakan hukum, bujukan dan undangan.

Isomorfisme mimesis menganjurkan peniruan praktik organisasi efektif yang diterima secara sosial yang sah. Peniruan praktik terbaik biasanya terjadi ketika terdapat ambiguitas dalam keadaan atau persyaratan untuk mematuhi persyaratan tertentu. Sementara itu, isomorfisme normatif biasanya dipromosikan oleh kelompok profesional dan pekerjaan. Isomorfisme ini biasanya mempromosikan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang pada akhirnya dianut bersama di dalam dan di luar organisasi.

Di Malaysia, isomorfisme kelembagaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan peraturan dan praktik akuntansi. Menarik untuk dicatat bahwa dalam mempersiapkan konvergensi IFRS pada bulan Januari 2012, pengaruh legitimasi sosial yang bersifat koersif, mimetik, dan normatif berperan penting. Perubahan dalam arena akuntansi Malaysia berasal dari pengaruh sosial, ekonomi dan politik, dan konsisten dengan, antara lain, temuan literatur yang masih ada.

Dalam bab ini, disebutkan bahwa tekanan koersif telah secara signifikan mempengaruhi perkembangan peraturan dan praktik akuntansi di Malaysia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Pengaruh koersif tertinggi berasal dari pemangku kepentingan internal, yaitu perusahaan-perusahaan Malaysia dari berbagai industri dan termasuk organisasi multinasional. Namun pengaruh koersif dari “pemangku kepentingan eksternal lainnya seperti investor internasional, operasi bisnis di luar negeri, dan anak perusahaan di luar negeri relatif rendah”.

Selain itu, sama seperti negara-negara lain, seperti Vietnam dan Kuwait, kekuatan koersif juga datang dari pemain internasional penting seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB), yang telah memberikan dukungan yang diperlukan untuk inisiatif pembangunan Malaysia. Malaysia menjadi anggota IMF segera setelah kemerdekaan, pada tanggal 7 Maret 1958 (Dana Moneter Internasional n.d.). Kehadiran Bank Dunia di Malaysia, melalui pendirian pusat keuangan di Kuala Lumpur pada tahun 2016, dan pertukaran keahlian, mendukung prioritas pembangunan Malaysia dan perjalanannya menuju status negara maju.

Tekanan pemerintah berperan penting dalam pengaktifan kembali MIA pada tahun 1987. Usulan merger dengan MICPA untuk membentuk Malaysian Institute of Chartered Accountants (MICA) ditolak oleh pemerintah pada tahun 1985, dengan alasan bahwa MIA sudah ada untuk mengatur profesi akuntansi. Sebagaimana terungkap dalam dokumen bersampul MIA tahun 1988, pemerintah mendesak MIA untuk aktif karena hilangnya kepercayaan terhadap profesi tersebut di antara perusahaan lokal dan asing, yang merugikan cita-cita bangsa untuk menjadi negara industri.

Arahan pemerintah agar MIA aktif juga termasuk dalam karakteristik proses implementasi kebijakan ekonomi baru (NEP), yang melibatkan intervensi pemerintah melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial-ekonomi. NEP dirumuskan setelah terjadinya kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969 dan dimulai dengan Rencana Malaysia Kedua (1971–1975) hingga Rencana Malaysia Kelima (1986–1990), yang berupaya mencapai persatuan nasional melalui restrukturisasi sosial-ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kebutuhan penyedia modal dan pemangku kepentingan lainnya akan informasi perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi telah membentuk lingkungan pelaporan keuangan di Malaysia. Penyediaan informasi perusahaan kepada para pengguna ini telah dimulai oleh Undang-Undang Perusahaan Jadwal Kesembilan tahun 1965 yang secara resmi menetapkan persyaratan pelaporan dalam laporan keuangan Malaysia dan relatif tidak berubah hingga tahun 1985. Merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keakuratan dan keadilan perhitungan sesuai dengan persyaratan Undang-undang.

Kemunculan dan perkembangan kekhawatiran multinasional dan pertumbuhan pasar keuangan internasional pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an memberikan perubahan signifikan dalam praktik pelaporan keuangan di Malaysia yang menunjukkan peran yang lebih berpengaruh dari otoritas pengatur seperti CBM dan SC. Sejalan dengan tujuan pembentukan SC pada tahun 1983, pedoman SC mengharuskan perusahaan publik untuk beralih dari sistem pelaporan penatagunaan tradisional ke pelaporan berbasis pengungkapan penuh. Kekuatan koersif dari pemangku kepentingan, khususnya penegakan peraturan mempengaruhi kesiapan perusahaan publik Malaysia untuk menerapkan IFRS

Hal ini didukung oleh temuan Scott (2008) bahwa perusahaan terpaksa mempersiapkan diri untuk konvergensi IFRS karena kekhawatiran akan ketidakpatuhan dan upaya untuk menghindari hukuman dari badan pengawas. Hal ini sesuai dengan tekanan isomorfik institusional menurut Almujaed et al. (2017). Isomorfisme koersif dari pemerintah telah memaksa pengungkapan informasi perusahaan melampaui persyaratan pengungkapan minimum menurut undang-undang dan Malaysia mulai mengadopsi empat IAS (IAS 1 hingga 4) pada tahun 1978.

Sejalan dengan isomorfisme mimesis, Malaysia dipengaruhi oleh perubahan dalam lingkungan hukum, ekonomi, dan politik Inggris sebagai anggota Persemakmuran (UKEssays 2018a, b). Status negara tersebut sebagai bekas jajahan Inggris mempunyai pengaruh mimesis terhadap kecenderungan mengikuti gaya institusi dan praktik akuntansi Inggris di bidang akuntansi. Hal ini terutama berlaku saat ini ketika MASB mengevaluasi dan memperbarui standar akuntansi Malaysia ketika standar akuntansi Inggris berubah (UKEssays 2018a, b), yang menjadi lebih rasional sekarang karena standar tersebut telah menyatu. Contoh terbaru adalah publikasi Amandemen MFRS 16 Leases on Covid-19-related Rent Concessions setelah tanggal 30 Juni 2021, yang merupakan Amandemen IASB terhadap IFRS 16 Leases on Covid 19-Related Rent Concessions “yang bersifat kata demi kata” 30 Juni 2021.

Selain mematuhi persyaratan dalam Jadwal Kesembilan Undang-Undang Perusahaan asli tahun 1965, item-item dalam contoh akun perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh

praktik akuntansi Inggris dan Australia. Alasan pengaruh ini dapat dikaitkan dengan isomorfisme normatif dalam teori institusional karena anggota sebelumnya dilatih atau memiliki kualifikasi profesional dari badan akuntansi di Inggris atau Australia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tertentu cenderung mengadopsi praktik serupa yang digunakan di negara-negara tersebut.

Tekanan normatif terutama datang dari profesi akuntansi, melalui keanggotaan di Federasi Akuntan Internasional (IFAC). Malaysia diwakili oleh MIA dan MICPA, dan sebagai anggota, profesi ini berkomitmen untuk “melayani kepentingan publik dengan meningkatkan relevansi, reputasi, dan nilai profesi akuntansi global” (IFAC n.d.). Selain itu, faktor budaya, terutama agama, moral dan nilai-nilai memberikan pengaruh normatif terhadap lingkungan akuntansi di Malaysia. Dalam masyarakat multikultural dan multikoneksi ini, agama resmi adalah Islam. Contoh bagaimana lingkungan akuntansi terkena dampaknya adalah budaya Islam “tidak mendorong peminjaman dibandingkan dengan budaya barat yang bersandar pada peminjaman”.

Oleh karena itu, penerapan sistem perbankan ganda, di mana lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Ini termasuk dimensi hukum dan budaya dan pengaruh normatif profesi akuntansi.

3.6 KESIMPULAN

Pengembangan berkelanjutan dalam peraturan dan praktik akuntansi sangat penting bagi proses pembangunan bangsa di negara mana pun. Profesi akuntansi terus-menerus ditantang oleh lanskap ekonomi yang berkembang akibat pengaruh terkait bisnis seperti globalisasi dan digitalisasi dalam menyampaikan keahlian mereka dalam strategi ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan industri.

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ekosistem politik, ekonomi, dan pemerintahan Malaysia, dan secara khusus menekankan pada kerangka akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, bab ini mengisi kesenjangan dalam studi akuntansi global dengan menerapkan teori kelembagaan untuk menjelaskan lingkungan kelembagaan dan menghubungkannya dengan perkembangan peraturan dan praktik akuntansi Malaysia termasuk IAS/IFRS. Terakhir, bab ini menawarkan pengembangan praktik akuntansi yang mendalam dalam merespons pandemi global COVID-19.

BAB 4

PENTINGNYA CRM DALAM PERBANKAN

4.1 PENDAHULUAN

Dalam perbankan, Customer Relationship Management (CRM) memiliki peran yang sangat penting. CRM membantu bank untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan nasabah melalui pendekatan yang personal dan terarah. Dengan melacak interaksi dan riwayat transaksi nasabah, bank dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan relevan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah tetapi juga memperkuat loyalitas dan mengurangi tingkat pemutusan hubungan. Selain itu, CRM memungkinkan bank untuk mengumpulkan data nasabah secara sistematis dari berbagai sumber, seperti transaksi, interaksi layanan, dan umpan balik. Dengan menganalisis data ini, bank dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang perilaku dan preferensi nasabah, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan informasi yang terperinci tentang nasabah, bank dapat menyediakan layanan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk rekomendasi produk yang sesuai atau penawaran khusus. Selain itu, penggunaan CRM yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi operasional bank dengan mengelola informasi nasabah secara terpusat dan mengotomatiskan proses bisnis yang repetitif. Dengan demikian, CRM bukan hanya meningkatkan hubungan dengan nasabah tetapi juga mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis bank secara keseluruhan.

Menjelang akhir abad kedua puluh, tindakan liberal politik dan ekonomi, perkembangan teknologi, dan globalisasi menciptakan banyak perubahan di dunia. Evolusi baru di seluruh dunia ini juga telah mempengaruhi pendekatan manajemen pemasaran dan banyak sektor, termasuk perbankan, industri keuangan, dan aktor utamanya. Akibat revolusi teknologi, muncul saluran distribusi akses jarak jauh berbasis teknologi dan metode pembayaran baru. ATM telah menggantikan teller kasir; cabang bank sebagian besar telah memodifikasi telepon seluler dan pusat panggilan; Internet mengembalikan surat; kartu kredit, kartu bank, dan uang elektronik telah menggantikan transaksi tunai tradisional.

Dalam lingkungan yang baru, berkembang, terglobalisasi, dan kompetitif ini, strategi dan praktik pemasaran baru telah muncul untuk menangkap peluang dengan risiko paling rendah untuk bertahan dalam lingkungan persaingan global dan domestik yang penuh tantangan. Oleh karena itu, layanan keuangan, produk, dan proses bisnis baru pun bermunculan. Sambungan manajemen hubungan pelanggan ada dalam gambarannya, tepat pada saat ini. Untuk menjaring sebanyak mungkin nasabah yang tersedia di pasar sasaran, sudah menjadi prioritas bank untuk memberikan perhatian maksimal terhadap nasabahnya melalui (selanjutnya disebut CRM), yaitu strategi yang diterapkan secara luas untuk mengelola keuangan perusahaan. Interaksi dengan pelanggan, klien internal, dan prospek

penjualan. “Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengatur, mengotomatisasi, dan menyinkronkan proses bisnis terutama aktivitas penjualan tetapi juga untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan teknis.

Tujuan keseluruhannya adalah untuk menemukan, menarik, dan memenangkan klien baru, memelihara dan mempertahankan klien yang sudah dimiliki perusahaan, menarik kembali klien lama, dan mengurangi biaya pemasaran dan layanan klien. Mengukur dan menilai hubungan pelanggan sangat penting untuk menerapkan strategi ini. Pelanggan memiliki lebih banyak pengetahuan terkait dengan meningkatnya persaingan, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, serta dampak globalisasi.

CRM adalah strategi bisnis seluruh perusahaan yang harus dikelola dengan pendekatan pemasaran holistik di mana nilai yang diharapkan pelanggan dari suatu organisasi dan kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan harus dipertimbangkan secara mendalam oleh semua departemen dan pemangku kepentingan selain departemen pemasaran. Sikap ini akan membawa portofolio pelanggan yang permanen dan menguntungkan bagi institusi. Penggerak bisnis utama CRM adalah “meningkatkan masa hidup pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi”.

Pertama, pemasaran relasional, yang menjadi landasan CRM, ditinjau. Kemudian dibahas transformasi melalui pendekatan CRM dan pentingnya CRM bagi operasional perbankan. Tinjauan singkat tentang perkembangan sektor perbankan Turki dan beberapa studi empiris yang menekankan efek utama CRM pada pelanggan bank-bank Turki dan implikasinya terhadap masa depan dibahas dalam penelitian ini.

4.2 PEMASARAN HUBUNGAN

CRM muncul dalam literatur mengikuti filosofi pemasaran relasional dan diterima sebagai jantung dari pemasaran relasional. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita meninjau pemasaran relasional untuk memahami dasar konsep CRM dengan lebih baik. Berry (1983, p. 25), bapak “pemasaran hubungan,” mendefinisikannya sebagai “menarik, mempertahankan, dan dalam organisasi multi-layanan meningkatkan hubungan pelanggan.” Sejalan dengan hal tersebut, Berry (1983) menguraikan lima faktor strategis untuk memperkuat pemasaran relasional: Menciptakan layanan inti untuk menjalin hubungan pelanggan, menyesuaikan koneksi ke setiap pelanggan, meningkatkan layanan inti dengan manfaat tambahan, menetapkan harga layanan untuk membina pelanggan. loyalitas, dan melibatkan karyawan dalam kampanye pemasaran untuk membantu mereka memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Grönroos (1990, p. 138) memperluas definisi awal pemasaran relasional Berry (1983) dengan perspektif “hubungan pemangku kepentingan lain selain pelanggan, saling menguntungkan, menepati janji, dan profitabilitas.” Grönroos (1990, p. 138) mengklarifikasi pendekatan baru ini sebagai “pemasaran adalah membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra lainnya, demi keuntungan, sehingga tujuan pihak-pihak yang terlibat dapat dicapai melalui pertukaran dan pemenuhan timbal

balik janji.” Menepati janji sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan pelanggan.

“Membangun hubungan dapat dibagi menjadi dua pihak: Menarik pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan itu”. “Konsep pemasaran relasional telah diperluas hingga mencakup semua bentuk pertukaran relasional, bukan hanya hubungan yang berhubungan dengan pelanggan. Pemasaran relasional secara luas mengacu pada aktivitas pemasaran yang diarahkan pada pembentukan, pengembangan, dan pemeliharaan semua pertukaran relasional yang sukses”. Semua hubungan harus dapat diandalkan, dengan kata lain, hal ini harus didasarkan pada kepercayaan, yang merupakan “kesediaan untuk bergantung pada mitra pertukaran yang dipercaya”. Lebih jauh lagi, ada “pergeseran dari fokus transaksi ke hubungan” dalam pemasaran hubungan.

Interaksi berulang antara pelanggan dan penyedia layanan memfasilitasi pemasaran hubungan yang “memungkinkan penyedia layanan menjadi lebih berpengetahuan tentang permintaan dan kebutuhan pelanggan”. Pada titik ini, penekanan sebelumnya pada pemasaran internal menjadi menonjol. Ketika penyedia layanan berkinerja baik, pelanggan tetap bersama mereka. Namun demikian, pergantian karyawan yang tinggi, yang disebut “siklus kegagalan”, adalah musuh dari pemasaran hubungan dan manajemen hubungan pelanggan.

Hambatan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kualitas layanan dan retensi pelanggan tetapi juga profitabilitas. Karyawan jangka panjang yang mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dan mengetahui dengan baik profil serta sikap pelanggan akan membangun kepercayaan dan ikatan yang baik dengan pelanggan. “Bisnis apa pun yang mendapatkan kepercayaan pelanggannya, terkait dengan loyalitas mereka, akan selalu memiliki dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi selangkah lebih maju di pasar”.

Sementara itu, perusahaan harus berusaha mempertahankan pelanggan yang tepat dalam hal profitabilitas dan secara sukarela mengembangkan hubungan serta menemukan karyawan yang tepat untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama mereka. “Segmentasi berdasarkan analisis profitabilitas hubungan pelanggan merupakan prasyarat untuk keputusan retensi pelanggan”. Membangun basis pelanggan yang sangat loyal harus tertanam dalam strategi bisnis utama suatu perusahaan. Perusahaan harus beralih dari tujuan berorientasi transaksi jangka pendek ke tujuan membangun hubungan jangka panjang dengan pemasaran hubungan.

Selain itu, terdapat hubungan positif antara minat yang kuat terhadap kualitas layanan dan meningkatnya minat terhadap pemasaran relasional. Pemasaran relasional, “sebuah alternatif yang mahal dibandingkan pemasaran massal,” menjadi lebih layak karena perkembangan teknologi informasi yang cepat dan berturut-turut. Kemajuan teknologi informasi mendukung efisiensi hubungan sebagai:

- (i) Memantau perilaku pembelian dan hubungan keseluruhan dengan pelanggan yang ada.

- (ii) Melakukan individualisasi layanan, promosi, dan penetapan harga yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan.
- (iii) Menawarkan layanan berbeda yang terkoordinasi dan terintegrasi kepada pelanggan yang sama.
- (iv) Meningkatkan komunikasi timbal balik yang efektif antara perusahaan dan pelanggan.
- (v) Mengurangi kemungkinan kesalahan dan kerusakan layanan.
- (vi) Meningkatkan penawaran layanan inti dengan tambahan yang berharga.
- (vii) Menyesuaikan interaksi pelanggan yang diperlukan.

Gummesson mendefinisikan pemasaran relasional secara luas dalam konteks manajemen dan sosial yang komprehensif: "Pemasaran relasional total adalah pemasaran yang didasarkan pada hubungan, jaringan, dan interaksi, dengan mengakui bahwa pemasaran tertanam dalam manajemen total jaringan perusahaan, organisasi penjualan, pasar, dan masyarakat. Hal ini diarahkan pada hubungan win-win jangka panjang dengan pelanggan individu, dan nilai diciptakan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Ini melampaui batas-batas antara fungsi dan disiplin ilmu khusus." Definisi ini mencakup hubungan semua pihak di pasar.

Gummesson juga menyatakan tiga isu inti dalam hubungan pemasaran yang memperlakukan setiap pelanggan sebagai individu, kolaborasi dan penciptaan nilai, dan menjaga hubungan jangka panjang. Pertama, pemasaran relasional menangani setiap pelanggan sebagai individu, yang dicontohkan dalam ekspresi pemasaran satu-ke-satu. Pendekatan pemasaran tradisional lebih heterogen dibandingkan homogenitas. Kedua, Anda berkolaborasi dan bersaing di dalam dan di luar organisasi dalam pemasaran hubungan total. Mitra kolaborasi menciptakan nilai bersama. Akhirnya, semakin lama hubungan dengan pelanggan, semakin tinggi pula keuntungannya. Hasil ini terutama disebabkan oleh dua dampak loyalitas pelanggan: "Pengurangan biaya pemasaran ketika lebih sedikit pelanggan yang beralih; dan peningkatan pangsa pelanggan".

Lima strategi pemasaran hubungan Berry (2002) dapat digunakan "kombinasi atau secara bersamaan." Penjelasan lebih lanjut dari strategi tersebut adalah;

- (i) "Strategi layanan inti": Layanan inti yang ideal harus menarik pelanggan baru dengan memenuhi permintaan mereka dengan layanan berkualitas tinggi, membangun ikatan jangka panjang dengan banyak pihak, dan memberikan manfaat tambahan seiring berjalannya waktu;
- (ii) "Penyesuaian hubungan": Menemukan karakteristik dan persyaratan khusus pelanggan individual dan menggunakan semua petunjuk ini untuk menjawab kebutuhan mereka dengan menyesuaikan layanan sesuai dengan pelanggan tersebut akan memberikan peluang untuk mempertahankan mereka dalam portofolio alih-alih menyelinap ke pesaing. Kustomisasi akan meningkatkan pemrosesan data elektronik;
- (iii) "Peningkatan layanan" berarti menawarkan tambahan yang tidak tersedia di pesaing dan melakukan bisnis dengan pelanggan tetap, seperti perbankan swasta. (iv) "Penetapan harga hubungan": Harga unik dan menguntungkan yang ditawarkan kepada pelanggan seperti pengurangan bunga pinjaman untuk sisa pinjaman atau tanpa biaya kartu kredit atau transfer dana elektronik (EFT). (v) "Pemasaran internal":

Perusahaan jasa juga harus fokus pada pelanggan internalnya, yang merupakan karyawannya, selain pelanggan eksternal.

Pemasaran relasional akan meningkatkan produktivitas pemasaran. Mempertahankan pelanggan lama selalu lebih murah dibandingkan memperoleh pelanggan baru. “Semakin lama pelanggan bertahan dalam suatu hubungan, semakin menguntungkan perusahaan. Secara statistik dikonfirmasi bahwa nasabah yang telah bekerja di bank lebih dari lima tahun jauh lebih diuntungkan dibandingkan nasabah baru selama satu tahun. Kemitraan pemasaran konsumen dapat menghasilkan respons cepat dari para pemasar yang mengarah pada efisiensi yang lebih besar. Pemasaran relasional memungkinkan konsumen individu untuk bertindak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka serta fleksibilitas untuk memilih tugas mereka, sehingga menghasilkan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi.” Misalnya, “layanan perbankan dilakukan melalui ATM” atau aplikasi perbankan elektronik.

4.3 CRM SEBAGAI STRATEGI MANAJEMEN BARU

CRM adalah suatu teknik untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan secara bersamaan memahami, meramalkan, dan mengelola permintaan pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. CRM adalah metode kreatif untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. CRM mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok yang beragam karena kebutuhan yang berbeda untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada mereka.

CRM, yang merupakan “jantung pemasaran relasional, melibatkan perlakuan terhadap setiap pelanggan secara berbeda sesuai dengan karakteristik mereka, mengalihkan pemasaran dari pemasaran transaksional jangka pendek menuju pengembangan hubungan jangka panjang dengan perspektif nilai seumur hidup yang dibangun berdasarkan izin, kepercayaan, dan mendengarkan serta menanggapi pelanggan.

Pemasaran relasional “didasarkan pada membangun hubungan pembelajaran dengan setiap pelanggan, dimulai dari pelanggan Anda yang paling berharga. Ada empat langkah kunci untuk menerapkan program pemasaran one-to-one: Mengidentifikasi pelanggan Anda, membedakan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan menyesuaikan produk atau layanan Anda agar sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan”. Penerapan langkah pemasaran satu-ke-satu berpengaruh positif terhadap strategi pemasaran CRM dalam hal memenangkan kembali loyalitas, pencarian calon pembeli, dan penjualan silang.

Buttle dan Burton (2002) menjelaskan CRM sebagai menciptakan dan mengelola hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan klien-klien penting yang strategis. CRM adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk membuat hubungan yang langgeng dengan pelanggan melalui “pembentukan, pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi hubungan jangka panjang yang saling bernilai antara konsumen dan organisasi. Manajemen hubungan pelanggan yang sukses berfokus pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan dan dicapai dengan menempatkan kebutuhan ini di jantung bisnis dengan mengintegrasikannya dengan strategi organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan proses bisnis”.

Dalam CRM tradisional, “pelanggan bersifat pasif, merespons tindakan perusahaan terutama melalui perilaku pembelian mereka” (Reinartz et al. 2004). “CRM adalah proses memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang menguntungkan. CRM adalah strategi bisnis dalam memilih dan mengelola pelanggan untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang”. CRM adalah strategi untuk mengelola pelanggan dengan berfokus pada pemahaman mereka sebagai individu dan bukan sebagai bagian dari kelompok (Lambert 2010).

Malthouse dkk. (2013) menjelaskan CRM sebagai sebuah proses yang “mencakup manajemen hubungan yang sistematis dan proaktif saat hubungan tersebut bergerak dari awal (inisiasi) hingga akhir (terminasi), dengan eksekusi di berbagai saluran kontak yang berhadapan dengan pelanggan.” Di sisi lain, platform jejaring sosial telah memberikan peran aktif kepada pelanggan, bukan situasi pasif di masa lalu. Pelanggan dapat dengan mudah mengungkapkan dan mendistribusikan pendapat mereka kepada khalayak luas, dan perusahaan cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola pesan yang diterima pelanggan tentang produk/layanan mereka, selain memiliki lebih banyak informasi tentang produk pesaing yang tersedia di mana saja melalui perangkat seluler. Perusahaan dapat melibatkan konsumennya dalam berbagai proses di platform media sosial, mulai dari pengembangan produk hingga pembuatan video iklan.

Malthouse dkk. (2013, hlm. 271–275) menciptakan konsep “rumah CRM sosial”, yang terdiri dari CRM dua dimensi dan media sosial. CRM adalah komposisi dari “inisiasi hubungan (akuisisi), pemeliharaan (retensi), dan penghentian.” Pelanggan yang menjadi peserta aktif karena media sosial mungkin menghasilkan konten yang terkait dengan merek tertentu sehingga terlibat dengan perusahaan tersebut, dengan rentang kontinum dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi secara intensif. Malthouse dkk. (2013) merekomendasikan penentuan strategi CRM berdasarkan tingkat keterlibatan. Perhatian pelanggan dipengaruhi oleh titik kontak perusahaan.

Meskipun tujuan tradisional CRM adalah memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan (CLV) yang merupakan turunan dari hubungan dengan pelanggan, indeks CLV tidak lagi sepenuhnya menangkap kontribusi nilai pelanggan terhadap perusahaan; CLV juga mengukur nilai masa depan yang diperoleh perusahaan dari hubungannya dengan klien sejak munculnya media sosial. Selain CLV, nilai rujukan pelanggan (CRV), efek pengaruh pelanggan (CIE), nilai pengaruh pelanggan (CIV), dan nilai kepada pemangku kepentingan lainnya juga harus dipertimbangkan dalam CRM sosial. Struktur dan manajemen data dan teknologi informasi yang sukses juga merupakan prasyarat CRM sosial.

Tujuan utama CRM adalah mempertahankan pelanggan saat ini dengan meningkatkan loyalitas mereka dan memilih pelanggan baru yang memberikan profitabilitas lebih tinggi (Hansotia 2002). CRM telah berkembang menjadi komponen penting di banyak perusahaan dan organisasi. Organisasi dapat melayani pelanggan dengan lebih baik, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, dan mengelola hubungan mereka dengan pelanggan dengan menerapkan sistem CRM yang mengkategorikan sistem informasi organisasi. Untuk meningkatkan ekuitas nasabah, banyak bank telah mengumumkan rencana untuk

menciptakan dan mengelola kontak yang lebih penting dengan klien mereka. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kebahagiaan pelanggan, kondisi ini memerlukan penciptaan dan pemeliharaan hubungan pelanggan yang sukses..

Chary dkk. (2012) mengusulkan enam persyaratan bisnis penting untuk CRM berikut ini:

- (i) Menciptakan organisasi dan infrastruktur yang berfokus pada pelanggan.
- (ii) Mendapatkan gambaran akurat tentang kategori pelanggan.
- (iii) Menilai nilai seumur hidup pelanggan.
- (iv) Memaksimalkan profitabilitas setiap hubungan pelanggan.
- (v) Memahami cara menarik dan mempertahankan pelanggan terbaik.
- (vi) Memaksimalkan tingkat pengembalian kampanye pemasaran.

Agar manajemen CRM berhasil, bank harus mengumpulkan informasi pelanggan terkini dan menggunakan data tersebut untuk memutuskan kapan harus menyediakan item yang paling relevan. Selain itu, konsep CRM menciptakan kemampuan untuk memilih pelanggan yang menguntungkan, mengintegrasikan penawaran pelanggan melalui saluran, mempersonalisasi pesan pemasaran, dan meningkatkan kebijakan harga (Richards dan Jones 2008). “Jika bank memfokuskan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, proporsi konsumen yang meninggalkan bank berkurang 25% dan biaya untuk memperoleh nasabah baru juga berkurang”.

CRM adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Ia mengelola hubungan pelanggan dengan membangun pemahaman yang jelas (tahu), dengan mengembangkan layanan dan produk berdasarkan nilai tambah bagi kelompok sasaran (target), dan kemudian dengan memungkinkan penjualan aktual dan pengiriman layanan dan produk melalui pilihan yang dipilih. saluran (jual). Hal ini juga membangun hubungan pelanggan yang bertahan lama dan menguntungkan melalui layanan purna jual (service). Peluang cross-selling CRM memberikan peluang bagi bank untuk menarik pelanggan dengan melakukan cross-selling produk dan layanan, menambah produk dan layanan yang sudah ada.

“Titik kontak pelanggan dan karyawan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melayani sangatlah penting dalam CRM. Proses CRM terdiri dari tiga langkah: mengidentifikasi persyaratan sebagai langkah pertama dan menetapkan standar pelanggan sebagai langkah kedua. Akses pelanggan adalah langkah terakhir” (Odabas, 2000). CRM adalah “pendekatan berorientasi pelanggan dalam sebuah institusi yang diterima secara holistik dan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, daripada mengelola pekerjaan dengan menggunakan teknologi modern” (Civelek 2004). CRM dapat diringkas sebagai “menawarkan produk atau layanan yang tepat, kepada pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat, pada harga yang tepat, dan pada tempat yang tepat”.

CRM di Sektor Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan, menghimpun dana, dan mentransfer dana tersebut kepada individu, korporasi, dan pemerintah sebagai pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang membutuhkan dana. Bank-bank saat ini melakukan berbagai transaksi selain simpanan dan pinjaman, seperti “mendukung pelaksanaan

kebijakan kredit dan moneter dalam negeri, bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan, melakukan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga, menjaga aset berharga, menawarkan instrumen fasilitas pembayaran seperti sebagai kartu kredit dan kartu debit, bertindak sebagai perantara transaksi perdagangan luar negeri”.

Pentingnya konsep CRM semakin meningkat di sektor jasa. CRM merupakan alat penting untuk membangun ikatan relasional dengan pelanggan, mendapatkan kepercayaan mereka, loyalitas mereka secara berturut-turut, dan meningkatkan profitabilitas dengan membangun hubungan jangka panjang. “Nasabah merupakan aset paling berharga bagi sebuah bank yang bergerak di bidang jasa. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa bank tidak dapat mengabaikan sikap yang berpusat pada pelanggan dan melakukan operasi berbasis CRM” (Koçer 2017).

Produk keuangan tradisional seperti fasilitas pembayaran, alokasi limit kredit, kartu kredit, layanan asuransi, atau layanan perbankan elektronik sudah tidak memadai lagi bagi nasabah bank modern. Oleh karena itu, bank harus berinovasi dan menawarkan produk-produk baru yang ramah nasabah untuk memudahkan hidup nasabah. Konsekuensinya, sistem perbankan saat ini harus meningkatkan produknya dengan mempertimbangkan nasabah individu dan korporasi (Demirel 2007).

Struktur nasabah yang terus berkembang di dunia global telah memaksa bank untuk melakukan reorganisasi dan meninjau ulang strategi mereka dengan pandangan yang berpusat pada nasabah. Bank mulai melakukan pendekatan pemasaran berorientasi pelanggan, pemasaran berbasis data, dan pemasaran hubungan pada akhir abad terakhir. CRM muncul sebagai penyelamat bagi bank. Semua bank di pasar Turki harus beralih dari produksi layanan massal dan beralih ke manajemen hubungan pelanggan yang berfokus pada permintaan individualis setiap pelanggan.

Oleh karena itu, muncullah konsep layanan swasta atau layanan yang dibuat khusus, dan nasabah telah bertransformasi menjadi nasabah swasta bagi sebagian besar bank sejak paruh kedua tahun 1990an. “Manajemen hubungan pelanggan bertujuan untuk melampaui kepuasan pelanggan dan memberikan nilai kepada pelanggan” (Yücel 2013). “CRM mendorong semua manajer dan karyawan bank untuk bertindak berorientasi pada pelanggan dan melayani pelanggan dengan mengembangkan produk dan layanan melebihi harapan mereka dengan dukungan teknologi informasi yang mengarah pada aktivitas bank” (Girginer dan Yılmaz 2007).

Laketa dkk. (2015, p. 241) menjelaskan secara garis besar pentingnya CRM bagi sektor perbankan sebagai berikut: Konsep CRM adalah kecenderungan sektor perbankan untuk membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan nasabah untuk memberikan nilai bagi nasabah dan bank. Konsep ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, melakukan segmentasi, mengkomunikasikan dan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah secara individual. Dalam lingkungan bisnis saat ini, bank bertujuan untuk mengidentifikasi nasabah dan menyesuaikan penawaran untuk memenuhi kebutuhan nasabah guna memaksimalkan keuntungan. Dengan menggunakan teknologi modern, CRM menjadi metode untuk mempertahankan struktur yang ada dan mengembangkan basis

pelanggan berkualitas tinggi. Hal ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran melalui pemahaman yang lebih baik terhadap seluruh basis nasabah, pemahaman kebutuhan dan sikap nasabah, serta pertimbangan yang lebih efisien atas profitabilitas dan nilai tambah yang dimiliki setiap nasabah bagi bank.

Sementara itu, Dwyer dkk. (1987) merekomendasikan untuk mempertimbangkan kehidupan hubungan pelanggan, yang memiliki tiga fase inti: akuisisi pelanggan, peningkatan pelanggan, dan pemulihan pelanggan. Hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan menciptakan kekebalan pelanggan terhadap persaingan. Hubungan pelanggan-bank terjalin selama fase akuisisi. Dalam kampanye CRM, karyawan layanan pelanggan membantu pelanggan menjadi akrab dengan produk dan layanan, sehingga meningkatkan keakraban pelanggan. Pemberdayaan adalah alat yang efektif untuk berhasil mengendalikan interaksi pelanggan individu karena sektor jasa memiliki tingkat integrasi dan interaksi yang tinggi dalam hal partisipasi kontak.

Karena memberikan peluang untuk mempertahankan klien, pemulihan layanan sangatlah penting. Misalkan konsumen telah hilang tetapi masih diinginkan. Dalam hal ini, penawaran pemulihan (seperti pembatalan harga inisiasi atau pengurusan formalitas yang diakibatkan oleh peralihan) atau layanan bernilai tambah dapat diberikan kepada pelanggan. Alasan utama bagi bank untuk menyesuaikan proses bisnisnya dengan kebutuhan nasabah adalah, mempertahankan nasabah yang ada, menarik nasabah baru, mendorong nasabah untuk bekerja sama secara kuat dengan bank, “memberi informasi kepada nasabah tentang portofolio produk, layanan, dan saluran komunikasi, untuk meningkatkan keuntungan. atau mencegah kerugian” (Laketa et al. 2015).

Tujuan utama CRM dapat diringkas sebagai: “Meningkatkan keuntungan karena peningkatan kepuasan pelanggan dan aktivitas cross-selling; pengurangan biaya dalam kegiatan penjualan dan distribusi; pengurangan biaya dukungan pelanggan; perilaku pembelian pelanggan yang berkelanjutan; fokus pada pengelolaan hubungan pelanggan daripada manajemen produk” (Demirel 2006). Meningkatkan loyalitas pelanggan akan menjadi dukungan kuat bagi institusi untuk mencapai tujuan tersebut. CRM memiliki enam dimensi: “Berkomunikasi dengan pelanggan, loyalitas pelanggan, interaksi dengan pelanggan, gudang data pelanggan, dan nilai yang disampaikan kepada pelanggan” (Demirel 2007)

Loyalitas adalah “kesediaan pelanggan untuk menjaga hubungannya dengan perusahaan atau merek; itu dapat diterima sebagai komitmen pelanggan” (Koçer 2017). Loyalitas nasabah dapat didefinisikan sebagai pembelian kembali produk atau layanan bank di masa depan atau menjadi pelanggan bisnis tersebut tanpa mempertimbangkan produk, layanan, dan merek yang bersaing, dan terus dipertahankan sebagai klien dari bank yang sama. Loyalitas memiliki dimensi perilaku, relatif (attitudinal), dan kognitif (Gümüş,boğça 2016). Dimensi loyalitas perilaku mengacu pada fakta bahwa konsumen secara konsisten memilih layanan atau merek dan menunjukkan perilaku pembelian berulang. Jones dan Taylor (2007) menjelaskan dua dimensi relatif lainnya (sikap) dan kognitif sebagai berikut:

Sikap relatif (evaluasi afektif terhadap merek) telah dioperasionalkan dalam berbagai cara, seperti: “Menganggap penyedia layanan sebagai pilihan pertama di antara alternatif,

kesediaan untuk merekomendasikan, kekuatan preferensi, perasaan keterikatan terhadap suatu produk, layanan, atau organisasi dan perilaku altruistik seperti membantu perusahaan jasa dan pelanggan lainnya.” Dimensi kognitif di mana loyalitas didasarkan pada evaluasi sadar terhadap atribut merek atau penghargaan dan manfaat yang terkait dengan patronase mengarahkan konsumen untuk mempertimbangkan penyedia layanan ini dengan mengorbankan yang lain.

Operasionalisasi elemen kognitif loyalitas layanan memiliki beberapa bentuk, termasuk top of mind, pilihan pertama, toleransi harga, pertimbangan eksklusif (yaitu, mempertimbangkan hanya satu penyedia layanan ketika membutuhkan jenis layanan ini), dan identifikasi dengan layanan tersebut. penyedia layanan (yaitu, menganggap penyedia layanan sebagai perpanjangan dari diri seseorang dan mengakui hal ini dengan mengacu pada "penyedia layanan saya", atau dengan representasi kolektif seperti "kami" dan "kami"). "Memastikan loyalitas pelanggan membawa peningkatan kepuasan dan retensi pelanggan bagi suatu organisasi. Selain itu, pelanggan setia memberikan rekomendasi positif tentang bisnis kepada orang-orang di sekitar mereka" (Avciokurt dan Köroglu 2006), menciptakan efek dari mulut ke mulut (WOM).

Proses CRM yang mapan, terorganisir, dan terlaksana akan meningkatkan kepuasan klien, retensi, loyalitas, dan profitabilitas bank. Mengadopsi perkembangan teknologi terkini adalah landasan dari proses CRM yang sukses. Selain itu, tidak hanya pelanggan eksternal tetapi juga pelanggan internal (karyawan) juga harus diperhatikan untuk memperoleh kinerja pelayanan yang tinggi. Dari atas hingga bawah, seluruh pemangku kepentingan, manajer, dan karyawan telah menjadi orang-orang yang sadar akan pelanggan. "Evolusi dalam teknologi informasi, pasar global, dan pertumbuhan saluran transaksi keuangan, pasar yang bergejolak, peningkatan permintaan pelanggan, pasar yang canggih, dan pelanggan" (Rathod 2012) menyebabkan bank memikirkan kembali strategi bisnis mereka dan mengembangkan pendekatan manajemen baru dengan pandangan yang berpusat pada pelanggan, hingga akhir abad terakhir.

Memahami berbagai kebutuhan konsumen pada berbagai tahap sangat penting untuk keberhasilan hubungan antara nasabah dan bank. Kemampuan bank untuk menanggapi kebutuhan konsumen membuat nasabah merasa dihargai sebagai individu yang unik dan bukan hanya sebagai bagian kecil dari basis nasabah yang besar. Membangun hubungan nilai simbolis jangka panjang memerlukan kesadaran akan harapan konsumen mengenai tingkat pemberian layanan dan kualitas produk. Manajemen mencakup semua inisiatif pemasaran yang dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara, menjunjung tinggi, dan mengelola hubungan yang sukses dengan audiens sasaran. Proses CRM mencakup empat fase: (i) Penentuan preferensi dan nilai pelanggan: Memahami segmen dengan baik. (ii) Akuisisi pelanggan: Menentukan solusi untuk menjangkau segmen sasaran. (iii) Pelanggan induk: Mempertahankan pelanggan dalam portofolio dengan menjawab permintaan mereka dengan mudah. (iv) Memperkuat ikatan dengan klien: Menjaga kontak dengan klien dengan menawarkan nilai-nilai ekstra yang menghalangi mereka untuk beralih ke pesaing.

CRM memberi bank peluang asimilasi dan penyimpanan informasi pelanggan, analisis profitabilitas, pemberdayaan upaya pemasaran, kontribusi pelanggan baru, manajemen hubungan yang lebih efektif, dan retensi pelanggan yang lebih lama. Erdog̃du merangkum CRM dan data mining sebagai berikut: Perkembangan teknologi telah menyebabkan restrukturisasi banyak definisi, seperti bisnis, perdagangan, dan profitabilitas di sektor keuangan. Terutama bank, yang memiliki jutaan nasabah dan miliaran data mentah milik nasabah tersebut, semakin mementingkan solusi berorientasi TI. Menyimpan miliaran data mentah juga memerlukan tanggung jawab yang luar biasa. Konsep dan terminologi baru, seperti data mining, juga muncul karena penyimpanan dan proses data yang sangat besar.

Penambangan data mengekstrak informasi berharga dari tumpukan data yang ada dan membuat keputusan industri perbankan yang lebih baik. Berbagai data dalam database perlu dihimpun dan dipersiapkan dengan baik agar data dapat dikumpulkan dan tercipta tempat penyimpanan data; penambangan data memungkinkan ekstraksi berlian informasi dari data historis dan memprediksi konsekuensi dari situasi masa depan. Dalam hal ini, data mining membantu mengoptimalkan keputusan bisnis, meningkatkan nilai setiap pelanggan dan komunikasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. CRM yang didukung data mining akan memberikan keunggulan kompetitif yang baik bagi bank di sektor ini. Manajemen hubungan pelanggan terutama berkaitan dengan mendengarkan pelanggan, permintaan mereka, dan harapan mereka terhadap bank. Setelah penjelasan mengenai ciri-ciri tersebut, strategi umum dapat muncul.

Mengelompokkan klien ke dalam segmen mikro akan diperlukan untuk memahami kebutuhan mereka dan menawarkan nilai-nilai yang diharapkan serta produk dan layanan yang disesuaikan, sehingga mencapai profitabilitas yang tinggi. Perkembangan teknologi sebagai senjata ampuh akan selalu memudahkan pemahaman pelanggan, memberikan respon yang cepat, dan mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi permintaan mereka secara bersamaan. CRM adalah komposisi dimensi hubungan teknis dan manusia. Karyawan bank dilatih untuk bertindak sadar akan nasabah dan menggunakan gudang data secara efektif. Semua upaya ini membuat bank tidak hanya menghubungi banyak nasabah secara pribadi namun juga menawarkan produk yang dibuat khusus kepada mereka tetapi juga gaya operasi yang hemat biaya dengan pengurangan biaya karena interaksi yang terperinci dan penuh kepercayaan dengan pelanggan dan dengan meningkatkan keuntungan karena peningkatan loyalitas klien.

CRM harus diterapkan di bidang operasional, analitis, dan organisasi bank. “CRM Operasional menyediakan sumber informasi pelanggan yang unik dan mendukung penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. CRM Analitik dilakukan melalui pengumpulan, pemrosesan, dan sistematisasi data yang digunakan dalam CRM. Terakhir, CRM organisasi menetapkan interaksi pelanggan melalui saluran komunikasi yang tepat. Keberhasilan CRM bergantung pada kualitas integrasi ketiga bidang ini” (Laketa dkk).

Situasi Saat Ini dan Implementasi CRM di Sektor Perbankan Turki

“Awal kegiatan perbankan dimulai pada tahun 3500 SM. Beberapa transaksi keuangan seperti perbankan muncul pada peradaban Sumeria, Babilonia, dan Yunani kuno.

Penemuan uang dan perkembangan maritim dan perdagangan memaksa dimulainya operasi perbankan. Pada awal tahun 1900-an, perbankan modern muncul. Perbankan, yang dimulai dengan bank asing dengan deklarasi Tanzimat pada Periode Ottoman, mendapatkan momentum pada Periode Republik di Türkiye” (Yetiz 2016).

Perkembangan sistem perbankan Turki sejak masa republik diklasifikasikan (Kaya dan Arslantürk Çöllü 2020): “Periode Bank Nasional (1923–1933), Periode Bank Umum (1933–1945), Periode Bank Swasta (1945– 1960), Periode Perencanaan (1960–1980), dan Periode Liberalisasi Perbankan dan Internalisasi (1980–2004).” Perkembangan yang berkelanjutan di bidang teknologi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan signifikan di seluruh dunia, termasuk pada industri keuangan dan aktor utamanya, perbankan. Bank-bank Turki juga telah mengadopsi semua perubahan dan perkembangan global dalam hal perspektif teknologi, manajerial, dan hukum.

Bank-bank Turki umumnya mengadopsi aturan yang mengatur pasar perbankan internasional yang disebut Basel 1, yang dideklarasikan oleh Bank for International Settlements (BIS). Türkiye bergabung dengan Komite Basel pada tahun 2002 dan secara aktif mempersiapkan rekonsiliasi Basel II, yang terdiri dari tiga pilar: “Kecukupan modal minimum, proses peninjauan pengawasan, dan disiplin pasar. Pilar-pilar ini bertujuan untuk menstandarisasi kondisi operasional dan transaksi bank. Selain itu, konsensus Basel II mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kondisi pengukuran dan manajemen risiko yang berubah dengan cepat dan terus mendukung sistem keuangan untuk beroperasi dalam kondisi yang lebih aman. Sistem perbankan Turki juga beralih ke Kriteria Basel II, mulai Juli 2012” (Kaya dan Arslantürk Çöllü 2020).

“Sistem perbankan Turki tidak tertinggal dari sistem perbankan negara-negara maju di UE atau negara-negara lain dalam menerapkan peraturan dan mengikuti inovasi tanpa penundaan. Misalnya, Turki lebih dekat dibandingkan banyak negara dalam hal kepatuhan terhadap kriteria Basel I, II, dan III” (Sümer 2016). Perbankan adalah sektor penting dan menguntungkan yang berhubungan dengan jutaan orang dan memiliki volume transaksi miliaran Lira Turki di Turki (Erdog̃du 2019).

“Saat ini, sektor perbankan Turki berada di bawah payung dewan pengawas dan pengatur independen; dengan struktur keuangan yang kuat, kecukupan modal yang tinggi, audit internal dan manajemen risiko yang efektif, tenaga kerja yang berkualitas, jenis transaksi dan layanan modern yang ditawarkan, penggunaan teknologi canggih dan kualitas layanan yang unggul membawa kemampuan untuk bersaing dengan sektor perbankan di negara-negara maju.” (Sümer 2016). “Sebagai hasil dari tindakan pencegahan dan peraturan yang dibuat, terutama setelah krisis tahun 2001, sektor perbankan Turki memiliki struktur yang kuat dan memiliki teknik manajemen modern dengan produk dan layanan berkualitas tinggi” (Kaya dan Arslantürk Çöllü 2020).

Produk dan layanan baru mulai ditawarkan ke pasar konsumen, seperti pengembangan layanan perbankan ritel, anjungan tunai mandiri, pinjaman konsumen, kartu kredit dan tunai, perbankan rumah dan kantor, serta mobile banking. “Masyarakat diperkenalkan dengan produk perbankan baru, seperti sewa guna usaha, anjak piutang, dan

transaksi forward dan swap, pada periode republik terakhir” (Sümer 2016). Bank-bank Turki telah menerapkan manajemen hubungan pelanggan sejak tahun 1990-an. Mereka telah melakukan investasi teknologi pada perangkat lunak CRM, gudang data, saluran elektronik, dan program pelatihan pelanggan internal.

Manajemen pemasaran yang efektif; manajemen kampanye; inisiatif penjualan silang untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan produk yang tepat, melalui saluran yang tepat, pada waktu yang tepat; peningkatan produktivitas penjualan dalam hal perwakilan dan proses penjualan; peningkatan profitabilitas; pengumpulan yang akurat dan analisis serta evaluasi data nasabah yang tidak memihak adalah jalan bagi bank untuk mencapai profitabilitas jangka panjang dengan memangkas biaya dan waktu transaksi sekaligus meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah. Jika kinerjanya bagus, semua aktivitas ini akan mendorong bank untuk menawarkan produk yang dirancang khusus kepada nasabahnya (Savas,çı dan Tatlıdil).

“Bank di Türkiye menerima persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk dapat memproses data tersebut, sebagai dasar berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagai hasil dari ikatan kuat yang dibangun berdasarkan CRM yang sukses, nasabah berbagi informasi rahasia mereka dengan perwakilan bank baik secara sadar atau tidak sadar.” Mengklarifikasi layanan nasabah sangat penting bagi bank untuk mengembangkan strategi baru. Oleh karena itu, sektor perbankan telah melakukan investasi yang signifikan dalam mengukur persepsi layanan nasabah. Sektor perbankan saat ini masih berorientasi pada pelanggan. Mereka terus memantau kepuasan pelanggan dan secara berturut-turut meningkatkan layanan mereka. “Di abad ini, bank harus memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam menyimpan data mereka dengan aman guna mempertahankan loyalitas jangka panjang sebagai prasyarat keberhasilan CRM” (Erdog˘du 2019).

Dalam penyelidikan empiris oleh Koçer (2017), “pengaruh positif CRM terhadap loyalitas pelanggan diamati.” Sebagian besar pelanggan yang menghadiri penyelidikan tersebut menggarisbawahi harapan mereka dalam menerima layanan, termasuk dimensi layanan Parasuraman et al. (1985) yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Para peserta menekankan bahwa bank atau perwakilannya harus mempertimbangkan permintaan dan saran khusus mereka. Penelitian ini menguraikan poin-poin berikut (Koçer 2017):

- (i) Bank harus mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan nasabahnya dan menjawabnya secara tepat, pada waktu dan cara yang tepat.
- (ii) Bank harus membuat nasabahnya merasa berkesan dengan layanan pribadi atau paket layanan untuk permintaan dan kebutuhan individualistis mereka.
- (iii) Bank hendaknya membuat database yang memuat informasi nasabah terkini dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh teknologi modern.
- (iv) Bank harus proaktif dan menganalisis potensi nasabah di sektornya, mengantisipasi kebutuhan segmen sasaran, dan membuat perbedaan dibandingkan pesaingnya dengan bauran layanan baru.

- (v) Seluruh organisasi harus memahami pentingnya CRM, dan semua pemangku kepentingan harus mengikutinya dengan ketat.
- (vi) Hubungan dengan pelanggan tidak hanya harus dijaga pada tingkat bisnis, tetapi hari-hari khusus pelanggan, situasi khusus, dan nilai-nilai moral juga harus dibagikan kepada mereka.
- (vii) Kepercayaan dan loyalitas nasabah yang tinggi harus dikumpulkan, dan tindakan yang diperlukan harus diambil untuk mempertahankan mereka dalam portofolio bank.
- (viii) Bank harus menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah untuk meningkatkan profitabilitas mereka dalam jangka panjang.
- (ix) Manajer bank harus mempertimbangkan peningkatan produktivitas karyawan.
- (x) Manajer bank juga harus memperhatikan kepuasan staf nasabah internalnya untuk mendidik mereka agar dapat menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah.

Penelitian empiris lainnya pada tahun 2007 menekankan “korelasi positif antara nilai yang diberikan kepada pelanggan dan loyalitas mereka. Hubungan positif yang kuat muncul antara komunikasi dan interaksi pelanggan” (Demirel 2007). Hasil penelitian lain menyatakan “Dimensi CRM berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Semua dimensi CRM berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan pelanggan. Peningkatan dalam dimensi CRM apa pun akan meningkatkan loyalitas klien” (Demirel 2007).

Pada Oktober 2022, tiga puluh dua bank ritel, enam belas bank investasi dan pembangunan, dan tiga bank partisipasi berada di bawah Badan Pengatur dan Pengawas Perbankan (BDDK) di Türkiye 65% dari bank ritel ini menawarkan layanan swasta kepada klien mereka dengan nama produk yang berbeda seperti perbankan one-to-one, perbankan premium, perbankan swasta, dan manfaat luar biasa sebagai sikap manajemen hubungan pelanggan.

4.4 KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Sektor perbankan telah menjadi salah satu sektor utama di Türkiye, seperti halnya di banyak negara di dunia. “Pembentukan Dewan Pengawasan dan Regulasi Perbankan pada tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi bank-bank Turki. Sektor perbankan Turki telah direstrukturisasi dengan peraturan dan audit yang diperlukan serta mencapai rasio penuh yang cemerlang, menjadikannya studi kasus yang penting dan sukses di Eropa. Tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan Turki akan mempertahankan posisi kuat ini di tahun-tahun mendatang” (Erdog̃du 2019, hal. 93).

Bank-bank yang beroperasi di Türkiye telah berkontribusi terhadap tren global yang cepat berubah dan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjadi aktor yang aktif dan kuat (Cesur dan Duranlar 2005). Dengan tren yang berubah ini, mereka telah beralih ke struktur organisasi yang berfokus pada permintaan, kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan, berupaya untuk terus meningkatkan produk dan layanan untuk mencapai keuntungan jangka panjang dengan klien yang berumur panjang. “Bank harus menerima CRM sebagai gaya hidup” dalam operasi mereka, seperti yang dinyatakan Kotler (2003, hal. 36).

Para deposan tradisional Turki pada tahun 1970-an kini menjadi klien perbankan swasta milenium (Law et al. 2003) yang memiliki pengetahuan luas mengenai peraturan dan produk keuangan domestik dan global. Pelanggan yang canggih saat ini telah memaksa bank untuk beroperasi dengan CRM untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan nilai yang diharapkan. Di sisi lain, bank-bank Turki secara ketat mengikuti standar dan persyaratan perbankan internasional untuk menjaga posisi mereka yang kuat, kompeten secara finansial, dan baik di arena keuangan.

Studi empiris sebelumnya telah menggarisbawahi pengaruh positif CRM terhadap loyalitas nasabah bank Turki. Loyalitas yang lebih tinggi berarti profitabilitas yang lebih tinggi dan berumur panjang. Oleh karena itu, bank harus menjaga sikap CRM dengan mengikuti perkembangan dan produk baru di pasar untuk melakukan adaptasi yang diperlukan guna mempertahankan pelanggan setia dalam portofolionya dan operasinya yang menguntungkan.

Manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah konsep yang harus diperhatikan oleh dunia bisnis untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan dalam perekonomian global. Perusahaan dan bank akan mengungguli pesaing mereka dan mencapai tujuan mereka dengan menawarkan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan mereka. Dengan aktivitas manajemen hubungan nasabah yang progresif, bank yang membuat nasabahnya merasa berharga dan penting akan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang tinggi dan berat yang ada dan akan datang.

Studi konseptual ini menekankan dampak manajerial CRM dalam pemasaran daripada mengevaluasinya hanya sebagai alat teknologi. Dalam pendekatan pemasaran modern, tujuannya adalah keuntungan jangka panjang suatu bisnis yang berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, CRM adalah metode yang paling tepat untuk mencapai target tersebut, terutama di sektor jasa dan perbankan, yang merupakan aktor utama di bidang ini. Karya ini mencakup tinjauan berharga tentang pemasaran relasional dan sumber kehidupannya CRM. Laporan ini menyatakan pentingnya hal ini bagi sektor perbankan dan dampak langsung dan positifnya terhadap nasabah bank-bank Turki.

BAB 5

SEJARAH, EVALUASI, DAN PERAN DALAM PERBANKAN

5.1 PENDAHULUAN

Praktik akuntansi dalam perbankan Indonesia memiliki sejarah yang meliputi perkembangan dari praktik sederhana menjadi lebih terstruktur seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara ini. Evaluasi terhadap praktik akuntansi dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan efektivitas penggunaannya dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam peranannya dalam perbankan, praktik akuntansi memainkan peran penting dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan internal dan eksternal. Selain itu, praktik akuntansi yang efektif juga membantu bank dalam memantau kesehatan keuangan mereka, mengelola risiko dengan lebih baik, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, praktik akuntansi memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan industri perbankan di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Sulit untuk menentukan tanggal pasti kapan perbankan muncul. Bank atau lembaga serupa bank lainnya selalu ada sepanjang sejarah umat manusia, meskipun tidak dalam bentuknya yang sekarang. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat indikasi bahwa banyak transaksi keuangan terjadi pada tahun 8000 SM, terdapat indikasi bahwa Hammurabi memerintah pada tahun 1800. SM suku bunga yang diatur yang berlaku untuk pinjaman, yaitu kredit. Perbankan, seperti yang kita kenal sekarang, dikembangkan di Italia utara pada abad keenam belas dan meluas ke seluruh Eropa. Hasilnya, perbankan modern memiliki sejarah sekitar 400 tahun.

Selanjutnya kita akan melihat pembahasan tentang Tren serupa dengan yang terlihat di negara-negara lain juga dapat dilihat dalam sejarah perbankan Turki. Dalam struktur organisasi Kekaisaran Ottoman, perbendaharaan, percetakan uang, penukaran uang, bazaar tertutup, yayasan keuangan, serikat pekerja, dan bankir Galata bertanggung jawab atas kegiatan keuangan seperti pengawasan pasokan uang, transaksi pengkreditan, pengelolaan emas negara dan mata uang asing. cadangan, pembayaran dalam dan luar negeri. Bank-bank asing didirikan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Kekaisaran Ottoman selama Perang Krimea, dengan hak istimewa diberikan kepada Inggris dan Perancis. Orang asing melakukan transaksi perbankan skala besar ke periode awal Republik.

Meskipun kepemilikan modal asing di sistem perbankan selalu menimbulkan reaksi, masalah ini telah dibahas dalam Kongres Ekonomi yang diadakan di İzmir pada tahun 1923, dan disepakati untuk mendirikan Bank Sentral nasional. Bank Sentral nasional didirikan pada tahun 1931, diikuti dengan pendirian dan keterlibatan beberapa bank Turki. Terlepas dari dampak Depresi Besar tahun 1929, Perang Dunia II, perubahan sistem moneter dunia, pembentukan serikat keuangan dan ekonomi internasional, guncangan harga minyak, dan krisis keuangan yang sering dihadapi, proses perkembangan perbankan Turki yang paling

menonjol sudah ada sejak tahun 1929. Periode Republik. Perusahaan ini telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1980an, ketika kecenderungan globalisasi dan liberalisasi keuangan meningkat, dan telah menjadi salah satu bisnis industri terpenting yang mendukung pembangunan ekonomi.

Pada masa republik, upaya dilakukan untuk mendongkrak industri dan perbankan nasional. Bank didirikan untuk memberikan dukungan negara kepada industri apa pun atau untuk mendapatkan fasilitas keuangan bagi kelompok industri besar untuk menjalankan aktivitasnya, sementara partisipasi asing dalam sistem perbankan Turki meningkat setelah tahun 1980. Pada awal periode ini, ketika globalisasi semakin cepat dan deregulasi keuangan diberlakukan. Saat diberlakukan, hanya empat bank yang memiliki saham modal asing, namun saat ini hampir seluruh bank dalam sistem tersebut memiliki saham asing. Pada masa ini, kebijakan perekonomian negara berubah secara dramatis dan penerapan ekonomi liberal. Reformasi signifikan dilakukan segera setelah krisis keuangan tahun 2001. Perubahan tersebut memperkuat perekonomian dan sektor keuangan Turki serta membantu proses mengintegrasikan Turki ke pasar global.

Industri perbankan adalah komponen paling mendasar dan signifikan dari sistem perbankan Turki. Mengikuti gambaran umum sejarah perbankan global, studi ini secara khusus merujuk pada perkembangan di Turki berdasarkan sejarah perbankan modern, dengan penjelasan mengenai proses yang terjadi saat ini dalam struktur yang rumit, supranasionalisasi, dan berfokus pada teknologi, krisis yang dialami, dan reformasi yang dilaksanakan. Studi tentang sejarah perbankan akan memberikan kontribusi pada pengetahuan yang lebih baik tentang institusi perbankan modern saat ini, sarana dan aturan, sistem dan pasar keuangan, serta proses pembangunan. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian. Setelah pengenalan, konsep dasar, dan gambaran umum sistem keuangan Turki saat ini, sejarah perbankan dunia dianalisis. Sejarah perbankan digambarkan dengan memisahkannya ke dalam periode-periode berbeda. Dalam kerangka ini, sejarah perbankan Turki dieksplorasi dengan cara yang mencakup periode pra-republik dan pasca-republik. Kajian ini mencakup klarifikasi mengenai perkembangan sektor perbankan Turki, serta evaluasi umum dan bagian kesimpulan yang menyimpulkan kajian.

5.2 KONSEP DAN DESKRIPSI PERBANKAN

Jika dilihat dari kegiatan dan fungsinya secara umum, bank dapat didefinisikan sebagai *“lembaga yang mengakui simpanan untuk dan atas namanya, atau tanpa mengakui dana yang dihimpun melalui rekening penyertaan, atau melakukan kegiatan pinjaman dan perantara keuangan terutama melalui sumber yang mereka sediakan. pasar uang dan modal nasional atau internasional dengan berutang dan memanfaatkan pinjaman dari ekuitas mereka.”* Bank adalah entitas kunci yang mengoperasikan sistem keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam definisi tersebut. Bank berkembang pesat selama berabad-abad dan berkembang menjadi organisasi canggih yang kita miliki saat ini. Mereka adalah lembaga keuangan organisasi yang menjalankan aktivitasnya di seluruh dunia, menyediakan barang

dan jasa keuangan melalui modifikasi terus-menerus dan penggunaan kemajuan teknologi yang paling cepat dan efisien.

Dalam kerangka perekonomian, bank merupakan entitas terpenting dalam proses intermediasi keuangan, termasuk menyediakan dana tidak aktif bagi perekonomian, meningkatkan efisiensi, memasok uang kertas dan uang fidusia kepada perekonomian, dan menyediakan layanan pembayaran kepada unit-unit ekonomi. Fungsi bank yang paling penting dalam hal ini adalah manajemen yang efektif atas kebijakan dan portofolio kredit, instrumen pembayaran, portofolio sekuritas, likuiditas, dan risiko. Pasokan pinjaman bank terkait dengan kebijakan moneter.

Bank adalah lembaga moneter paling penting dalam masyarakat, dan mereka memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan moneter dan penentuan jumlah uang beredar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi dan keuangan. Struktur permodalan bank dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, termasuk kepemilikan perseorangan, namun dalam bentuk yang umum dikenal, struktur tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok.

- (a) **Bank Sentral:** Bank Sentral bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan uang dan nilai tukar, mengeluarkan uang atas nama Majelis Agung dan peredaran uang, menjaga nilai mata uang, menyediakan stabilitas keuangan, membangun dan mengelola sistem pembayaran untuk mentransfer dana dan surat berharga dengan cara yang aman dan tepat waktu, dan merupakan lembaga yang paling penting dalam hal operasi ekonomi yang sehat.
- (b) **Bank Komersial:** Mereka juga dikenal sebagai bank simpanan, dan mereka adalah lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada nasabah dan investor menggunakan dana yang dikumpulkan dari rekening simpanan, atau mereka menerbitkan surat berharga di pasar lokal dan internasional, atau mereka mendapatkan keuntungan dari sekuritas. Secara umum, bank komersial memperoleh penghasilan dari bunga yang mereka bayarkan atas simpanan yang dikumpulkan dan pendapatan yang dihasilkan dari suku bunga pinjaman yang mereka tawarkan (setelah dikurangi margin bunga). Saat ini, sebagian besar jumlah uang beredar disediakan oleh uang fidusia yang diciptakan oleh bank-bank komersial. Jika bank simpanan (komersial) gagal mengembalikan modal dan bunga pada rekening yang ditiptkan, dijamin bahwa Tabungan dan Dana Penjaminan akan membayar sebagian dari modal dan bunga tersebut. Tabungan dan Dana Asuransi (LPS) menjamin sebagian pembayaran modal dan bunga untuk Tabungan Komersial yang dimiliki oleh perorangan.
- (c) **Bank Penyertaan:** Merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatannya dengan menghimpun dana melalui rekening giro dan penyertaan berdasarkan penyertaan untung-rugi dan pemberian kredit. Karena Islam benar-benar melarang bunga, maka mereka melakukan pemanfaatan pinjaman dan pengumpulan uang dalam kerangka model apakah mereka berbagi keuntungan atau kerugian, dan oleh karena itu mereka disebut sebagai “Perbankan Islam” atau “Perbankan Bebas Bunga.” Bank partisipasi

menyediakan jalur kredit melalui dana partisipasi, yang berarti uang dalam rekening giro pribadi dan rekening partisipasi badan hukum dan perorangan.

- (d) **Bank Pembangunan:** Ini adalah bank yang tidak mempunyai wewenang untuk mengambil simpanan ketika mereka menggunakan uang yang terdiri dari modal, dana ekuitas yang dikelola oleh mereka, dan pinjaman internal dan internasional yang diterima untuk investasi industri dan komersial.
- (e) **Bank Investasi:** Ini adalah lembaga yang menjalankan operasi untuk menyediakan pinjaman, kecuali menerima dana simpanan atau penyertaan, dan/atau melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan undang-undang tertentu.

Fungsi utama bank adalah beroperasi sebagai entitas moneter yang bertindak sebagai perantara antara deposan dan investor.

Sepanjang sejarah, dasar-dasar kegiatan perbankan adalah meminjamkan atau meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga. Namun, hal ini telah berkembang menjadi suatu proses di mana bank kini didefinisikan sebagai “entitas keuangan yang memasok berbagai macam produk.” Kegiatan perbankan seperti ini tidak hanya mempercepat transfer daya beli suatu unit ekonomi, namun juga menentukan pilihan dan bentuk pembiayaan. Pemberian kredit adalah fungsi dasar perbankan. Bank mengambil simpanan lancar dan berjangka dari nasabah atau meminjam uang dalam bentuk pinjaman dan meminjamkannya kepada orang lain, memperoleh keuntungan dengan memperoleh surat berharga yang diproduksi oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting, dengan fungsi paling mendasar adalah pembiayaan, peminjaman, penyimpanan uang fidusia, dan sponsor (penjaminan).

- (a) **Pendanaan:** Menerima pembayaran tunai baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dana tersebut dapat disediakan tidak hanya melalui rekening deposito, tetapi juga melalui penerbitan surat berharga dari pasar lokal dan luar negeri atau melalui pengkreditan.
- (b) **Pemberian Kredit:** Bank memberikan kredit kepada berbagai rumah tangga, dunia usaha, negara bagian, dan pemerintah dalam berbagai bentuk dan kondisi, atau mereka menyediakan pembiayaan untuk investasi dengan mengakuisisi sekuritas perusahaan.
- (c) **Produksi Uang Fidusia:** Berdasarkan rekening simpanan dalam portofolionya, pembangkitan daya beli tambahan yang melebihi jumlah simpanan dikenal sebagai uang fidusia.
- (d) **Sponsor:** Bank bertindak sebagai sponsor terhadap komitmen lokal dan internasional nasabahnya. Dalam hal operasi yang memerlukan jaminan, bank menawarkan surat jaminan untuk kewajiban moneter kliennya. Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan bank. Operasi anjak piutang, penyitaan, dan sewa guna usaha sering kali dilakukan oleh afiliasi bank. Strategi keuangan kontemporer ini berkontribusi pada pembiayaan operasi ekspor-impor.

5.3 GAMBARAN UMUM SEKTOR PERBANKAN

Lembaga keuangan, seperti lembaga perantara keuangan, instrumen keuangan, dan pasar keuangan, terdiri dari sistem keuangan. Sektor perbankan adalah elemen terpenting dari sistem keuangan dan sektor utama yang mempengaruhi perekonomian. Sektor perbankan menyediakan pembiayaan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan memediasi transfer sumber daya dalam perekonomian. Bagian terbesar dalam sistem keuangan di Turki dimiliki oleh sektor perbankan. Bank, perusahaan manajemen portofolio, perusahaan asuransi, Dana Asuransi Pengangguran, dana investasi pensiun, kemitraan investasi properti, perusahaan leasing, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan, perantara, perusahaan penjaminan, dana ventura, dan perusahaan investasi saham merupakan bagian dari sistem keuangan Turki.

Bank menyumbang 84% dari ukuran neraca sistem keuangan. Bank dan sistem perbankan adalah entitas paling menonjol yang berfungsi dalam Sistem Keuangan. Pada akhir Maret 2021, memiliki 54 bank, 34 di antaranya merupakan bank simpanan, 14 bank pembangunan dan investasi, dan 6 bank partisipasi. Tiga dari bank simpanan tersebut merupakan milik negara, sedangkan delapan sisanya merupakan milik swasta. Terdapat 21 bank simpanan yang berlokasi di luar negeri yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh asing. Tiga bank pembangunan dan investasi merupakan milik negara, tujuh bank swasta, dan empat bank milik asing (Tabel 5.1).

Sepuluh bank teratas memiliki pangsa sebesar 87% dari total aset, 89% dari total simpanan, dan 88% pinjaman, sedangkan transaksi perbankan secara signifikan terfokus pada sepuluh bank pertama. Pinjaman menyumbang 59% dari total aset, aset likuid 15%, dan surat berharga 17%. Kewajiban simpanan dan non-simpanan menyumbang 81% dari total sumber daya, sedangkan dana pribadi hanya menyumbang sepuluh%. Rasio modal inti sebesar 14,5% dan rasio standar kecukupan modal sebesar 18,8% (Tabel 6.3). Sektor ini memiliki laba atas aset sebesar 0,74% dan laba atas ekuitas sebesar 8,12%. Pada tahun 2020, rasio margin bunga terhadap rata-rata aset tumbuh menjadi 3,2%.

Tabel 5.1 Sistem perbankan jumlah bank, kantor cabang, personel, dan kontribusi mereka dalam industri

	Jumlah bank	Karyawan (Ribuan orang)	Jumlah cabang	Saham dalam industri		
				Aktiva	Pinjaman	Deposito
Bank simpanan	10	181	3.643	87	86	91
- Milik negara	4	250	3.701	38	39	41
- Bank swasta	10	300	9.875	28	27	30
- Dibiayai asing	10	52	2.529	20	20	21
bank LPS	1	11	2	–	–	–
Bank pembangunan dan investasi	2	5	64	6	7	0
Bank partisipasi	20	17	1.255	7	7	9
Total	111	816	11.194	100	100	100

Tabel 5.2 Aset dan sumber daya seimbang terpilih dari sistem perbankan

Aset/sumber daya	Miliar	Miliar USD	Mengubah %
Aset likuid	897.000.000	1.945.982	15
Aset keuangan	1.023.000	2.219.385	17
Pinjaman	3.577.000	7.751.765	59
Total aset	6.108.000	13.235.897	100
Deposito	3.455.000	7.494.445	57
Sumber daya selain deposito	1.477.000	3.200.417	24
Ekuitas	601.000.000	1.302.682	10
Jumlah sumber daya	6.108.000	13.268.062	100

Tabel 5.3 Rasio terpilih dari sistem perbankan

Rasio	Kecepatan
Kredit bermasalah (gross)/total pinjaman tunai (%)	3.67
Penyisihan kredit bermasalah/kredit bermasalah bruto (%)	78.01
Laba (rugi) jangka bersih/rata-rata total aset (%)	0,74
Laba (rugi) jangka bersih/rata-rata total ekuitas (%)	8.12
Total pendapatan bunga/rata-rata aset pendapatan bunga (%)	6.15
Total biaya bunga/rata-rata total liabilitas bunga (%)	5.44
Setelah dikurangi pendapatan bunga (biaya)/rata-rata total aset (%)	3.20
Pendapatan/biaya non-bunga (%)	98.19

5.4 SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI DUNIA

Perbankan telah ada sejak adanya perekonomian dan perdagangan. Sistem seperti bank selalu ada, namun tidak dalam bentuknya yang sekarang, sepanjang sejarah manusia. Menurut para sejarawan, kepergian bank paling awal terjadi delapan ribu tahun yang lalu. Sebenarnya, meminjamkan koin dengan atau tanpa bunga lebih dari sekedar transfer daya beli dari satu orang ke orang lain, atau penggunaan uang dalam perdagangan.

Kenyataannya, pada abad kelima dan keenam SM di Mesopotamia, jauh sebelum berkembangnya uang sebagai alat transaksi, transaksi perbankan seperti surat promes dan transaksi perbankan sejenis kredit, serta hipotek real estat dan pinjaman dengan imbalan jaminan, diketahui digunakan dalam transaksi komersial pada abad kelima dan keenam (Ilkin 1983). Meskipun pengertian uang dan perbankan sangat berkaitan, kita dapat menunjukkan bahwa transaksi perbankan pertama kali terjadi di BC jika kita sepakat bahwa aktivitas perbankan sebenarnya hanya dimulai dengan aktivitas penerimaan simpanan dan peminjaman. Secara umum disepakati bahwa hal ini dimulai sekitar tahun 3500 SM di Sumeria dan Babilonia (Tabel 5.2).

Struktur bank paling awal yang terdokumentasi adalah “Kuil Merah” dekat Uruk di Mesopotamia. Layanan perbankan berkembang dalam struktur keagamaan pada masa ini, karena masyarakat percaya bahwa kuil adalah tempat yang aman dan pendeta adalah orang yang dapat dipercaya. Orang-orang menyerahkan kekayaan, aset yang digunakan sebagai uang, dan perhiasan mereka ke kuil. Mengingat hadiah yang diberikan kepada para dewa pada

periode tersebut, kuil tersebut mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Oleh karena itu, institusi pertama yang diketahui berperan sebagai bank adalah “model” atau kuil. Kekayaan yang dikumpulkan kuil-kuil mulai dipinjamkan kepada individu yang membutuhkan sepanjang waktu.

Orang yang meminjam barang atau uang dengan cara ini mengembalikan pinjaman tersebut dengan hadiah (bunga) pada akhir masa jatuh temponya. Fakta bahwa seorang pedagang yang bepergian ke kota lain untuk urusan bisnis memperoleh surat dari orang terkenal, terkemuka, dan dapat dipercaya di kotanya sendiri untuk memperkenalkan diri dipandang sebagai asal muasal “surat jaminan” dari jasa keuangan. Selama penggalian, ditemukan catatan yang menyiratkan bahwa kuil meminjam uang seperti bank, meminjamkan uang dengan bunga seperti bank, menerima jaminan keuangan atau penjamin sebagai imbalannya, dan bahkan memperbudak warga negara merdeka yang tidak membayar utangnya dengan memperbudak mereka dan menagih piutangnya.

Layanan perbankan dapat ditelusuri kembali ke peradaban seperti Lydia, Tiongkok, dan Roma, tempat perdagangan pertama kali didirikan. Kode Hammurabi juga memuat batasan legislatif pertama yang mengatur operasi keuangan (1792–1750 SM). Hutang, yaitu meminjamkan uang, tingkat bunga dan komisi yang diterapkan dalam interaksi ini, metode mengamankan komoditas seperti biji-bijian, produk pertanian, atau logam mulia, atau pinjaman melalui jaminan pribadi (hipotek bergerak atau real estat), bagaimana utang akan dibayar tepat waktu, dan bagaimana utang akan dilikuidasi jika tidak dibayar, semuanya tercakup dalam hukum Hammurabi. Di Mesir Kuno, Yunani, dan Roma, terdapat lembaga-lembaga yang melakukan transaksi keuangan, dan peraturan diberlakukan untuk mengatur bagaimana lembaga-lembaga ini menjalankan operasi perbankannya. Meskipun riba dan bunga majemuk dilarang di Mesir kuno, bunga tidak diatur di Yunani Kuno seiring dengan berkembangnya perdagangan dan masyarakat menjadi lebih kaya.

Karena tingkat suku bunga yang tinggi, bank didirikan di lokasi dan negara bagian yang otonom. Transaksi kredit dilakukan di Yunani kuno melalui institusi gerejawi yang dikenal sebagai “sistem pasar,” serta bankir yang dikenal sebagai “*Trapezitai*” Sedangkan bank negara pertama terjadi di Yunani kuno, dan krisis perbankan pertama terjadi di Roma kuno. Sejarah perbankan dunia dan sejarah uang saling terkait erat. Tidak diketahui kapan manusia pertama kali menggunakan uang di planet ini. Banyak hal (seperti beras, jagung, gandum, kerang, garam, gigi ikan paus, domba, tembakau, perak, emas, dan sebagainya) telah digunakan sebagai pengganti uang dalam transaksi kredit dan komersial sepanjang sejarah. Koin-koin awal, seperti yang kita kenal sekarang, terdiri dari tembaga, perak, dan emas dan memiliki beragam kegunaan. Pada abad ketujuh SM, buku ini dicetak di Lydia. Akibat penaklukan Lydia oleh Persia, penggunaan uang dan perbankan meluas ke seluruh Timur Tengah.

Setelah Lydia, percetakan dan mata uang menjadi semakin penting dalam komunitas Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Pembuatan dan penggunaan koin telah menjadi hal yang lumrah di banyak negara di dunia. Bankir muncul sebagai akibat dari penggunaan uang dalam perekonomian sebagai alat perdagangan. Mereka menukar mata uang dari suatu negara atau tempat dengan mata uang dari negara atau tempat lain. Para bankir juga

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan operasi perbankan dengan meminjamkan simpanan yang mereka peroleh dari klien mereka sebagai pinjaman berbunga tinggi kepada orang lain yang ingin meminjam, selain aktivitas penukaran uang semacam ini. Transaksi perbankan dan keuangan di Roma dilakukan oleh "*publicanus*" (ksatria) selama periode Republik, yang menyuplai uang kepada entitas swasta dan negara, dan oleh para bankir yang sebanding dengan trapezites mereka selama periode Kekaisaran. Karena bankir mencatat transaksi mereka dalam buku besar, mereka akan menindaklanjuti transaksi akuntansi klien mereka.

Pertempuran yang sedang berlangsung dan invasi Arab antara timur dan barat menghambat perdagangan di wilayah tersebut pada awal Abad Pertengahan. Alasan penting lainnya mengapa perbankan tidak berkembang selama periode ini adalah karena dua agama utama, Islam dan Kristen, melarang dan mengharamkan bunga. Namun, perkembangan maritim pada Abad Pertengahan, pengangkutan logam mulia dari tempat-tempat yang baru ditaklukkan ke Eropa, kebutuhan akan pengiriman uang dalam jumlah besar sebagai akibat dari Perang Salib, dan pertumbuhan perdagangan sebagai akibat dari lahirnya kota-kota baru. menciptakan kebutuhan akan institusi untuk memediasi transaksi moneter. Perkembangan sistem perbankan dan hukum komersial dibantu oleh perluasan perdagangan, khususnya antara Eropa dan negara-negara timur.

Jadi, istilah "bank" berasal dari kata Italia "*banco*", yang berarti "meja, bangku, atau bangku" dalam bahasa Italia. Bank tertua dapat ditemukan di Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Roma Kuno. Pada masa ini, orang-orang Yahudi dari Lombardy, yang dianggap sebagai bankir pertama, melakukan aktivitas keuangan. Karena agama Islam dan Kristen melarang bunga, orang-orang Yahudi menguasai industri keuangan selama periode ini. Para bankir Yahudi biasa berbisnis di atas meja (*banco*) yang didirikan di pasar. Masyarakat akan bangkrut jika beberapa bankir tersebut bangkrut karena gagal memenuhi kewajibannya (tabel). Itulah sebabnya kata "kebangkrutan" berasal dari kata "*banco*".

Setelah dominasi bangsa Arab di Mediterania berkurang pada abad ke-12, bangsa Italia, khususnya para bankir dari Lombardy, semakin berpengaruh dalam membiayai operasi di Perancis, Jerman, Inggris, dan wilayah timur. Mereka mengembangkan "surat pembayaran", suatu metode pengiriman uang untuk melaksanakan operasi yang melibatkan risiko keamanan, seperti simpanan dan pinjaman, serta pertukaran mata uang asing (penukaran uang) dan pengangkutan uang tunai dari satu lokasi ke lokasi lain (transfer uang). Seorang bankir di lokasi lain diperintahkan untuk membayar sejumlah uang kepada individu yang mengirimkan surat dengan cara ini.

Evolusi perbankan juga dipengaruhi oleh diperkenalkannya uang kertas. Setelah penyitaan emas pedagang oleh Raja Inggris, emas tersebut diserahkan kepada pedagang yang dikenal sebagai "tukang emas". Menjelang akhir Abad Pertengahan (1400–1453), khususnya di beberapa negara kota di Italia, uang ini diberikan kepada para penukar uang, dengan imbalan sertifikat. Para penukar uang ini menyimpan uang logam perak dan emas milik rakyat di brankas mereka sebagai imbalan atas sertifikat yang menyatakan bahwa uang logam tersebut akan dikembalikan kapan pun diminta. Orang-orang menunjukkan dokumen-

dokumen ini kepada penjual daripada harus repot-repot mentransfer sendiri logam-logam berharga ini ketika berbelanja, dan sertifikat perak dan emas ini, yang dapat diubah menjadi koin bila diinginkan, secara bertahap telah menggantikan uang.

Menyadari bahwa tidak semua koin perak dan emas yang diserahkan kepada mereka diperlukan pada saat yang sama, para penukar uang meminjamkan sebagian dari koin tersebut kepada pedagang dengan imbalan bunga karena penggunaan sertifikat tersebut, yang jauh lebih mudah disimpan dibandingkan koin perak dan emas, menjadi lebih lazim sebagai bentuk pembayaran, beberapa penukaran uang beralih menjadi bankir. Uang kertas adalah sebutan untuk sertifikat ini, yang diterbitkan oleh bank dan tidak memiliki padanan 100%. Akibatnya, uang kertas menjadi uang kertas yang sebagian didukung oleh perak dan emas, dan secara bertahap menggantikan koin perak dan emas di pasar. Akibat hal ini, jumlah uang beredar di pasar meningkat secara tidak terkendali.

Penaklukan Istanbul pada tahun 1453 mengakibatkan peningkatan imigrasi ke Eropa dan Italia. Di sisi lain, gerakan Renaisans dalam pencerahan, penemuan, dan penemuan di Eropa menghasilkan perubahan tertentu dalam konteks agama, serta di banyak bidang lainnya, dan mempercepat pertumbuhan pasar keuangan dan perbankan, terutama setelah bunga diterima sebagai hal yang sah. Ada kemajuan tertentu dalam penggunaan “surat pembayaran”, yang digunakan sebagai metode pengiriman uang yang disebutkan di atas, sebagai dampak dari Renaisans. Prosedur untuk melaksanakan “surat pertukaran”, yang kemudian dibeli oleh bankir dari debitur dan diubah menjadi instrumen pinjaman yang didiskon, telah berkembang. Para bankir menggunakan modal mereka sendiri serta uang yang dipercayakan kepada mereka sebagai pinjaman sepanjang waktu, yang memperkuat sistem perbankan dan berkontribusi terhadap perkembangannya. Banyak bank besar didirikan pada masa ini, khususnya di Italia. Banco di San Giorgio, didirikan pada tahun 1407, adalah bank paling terkenal. Bank ini memiliki struktur publik dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pertumbuhan perdagangan internasional, khususnya dengan Amerika, semakin meningkatkan permintaan uang pada abad ketujuh belas. Uang digunakan di hampir setiap negara, dan keragaman mata uang di Eropa, serta perubahan pengaturannya sepanjang waktu, membuat pengidentifikasian nilai mata uang mereka menjadi rumit. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak terkendali pada sertifikat yang diterbitkan terhadap emas telah menyebabkan ketidakpastian, terutama di negara-negara dengan tingkat perdagangan internasional yang tinggi. Untuk menjernihkan kesalahpahaman ini, Amsterdam Bank, bank pertama dalam pengertian kontemporer, didirikan di Belanda pada tahun 1609. Swedish National Bank, yang didirikan pada tahun 1668 di Swedia, merupakan bank sentral tertua di dunia.

Di sisi lain, karena kelangkaan uang, gagasan pembentukan bank yang suplai dan peredaran uangnya dilakukan dengan satu tangan muncul di Inggris menyusul perang antara Inggris dan Prancis. Pada tahun 1694, Bank of England, contoh paling awal dari bank sentral modern, didirikan. Pada tahun 1800, Perancis mendirikan Bank of France, yang tumbuh menjadi lembaga keuangan terbesar di negaranya. Pada masa ini juga ditentukan bahwa beberapa bank Jerman akan berfungsi sebagai perusahaan saham gabungan. Pada tahun

1913, kira-kira 250 tahun setelah Swedia mendirikan bank sentral pertama di dunia, Federal Reserve Bank, Bank Sentral Amerika, sebuah tonggak penting dalam hal perbankan sentral dan perkembangan perbankan modern terjadi.

Sistem perbankan telah berkembang secara signifikan sejak abad kesembilan belas, berkat dampak revolusi industri dan pertumbuhan perdagangan internasional, dan telah berkembang menjadi lembaga-lembaga penting yang membiayai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selama ini, bank-bank telah melakukan restrukturisasi, dengan fokus pada spesialisasi sebagai bank perdagangan, investasi, dan pembangunan. Depresi Hebat di awal abad ke-20 membuka era baru dalam evolusi keuangan global. Industri keuangan bekerja pada leverage 1/10 sebelum Depresi Besar tahun 1929. Dengan kata lain, untuk setiap lira ekuitas, bank telah menyediakan hampir 10 unit kredit. Kebangkrutan hampir separuh perusahaan dan pengangguran individu, serta Depresi Besar, yang berlangsung setidaknya selama sepuluh tahun dan berdampak besar pada permulaan Perang Dunia II, membuat pembayaran kembali pinjaman menjadi mustahil.

Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan telah menyebabkan kerusakan pada sistem keuangan global. Selama masa ini, tindakan dan jaminan bank sentral dalam kerangka teori ekonomi tradisional tidak berhasil. Karena teori ekonomi Keynesian belum ada, dan karena intervensi dalam perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal belum diketahui dalam kasus-kasus seperti itu, sekitar setengah dari perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika telah bangkrut dalam sepuluh tahun terakhir, dan hampir setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut. penduduk yang bekerja telah kehilangan pekerjaan. Selama masa ini, hampir 10.000 bank di AS saja bangkrut dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Dunia sedang mengalami depresi berat.

Stagnasi ekonomi yang berkepanjangan ini mungkin dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap Perang Dunia II. Pada tahun 1944, di penghujung Perang Dunia II, diadakan konferensi internasional di Bretton Woods, New York, untuk membahas dan menganalisis tatanan ekonomi dunia pascaperang, rekonstruksi global, dan kesejahteraan sosial, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. membangun sistem ekonomi dan keuangan yang stabil. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia didirikan sejalan dengan keputusan yang diambil, begitu pula organisasi yang mengatur dan memantau sektor keuangan dan perbankan di setiap negara.

Selama abad ke-20, kemajuan di bidang komunikasi dan pemrosesan data menghasilkan perubahan signifikan dalam cara bank beroperasi; bank berkembang dengan cepat dan mendirikan organisasi sedunia. Pada tahun 1970an dan 1980an, terjadi banyak krisis perbankan dan keuangan di seluruh dunia, yang mempercepat tren privatisasi lembaga keuangan dan bank milik negara di berbagai negara, khususnya di Inggris. Pasar keuangan dan industri perbankan telah menjadi lebih terinternasionalisasi sejak tahun 1980an, dengan lembaga keuangan dan produk keuangan yang terdiversifikasi dan berlipat ganda, dan persaingan internasional meningkat.

Serangan teroris pada bulan September 2001 di AS menimbulkan guncangan eksternal baru terhadap negara-negara berkembang serta perekonomian dan sistem perbankan AS.

Perilaku investor sangat terpengaruh oleh dampak serangan ini, yang berdampak pada seluruh dunia, termasuk perekonomian AS, perekonomian negara-negara berkembang lainnya, dan arena politik. Ekspektasi akan semakin parahnya resesi di negara-negara maju semakin meningkat. Akibatnya, tahun 2000an adalah masa ketika suku bunga diturunkan di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat, dan ekspansi moneter menjadi lebih penting.

Pinjaman bank dengan cepat terpengaruh oleh ekspansi moneter dan suku bunga rendah pada tahun 2000an, dan pasar serta institusi keuangan berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya persaingan, merger bank pun berkembang pesat, dan merger bank yang semakin meningkat mengubah bank menjadi organisasi keuangan besar yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan jika gagal. Dalam industri perbankan di seluruh dunia, persentase perusahaan keuangan non-bank, yang dikenal sebagai shadow banking, telah meningkat secara dramatis.

Pada akhir tahun 2000, di bawah kepemimpinan Amerika, bank sentral di negara-negara industri mulai melonggarkan kebijakan moneter dan pasar dana dengan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi industri perbankan adalah mengubah kelebihan likuiditas yang mereka sediakan sebelum krisis menjadi aktivitas yang menguntungkan. Bank dan lembaga keuangan lainnya khususnya di AS meningkatkan portofolio kredit mereka dengan meminjam dengan suku bunga rendah.

Pinjaman rumah yang digadaikan menyumbang sebagian besar perluasan portofolio kredit. Harga rumah meningkat akibat suku bunga rendah dan fleksibilitas pinjaman. Meningkatnya likuiditas internasional meningkatkan selera risiko lembaga-lembaga keuangan di negara-negara kaya, sehingga mengakibatkan peningkatan aliran modal dari negara-negara maju ke negara-negara miskin. Sebagai dampak yang diharapkan, mata uang lokal di negara-negara berkembang meningkat, suku bunga menurun, dan perkembangan karena volume pinjaman dan permintaan luar negeri mulai meningkat pesat. Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, yang meletus dan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat, dimulai dengan kepanikan perbankan di Amerika pada tanggal 9 Agustus 2007.

Karena kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga keuangan, para penabung berbondong-bondong ke bank untuk menarik uang mereka, dan mereka menghindari pemberian pinjaman satu sama lain. Bank mencoba menciptakan likuiditas dengan menjual aset dan surat berharganya; namun, dalam kondisi panik, suku bunga aset-aset ini melonjak dengan cepat, dan bank menghadapi tantangan pendanaan karena pinjaman didanai oleh sumber daya repo dan bukan deposito. Meskipun krisis ini dimulai di Amerika, kini krisis tersebut telah menyebar ke seluruh lembaga keuangan di seluruh dunia, seiring dengan semakin globalnya sektor perbankan. Bank sentral di setiap negara telah mentransfer modal ke bank untuk menstabilkan sistem perbankan dan keuangan, dan sistem perbankan dan keuangan di banyak negara industri saat ini dilindungi oleh ekspansi moneter dan kebijakan suku bunga rendah (Tabel 5.4).

Terdapat terobosan luar biasa di bidang keuangan dalam dua dekade pertama abad kedua puluh satu, dan tren globalisasi telah membantu peralihan sistem perbankan dari

tingkat nasional ke tingkat internasional. Krisis keuangan global, serangan teroris 11 September 2001, globalisasi keuangan, liberalisme, dan liberalisasi keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap industri perbankan global. Terdapat perkembangan dan perbaikan substansial dalam industri perbankan selama sepuluh tahun sebelumnya. Bank menciptakan produk, memperluas saluran distribusi, dan mengumpulkan serta menganalisis data untuk memenuhi perubahan permintaan dan risiko nasabahnya.

Prioritas utama adalah keamanan, privasi, dan efisiensi. Bagian ini menyaksikan munculnya keuangan mikro, kredit mikro, dan uang seluler seiring dengan kemajuan globalisasi produk dan layanan keuangan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai lembaga keuangan, produk keuangan yang terstruktur dan terdiversifikasi menandai awal era baru di mana perbedaan antara perantara keuangan perbankan dan non-bank secara bertahap menghilang. Cara kerja bank telah beralih dari perbankan cabang konvensional ke perbankan digital sebagai hasil dari inovasi teknologi.

Tabel 5.4 Perkembangan perbankan di seluruh dunia

Periode	Kemajuan, langkah, dan pencapaian yang substansial
8000 SM	Contoh pertama perbankan dan keuangan
3500 SM	Dokumen yang membuktikan transaksi perbankan pertama yang dilakukan oleh para pendeta di kuil-kuil di Sumeria dan Babilonia
1792–1750 SM	Aturan perbankan pertama diatur oleh aturan Kerajaan Eshunnance Hammurabi, pengkreditan, pengumpulan simpanan, prosedur komisioning, dan tagihan kredit semuanya diatur
1000 SM	Bangsa Yunani, Romawi, dan Mesir mendirikan perbankan pada Abad Pertama dan Pertengahan. Di Mesir, suku bunga dibatasi, dan peraturan keuangan diterapkan di Yunani
800 SM	Bangsa Lydia, negara kaya dari Anatolia, mencetak mata uang pertama, yang terbuat dari 75% emas dan 25% paduan perak.
1407	Banco Di San Giorgio, yang dianggap sebagai bank tertua di dunia, didirikan
1609	Bank modern pertama "The Bank of Amsterdam" didirikan
1637	Bank of Venice didirikan, dan cek serta uang kertas dikeluarkan
1640	Setelah penyitaan emas pedagang oleh Raja Inggris, emas tersebut mulai dikirimkan ke pedagang yang dikenal sebagai "tukang emas" sebagai imbalan atas sertifikasi.
1668	Bank Nasional Swedia, yang dianggap sebagai bank sentral pertama di dunia, didirikan
1694	Bank Sentral Inggris didirikan
1913	Federal Reserve Bank (FED), bank sentral terbesar di dunia, didirikan dan menjadi basis perbankan sentral kontemporer
1944	Diputuskan untuk mendirikan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional
1980	Awal mula gerakan Globalisasi Keuangan dan globalisasi
2007	Krisis Keuangan Global, yang berasal dari Amerika dan telah meluas ke sebagian besar belahan dunia, telah dimulai

Wabah virus corona, yang terjadi di industri perbankan pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia, mendorong daya saing perbankan, digitalisasi, dan pembentukan saluran layanan keuangan baru. Karantina yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 telah menghentikan aktivitas ekonomi di sejumlah industri, dengan konsekuensi serius bagi dunia usaha dan individu. Suasana ini berdampak tidak langsung pada sektor keuangan.

Beberapa usaha yang bangkrut atau mengalami kesulitan selama masa ini, serta orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau mengambil cuti tidak dibayar, tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Sebagai akibat dari peningkatan penyediaan pinjaman, profitabilitas dan situasi permodalan mereka melemah. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya biaya unit ekonomi, permintaan pinjaman dari bank juga meningkat. Karena aset keuangan bank dalam portofolio sekuritasnya kehilangan nilai selama periode ini, bank mengalami kerugian. Besarnya kerugian ini diperburuk oleh kepemilikan derivatif terbuka yang bergerak secara tidak terduga akibat krisis ini.

Untuk memitigasi dampak negatif pandemi terhadap sistem perbankan, otoritas pengawas dan moneter di semua negara, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, menurunkan suku bunga, mencapai ekspansi moneter, mengumumkan program pembelian obligasi, dan menyediakan likuiditas yang diperlukan bagi bank untuk terus memberikan pinjaman kepada bank. perekonomian riil. Sebaliknya, bantuan pendapatan langsung dari pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat mempunyai dampak positif tidak langsung terhadap bank karena membantu pembayaran kembali pinjaman peminjam.

5.5 SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN

Sejarah perkembangan sistem perbankan di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, di mana bank-bank Belanda mendominasi perekonomian. Pada tahun 1828, Bank Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indische Handelsbank*) didirikan sebagai bank sentral kolonial pertama di Batavia (sekarang Jakarta). Selanjutnya, bank swasta Belanda seperti De Javasche Bank (1828) dan bank-bank Jerman dan Inggris turut beroperasi di Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bank Agricola, sebuah bank pertanian, dan *Nederlandsche-Indische Postspaarbank* (NIP), sebuah bank tabungan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bank-bank tersebut menjadi bank nasional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral, yang kemudian menjadi bank komersial terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, Bank Indonesia (BI) didirikan sebagai bank sentral independen yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Selama dekade 1950-an hingga 1960-an, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank swasta asing, yang mengakibatkan pembentukan bank-bank milik negara seperti Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Pada tahun 1968, pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat.

Selanjutnya, era reformasi ekonomi pada tahun 1980-an membuka pintu bagi partisipasi swasta dalam industri perbankan. Banyak bank swasta baru didirikan, sementara bank-bank asing juga mulai beroperasi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 1992, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perbankan yang mengatur lebih lanjut mengenai struktur dan pengaturan sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, sektor perbankan Indonesia terus mengalami transformasi, dengan adopsi teknologi digital dan inovasi produk menjadi fokus utama. Pada saat ini, sektor perbankan Indonesia mencakup berbagai bank nasional dan swasta, bank asing, bank syariah, serta lembaga keuangan non-bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat.

Contoh lain perkembangan Sektor perbankan di negara Turki. Turki sudah ada sejak abad kesembilan belas. Evolusi sistem keuangan Turki dapat dibagi menjadi dua periode: periode Kekaisaran Ottoman (1839–1922) dan periode Republik (1923–Selanjutnya).

Sistem Perbankan Turki Selama Periode Kekaisaran Ottoman (Periode Pra-Republik) (1839–1922)

Perbankan, yang mengalami kemajuan besar di dunia sejak zaman Romawi, hampir punah seiring dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi. Meskipun perluasan perdagangan global dan kebutuhan transaksi transfer uang akibat Perang Salib mendorong munculnya bankir dan perkembangan sistem perbankan, namun diakui secara luas bahwa perbankan modern dimulai dengan berdirinya Bank of Venice pada tahun 1157.

Pada tahun 1071, orang Turki pindah dan menetap di Anatolia. Meskipun orang non-Turki menangani sebagian besar perekonomian dan bisnis perdagangan di Anatolia selama periode ini, orang Turki yang tinggal di kota sepanjang waktu juga terlibat dalam perdagangan dan kerajinan, sedangkan mereka yang menetap di daerah pedesaan memiliki kehidupan nomaden. Anatolia diyakini berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Koin emas dan perak dicetak dan digunakan sepanjang periode Seljuk, dan sistem moneterinya sederhana. Namun, selama periode ini, tantangan ekonomi dan keuangan tidak lagi menjadi tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat: keadilan dan keamanan.

Sejarah perbankan Kekaisaran Ottoman mengikuti sejarah perbankan di seluruh dunia, dan tidak ada terobosan penting di bidang keuangan hingga abad kesembilan belas. Hingga periode ini, di bawah sistem organisasi Daulah Ottoman, aktivitas perbankan pertama dimulai dan dilanjutkan dengan aktivitas penukaran uang Galata di Istanbul. Kegiatan perbankan komersial seperti mengatur jumlah uang beredar dan volume kredit negara, mengelola emas dan cadangan devisa, melakukan pembayaran dalam dan luar negeri, jalur kredit kepada pedagang dan negara, dan melakukan transaksi pembayaran dalam perdagangan luar negeri dilakukan dengan berbagai cara. organisasi, termasuk percetakan uang, yayasan moneter, bazaar tertutup, dan serikat pekerja hingga bank mencapai status efisien.

Menyusul pengumuman Reformasi tahun 1839, uang kertas pertama Kesultanan Utsmaniyah, “Kaime,” dicetak pada tahun 1840 untuk menutupi defisit anggaran dengan menggunakan hak istimewa seigniorage. Kaime adalah jenis surat utang dalam negeri pemerintah yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi daripada uang. Pasokan uang tunai yang berlebihan telah menurunkan nilai uang untuk mendukung defisit anggaran dan

perdagangan luar negeri yang terus meningkat. Ada beberapa upaya untuk mendirikan bank guna membiayai reformasi, terutama atas rekomendasi perusahaan asing untuk mencegah devaluasi terhadap mata uang Eropa lainnya, menjamin stabilitas nilai tukar, menata ulang sistem moneter, mengumpulkan pendapatan negara, mengendalikan pengeluaran publik, menawarkan pinjaman kepada sektor publik, penerbitan surat berharga pemerintah, pembayaran pokok dan bunga, serta penerbitan uang kertas atas nama negara (Ortabag˘ 2018).

Namun, bank pertama yang didirikan dalam sejarah keuangan Turki dianggap adalah İstanbul Bankası (Dersaadet Bank) pada tahun 1849, dengan 60% modalnya dimiliki oleh pedagang asing dan 40% milik pemerintah Ottoman, yang tidak memiliki hak kepemilikan. karakteristik bank umum atau bank negara, namun hanya berperan melindungi nilai uang dan menstabilkan nilai tukar. Namun bank tersebut bangkrut pada tahun 1852 karena spekulasi terhadap instrumen utang daerah yang disebut kaime, transaksi terlarang, ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali uang muka yang diberikan kepada pemerintah, pinjaman bank yang berlebihan, dan kurangnya sistem akuntansi standar.

Ini dipinjam dari luar negeri untuk pertama kalinya pada tahun 1854, setelah pecahnya Perang Krimea pada tahun 1853, selain instrumen pinjaman dalam negeri. "The Ottoman Bank," yang berbasis di London, didirikan pada tahun 1856 untuk berfungsi sebagai perantara pinjaman luar negeri, untuk memberikan uang muka kepada pemerintah melalui diskon surat utang pemerintah dalam negeri, dan untuk memberikan pinjaman pedagang.

Karena kesulitan keuangan yang dialami Dinasti Ottoman pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, seperti pinjaman dalam dan luar negeri yang berlebihan, dan defisit anggaran yang berlebihan, upaya untuk mendirikan beberapa bank domestik, misalnya Bank Turki, tidak dilakukan. Sementara itu, kesuksesan penawaran umum Obligasi Ottoman Bank senilai 8 juta pon atas nama Pemerintah Ottoman pada tahun 1862, serta penarikan Kaime yang telah didiskreditkan dari peredaran bersama dengan hasil penawaran umum dan penggunaannya dalam akuntansi utang dalam negeri, meningkatkan peluang untuk mendirikan bank nasional dengan hak istimewa dan otoritas negara yang luas.

Pemerintah Ottoman tidak ingin memberikan hak istimewa bank nasional kepada bank yang didominasi oleh modal satu negara, dan karena sejumlah alasan politik, Bank Ottoman membubarkan diri pada tahun 1863 dan berganti nama menjadi Imperial Ottoman Bank (Bank-ı S, ahane -i Osman-i) di bawah kemitraan Inggris-Prancis. Selama jangka waktu 30 tahun, bank tersebut diberi hak monopoli atas penerbitan uang kertas, dan dipercaya untuk mengumpulkan pendapatan dengan bertindak sebagai bendahara negara, melakukan pembayaran Perbendaharaan dan mendiskontokan tagihan-tagihannya, serta menjadi perantara pembayaran bunga dan pokok kewajiban dalam dan luar negeri.

Era perbankan asing dimulai dengan bank yang merupakan bank emisi pertama yang menyandang nama negara dalam sejarah perbankan Turki ini merupakan lembaga keuangan paling signifikan yang terus beroperasi dalam struktur serupa hingga tahun 1924 dan terus melayani hingga tahun 2001 dimulai. sejak tanggal tersebut ketika krisis keuangan terjadi, dana tersebut ditugaskan ke Garanti Bankası. Pada masa Ottoman, hanya ada sedikit bank

yang didirikan, dan sistem keuangan belum berkembang. Dalam masyarakat Ottoman, orang Turki pada umumnya terlibat dalam dinas militer, manajemen, dan pertanian, sedangkan perdagangan dan transaksi berbasis bunga diserahkan kepada non-Muslim; dan kegagalan dalam menanggapi revolusi industri, yang dimulai di Inggris dan meluas ke seluruh dunia pada periode ini, menghasilkan struktur ekonomi yang berbasis pada operasi komersial dan pertanian berskala kecil dan tertutup. Akibatnya, kegiatan perekonomian, perbankan, dan intermediasi keuangan tidak dapat berkembang.

Kemajuan paling signifikan dalam perbankan Turki di Kekaisaran Ottoman adalah pendirian Dana Lokal pada tahun 1863 oleh Gubernur Nish, Ahmed Mithad Pasha, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan produsen pertanian yang harus menggunakan pinjaman berbunga tinggi. Dana Lokal tersedia di seluruh Kesultanan Ottoman dan digunakan secara efisien selama bertahun-tahun. Secara khusus, dua pertiga dari laba bersih yang diperoleh dari kegiatan kredit pertanian digunakan untuk membangun dan memelihara kebutuhan umum seperti jalan, jembatan, dan sekolah di wilayah di mana Dana Daerah digunakan, dan dalam hal ini Dana Daerah tersebut berkontribusi terhadap perkembangan negara.

Namun, penurunan fungsi Dana Daerah yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya mengurangi efektivitas dana tersebut, dan pemerintah, yang percaya bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengintegrasikan Dana Daerah ke pemerintah pusat, mengubah Dana Daerah menjadi "Dana Manfaat". " pada tahun 1883. Namun, seiring berjalannya waktu disimpulkan bahwa akan lebih masuk akal untuk menyusun Dana Manfaat sebagai bank, dan pada tahun 1888, Ziraat Bank didirikan sebagai lembaga keuangan modern untuk menggantikan Dana Manfaat, sementara Dana Manfaat yang beroperasi dipindahkan ke cabang-cabang bank.

Pada masa ini, Ahmed Midhat Pasha membentuk Istanbul Emniyet Sandığı (Dana Keamanan) pada tahun 1868 sebagai upaya perbankan nasional untuk memenuhi kebutuhan kredit para pedagang dan pengrajin kecil, serta untuk mengumpulkan dan memproses tabungan masyarakat. Namun pengelolaannya pertama kali diambil alih oleh Ziraat Bank pada tahun 1907, diikuti dengan merger dengan Ziraat Bank pada tahun 1984. Ziraat Bank adalah bank nasional terbesar di Turki, yang didirikan pada masa Kekaisaran Ottoman, bertahan dari masa Republik, dan terus eksis. Hari ini. Hingga runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, beberapa bank dengan modal asing didirikan, dan bank-bank ini terutama terlibat dalam operasi penerimaan dan pembayaran kembali pinjaman domestik dan internasional untuk Perbendaharaan Utsmaniyah. Untuk alasan ini, konsep "perbankan pinjaman" juga dikembangkan untuk perbankan periode Ottoman.

Karena ketidakmampuan Kekaisaran Ottoman untuk membayar kewajibannya pada tahun 1875, Administrasi Utang Publik Ottoman didirikan pada tahun 1881 dengan Dekrit Muharrem untuk mengatur kembali pinjaman luar negeri Ottoman, memungut pajak, dan membayar kreditur terhadap hutang domestik dan internasional. Era baru telah dimulai (Akgüç 1992). Setelah sebagian besar sumber pendapatan Kesultanan Utsmaniyah berada di bawah wewenang organisasi internasional, beberapa bank asing didirikan di Kesultanan Utsmaniyah setelah tahun 1881. Setelah periode ini, masuknya modal asing dalam jumlah

besar ke Kesultanan Utsmaniyah dimulai, dan banyak bank asing yang masuk ke wilayah Kesultanan Utsmaniyah. perusahaan-perusahaan didirikan di bidang perdagangan dan industri dengan penyertaan modal asing, khususnya fluktuasi harga saham yang berlebihan di sektor perbankan dan keuangan dari tahun 1895 hingga deklarasi monarki konstitusional kedua, dan pinjaman diberikan dengan mengambil surat berharga ini sebagai jaminan. Sistem keuangan berada dalam krisis, dan satu-satunya perkembangan penting adalah masuknya bank-bank Jerman ke dalam sektor ini.

Sebagai konsekuensi dari meningkatnya pemberontakan, kekacauan politik internal dan eksternal, dan fluktuasi pasar uang dan modal menjelang akhir Kesultanan Ottoman, Monarki Konstitusional Kedua diproklamasikan pada tahun 1908, dan hingga tahun 1914, ketika Perang Dunia I dimulai, terjadilah pemberontakan. terdapat perkembangan signifikan di sektor perbankan dalam kerangka pandangan “ekonomi nasional” pemerintah Union and Progress. Selain bank asing, beberapa bank dalam negeri juga didirikan. Konya İktisadi Milli Bankası, yang mulai beroperasi pada tahun 1911 selama periode ini, merupakan bank pertama di Anatolia yang mempromosikan perekonomian dan perdagangan lokal. Namun, ketika Bank Utsmaniyah, yang dikuasai Perancis dan Inggris selama Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914, berhenti membayar utang luar negeri pemerintah, keuangan Utsmaniyah membutuhkan sumber daya Jerman, sehingga mereka pindah lebih dekat ke Jerman dan bergabung dengan Bank Utsmaniyah.

Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa bank asing beroperasi di Kekaisaran Ottoman, dan modal Bank Ottoman dimiliki oleh orang asing, banyak hak istimewa yang diberikan kepada bank ini menimbulkan reaksi. Akibat meningkatnya gerakan nasionalis, pertumbuhan perbankan nasional di tanah air, serta gagasan pembentukan bank sentral nasional yang mendominasi dunia pada era ini, menjadi perdebatan sengit. Mengingat hal ini, Bank Martabat Nasional Ottoman (Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası) didirikan pada tahun 1917, namun karena kekalahan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia I, bank tersebut tidak dapat mewujudkan tujuannya untuk menjadi bank nasional dan bergabung dengan İsbank pada tahun 1927.

Selain beberapa bank asing yang memasuki sektor perbankan Utsmaniyah di luar Istanbul antara tahun 1890 dan 1915 dengan tujuan menjadi perantara perdagangan luar negeri, dan beberapa bank lokal kecil yang didirikan oleh pedagang lokal untuk memberikan pinjaman komersial di Anatolia pada tahun 1917–1918, terdapat pula tidak ada perkembangan signifikan di bidang perbankan nasional pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Tidak dapat dikatakan bahwa terdapat perkembangan signifikan di bidang perbankan nasional selama masa Kesultanan Utsmaniyah, selain masuknya beberapa bank asing ke sektor perbankan Utsmaniyah yang didirikan di luar Istanbul antara tahun 1890 dan 1915 dengan tujuan untuk menengahi perdagangan luar negeri dan beberapa bank lokal kecil yang didirikan oleh pedagang lokal untuk memberikan pinjaman komersial di Anatolia pada tahun 1917–1918.

Aktivitas perbankan dianggap di seluruh Kekaisaran Ottoman sebagai struktur yang semata-mata berfungsi untuk mendukung defisit anggaran negara dan berkontribusi terhadap

stabilitas mata uang. Terlepas dari kenyataan bahwa Kekaisaran Ottoman tersebar di tiga benua dan mencakup masyarakat dari semua agama, bahasa, dan etnis, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap kegagalan sistem keuangan: Ketidakmampuan Ottoman untuk beradaptasi dengan revolusi industri, pelaksanaan aktivitas perbankan seperti penukaran uang, perdagangan uang, pinjaman berbunga dan transaksi pinjaman, dan dinas militer, penerapan tarif pajak yang rendah untuk orang asing dan tarif pajak yang tinggi untuk penduduk lokal, ketidakmampuan untuk menyediakan akumulasi modal, dan pinjaman publik yang berlebihan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini.

Sistem Perbankan Turki di Era Republik (1923–Selanjutnya)

Perkembangan perbankan Turki selama Era Republik dapat dibagi menjadi dua periode besar: periode 1923 hingga 1980, ketika liberalisasi dimulai, dan periode liberalisasi setelah tahun 1980. Karena strategi ekonomi campuran yang tertutup, negara terlibat secara signifikan dalam perekonomian. aktivitas ekonomi, keuangan, dan perbankan sepanjang era pertama ketika sistem keuangan akan berkembang melalui pengaturan peraturan dan pengendalian atas suku bunga dan nilai mata uang. Tahap kedua dikenal sebagai periode perbankan modern, di mana dampak globalisasi dan liberalisasi keuangan sangat terasa, masuknya bank-bank asing ke dalam sistem perbankan dipercepat, dan teknologi dimanfaatkan secara luas. Namun, berdasarkan perbedaan yang luas, sejarah perbankan Turki akan dieksplorasi dalam beberapa bagian dalam penelitian ini.

Periode Pendirian dan Perbankan Nasional (1923–1932)

Ketika Republik Turki didirikan pada tahun 1923, negara ini mempunyai beberapa pabrik militer, jalur kereta api yang dioperasikan oleh perusahaan asing, perusahaan kecil di kota-kota besar yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air, listrik, dan gas, perusahaan petani kecil yang memegang kekuasaan. modal rendah dan teknologi produksi tradisional untuk melepaskannya ke pasar, dan terbatasnya jumlah perusahaan yang menanam dan mengeksport barang-barang seperti hazelnut, buah ara, anggur kering, dan kapas membuktikan bahwa Turki tidak memiliki struktur ekonomi yang kuat. Karena perekonomian sebagian besar bergantung pada pertanian, diakui bahwa perbankan nasional seharusnya didirikan untuk menjamin pembangunan ekonomi, membiayai perdagangan dan industri, melindungi perekonomian dari modal asing, dan membangun perekonomian dan pasar nasional. Untuk melengkapi kemandirian politik yang diperoleh selama Perang Kemerdekaan dengan kemandirian ekonomi, dilakukan upaya untuk mendirikan bank sentral nasional.

Pada periode yang sama, setelah Perang Dunia I, sebuah gerakan berkembang menuju pembentukan bank sentral agar negara-negara dapat secara mandiri menetapkan kebijakan moneter mereka sendiri dan memberikan emisi melalui hak usia lanjut. Masalah ini pertama kali dibahas pada Kongres Ekonomi Izmir pada tahun 1923, yang dihadiri oleh anggota dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan di negara tersebut. Diputuskan di Kongres bahwa bank-bank nasional harus didirikan dan dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan, dan bahwa negara harus membantu mendorong bidang

perbankan, seperti halnya di semua bidang, karena sumber daya yang tidak mencukupi. sektor swasta, serta berkembangnya pendirian bank-bank nasional pusat.

Pada tanggal 26 Agustus 1924, bank swasta pertama di Era Republik, İis, bank (Türkiye İis, Bankası), didirikan sesuai dengan resolusi yang dibuat pada Kongres Ekonomi Pertama Izmir seperti yang direkomendasikan oleh Atatürk. Bank ini masih beroperasi hingga saat ini sebagai bank swasta terbesar di Turki. Atatürk secara pribadi mendanai bagian dari modal nominal bank sebesar 1 juta TL, sebesar 250 ribu TL. Sinai ve Maadin Bankası (Bank Industri dan Pertambangan), bank pembangunan pertama Turki, didirikan pada tahun 1925 sebagai hasil keputusan yang dicapai dalam Kongres Ekonomi Izmir. Bank ini didirikan dengan tujuan memberikan pinjaman kepada perusahaan industri dan pertambangan yang baru didirikan oleh sektor swasta, menjalin kemitraan dengan sektor swasta, sesekali mengoperasikan perusahaan industri milik negara dan pada akhirnya mengalihkan lembaga-lembaga tersebut ke sektor swasta. dan menyediakan layanan konsultasi keuangan dan ekonomi untuk semua segmen.

Pada tahun 1932, Bank Industri dan Pertambangan menyerahkan pabriknya kepada Kantor Perindustrian, yang kemudian dipindahkan ke Bank Kredit Industri Turki (Bank Türkiye Sanayi Kredi) untuk mengeluarkan pinjaman industri saja. Industri yang berada di tangan Kantor Perindustrian dialihkan ke perusahaan yang baru didirikan ini dengan berdirinya Sümerbank pada tahun 1933. Bank Real Estat dan Yatim Piatu (Emlak ve Eytam Bankası) didirikan pada tahun 1927 untuk menawarkan pembiayaan untuk konstruksi dan operasi zonasi, juga sebagai pinjaman perumahan, selama periode ini nama bank ini kemudian diubah menjadi Bank Real Estat dan Kredit (Emlak ve Kredi Bankası) pada tahun 1946, dan telah bergerak di sektor perbankan perumahan dan komersial Turki selama bertahun-tahun. Pada tahun 1988, Wheat Bank (Bug̃day Bankası) dan Turkish Express Bank (Türk Ekspres Bank) mengubah nama bank menjadi Turkey Real Estate Bank (Türkiye Emlak Bankası), setelah merger dengan Anatolian Banka (Anadolu Bankası) dan Maritime Bank (Denizcilik Bankası) dipindahkan ke Bank Real Estat Turki pada tahun 1992. Sekali lagi, dalam kerangka resolusi Kongres Ekonomi Izmir, struktur keuangan Bank Ziraat diperkuat pada tahun 1924, dan diberi wewenang untuk melakukan semua aktivitas perbankan selain pertanian perbankan (BAT 2008).

Pendirian Bank Sentral adalah salah satu tonggak terpenting di Era Republik. Pembentukan bank sentral independen untuk menjaga stabilitas mata uang Turki, mengendalikan jumlah uang beredar, dan mengelola kebijakan moneter pertama kali dipertimbangkan pada Kongres Ekonomi Izmir tahun 1923. Rancangan undang-undang tentang Bank Sentral disahkan oleh Majelis Agung Nasional Turki pada tanggal 11 Juni 1930, dan diumumkan dalam Berita Resmi pada tanggal 30 Juni 1930, dengan nama Undang-Undang Bank Sentral Republik Turki bernomor 1715.

Bank sentral memulai operasinya pada tanggal 3 Oktober 1931, sebagai perusahaan saham gabungan, dengan penekanan pada posisinya yang sepenuhnya berbeda dan otonom dari lembaga-lembaga publik lainnya, setelah tugas-tugas yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan organisasi dikonsolidasikan ke dalam satu tangan. Tujuan utama Bank Sentral,

menurut Undang-Undang Pendirian, adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Bank telah diberikan wewenang untuk menerbitkan uang kertas dari satu sumber untuk tujuan ini. Pada tahun 1923, Turki mempunyai 35 bank yang beroperasi, 22 di antaranya adalah bank nasional dan 13 di antaranya adalah bank asing. Banyak bank lokal atau bank modal asing didirikan dan mereka diizinkan untuk melayani permintaan kredit para pedagang dan industri antara tahun 1923 dan 1932. Pada tahun 1930, jumlah bank nasional meningkat menjadi 44 sementara bagian negara dalam total simpanan meningkat menjadi 80%. Seperti yang bisa dilihat, sistem perbankan Turki pada era ini terdiri dari penelitian yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional sesuai dengan resolusi yang dibahas dan diadopsi pada Kongres Ekonomi Izmir.

Periode Statisme atau Perbankan Publik (1933–1944)

Tahun 1930-an adalah masa ketika Bank Sentral mempertahankan independensinya, inflasi tetap rendah, dan kebijakan ekonomi yang berpusat pada substitusi impor diberlakukan. Dengan krisis ekonomi paling signifikan dalam sejarah dunia, yang dimulai di Amerika pada tahun 1929 karena kurangnya permintaan, produksi anjlok, perekonomian berkontraksi, pengangguran meningkat, dan harga turun secara signifikan. Kerugian tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian semua negara maju dan berkembang, serta perekonomian dan sistem keuangan Turki. Akibatnya, “statisme” menjadi menonjol dalam kehidupan ekonomi, dan merupakan era di mana kebijakan investasi, produksi, dan industrialisasi dilaksanakan melalui lembaga-lembaga ekonomi publik.

Statisme diartikan sebagai intervensi langsung negara pada setiap sektor perekonomian yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Pada masa ini didirikan bank-bank umum yang mengkhususkan diri pada bidang-bidang tertentu. Banyak bank khusus didirikan dengan modal negara dan menjalankan peran penting sebagai bagian dari Rencana Industri Lima Tahun Pertama. Sümerbank (1933) didirikan untuk organisasi, pengembangan, dan pemberian kredit bisnis dan industri; Etibank (1935) untuk operasi tambang, pembangkitan energi, dan distribusi; Denizbank (1937) untuk pengembangan dan pembiayaan sektor maritim; Belediyeler Bankası (İller Bank (1933) untuk promosi pembangunan perkotaan dan infrastruktur, dan Türkiye Halk Bankası (1938) untuk memberikan pinjaman kepada pengrajin dan pengrajin), bersama dengan bank yang didirikan untuk tujuan tertentu, seperti Türk Ticaret Bankası (1937), untuk membiayai perdagangan. Banyak dari bank-bank ini beroperasi baik sebagai perbankan komersial maupun perbankan khusus. Tahun 1930-an merupakan periode di Turki ketika peraturan-peraturan penting di bidang perbankan dan keuangan diberlakukan, dan berbagai tindakan dilakukan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri.

Meskipun berpusat di Amerika Utara dan Eropa, krisis ekonomi besar dunia yang meletus pada tahun 1929 mempunyai dampak buruk terhadap semua negara, khususnya negara-negara industri, serta perekonomian Turki. Di negara-negara yang terkena dampak krisis, pengangguran melonjak, kegiatan konstruksi terhenti, dan harga-harga turun, terutama produk pertanian, menyebabkan pengangguran meningkat, perekonomian berkontraksi, dan tingkat kesejahteraan menurun. Krisis ini berlanjut selama tahun 1930-an dan Perang Dunia II, dari tahun 1939 hingga 1945 dan dampak buruk Perang Dunia II berdampak negatif

terhadap perekonomian dan industri keuangan Turki, seperti halnya negara-negara lain di dunia.

Seiring dengan gangguan yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II, tahun 1940-an adalah tahun ketika dampak negatif Perang Dunia II mulai terlihat dan pendanaan publik mulai disalurkan dari sumber daya Bank Sentral. Akibat dampak dari kecenderungan ini, Bank Sentral Turki menerapkan strategi yang bertujuan untuk menutup defisit pendanaan sektor publik selama era ini, dibandingkan menjalankan kebijakan moneter yang independen. Akibatnya, tingkat harga keseluruhan naik hampir tiga kali lipat. Akibat Depresi Besar, Turki memiliki 62 bank yang berfungsi pada tahun 1931, dan turun menjadi 40 bank pada tahun 1945.

Periode Saat Operasional Perbankan Swasta Berkembang (1945–1959)

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, keputusan Bretton Woods dan kebijakan ekonomi Keynesian mendapat dukungan luas di seluruh dunia, struktur ekonomi dalam dan luar negeri Turki mulai berubah, dan ini adalah era di mana target pertumbuhan dan pembangunan pesat diprioritaskan. Gagasan tentang statisme ekonomi ditinggalkan, dan strategi industrialisasi didorong ke depan di bawah kepemimpinan sektor swasta. Selama Perang Dunia II, tingginya inflasi dan struktur spekulatif memungkinkan terciptanya kekayaan dalam jumlah besar, khususnya di bidang komersial. Meningkatnya akumulasi kekayaan telah meningkatkan aliran modal ke sektor perbankan. Kebijakan ekonomi yang tertutup dan proteksionis yang telah diterapkan dalam perekonomian Turki sejak tahun 1930-an dibalikkan pada masa ini, dan kebijakan-kebijakan yang lebih liberal dan berorientasi ke luar yang memihak sektor swasta diterapkan. Ekonomi pasar sangat penting dan investasi sektor swasta didorong, dan investasi seperti energi, transportasi, tekstil, besi dan baja, dan sebagainya yang tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena biayanya dibiayai dengan dana pemerintah. dana.

Setelah tahun 1950, sebagai akibat dari perubahan struktur politik, kebijakan ekonomi yang bertujuan mendukung pengusaha terbuka, liberal, dan industri diadopsi. Kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionis tidak lagi sejalan dengan strategi ekonomi yang mendorong kepemilikan swasta, mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan modal asing, dan bertujuan untuk mengembangkan pasar modal. Perubahan kebijakan ekonomi secara keseluruhan ini mempunyai dampak positif terhadap perkembangan sektor perbankan sektor swasta. Namun, khususnya sepanjang tahun 1950an, sumber daya Bank Sentral secara bertahap digunakan untuk mendanai investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan tersebut. Jumlah bank swasta telah berkembang pesat, seiring dengan transisi dari bank dengan satu cabang menjadi bank dengan banyak cabang, dan dari bank lokal menjadi bank nasional. Pada tahun 1944, Turki memiliki 43 bank dan 405 cabang; pada tahun 1959, jumlah bank meningkat menjadi 60 dan jumlah cabang meningkat menjadi 1.759.

Industrialisasi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta perluasan sektor pedesaan ke pasar semuanya meningkatkan kebutuhan kredit dalam perekonomian. Kebutuhan untuk memenuhi permintaan pinjaman yang meningkat memicu keinginan kelompok modal besar dan negara untuk mendirikan bank pada periode ini. Di antara bank-bank yang baru didirikan, negara mendirikan Bank Maritim, Bank Türkiye Vakıflar, dan Bank

Türkiye Öğretmenler. Sebagai bank bermodal swasta terbesar, Yapı ve Kredi Bank (1944), Garanti Bank (1946), Akbank (1948), Pamukbank (1955), dan Türkiye Sanayi Bank (1950) memulai operasinya.

Selain Türkiye Sınai ve Maadin Bankası, yang didirikan pada tahun 1925 tetapi tidak bertahan lama, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası adalah bank pertama yang didirikan di negara kita. Bank-bank komersial menyediakan sebagian besar modal awal bank, sementara Departemen Keuangan memberikan dukungan melalui pinjaman jangka panjang kepada bank. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası terutama membiayai industri manufaktur swasta melalui pinjaman dalam lira Turki dan mata uang asing, dan juga meminjamkan uang ke sektor pembangunan ekonomi penting seperti pertambangan, transportasi, dan energi (Akgüç 1992). Karena pemerintah menetapkan tingkat bunga dan komisi yang diterapkan bank, dan Bank Sentral menangani semua transaksi valuta asing, persaingan antar bank terbatas pada pengumpulan simpanan selama periode ini. Persaingan untuk mengumpulkan simpanan telah menggarisbawahi perlunya perbankan ritel multi-cabang.

Pada masa ini, terjadi tiga perkembangan penting: Pertama, untuk mendorong penanaman modal asing, Undang-Undang tentang Insentif Modal Asing disahkan pada tahun 1954, dan percetakan Uang Bank Sentral didirikan di Ankara pada tahun 1955. , dan uang kertas telah diproduksi di Turki sejak tahun 1957. Terakhir, Undang-undang Bank bernomor 7129 disahkan pada tahun 1958, dan Asosiasi Bank Turki didirikan pada tahun yang sama untuk menjaga hak dan kepentingan industri keuangan, meningkatkan daya saing, melarang persaingan tidak sehat, dan berkontribusi pada pengembangan profesi perbankan. Dana Kewajiban Bank, yang bersumber dari setengah ribu tabungan dan simpanan komersial pada neraca akhir tahun bank, diperkenalkan dengan modifikasi Undang-Undang Perbankan nomor 7129, dan aturan likuidasi progresif di bank adalah diatur. Dana Kewajiban Bank telah ditugaskan ke Dana Penjaminan Simpanan yang dikelola oleh Bank Sentral sejak tahun 1983. Sekali lagi, Undang-Undang Perbankan nomor 7129 menghapus batasan penggunaan pinjaman oleh bank-bank pemerintah, sehingga pemberian pinjaman dapat dilanjutkan.

Sejak tahun 1953, struktur perekonomian telah terkikis akibat penggunaan sumber daya Bank Sentral yang berlebihan oleh pemerintah. Inflasi, ketidakseimbangan perdagangan, dan utang luar negeri semuanya meningkat tajam. Karena bahan mentah atau produk setengah jadi tidak dapat diimpor karena kekurangan uang asing, tingkat pemanfaatan kapasitas di sektor tersebut menurun, dan devaluasi menjadi tidak terhindarkan mulai tahun 1958. Nilai tukar dolar/TL dinaikkan dari 2,8 lira menjadi 9 lira sebagai bagian dari Program Stabilisasi yang dicanangkan.

Namun, karena penggunaan sumber daya bank sentral yang berlebihan memperburuk inflasi, sebuah era baru telah dimulai di mana perbankan Turki akan beroperasi di lingkungan inflasi yang tinggi setidaknya selama 40 tahun ke depan. Dalam jangka pendek, perekonomian Turki mengalami depresi dan resesi pada akhir tahun 1950-an sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang mengakibatkan inflasi berlebihan dan penyalahgunaan sumber daya Bank Sentral, yang berujung pada penutupan beberapa bank.

Periode Perekonomian Terencana (1960–1979)

Akibat degradasi ekonomi tahun 1950-an, kebijakan ekonomi liberal dihilangkan, dan praktik ekonomi campuran dan terencana berdasarkan substitusi impor, yang tertutup bagi pihak luar dan bertujuan untuk menjamin produksi barang-barang industri impor dalam negeri, di mana negara intervensi di bidang ekonomi, dipulihkan. Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (1963–1967) dirancang untuk meningkatkan tabungan nasional, memfokuskan investasi pada prioritas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat, dan mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya melalui metode demokratis.

Periode ini didefinisikan sebagai “periode yang direncanakan” karena rencana pembangunan Turki, yang telah dilaksanakan sejak tahun 1963 dan diperbarui setiap lima tahun. Karena Turki dikelola sebagai perekonomian tertutup selama periode ini, suku bunga dan mata uang, batas kredit bank, dan tingkat komisi ditetapkan secara independen dari pasar luar negeri. Selama waktu yang direncanakan, sebagian besar industri perbankan berada di bawah kendali dan pengaruh pemerintah, dan sumber daya sistem perbankan Turki disalurkan untuk membiayai investasi yang diuraikan dalam rencana pembangunan lima tahun.

Bank-bank asing atau Turki tidak diperbolehkan untuk didirikan selama periode ini, kecuali lima bank pembangunan dan dua bank swasta. Lima bank pembangunan, yaitu T.C Turizm Bankası (1962), Sinai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden Bankası (1968), dan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (1976), didirikan bersama dengan dua perusahaan swasta milik bank komersial, yaitu Amerikan—Türk Dış Ticaret Bankası (1964) dan Arap-Türk Bankası (1977) (BAT 2008).

T.C. Turizm Bankası didirikan dengan dana publik pada tahun 1962, dan statusnya diubah pada tahun 1986 menjadi sekelompok bank pembangunan dan investasi milik negara, sebelum dipindahkan ke Türkiye Kalkınma Bankası A.S., dengan seluruh aset dan kewajibannya pada tahun 1989. Sinai Yatırım ve Kredi Bankası (Sinai Yatırım ve Kredi Bankası A.S.,) adalah bank pembangunan yang didirikan oleh enam bank komersial swasta dengan tujuan mendanai investasi sektor swasta dalam rencana pembangunan mereka melalui media - dan pinjaman jangka panjang. Devlet Yatırım Bankası didirikan untuk mendanai proyek-proyek yang tercakup dalam rencana pembangunan, dan bank ini dibentuk kembali menjadi Türkiye İhracat Kredi Bankası pada tahun 1987.

Türkiye Maden Bankası didirikan pada tahun 1968 tetapi baru mulai beroperasi pada tahun 1974, ketika bank tersebut dibubarkan. Pada tahun 1976, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası didirikan sebagai bank pembangunan pemerintah untuk menawarkan sumber daya bagi pembiayaan industri dan untuk menyediakan layanan di sektor pariwisata dengan pengalihan Turizm Bankası dengan seluruh aset dan kewajibannya pada tahun 1987, sementara itu direorganisasi pada tahun 1999 sebagai Türkiye Kalkınma Bankası untuk memberikan dukungan keuangan untuk inisiatif investasi dan kewirausahaan bagi entitas swasta di sektor industri dan pariwisata dan diberi nama Türkiye Kalkınma Bankası A.S., pada tahun 2018. Selama periode ini, dua bank komersial didirikan: Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası (1964), perusahaan patungan antara Bank of America dan Türkiye İş Bankası, dan Arap Türk Bankası (1977) yang merupakan contoh pertama ekspansi internasional (BAT 2008).

Selama periode Republik, Amerika Türk Di Dicaret Bankası adalah bank pertama yang didirikan dengan melibatkan modal asing.

Bank Arab-Turki, sebaliknya, didirikan dengan modal Libya dan Kuwait untuk memikat modal Arab ke Turki, dan merupakan bank yang mengkhususkan diri dalam transaksi komersial antara Turki dan Timur Tengah serta Afrika Utara. Pada masa ini, kebijakan penggunaan sebagian besar sumber daya bank untuk pinjaman publik atau pendanaan investasi publik dimulai dan berlangsung hingga krisis keuangan tahun 2001. Suku bunga, nilai mata uang, dan arus modal (trio yang mustahil) tidak dapat dikelola secara bersamaan dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Oleh karena itu, karena suku bunga dan nilai tukar dikendalikan sebagai kebijakan ekonomi, artinya, bank tidak mengambil risiko suku bunga dan nilai tukar serta mentransfer sebagian besar sumber daya yang mereka kumpulkan kepada masyarakat sebagai pinjaman, sehingga bank beralih ke lebih banyak sumber daya. perbankan cabang untuk meningkatkan profitabilitas mereka, khususnya dalam hal simpanan. Pada saat ini, ketika bank-bank besar memperluas jaringan cabangnya, khususnya di kota-kota besar dengan potensi simpanan yang besar, bank-bank kecil berusaha menghemat biaya dengan melakukan merger.

Ketika sistem keuangan Turki bertransisi ke perekonomian terencana pada tahun 1960an, investasi sektor swasta masih belum mencukupi karena kurangnya tabungan dan kurangnya program untuk meningkatkan tabungan. Pendanaan investasi publik dengan menggunakan sumber daya yang diberikan oleh anggaran publik dan pinjaman domestik dan internasional, serta penyediaan sumber daya yang berkelanjutan oleh bank sentral kepada publik melalui kebijakan moneter ekspansif, telah mempercepat inflasi. Selain faktor-faktor tersebut, ketidakmampuan sumber daya yang langka untuk dialokasikan secara efektif untuk memperbaiki kondisi perekonomian, industri keuangan, dan pembangunan, serta kesulitan dalam mengumpulkan subsidi dan pinjaman, telah mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar yang tidak terkendali dan inefisiensi. Meskipun investasi dan output tidak mencukupi, peningkatan pesat jumlah uang beredar merupakan faktor paling mendasar dari lonjakan cepat tingkat inflasi pada tahun tujuh puluhan.

Fase baru dalam sejarah Bank Sentral dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Bank Sentral baru nomor 1211 pada tahun 1970 untuk mencegah kesulitan-kesulitan dalam struktur perekonomian dan untuk meningkatkan efisiensi bank sentral. Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap status Bank, struktur organisasi, dan operasional dengan Undang-Undang Bank Sentral yang baru, dan di dalamnya telah diatur bahwa bagian Bank dalam modal Perbendaharaan tidak boleh kurang dari 51% sedangkan status Perusahaan Saham Gabungan Bank adalah dilestarikan.

Tugas dan wewenang Bank dalam mengatur transaksi uang dan perkreditan diperluas dengan Undang-undang nomor 1211, begitu pula dengan kendali Bank terhadap instrumen kebijakan moneter. Bank juga diberi wewenang untuk melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar dan likuiditas, serta memberikan pinjaman jangka menengah dengan transaksi diskon ulang untuk mendukung investasi dan pembangunan ekonomi serta kebijakan pemilihan kredit. Selain itu, batas tertinggi jumlah uang muka yang harus diserahkan

ke Departemen Keuangan telah dinaikkan menjadi 15% dari pengeluaran anggaran tahun terkait.

Singkatnya, selama periode perencanaan antara tahun 1960 dan 1979, perbankan pembangunan dan investasi didorong, pendirian bank-bank komersial swasta dibatasi, sebagian besar bank-bank komersial swasta diubah menjadi holding banking, dan holding banking bahkan didukung oleh negara pada tahun 1979. Keyakinan bahwa hal ini akan mempercepat investasi sektor swasta, dan persaingan antar bank semakin buruk dalam aktivitas percabangan karena risiko suku bunga riil dan nilai tukar yang rendah dan bahkan negatif. Hal ini diasumsikan sebagai fase terakhir dari perbankan induk tradisional, non-spesialisasi, dan tertutup, yang terutama menyediakan layanan untuk kebutuhan pembiayaan kelompok perusahaan sejak Republik.

Transisi ke Ekonomi Pasar, Liberalisasi Keuangan, dan Ekspansi Internasional (1980–1990)

Meskipun perkembangan pesat terjadi dalam rekonstruksi selama periode yang direncanakan, kebijakan ekonomi harus diidentifikasi ulang karena meroketnya inflasi akibat penggunaan sumber daya bank sentral yang berlebihan dalam membiayai investasi dan industrialisasi, volume produksi gagal mendukung ekspor karena produksi hanya memenuhi permintaan pasar domestik, deformasi neraca pembayaran, dan kekurangan mata uang asing. Kebijakan ekonomi dan industri yang mandiri dan tersubstitusi impor ditinggalkan pada tanggal 24 Januari 1980, dengan penerapan dan penerapan strategi ekonomi pasar bebas yang diperluas secara internasional dengan liberalisasi keuangan dan ekonomi liberal berdasarkan ekspor, industrialisasi, dan pertumbuhan.

Dengan pengambilan keputusan pada tanggal 24 Januari 1980, terjadilah revolusi mendasar dalam perekonomian, struktur keuangan, dan sistem perbankan Turki, dan tahun 1980-an merupakan tahun-tahun perkembangan signifikan dalam perekonomian dan industri perbankan Turki. Sepanjang era baru ini, mata uang Turki mengalami devaluasi terhadap mata uang lainnya, dan sistem nilai tukar tetap dicabut untuk memungkinkan transisi yang sehat menuju perekonomian perdagangan bebas yang berpusat pada ekspor, dengan nilai tukar yang fleksibel (berfluktuasi).

Dengan dimulainya proses liberalisasi keuangan, bank sentral mengambil langkah-langkah signifikan untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan nilai tukar dengan ekonomi pasar bebas. Diputuskan untuk menentukan suku bunga yang sesuai pada rekening simpanan dan pinjaman sesuai dengan kondisi pasar, dan kebijakan bunga riil yang positif diperkenalkan. Pengendalian harga ditinggalkan demi menghasilkan harga dalam kerangka mekanisme pasar, dan perjanjian penting dibuat untuk meliberalisasi, memperluas, dan mereformasi pasar keuangan secara mendalam.

Pada tanggal 1 Juli 1980, pengaturan pertama dan terpenting untuk pengembangan, perluasan, dan liberalisasi perbankan dan sistem keuangan ditetapkan ketika suku bunga deposito dan pinjaman diturunkan. Suku bunga pada rekening simpanan dan pinjaman meningkat pesat sebagai akibat dari pelepasan suku bunga, kemampuan bank untuk menerbitkan sertifikat simpanan, dan inisiatif lain untuk mempromosikan. Bank harus bersaing secara agresif melawan “bankir” yang berkembang biak seperti kelinci dan di antara

mereka sendiri selama periode ini karena inflasi merajalela, tingkat suku bunga riil rendah, dan langkanya instrumen investasi alternatif.

Pada masa ini, bisnis yang didirikan dengan tujuan meminjamkan uang disebut sebagai “bankir”, dan pekerjaan mereka dikategorikan sebagai “broker”. Tidak ada syarat pasti atau persyaratan modal yang dikenakan pada bankir. Meskipun tingkat bunga yang berlaku untuk rekening simpanan di bank dibatasi pada periode ketika tingkat bunga tahunan mencapai 30–40%, para bankir membayar tingkat bunga sebesar 10% per bulan karena tidak ada batasan bunga bagi para bankir. Para deposan yang mencari keuntungan lebih tinggi daripada tingkat inflasi mulai menyimpan tabungan mereka pada bankir.

Para bankir menggunakan sertifikat mereka sendiri untuk mempromosikan sertifikat deposito yang dikurangi yang mereka peroleh dari bank kepada klien mereka, dan mereka menerima simpanan (uang) dengan cara yang tidak diatur dan tidak sesuai dengan undang-undang peminjaman uang dan perbankan. Bunga yang dibayarkan atas uang tunai yang ditempatkan pada bankir hanya dibayarkan pada rekening deposito baru yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, sementara jumlah yang terkumpul digunakan secara boros untuk urusan pribadi.

Beberapa bank mempekerjakan bankir sebagai perantara untuk menjual sertifikat deposito guna mengumpulkan dana, sementara beberapa perusahaan induk mendirikan bisnis pialang mereka sendiri. Bank menciptakan bisnis bankir mereka sendiri untuk menjalankan operasi apa pun yang tidak dapat mereka lakukan karena kendala peraturan. Yatrm-Finansman adalah nama komersial korporasi yang didirikan pada pertengahan tahun 1980 dengan partisipasi tiga belas bank terkemuka.

Banyaknya uang yang terkumpul membuat banyak orang tergiur untuk terjun ke bisnis pialang, sedangkan persaingan menghimpun dana dengan bunga tinggi mengakibatkan terjerumus ke dalam utang untuk membayar bunga uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu, dan berlomba-lomba untuk menawarkan. kepentingan yang mengakibatkan krisis dimulai. Kasus pertama, pada tahun 1982, ketika inflasi mencapai 30%, Hisarbank, yang akan bangkrut, menawarkan bunga 80% pada rekening tabungan satu tahun. Perlombaan untuk mendapatkan bunga akhirnya berakhir dengan krisis keuangan yang dikenal sebagai “krisis bankir” pada tahun 1982. Akibat krisis ini, banyak bank dan bisnis bankir bangkrut, dan krisis ini merugikan sekitar 2,5% PDB negara tersebut. Setelah krisis, pembatasan pada semua jenis rekening simpanan dihapuskan, dengan diberlakukannya jaminan negara pada rekening simpanan, dan program reorganisasi sistem perbankan dimulai.

Karena adanya permasalahan dalam bisnis perbankan dan pialang, penerapan bunga bebas dihentikan pada tahun 1983, dan suku bunga bebas diberlakukan kembali pada tahun 1987. Sistem perbankan menjadi rentan terhadap risiko keuangan sebagai akibat dari pelepasan suku bunga simpanan dan pinjaman. , serta nilai tukar mata uang, izin yang diberikan untuk pendirian bank asing, izin yang diberikan kepada bank untuk menyediakan posisi valuta asing, pembelian dan penjualan valuta asing, dan izin pembukaan rekening valuta asing. Selain itu, karena persaingan yang ketat, bank memperluas investasi mereka di bidang teknologi dan mengalihkan semua aplikasi keuangan yang relevan dari pasar luar negeri ke

dalam negeri dalam upaya menyediakan berbagai layanan. Melalui anak perusahaan dan afiliasinya, bank secara langsung menawarkan pinjaman konsumen, kartu kredit, rekening simpanan valuta asing, anjungan tunai mandiri, serta metode pembiayaan seperti leasing, anjak piutang, forefeiting, dan aplikasi manajemen risiko seperti forward, swap, futures, dan opsi. Selama masa ini, perbankan Turki berkembang dan menginternasionalisasi.

Undang-Undang Pasar Modal disahkan pada tahun 1982 untuk menjaga kepercayaan, transparansi, dan stabilitas pasar modal, serta untuk membela hak dan keuntungan para penabung, atau investor, dan Dewan Pasar Modal, organisasi pengatur dan pengawas pertama di Turki, didirikan. Bursa Efek Istanbul didirikan pada tahun 1986 untuk memfasilitasi penjualan dan pembelian instrumen uang dan modal saham dalam lingkungan yang adil, andal, dan kompetitif dalam kerangka undang-undang tersebut di atas. Pada awalnya, sistem ini berkembang pesat karena mudahnya akses masyarakat terhadap bursa efek dan juga banyaknya cabang bank yang tersebar luas karena bank-bank tersebut secara langsung mendaftarkan keanggotaannya ke bursa efek; namun, ketika bank dilarang menjadi anggota langsung pasar saham Bursa Efek pada tahun 1997, proses perkembangan pesat pasar modal pun berakhir.

Ketika dampak krisis para bankir dinilai dengan tepat, Bank Sentral membentuk Dana Asuransi Simpanan (SDIF) pada tahun 1983 untuk mencegah krisis likuiditas di masa depan dan menjaga keuntungan para deposan. Karena krisis ekonomi tahun 1994, tanggung jawab SDIF diperluas, dan SDIF bertanggung jawab untuk memperkuat struktur keuangan bank dan merestrukturisasi bank bila diperlukan, selain mengasuransikan simpanan tabungan. Pada tahun 1985, Undang-Undang Perbankan Nomor 3182 mulai berlaku dengan tujuan mengatur pendirian, pengurusan, kegiatan operasional, penugasan, penggabungan dan likuidasi, serta pengawasan untuk memberikan perlindungan terhadap rekening simpanan dan memelihara penggunaan rekening tersebut sesuai dengan ketentuan persyaratan pembangunan ekonomi.

Mulai awal tahun 1986, rencana akuntansi yang seragam diterapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menghasilkan neraca dan tabel pendapatan yang seragam, serta untuk memverifikasi dan mengawasi data tersebut untuk tujuan pengawasan dan pengawasan, bersama dengan analisis keuangan, analisis risiko, analisis efisiensi, dan berbagai analisis dan interpretasi. Setelah tahun 1989, era “suku bunga lebih tinggi, inflasi lebih tinggi” dimulai dalam perekonomian. Mendanai sejumlah besar defisit anggaran yang meningkat pesat melalui pinjaman dalam negeri telah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap sumber daya keuangan.

Sementara itu, meskipun terjadi liberalisasi pergerakan modal, kebijakan inflasi yang didasarkan pada peningkatan permintaan domestik menyebabkan tekanan yang besar terhadap neraca pembayaran, yang kemudian menyebabkan kenaikan suku bunga riil. Ekspektasi telah memburuk, dan ketidakpastian meningkat sebagai akibat dari ketidakmampuan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi. Hilangnya disiplin makroekonomi tercermin pada aktivitas dan pengawasan sektor keuangan. Bank Sentral Republik Turki diberi wewenang untuk mengelola emas dan

cadangan devisa negara sebagai hasil amandemen Undang-Undang Bank Sentral selama periode ini.

Pasar Uang Antar Bank didirikan pada tahun 1986 dengan tujuan untuk menggunakan sumber daya di sektor perbankan secara lebih efisien, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk menilai kelebihan uang tunai, yaitu untuk mengurangi masalah likuiditas, dan Bank Sentral mulai melakukan operasi pasar terbuka pada tahun 1987. Pada masa ini, bank sentral menjadi penggerak pembentukan pasar uang dan valuta asing negara. Pasar valuta asing didirikan pada tahun 1988, dan pasar emas pada tahun 1989. Dengan Resolusi nomor 32 yang diadopsi pada tahun 1989, pergerakan modal diliberalisasi, dan lembaga keuangan diizinkan untuk bertransaksi dalam mata uang asing.

Bank diperbolehkan mengumpulkan uang tunai dari luar negeri melalui sindikasi atau sekuritisasi setelah liberalisasi pergerakan modal. Saat ini, sumber daya pinjaman jangka menengah dan panjang yang diterima dari luar negeri telah melampaui deposito sebagai sumber daya yang paling penting bagi bank. Selain liberalisasi keuangan dan upaya ekspansi internasional sistem perbankan Turki setelah tahun 1980, ini adalah awal dari periode di mana konsep perbankan bebas bunga atau Islam, yang telah muncul di dunia sejak tahun 1960, mulai berkembang di Turki juga.

Di Turki, praktik perbankan dan keuangan Islam yang dikenal sebagai perbankan partisipasi juga berkembang selama tahun-tahun ini. Jenis perbankan ini, yang beroperasi berdasarkan untung-rugi di Turki, pada awalnya dimasukkan ke dalam sistem keuangan Turki dengan istilah "Rumah Keuangan Khusus." Namun, sejak tahun 2006, perusahaan keuangan swasta yang memiliki keraguan untuk diklasifikasikan sebagai "bank" dalam transaksi dan pasar luar negeri telah ditetapkan sebagai bank partisipan.

Singkatnya, setelah penerapan kebijakan pertumbuhan berdasarkan ekonomi pasar bebas pada tahun 1980, peraturan diberlakukan untuk memastikan liberalisasi di sektor perbankan dan keuangan dan untuk menghilangkan hambatan persaingan pada periode ini. Sebuah struktur baru didirikan di bidang pengawasan dan pengawasan untuk melindungi para deposan sementara hambatan untuk masuk ke dalam sistem dihilangkan dan suku bunga dilepaskan pada tahun 1981, dengan undang-undang pasar modal diberlakukan pada tahun 1982.

Undang-Undang Pasar Modal, diadopsi pada tahun 1982, menetapkan mekanisme untuk pengembangan instrumen pasar modal, sementara perdagangan valuta asing dimulai pada tahun 1984 dan pergerakan modal dimulai pada tahun 1989, sebagai bagian dari upaya sektoral untuk internasionalisasi. Sebagai konsekuensi dari penelitian dan perundang-undangan, jumlah bank dalam sistem perbankan Turki meningkat dari 37 pada tahun 1980 menjadi 64, dan ukuran aset meningkat dari 20,8 miliar dolar menjadi 58,2 miliar dolar.

Periode Krisis Ekonomi dan Keuangan (1991–2001)

Kemajuan signifikan dicapai pada tahun 1990an dalam hal keterbukaan industri perbankan terhadap dunia luar dan mengintegrasikannya dengan sistem keuangan global. Mata uang Turki dianggap dapat dikonversi pada tahun 1990, dan sistem nilai tukar yang lebih liberal diterapkan. Masyarakat yang tinggal di luar negeri kini diperbolehkan membuka

rekening bank dalam TL dan mata uang asing, serta memperdagangkan saham di Turki, berdasarkan peraturan baru ini.

Rasio simpanan yang terhimpun dalam rekening simpanan mata uang asing terhadap total simpanan meningkat secara signifikan sepanjang tahun 1990an. Fenomena “substitusi mata uang lokal dengan mata uang asing,” yang dikenal sebagai dolarisasi, muncul dalam perekonomian sebagai akibat dari inflasi yang terus-menerus dan berlebihan. Selama periode ini, sektor perbankan mengalami pertumbuhan pesat dengan bergabungnya bank-bank lokal dan asing ke dalam sistem keuangan, investasi teknologi yang pesat, langkah-langkah signifikan menuju pelembagaan pasar uang dan pasar modal, persaingan meningkat sebagai akibat dari liberalisasi simpanan dan suku bunga pinjaman, dan lebih mudah bagi bank untuk memasok sumber daya dari luar negeri karena kebebasan yang diberikan dalam rezim valuta asing.

Namun, karena defisit anggaran yang meningkat pesat dan tingginya pinjaman pemerintah sebagai akibat dari defisit anggaran yang terus meningkat, sebagian besar sumber daya bank dialokasikan untuk pembiayaan publik dan surat utang negara berbunga tinggi serta obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Turki. Untuk tujuan ini. Oleh karena itu, bank mengarahkan sektor riil ke pembiayaan publik dibandingkan menawarkan pinjaman dan menyalurkan sumber daya untuk investasi jangka panjang guna membiayai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenyataannya, meskipun rasio pinjaman/simpanan sebesar 84% pada awal tahun 1990, rasio tersebut turun menjadi 50% pada tahun 2000.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan defisit publik, Bank Sentral mampu menutup sebagian besar defisit anggaran, yang berarti bahwa pelaksanaan program tersebut harus dilakukan dengan cara yang sama. Kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif berkontribusi pada spiral “bunga tinggi, inflasi tinggi.” Sekali lagi, ekspansi signifikan di sektor perbankan ritel, serta peningkatan jumlah kartu kredit, berdampak signifikan terhadap peningkatan total permintaan selama ini.

Meskipun suku bunga dan aliran modal bebas pada periode ini, namun nilai tukar yang masih terkendali mengakibatkan peningkatan signifikan pada investasi portofolio asing jangka pendek. Kepemilikan terbuka bank-bank meningkat dengan cepat seiring dengan melebarnya perbedaan suku bunga. Posisi terbuka bank akibat kesenjangan yang lebar antara suku bunga dan nilai tukar meningkatkan risiko nilai tukar pada bank, dan sebagai akibat dari ketidakmampuan melaksanakan perubahan struktural yang dijanjikan, hal ini membuka jalan bagi dimulainya periode keuangan krisis.

Pada awal tahun 1990, Bank Sentral mulai menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan ukuran neraca dan pinjaman yang diberikan kepada Departemen Keuangan, yang merupakan salah satu kewajiban domestiknya, untuk mengelola ukuran neracanya sendiri dan menurunkan jumlah utangnya. Inflasi. Mempertahankan suku bunga tinggi dan nilai tukar rendah mengakibatkan peningkatan impor dan penurunan ekspor. Padahal, meski bertujuan untuk mendorong masuknya mata uang asing dengan menjaga nilai tukar tetap rendah, hal itu justru meningkatkan defisit perdagangan luar negeri.

Bank Sentral melakukan upaya dalam melaksanakan kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen transaksional seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskon ulang, cadangan minimum, dan pembelian dan penjualan mata uang asing. Namun, sebagai akibat dari Krisis Teluk pada tahun 1991 dan pemilihan umum awal yang diadakan pada tahun itu, likuiditas TL dan valuta asing dari pasar menurun drastis, dan hal ini berdampak buruk pada struktur keuangan bank karena hal ini meningkatkan biaya pembiayaan mereka.

Karena permintaan pinjaman yang tinggi di sektor publik terus meningkatkan defisit anggaran, inflasi dan biaya pinjaman Departemen Keuangan meningkat sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan hingga awal tahun 1994. Karena suku bunga dan pergerakan modal bebas dan nilai tukar mata uang asing rendah, bank mengkonversi mata uang asing yang mereka berikan dari luar negeri melalui surat utang ke Lira Turki dan menginvestasikan jumlah tersebut dalam sekuritas publik domestik berbunga tinggi selama periode ini atau lebih memilih untuk membiayai pinjaman individu. Investor portofolio asing bergabung dengan pasar keuangan untuk berinvestasi pada instrumen utang dalam negeri pemerintah dan saham untuk memanfaatkan peluang “bunga tinggi, nilai tukar rendah” (BAT 2008).

Pada awal tahun 1994, pemerintah berusaha menurunkan suku bunga untuk membatasi masuknya uang panas dan meningkatkan nilai tukar, dan alih-alih memanfaatkan pinjaman domestik berbunga tinggi, pemerintah beralih ke uang muka Bank Sentral dan pinjaman luar negeri. Meskipun kondisi ini membatasi pemanfaatan sumber daya di bank, namun juga memperluas posisi terbuka mereka dari hari ke hari. Meskipun langkah-langkah struktural dan kebijakan ekonomi yang tepat seharusnya diterapkan untuk menghilangkan ketidakseimbangan makro dan mengurangi suku bunga tinggi, upaya untuk mengurangi suku bunga tinggi menggunakan metode yang salah (meningkatkan penjualan aset keuangan dalam mata uang TL karena pajak tambahan yang dikenakan pada instrumen keuangan, dll.) meningkatkan orientasi terhadap mata uang asing. Akibatnya, Rekening Deposito Valuta Asing di bank terus meningkat, begitu pula ketidakseimbangan perdagangan luar negeri, dan peringkat kredit Turki kemudian diturunkan.

Kenaikan nilai tukar yang cepat memicu krisis keuangan yang dimulai di sektor perbankan pada tanggal 5 April 1994. Bank Sentral menjual sejumlah besar mata uang asing dalam upaya menstabilkan nilai mata uang asing, namun suku bunga melonjak ke rekor tertinggi, lira Turki kehilangan 200% nilainya dibandingkan mata uang asing, dan suku bunga semalam meningkat hingga hampir 800%. Tahun 1994 merupakan tahun dimana posisi terbuka bank berubah menjadi kerugian, bank dengan struktur keuangan yang lemah menjadi bangkrut, dan aset sistem perbankan menurun drastis.

Untuk memulihkan stabilitas pasar keuangan, kurs valuta asing dirilis dengan “Keputusan 5 April”, kurs harian ditetapkan berdasarkan kurs penjualan valuta asing dari sepuluh bank dengan transaksi valuta asing tertinggi di Pasar Valuta Asing Antar Bank, Bank Sentral menjual mata uang asing ke bank, dan bank menutup posisi terbukanya. Penggunaan sumber daya Bank Sentral oleh Departemen Keuangan dibatasi, dan semua simpanan dijamin. Aktivitas tiga bank (TYT Bank, Marmarabank, dan Impexbank), yang mengalami kerugian besar

selama periode ini dan modal ekuitasnya berubah negatif, menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

Pemulihan ekonomi yang cepat yang terjadi setelah tahun 1995 mendorong perluasan sistem keuangan seperti halnya industri lainnya. Meskipun bunga riil yang tinggi membuat instrumen investasi dalam Lira Turki menarik dan substitusi mata uang sedikit melambat, posisi valuta asing dibuka kembali, permintaan investor domestik dialihkan ke instrumen keuangan jangka pendek, pinjaman luar negeri berbiaya tinggi dilanjutkan, dan sebagian besar permintaan simpanan dan deposito berjangka di sektor perbankan memiliki denominasi harian dan tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara sebagian simpanan dalam negeri dialihkan ke bank luar negeri. Pada tahun 1996, penerapan seperti rekening bersama publik, pinjaman yang diindeks inflasi, dan pinjaman mata uang asing bertujuan untuk membantu memenuhi permintaan pinjaman publik yang terus meningkat, tanpa menaikkan suku bunga.

Terlepas dari krisis Asia, yang muncul pada tahun 1997 sebagai akibat dari liberalisasi pergerakan modal di Asia, kebijakan nilai tukar tetap, perlambatan ekspor, peningkatan defisit transaksi berjalan, dan penurunan kualitas pinjaman bank, semuanya tetap ada. Hal ini berdampak buruk pada semua pasar keuangan, ekspektasi investor asing dan domestik terhadap Turki membaik, cadangan devisa meningkat, suku bunga menurun, dan investor mulai kembali menyukai rekening deposito. Namun, keadaan sulit ini tidak membatasi kecenderungan bank untuk mempertahankan posisi terbuka; hal ini malah mendorong bank untuk memperluas kepemilikan terbuka mereka.

Sementara itu, Rusia mengumumkan moratorium non-pembayaran pinjaman luar negeri pada tahun 1998, dan meskipun perekonomian Rusia anjlok 5,3% pada tahun itu, Rusia mampu memulihkan posisi ekonominya karena kenaikan harga minyak. Meskipun terjadi krisis di Asia dan Rusia, baik struktur ekonomi Turki maupun sistem keuangan perbankannya tidak banyak berubah. Inflasi, suku bunga, defisit perdagangan internasional, defisit transaksi berjalan, defisit anggaran, dan utang pemerintah semuanya meningkat. Sementara itu, gempa bumi besar melanda Turki bagian barat pada bulan Agustus 1999.

Gempa bumi Marmara, yang terjadi dalam kondisi seperti itu, memperburuk kesengsaraan keuangan. Undang-Undang Perbankan yang baru disahkan pada bulan Juni 1999 untuk menyelaraskan kontrol hukum dan kelembagaan di sektor perbankan dengan standar internasional. Badan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan (BRSA), sebuah badan tertinggi baru dengan otonomi administratif dan keuangan, dibentuk dengan Undang-Undang Perbankan yang baru, dan standar yang lebih ketat diberlakukan untuk pendirian dan permulaan operasi, serta pemantauan dan pengawasan kegiatan bank. Pada tahun yang sama, lima bank simpanan (Egebank, Esbank, Yas, arbank, Interbank, dan Yurtbank) dipindahkan ke Dana Asuransi Simpanan (SDIF). United Investment Bank yang merupakan bagian dari kelompok bank investasi dan pembangunan ditutup dengan pencabutan izin perbankannya.

Karena tingginya inflasi yang kronis dan kekhawatiran mengenai keberlanjutan utang, perjanjian siaga baru dengan IMF dibuat pada bulan Desember 1999, dan program stabilisasi di mana nilai mata uang ditentukan berdasarkan target inflasi pun dilaksanakan. Menurut program ini, nilai tukar mata uang akan diumumkan setiap tahun, ekspansi moneter akan

dibatasi hanya dengan pembelian valuta asing, defisit pemerintah akan diturunkan melalui disiplin fiskal yang ketat, dan surplus primer akan ditingkatkan. Pada awalnya, hasil yang baik di bidang pertumbuhan, inflasi, dan keuangan publik dihasilkan dari pelaksanaan program ini. Suku bunga menurun, inflasi turun, dan produksi serta permintaan melonjak.

Sebagai akibat dari keputusan Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga jangka pendek untuk mengendalikan inflasi, dan asumsi bahwa tidak ada risiko nilai tukar karena nilai tukar yang diumumkan sebelumnya, bank membeli surat utang dalam negeri pemerintah dengan cara melakukan konversi sumber daya devisa mereka ke dalam TL atau pinjaman dalam jangka pendek karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah. Bank tidak ragu-ragu untuk meminjam lebih banyak dalam jangka pendek dan berinvestasi pada aset jangka panjang, serta menghadapi risiko jatuh tempo dan suku bunga karena mereka yakin tidak akan terkena risiko nilai tukar mata uang asing. Bank mengurangi pemberian pinjaman, yang sebelumnya merupakan salah satu kegiatan utama mereka, dan berkembang menjadi organisasi yang bertujuan untuk membiayai masyarakat.

Mereka mengalihkan fokus pembiayaannya ke pinjaman individu, yang mereka yakini menguntungkan. Contoh sempurna untuk menggambarkan skenario ini adalah Demirbank. Demirbank, yang telah menjadi bagian dari sistem perbankan Turki sejak tahun 1953, memiliki 10% dari total saham utang domestik publik dalam portofolio sekuritasnya, dengan pinjaman jangka pendek dan posisi terbuka jauh melebihi batas hukum, meskipun faktanya deposito berjangka menyumbang 1% dari total sumber dayanya. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem ini menimbulkan kerapuhan pada sektor perbankan, suku bunga turun drastis pada awal tahun 2000, impor menjadi lebih murah, perdagangan internasional dan defisit transaksi berjalan meningkat, dan PDB melonjak sebagai akibat dari kebijakan nilai tukar yang diterapkan.

Meskipun terdapat reformasi struktural yang positif seperti privatisasi, peningkatan usia pensiun, dan peningkatan sistem jaminan sosial, penilaian nilai tukar riil yang berlebihan, penurunan kepercayaan terhadap program IMF, risiko yang ditanggung oleh sistem perbankan, dan hilangnya sumber daya manusia. Keyakinan terhadap kelangsungan risiko-risiko ini dalam jangka panjang semuanya berkontribusi pada hilangnya kepercayaan terhadap perekonomian pada akhir tahun 2000. Bank-bank menggunakan mata uang asing untuk menyelesaikan posisi terbuka dan meningkatkan permintaan TL mereka untuk membeli mata uang asing.

Hal ini meningkatkan ekspektasi devaluasi, dan ketika permintaan mata uang asing yang spekulatif ditambah dengan peningkatan permintaan valuta asing, krisis likuiditas TL secara dramatis meningkatkan suku bunga jangka pendek dan akibatnya biaya pembiayaan bank. Modal investor asing lari akibat krisis ini, dan Etibank diserahkan kepada SDIF pada bulan Oktober 2000. Ketika implementasi program ekonomi meningkatkan kekhawatiran akan nilai tukar dan likuiditas bank, banyak bank yang takut bahwa mereka tidak lagi dapat melakukan hal tersebut. mengelola risiko-risiko ini. Akibatnya, suku bunga meningkat secara dramatis sejak November 2000, setelah beberapa bank menghentikan jalur kredit mereka ke Demirbank, yang mengalami kendala likuiditas yang parah dan menolak meminjamkan uang.

Namun, banyak bank yang memiliki instrumen utang pemerintah dalam portofolionya mempunyai niat untuk menjualnya, dan bank-bank yang memiliki posisi terbuka dengan cepat meminta mata uang asing untuk menutupi kepemilikan terbuka mereka, sehingga menghilangkan likuiditas pasar. Akibatnya, suku bunga naik dan pasar saham turun secara signifikan. Demirbank diserahkan kepada SDIF pada bulan Desember 2000, karena peningkatan biaya pendanaan yang berlebihan, penurunan harga sekuritas, dan kendala likuiditas menyebabkan kerugian yang signifikan pada neraca bank.

Bank Sentral, dalam upaya menjaga nilai tukar pada tingkat yang diperkirakan, menjual mata uang asing sekitar Rp.10 miliar, sementara pemerintah lebih memilih untuk mempertahankan kebijakan tersebut, yang dicapai melalui perjanjian kembali dengan IMF. Meskipun hilangnya kepercayaan terhadap sektor perbankan, yang berada dalam krisis likuiditas dan menutup tahun 2000 dengan kerugian keamanan yang sangat besar, dan program ekonomi dilaksanakan, reformasi struktural tidak dilaksanakan, dan program ekonomi saat ini lebih disukai untuk dilanjutkan. Pada tahun 2001, perekonomian dan sektor perbankan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena defisit transaksi berjalan dalam struktur ekonomi dan pertumbuhan permintaan domestik yang terus-menerus, peningkatan porsi pinjaman konsumen dalam total pinjaman bank dalam sistem perbankan. , struktur sumber daya jangka pendek dan tertimbang dalam mata uang asing, pencairan jangka panjang dan berbasis TL, serta risiko likuiditas dan suku bunga terkini.

Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis keuangan terbesar dalam sejarah Republik pada tanggal 19 Februari 2001, dan program yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2001, ditinggalkan karena meningkatnya permintaan valuta asing, dan rezim nilai tukar mengambang. telah dilaksanakan. Antara tahun 2001 dan 2003, nilai TL menurun hampir 250%, 11 bank yang gagal memenuhi persyaratan kecukupan modal dialihkan ke SDIF, dan PDB menyusut sebesar 7,4%. Degradasi struktur aset dan liabilitas sektor perbankan, serta rapuhnya struktur tersebut, mengakibatkan banyak institusi, termasuk bank umum, mengalami kerugian besar dan menguras modalnya pada tahun 2001.

Periode Restrukturisasi Sektor Perbankan (2002–2010)

Pada bulan November 2000 dan Februari 2001, Sektor Perbankan Turki mengalami salah satu krisis keuangan terparah dalam sejarah Republik. Industri perbankan telah menghadapi kerugian akibat risiko suku bunga setelah bulan November 2000, serta suku bunga dan nilai mata uang setelah bulan Februari 2001. Krisis yang diakibatkannya meningkatkan suku bunga, nilai tukar, dan inflasi, dan tidak hanya kesulitan di sektor keuangan. menghentikan aliran sumber daya ke sektor riil, namun juga berdampak negatif terhadap pembayaran kembali pinjaman yang digunakan sektor riil.

Pada tanggal 3 Mei 2001, perjanjian siaga baru ditandatangani dengan IMF untuk merestrukturisasi perekonomian dan sistem perbankan, dan program “Transisi menuju Perekonomian yang Lebih Sehat” diluncurkan. Tujuan dari program ini adalah untuk memulihkan stabilitas perekonomian dan keuangan, memperkuat sistem keuangan dan perbankan, mengendalikan inflasi, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Tindakan mendasar yang harus diambil untuk tujuan khusus ini adalah restrukturisasi sektor perbankan

untuk memperkuat struktur keuangan sektor publik, melaksanakan reformasi struktural, dan membangun sistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan kompetitif. Program restrukturisasi yang dirancang untuk mempertahankan struktur sistem perbankan Turki yang lebih sehat dibagi menjadi empat bagian dasar: restrukturisasi bank-bank publik, bank-bank yang dilindungi oleh The Savings Deposit Insurance Fund (SDIF), bank-bank dengan modal swasta, dan peningkatan efisiensi pengawasan dan pengawasan (Badan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan (BRSA), 2002).

Skema manajemen bersama disusun untuk bank-bank publik dalam proses restrukturisasi sistem perbankan dan kerugian bea bank-bank publik semuanya dilikuidasi terhadap obligasi pemerintah dalam negeri untuk memperkuat kapasitas keuangan mereka. Bank-bank swasta memperkuat struktur permodalan mereka yang telah hilang secara signifikan setelah krisis tahun 2001 melalui peningkatan modal. Namun jika gagal, beberapa bank melakukan merger atau tergabung dalam SDIF. Dari bank skala menengah hingga besar, Pamukbank ditugaskan ke SDIF yang diikuti dengan merger dengan Halkbank.

Para mitra membayar kebutuhan modal S₁ ekerbank secara tunai, sementara Vakfbank menerima pinjaman serupa modal untuk memperkuat struktur keuangannya. "Pendekatan Istanbul," atau program restrukturisasi keuangan, diadopsi untuk memperkuat sektor riil dan menjadikan kredit bermasalah dapat diterima di sektor perbankan. Karena bank menyadari pentingnya dan perlunya manajemen risiko lebih dari sebelumnya, langkah-langkah signifikan diambil untuk meminimalkan risiko pasar, pinjaman, dan operasional yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dalam sistem perbankan. Badan Pengawasan dan Pengawasan Umum (Badan Pengawasan dan Pengaturan Perbankan) mengembangkan pemahaman pengawasan berbasis risiko.

Pada tahun 2005, peraturan perbankan baru bernomor 5411 diadopsi untuk mengatasi masalah penerapan dan memungkinkan konsistensi dengan standar yang diterima secara umum di seluruh dunia. Dengan pengaturan baru ini, BRSA mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika bank gagal memenuhi persyaratan tingkat minimum ekuitas dan kecukupan modal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan melalui izin pendirian dan pengoperasian bank, serta kewenangan pengawasan dan pengendalian. Pada akhir proses restrukturisasi yang dimulai pada tahun 2000, terdapat perkembangan yang signifikan dalam industri perbankan ketika indikator-indikator seperti kualitas aktif industri, besaran dan variasi kredit, tingkat likuiditas, kecukupan modal, manajemen risiko, dan profitabilitas terpenuhi. dipertimbangkan.

Karena bank-bank AS memberikan pinjaman kepada nasabah yang kelayakan kreditnya buruk pada saat sistem perbankan direstrukturisasi, harga rumah naik dengan cepat. Peningkatan biaya mendorong penerbitan kredit tambahan dan jaminan terhadap piutang dari kredit rumah. Dengan kenaikan suku bunga dan penangguhan biaya hipotek pada akhir tahun 2007, pembayaran kembali menjadi sebuah tantangan. Bank-bank mengalami kerugian yang cukup besar bukan hanya sebagai akibat dari menurunnya nilai surat-surat berharga, tetapi juga sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk menagih jumlah yang digadaikan

karena nilai surat-surat berharga yang diterbitkan untuk mengasuransikan kredit-kredit tersebut turun dan kredit perumahan menjadi rusak tidak dibayar dengan benar.

Produk keuangan terkait kredit kehilangan nilainya, dan hilangnya nilai ini diperburuk oleh transaksi leverage. Beberapa lembaga keuangan di AS bangkrut, sementara perekonomian dunia lainnya terkena dampaknya, sehingga menimbulkan krisis di seluruh dunia. Untuk mengatasi stagnasi perekonomian dan masalah likuiditas, bank sentral harus melakukan ekspansi moneter besar-besaran. Krisis global berdampak besar pada Turki, menyebabkan perekonomiannya berkontraksi sebesar 4,7%, ekspor turun sebesar 23%, impor turun sebesar 30%, dan investasi menurun. Namun, hal ini tidak berubah menjadi krisis perbankan karena struktur permodalan dan keuangan sistem perbankan Turki memadai dan produk leverage tidak dimasukkan dalam neraca bank.

Periode Perbankan Digital (2011–2020)

Perbankan digital, juga dikenal sebagai perbankan tanpa cabang, perbankan online, atau perbankan elektronik, dapat didefinisikan sebagai akses nasabah terhadap transaksi keuangan tanpa memerlukan cabang atau personel. Manfaat perbankan digital mencakup penghapusan biaya cabang dan pegawai, pengurangan biaya transaksi, dan kemudahan akses (Savas, et al. 2014). Akses terhadap layanan keuangan melalui komputer, telepon, televisi, atau aplikasi seluler disebut sebagai perbankan digital. Pengguna dapat dengan mudah mengakses seluruh transaksi keuangan dari rumah, kantor, atau dimana saja dengan koneksi internet.

Di AS, perbankan digital pertama kali ditawarkan sebagai “layanan perbankan di rumah” di negara bagian New York pada tahun 1981 (Osho 2008). Nasabah memiliki komputer sendiri untuk terhubung ke komputer host bank melalui modem melalui saluran telepon. Klien dapat memantau rekening bank mereka dan melakukan transaksi antar rekening dengan cara ini (Horvitz 1996). Selain bank yang memiliki cabang, sektor ini juga diperkenalkan kepada bank yang menyediakan layanan perbankan melalui Internet. Bank pertama yang menyediakan layanan keuangan melalui Internet adalah “Security First Network Bank,” yang didirikan di AS pada tahun 1995. Semua transaksi yang mungkin diselesaikan di bank biasa juga diselesaikan di bank ini. Setelah menyelesaikan proses keanggotaan online, klien akan membuat akun, membayar tagihan, mengajukan pinjaman, melakukan transfer antar akun, dan mengembangkan portofolio pribadi untuk diri mereka sendiri menggunakan kata sandi yang secara khusus diberikan kepada mereka.

Kartu kredit dikembangkan dan pertama kali digunakan di Turki pada tahun 1970, diikuti oleh anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahun 1987, terminal point-of-sale (POS) pada tahun 1989, phone banking pada tahun 1996, dan internet banking pada tahun 1997, dan bank digital pada tahun 2012. Selama satu dekade, perbankan digital telah mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing secara signifikan, dengan kemajuan perbankan digital menjadi platform utama dalam penyediaan layanan keuangan. Dengan kontribusi pandemi, semua layanan keuangan akan diubah dalam waktu dekat untuk dipasok melalui platform digital. Pada tahun 2010, terdapat 16,4 juta nasabah terdaftar yang aktif menggunakan layanan perbankan digital, dan jumlah ini meningkat menjadi 68,4 juta pada Maret 2021.

Status Industri Perbankan Saat Ini (2021–...)

Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Turki, khususnya sektor keuangan dan perbankan, telah menarik perhatian dunia. Investor asing tertarik pada Turki karena struktur demografinya yang muda, pertumbuhan yang dipimpin oleh perusahaan swasta, pengurangan defisit publik, penurunan inflasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, pasar dalam negeri yang mandiri, lembaga keuangan yang sehat, dan potensi pertumbuhan yang baik dipengaruhi oleh tingkat penetrasi yang rendah. Selama masa ini, ekspansi sektor keuangan yang solid, serta status Istanbul sebagai pusat keuangan internasional, memicu minat terhadap perbankan dan sistem keuangan Turki.

Industri perbankan Turki mengalami ekspansi aktif sebesar EUR 674 miliar pada akhir tahun 2020. Tingkat PDB aset adalah 105%, lebih rendah dari rata-rata UE. Rasio kredit terhadap aset adalah 57%, sedangkan rasio simpanan terhadap kewajiban adalah 57%. Potensi pertumbuhan dalam hal ini tetap terjaga (Tabel 5.5). Sektor perbankan Turki telah berkembang sangat pesat setelah tahun 2002. Setelah krisis keuangan tahun 2001, sektor perbankan terus pulih hingga tahun 2003, program restrukturisasi bank dilaksanakan, jumlah bank yang semula 79 pada tahun 2000 berkurang menjadi 49 pada tahun 2002 akhir tahun 2010, setelah beberapa bank dialihkan ke SDIF dan beberapa bank melakukan merger, namun jumlah total bank telah mencapai 54 bank pada akhir tahun 2020. Hanya ada tiga bank umum sejak tahun 2003.

Sedangkan jumlah bank simpanan swasta dan bank pembangunan dan investasi mengalami penurunan, jumlah bank simpanan asing meningkat. Lembaga keuangan khusus yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dimasukkan dalam ruang lingkup Undang-Undang Perbankan sebagai bank Penyertaan pada tahun 2005. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah cabang dan pegawai bank pertama kali mengalami penurunan akibat bank yang bangkrut atau merger setelah krisis tahun 2001 dan kemudian meningkat pesat setelah tahun 2005. Jumlah cabang dan jumlah pegawai kembali menurun akibat perbankan digital, teknologi perbaikan, pengembangan sistem online, dan kemajuan saluran distribusi alternatif. Jumlah kartu kredit yang pertama kali digunakan di Turki pada tahun 1970an telah meningkat pesat. Jumlah POS dan ATM juga terus bertambah.

Jumlah bank yang beroperasi di sektor perbankan pada akhir tahun 2020 sebanyak 54 bank. 34 diantaranya merupakan bank simpanan, dan 14 bank pembangunan dan investasi. Dari bank simpanan tersebut, tiga diantaranya merupakan bank pemerintah dan delapan bank swasta. Ada enam bank partisipasi di Turki. Total aset meningkat menjadi RP 823 Triliyun. Pangsa aset bank simpanan adalah 87%, sedangkan pangsa bank pembangunan dan investasi serta bank penyertaan masing-masing sebesar 6% dan 7%. Pangsa bank deposito milik negara sebesar 38%, bank swasta sebesar 28%, dan bank asing sebesar 21%. Jumlah cabang sebanyak 11.194 orang dan jumlah pegawai sebanyak 203.223 orang. Kemajuan, langkah, dan pencapaian penting dalam Sektor Perbankan Turki dirangkum dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.5 Perkembangan dan situasi terkini Sektor Perbankan Turki

Periode	2000	2005	2010	2015	2020
Jumlah bank	79	51	49	50	54
Dep. BUMN. Bank	4	3	3	3	3
Bank simpanan swasta	28	17	11	8	8
Bank simpanan asing	18	13	17	21	21
Mengembangkan. dan Invst. Bank	18	13	13	13	14
bank SDIF	11	1	1	1	2
Bank partisipasi	–	4	4	5	6
Total aset (Miliar USD)	271	296	627	808	823
Total aset/PDB	101%	59%	91%	121%	121%
Aset likuid (Miliar USD)	35	47	65	122	121
Surat Berharga (Miliar USD)	19	107	191	113	138
Pinjaman (Miliar USD)	55	114	324	513	482
Deposito (Miliar USD)	110	189	380	427	466
Non-deposito (Miliar USD)	32	50	122	225	199
Ekuitas pemegang saham (Miliar USD)	8	40	84	90	81
Jumlah cabang	7.837	6.247	9.465	12.269	11.194
Jumlah karyawan	137.495	132.258	178.503	217.504	203.223
Jumlah ATM	11.397	14.836	26.566	46.220	49.294
Jumlah kartu kredit	13.372.600	29.885.900	46.956.124	58.215.318	75.697.214
Jumlah POS	489.213	1.130.408	2.176.000	2.158.328	1.686.009

Tabel 5.6 Perkembangan Perbankan Turki

Periode	Kemajuan, langkah, dan pencapaian yang substansial
1071	Bangsa Turki masuk dan menetap di Anatolia
1840	Aplikasi pertama yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan muncul
1840	Uang kertas pertama, "Kaime," diterbitkan di Kekaisaran Ottoman
1849	Istanbul Bank (Bank-ı Dersaadet), yang dianggap sebagai bank pertama dalam sejarah keuangan Turki, didirikan
1854	Kesultanan Ottoman meminjam dari luar negeri untuk pertama kalinya
1856	Bank Ottoman, dengan ibukota Inggris, didirikan di London
1863	Bank Ottoman membubarkan diri dan direorganisasi menjadi bank negara dengan nama Imperial Ottoman Bank (Bank-ı Şahane-i Osman-i) di bawah kemitraan Inggris-Prancis. Bank ini merupakan bank penerbit pertama dan juga dianggap sebagai awal periode bank asing dalam sistem perbankan Turki
1863	Dana Lokal Tanah Air, yang merupakan fondasi Bank Ziraat, didirikan

1881	Dengan Dekrit Muharrem, Administrasi Utang Umum Utsmaniyah (Düyün-u Umumiye) didirikan untuk merestrukturisasi utang luar negeri Utsmaniyah, memungut pajak dan membayar kreditor yang timbul dari utang dalam dan luar negeri.
1883	Dana Lokal Kampung Halaman telah diubah menjadi Dana Manfaat
1888	Ziraat Bank didirikan sebagai lembaga keuangan modern untuk menggantikan Dana Manfaat
1911	Bank Ekonomi Nasional Konya, bank pertama yang didirikan untuk mendukung perekonomian domestik dan perdagangan di Anatolia, memulai aktivitasnya
1917	Dengan gagasan mendirikan bank sentral nasional, Bank Martabat Nasional Ottoman (Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası) didirikan pada tahun 1917
1923	Ketika Republik didirikan, total 35 bank beroperasi di Turki, 22 di antaranya adalah bank nasional dan 13 bank asing.
1924	İsbank (Türkiye İis Bankası), bank swasta pertama di Era Republik, didirikan
1927	Bank Martabat Nasional Ottoman, yang tidak dapat mencapai tujuannya menjadi bank nasional setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, digabungkan dengan İisbank Turki pada tahun 1927
1930	Bank Sentral Republik Turki didirikan
1955	Rumah Percetakan Uang Kertas Bank Sentral didirikan di Ankara
1957	Uang kertas mulai dicetak di Turki
1958	Asosiasi Bank Turki dan Dana Likuidasi Bank didirikan
1970	Kartu Kredit pertama diterbitkan di Turki
1980	Dengan keputusan yang diumumkan pada tanggal 24 Januari 1980, transformasi struktural dialami dalam perekonomian Turki, struktur keuangan, dan sistem perbankan, ekonomi pasar bebas berbasis ekspor diadopsi, dan penerapan nilai tukar fleksibel (mengambang) diperkenalkan.
1980	Pada tanggal 1 Juli 1980, suku bunga yang diterapkan pada simpanan dan pinjaman dilepaskan untuk pengembangan, pertumbuhan, dan liberalisasi perbankan dan sistem keuangan.
1982	Akibat keruntuhan finansial yang dikenal sebagai “krisis bankir”, aktivitas beberapa bank terhenti dan banyak bank serta lembaga perbankan bangkrut.
1983	Pengaturan hukum telah dibuat mengenai pembentukan Lembaga Keuangan Khusus yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip perbankan bebas bunga.
1985	Lembaga keuangan swasta pertama adalah Albaraka Türk Finance House dan Faisal Finance House didirikan
1987	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pertama mulai dioperasikan

1989	Dengan Keputusan No. 32 tentang Perlindungan Nilai Mata Uang Turki, pergerakan modal dilepaskan dan unit ekonomi diizinkan untuk berdagang dalam mata uang asing.
1996	Cabang Internet Banking pertama diluncurkan di Turki
2001	Setelah krisis tahun 2001, yang merupakan krisis keuangan terbesar dalam sejarah Republik Turki, perjanjian siaga ditandatangani dengan IMF pada tanggal 3 Mei 2001, dan "Program Transisi menuju Perekonomian Kuat" dilaksanakan, dan program restrukturisasi sektor perbankan dimulai untuk mewujudkan sistem keuangan yang kokoh, berkelanjutan, dan kompetitif
2006	Lembaga Pembiayaan Khusus direorganisasi menjadi "Bank Peserta"

5.6 KESIMPULAN

Sejak tahun 1980, ketika globalisasi dan liberalisasi keuangan meningkat pesat di seluruh dunia, peningkatan investasi dan produksi yang berkelanjutan dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan volume perdagangan intranasional, kemajuan teknologi, dan perkembangan ekonomi dan keuangan internasional semuanya mempunyai dampak positif. dampak positif terhadap perkembangan lembaga dan pasar keuangan Turki. Diperlukan sistem keuangan yang solid, efisien, efektif, dan akurat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan produksi akumulasi modal untuk tujuan ini, serta penggunaan sumber daya yang paling rasional.

Dengan mempertimbangkan seluruh struktur ekonomi Republik Turki pada saat pendiriannya, serta kondisi perekonomian global pada saat itu, kebijakan ekonomi yang terencana dan mandiri berdasarkan substitusi impor diterapkan. Pada periode tersebut, tingkat suku bunga pinjaman, batasan kredit, input pasar, dan output semuanya berada di bawah kendali negara, dan bank sangat terlibat dalam pendanaan kegiatan yang diuraikan dalam rencana pembangunan.

Karena kebijakan resmi tidak mengizinkan pendirian bank swasta dan asing baru sepanjang sejarah Perbankan Turki dari tahun 1960 hingga 2000, bank harus berfungsi dalam lingkungan dengan persaingan yang terbatas. Karena tidak adanya risiko pasar yang disebabkan oleh suku bunga, nilai tukar, dan bahkan suku bunga negatif, bank terpaksa menjalankan program pertumbuhan berdasarkan rekening simpanan. Hasilnya, bank-bank menunjukkan pertumbuhan perbankan ritel berdasarkan perbankan cabang. Rekening deposito yang tidak memadai, serta penggunaan cadangan bank sentral untuk membiayai investasi dan biaya operasional, meningkatkan jumlah uang beredar dan inflasi. Output dan ekspor yang tidak memadai menyebabkan kesulitan nilai tukar, yang meningkatkan ketidakstabilan sistem keuangan. Krisis ekonomi dan keuangan terjadi sebagai akibat dari upaya menjaga nilai tukar tetap terkendali, yang, bersama dengan kondisi negatif lainnya terhadap keseimbangan makroekonomi, mengakibatkan penurunan krisis dengan cepat, dan hilangnya sebagian besar ekuitas. Mulai bulan Mei 2001, inisiatif restrukturisasi menyeluruh diluncurkan. Dari tahun 2002 hingga 2007, terdapat perkembangan penting dalam struktur keuangan dan indikator makroekonomi industri perbankan.

Pada saat proses restrukturisasi perbankan Turki terus berlanjut, bank-bank mengalami kerugian besar akibat gangguan yang dialami bank-bank AS terhadap pinjaman yang diberikan kepada konsumen dengan kredibilitas rendah akibat kenaikan suku bunga dan penurunan harga efek beragunan aset. diterbitkan melalui jaminan atas pinjaman tersebut. Di banyak negara, khususnya Amerika, beberapa bank dan lembaga keuangan bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan karena kerugian besar. Untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan krisis likuiditas yang diakibatkan oleh situasi ini, proses ekspansi moneter yang luar biasa dimulai oleh bank sentral. Meskipun perekonomian Turki mengalami kontraksi pada periode ini, kurangnya produk leverage dalam neraca bank-bank Turki dan kuatnya kecukupan modal serta kesehatan keuangan sistem perbankan tidak membuat sistem perbankan mengalami krisis.

Apalagi dengan adanya proses globalisasi sejak tahun 1990an, aktivitas perbankan harus bersifat internasional. Sejak tahun 2010, kemajuan dan pembaharuan teknologi yang pesat telah terlihat pada sistem perbankan Turki bersamaan dengan perbankan dunia. Pesatnya perkembangan sistem perbankan digital dan saluran distribusi alternatif memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi Perbankan Turki dengan sistem perbankan internasional. Industri Perbankan dan bank adalah lembaga keuangan terpenting di Turki, untuk membiayai industri, perdagangan, investasi, perdagangan luar negeri, dan pengeluaran publik.

Oleh karena itu, walaupun ketentuan menyeluruh telah ditetapkan untuk struktur perbankan yang sehat secara finansial dengan pengawasan yang efektif, industri perbankan telah menjadi lembaga keuangan yang paling signifikan dalam membiayai perdagangan, investasi, perdagangan internasional, dan defisit publik. Struktur industri perbankan yang sehat sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Ukuran aktif sistem perbankan Turki adalah sekitar 105% dari PDB, yaitu sekitar 90% dari sistem keuangan perbankan. Oleh karena itu, industri perbankan merupakan institusi yang paling signifikan dalam sistem keuangan dan mempunyai potensi pertumbuhan yang paling besar. Ketika rasio modal, aktivitas, kualitas keseimbangan, dan profitabilitas sistem perbankan Turki dipertimbangkan, sektor perbankan diasumsikan akan terus berkembang dengan mantap.

BAB 6

PENELITIAN TENTANG NILAI KERJA LULUSAN SEKOLAH KEUANGAN

6.1 PENDAHULUAN

Orang bertindak dengan mempertahankan pendirian yang menjadi penting bagi mereka dalam hubungan dan keputusan sepanjang hidup mereka. Sikap yang berubah menjadi perilaku ini sebenarnya merupakan hasil dari keyakinan, yaitu nilai-nilai, sebagai cerminan dari prinsip dan tujuan yang dimilikinya. Nilai-nilai yang kita miliki dalam kehidupan sosial atau bisnis memungkinkan kita tampil sebagai orang yang tradisional, demokratis, sentralistik, rasional, konservatif atau sosial. Di sisi lain, kita dapat mengatakan bahwa nilai-nilai yang muncul sebagai cerminan kepribadian kita muncul dari cerminan faktor genetik dan lingkungan serta budaya dan subkultur umum yang kita ikuti.

Selalu menjadi persoalan yang memprihatinkan apakah nilai-nilai kerja yang merupakan cerminan akumulasi individu dan terutama indikator bagaimana mereka dipahami dalam kehidupan kerja berbeda-beda menurut status perkawinan, usia, tingkat pendidikan, profesi dan pekerjaan. pengalaman. Meskipun memiliki karakteristik demografi yang berbeda-beda, namun nilai-nilai kerja yang ditunjukkan oleh para Lulusan Sekolah Keuangan dalam kehidupan kerjanya merupakan suatu hal yang patut dikaji dalam menentukan prestasi mereka di “Sekolah Keuangan” yang merupakan proses pendidikan terakhir yang mereka terima selama menjadi bagian dari kehidupan mereka dan terutama sebelum kehidupan kerja pertama mereka, dan melihat hasil dari “Budaya Sekolah Keuangan”.

Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka terhadap konsep nilai dan nilai kerja. Kemudian, berdasarkan penilaian diri lulusan Sekolah Keuangan, “pertanyaan penelitian” dan hasilnya dimasukkan untuk menentukan perbedaan dalam kehidupan kerja mereka menurut nilai kerja dan karakteristik demografi.

6.2 SASTRA

Konsep nilai merupakan mata pelajaran yang telah diteliti dalam ilmu manajemen dan psikologi selama lima puluh tahun terakhir. Kajian yang dilakukan oleh Eduard Spranger pada tahun 1928 dan membagi manusia menjadi enam tipe secara teoretis, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama dianggap sebagai kajian pertama dalam. Ketika dianalisis dari sudut pandang organisasi, ditekankan bahwa nilai juga merupakan sumber motivasi dan merupakan penentu penting perilaku dan sikap dalam organisasi. Schwartz (1996: 2) mendefinisikan nilai sebagai *“tujuan yang diinginkan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, berubah sesuai kepentingannya, dan berada di luar situasi”*.

Hofstede (2001: 5) yang mencoba mengungkap perbedaan lintas budaya menggunakan definisi *“kecenderungan besar untuk lebih memilih situasi tertentu dibandingkan situasi lain”* sebagai nilai. Definisi lain dari nilai adalah *“lebih memilih perilaku*

atau pendirian tertentu daripada perilaku atau pendirian yang berlawanan atau berlawanan secara pribadi atau sosial" (Robbins dan Judge 2013: 145). Ciri-ciri umum dari semua definisi nilai dalam literatur adalah sebagai berikut. Hal-hal tersebut adalah (1) konsep atau keyakinan, (2) tujuan dan perilaku yang diinginkan, (3) melampaui situasi tertentu, (4) panduan dalam mengevaluasi atau memilih perilaku dan peristiwa, dan (5) diurutkan berdasarkan kepentingannya.

Wollack dkk. (1971: 331) mendefinisikan nilai kerja sebagai sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Ros dkk. (1999: 64–68) menekankan bahwa nilai-nilai kerja merupakan penjelasan dan cerminan khusus dari nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan pribadi seorang karyawan, perasaan dan keyakinan umum dan jangka panjang tentang apa yang dia harapkan dari pekerjaan dan bagaimana dia harus berperilaku mengungkapkan nilai-nilai kerja orang tersebut. Donald Super (1980: 130) menggunakan ungkapan "*keadaan psikologis, hubungan atau situasi material yang ingin dicapai seseorang*" untuk nilai-nilai kerja. Faktanya, terlepas dari perubahan definisi, Zytowski (1994) menyatakan dalam literatur psikologi kejuruan bahwa nilai-nilai kerja sebaiknya digambarkan sebagai penguat yang meningkatkan kepuasan kerja.

Literatur telah menunjukkan bahwa nilai-nilai kerja juga mengungkapkan pemahaman seseorang terhadap pekerjaan. Dengan demikian, dalam kegiatan yang dilakukan individu, kelompok, dan lembaga untuk mencapai tujuan tertentu, pencerminan nilai-nilai dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai suatu sikap mengungkapkan nilai-nilai kerja. Nilai-nilai ini, yang muncul sebagai suatu sikap, menjelaskan dan dapat mengarahkan metode, alat, proses, sistem dan hubungan timbal balik yang sebenarnya disukai orang-orang saat melakukan pekerjaan mereka dalam kehidupan kerja mereka.

Nilai-nilai ini, yang mengungkapkan pemahaman karyawan tentang pekerjaan dalam kehidupan kerja mereka, merupakan hasil dari dua proses dasar. Yang pertama dari dua proses ini adalah fakta bahwa pengetahuan dan nilai-nilai dipelajari dari pengalaman dan yang lainnya adalah bahwa pengetahuan dan nilai-nilai adalah sebuah proses yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai cerminan budaya di mana masyarakat hidup. Bahkan terlihat bahwa keluarga individu, lingkungan tempat ia dibesarkan dan pengalaman interaksinya di lingkungan tersebut serta budayanya efektif dalam pembentukan nilai-nilai kerja dan refleksinya dalam pemahaman kerja.

Ketika literatur dikaji, dapat dipahami bahwa pendekatan mengenai nilai-nilai kerja berbeda secara budaya, agama, dan sosiologis. Namun, Dose (1997: 221–225) menunjukkan perspektif holistik mengenai nilai-nilai kerja dan mengklasifikasikan teori dan pendekatan dalam empat cara. Nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan menjadi (1) Nilai-nilai kerja dan perilaku kejuruan, (2) Nilai-nilai mengenai perilaku kerja, (3) Pentingnya pekerjaan dan (4) Etika bisnis sebagai suatu sistem nilai.

Studi empiris tentang nilai-nilai kerja menunjukkan bahwa nilai-nilai kerja merupakan cikal bakal kepuasan kerja, perilaku kewarganegaraan organisasi, pengambilan keputusan individu dan kepentingan profesional dan juga dikaitkan dengan pilihan karir, (komitmen organisasi dan prestasi kerja. Di sisi lain, ada banyak penelitian yang menyelidiki apakah nilai

kerja berbeda berdasarkan faktor demografi, namun sebagian besar penelitian tidak menunjukkan adanya perbedaan antar gender, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja.

Namun, Özkan (2010) menemukan hubungan antara transformasi nilai kerja dan masa kerja, sedangkan Hansey dan Leuty (2012: 34) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa perbedaan antara nilai kerja yang dimiliki oleh tiga generasi (Silent Generation, Baby Boom, dan Generasi X) adalah lebih besar dari usia mereka. Oltulu (2019: 37) menyatakan bahwa “Nilai Kerja Sosial-Altruis”, subdimensi nilai kerja, berbeda menurut kelompok umur. Kaleli (2019: 127–129), sebaliknya, menemukan bahwa terdapat korelasi antara nilai-nilai kerja dan ciri-ciri kepribadian lima faktor dan menyatakan bahwa nilai-nilai kerja juga bervariasi menurut profesi dan generasi.

6.3 PENELITIAN

Tujuan dan Pentingnya Penelitian

Sejarah Sekolah Keuangan dimulai dari peraturan setelah deklarasi monarki konstitusional pada tahun 1908. Pada periode ini, diputuskan untuk mendirikan “Sekolah Keuangan” untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petugas keuangan dan sekolah tersebut dibuka pada tahun 1909. Namun, sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat budaya siswa dengan mengajar tidak hanya kursus kejuruan tetapi juga hukum, ekonomi, sejarah dan geografi di sekolah tersebut. Sekolah yang terpaksa ditutup pada tahun-tahun Perang Dunia I ini dibuka kembali pada tahun 1924. Pada tahun 1943, Sekolah Kejuruan Keuangan memperoleh status sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tingkat sekolah menengah atas dengan nama “Sekolah Keuangan”. Lembaga penyelenggara pendidikan di Ankara ini melanjutkan aktivitasnya di tiga provinsi dengan membuka cabang di Izmir pada tahun 1977 dan di Istanbul pada tahun 1978. Dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi Turki, Sekolah Keuangan memiliki budaya sekolah yang membekali banyak generasi muda sukses dengan perekonomian berbeda. situasi untuk memiliki nilai-nilai yang menjadi teladan bagi kehidupan dan masyarakat selain perolehan pengetahuan, keterampilan dan profesi.

Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nilai-nilai kerja yang diciptakan oleh budaya sekolah keuangan yang mereka peroleh dari pendidikan sekolah menengah atas meskipun lulusannya memiliki budaya keluarga dan daerah yang berbeda, serta untuk mengungkap perbedaannya menurut karakteristik demografi. Mengingat dampak budaya sekolah mapan ini terhadap nilai kerja lulusannya, maka kajian ini dianggap penting untuk memahami bahwa penutupan Sekolah Keuangan merupakan kerugian besar.

Metodologi Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari 5001 lulusan menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Alumni Sekolah Keuangan. Ukuran sampel minimum dihitung sebanyak 357 dengan interval kepercayaan 95% dan margin kesalahan 5% di atas angka ini (5001). Tautan berisi formulir kuesioner dikirimkan kepada total 2700 wisudawan melalui grup WhatsApp dan Facebook yang dibuat oleh Ikatan Alumni Keuangan. Untuk studi kuesioner, 600 formulir kuesioner dievaluasi untuk dianalisis.

Formulir kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian pertama formulir mencakup 6 pertanyaan untuk mengetahui karakteristik demografi lulusan yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian. Bagian kedua dari formulir ini mencakup lima poin tipe Likert “Skala Nilai Kerja”. Skala tersebut terdiri dari lima dimensi dan 58 nilai. Ke-58 nilai ini diketahui terbagi dalam dimensi “Profesionalisme” (14), “Sentralisasi” (9), “Rasa Kemunafikan” (14), “Rasionalisme” (15) dan “Mistik” (6). Untuk penelitian ini, kajian-kajian dalam literatur nasional dan internasional diperiksa dengan metode pemindaian, dan hipotesis yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan 5 faktor (dimensi) yang ditentukan oleh nilai-nilai karya sastra, diuji. Pertanyaan Penelitian:

RQ1: Apakah terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

RQ2: Apakah terdapat perbedaan nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

RQ3: Apakah terdapat perbedaan nilai Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

RQ4: Apakah terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

RQ5: Apakah ada perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

Analisis Data

Sebanyak 28,5% peserta adalah perempuan dan 71,5% laki-laki, 86,7% sudah menikah dan 13,3% masih lajang, 3,3% berpendidikan SMA, 77,2% berpendidikan sarjana, dan 19,5% berpendidikan pascasarjana. 50% berusia antara 44 dan 54 tahun, 22,5% berusia kurang dari 44 tahun, 22% berusia antara 55 dan 64 tahun, 4% berusia antara 65 dan 74 tahun, dan 1,5% berusia di atas 75 tahun. Pesertanya terdiri dari 53,8% pegawai pemerintah, 21,5% IFA-CFA, 5,3% pendidik, 5% pengacara, 4,8% wiraswasta, 4,3% pensiunan, 3,7% bankir, 1% konsultan dan 0,5% personel militer.

Selain itu, 42% telah bekerja selama 30–39 tahun, 38,5% selama 20–29 tahun, 13,5% selama 40–49 tahun, 4,7% selama 10–19 tahun, 1% selama lebih dari 50 tahun, dan 0,3% selama kurang dari 9 tahun (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Hasil analisis faktor

Nilai	Profesionalisme I	Kemunafikan II	Mistik III	Rasionalisme IV	Sentralisasi V
Intuitivisme	0,883				
Penglihatan	0,877				
Kerja sama	0,875				
Rekonsiliasi	0,874				
Kompetensi	0,873				
Prestise	0,870				
Terbuka terhadap ide-ide baru	0,861				
Melakukan pekerjaan dengan baik	0,859				

Keraguan	0,857				
Voluntarisme	0,852				
Tanggung jawab	0,845				
Kewiraswastaan	0,801				
Mengambil resiko	0,461				
Faksionalisme		0,874			
Kepentingan pribadi		0,859			
Favoritisme		0,838			
Intoleransi		0,804			
Kemewahan		0,787			
Melebihi otoritas seseorang		0,781			
Ketidaksetiaan		0,781			
Kemalasan		0,770			
Kemunafikan		0,730			
Kesombongan		0,717			
Proteksionisme		0,669			
Kekakuan		0,626			
Materialisme		0,460			
Agama			0,868		
Fatalisme			0,837		
Sifat tradisional			0,802		
Afektifitas			0,702		
Penghematan			0,570		
Ikatan Keluarga			0,558		
Persahabatan				0,831	
Keilmuan				0,821	
Hak dan kebebasan individu				0,816	
Bersikap adil				0,808	
Kerendahhatian				0,804	
Rasionalisme				0,802	
Memercayai				0,802	
Memperhatikan detail				0,800	
Berbagi informasi				0,797	
Disiplin				0,796	
Ketekunan				0,795	
Kejujuran				0,791	
Ketegasan				0,788	
Kesuksesan				0,767	
Hidup hari ini				0,708	
Ketergantungan					– 0.780
Pangkat dan otoritas					– 0.742
Sentralisasi					– 0.706
Ketundukan					– 0.696
Represif					– 0.569
Alfa	0.973	0.930	0.861	0.977	0.771

Total varians yang dijelaskan = 69,123%

KMO = 0,965

BTS = 32.333.219, df = 1326, p = 0,000

Dengan memperhatikan nilai KMO (0,965) dan BTS (32,333; p 0,000) hasil analisis, terlihat bahwa kumpulan data dan matriks korelasi sesuai untuk analisis faktor. Kumpulan data dengan varian yang dijelaskan sebesar 69,123% dikumpulkan berdasarkan 5 faktor seperti pada artikel asli. Faktor pertama adalah Profesionalisme (13 item), yang kedua adalah Rasa Kemunafikan (13 item), yang ketiga adalah Mistik (6 item), yang keempat adalah Rasionalisme (15 item) dan yang kelima adalah Sentralisasi (5 item). Sebanyak enam item skala nilai kerja dikeluarkan dari analisis karena bergeser ke dimensi yang berbeda atau dimasukkan dalam dua dimensi. Analisis komponen utama digunakan sebagai model faktor dalam analisis. Metode miring digunakan sebagai metode rotasi agar dapat membedakan dengan jelas antara dimensi faktor dan nilai dengan beban faktor 0,40 ke atas dipertimbangkan berdasarkan artikel asli dari mana skala tersebut diambil (Aldemir dkk. 2003: 19).

6.4 TEMUAN

Tabel 6.2 memperlihatkan secara rinci faktor apa saja yang menjadi konsentrasi nilai kerja lulusan. Dengan demikian terlihat bahwa lulusan paling banyak (90,96%) memiliki nilai Rasionalisme (Sangat Setuju Setuju Agak Setuju), disusul nilai Profesionalisme (89,35%). Nilai-nilai mistik yang meliputi agama, fatalisme, penghematan, ikatan kekeluargaan, dan afektif menempati urutan ketiga (67,11%) dalam nilai-nilai kerja lulusan dalam dunia kerja. Meskipun hampir separuh penduduk (47,73%) mengedepankan aspek Sentralisasi, namun ternyata Rasa Kemunafikan yang mengandung unsur negatif memiliki nilai kerja paling rendah (11,45%).

Uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan bahwa data kami terdistribusi normal, dan uji parametrik digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut karakteristik sosio-demografis peserta, jawaban dicari untuk lima pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode statistik T-Test (gender dan status perkawinan) dan Anova (usia, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja) dari subdimensi. nilai-nilai kerja (Profesionalisme, Sentralisasi, Rasa Kemunafikan, Rasionalisme dan Mistik).

Pertanyaan Penelitian Pertama

Hasil analisis pertanyaan penelitian pertama dan enam hipotesis terkait diberikan di bawah ini.

RQ1: Apakah terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

H1 : Terdapat perbedaan Nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender.

Tabel 6.2 Nilai-Nilai Kerja Lulusan Sekolah Keuangan

	Profesionalisme		Sentralisasi		Rasa kemunafikan		Rasionalisme		Mistik	
	%	Cum	%	Cum	%	Cum	%	Cum	%	Cum
Sangat setuju	41.9	41.9	4.40	4.40	1.22	1.22	50.45	50.45	13.50	13.50
Setuju	39.12	81.02	13.03	17.43	2.40	3.62	33.22	83.67	24.14	37.64
Agak setuju	8.33	89.35	30.30	47.73	7.83	11.45	7.29	90.96	29.47	67.11
Tidak setuju	5.44	94,79	31.37	79.10	28.33	39.78	5.17	96.13	20.14	87.25
Sangat tidak setuju	5.21	100	20.9	100	60.22	100	3.87	100	12.75	100

Menunjukkan rasio nilai bisnis yang menurut lulusan Sekolah Keuangan dimilikinya

H2 : Terdapat perbedaan Nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan.

H3 : Terdapat perbedaan Nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur.

H4: Terdapat perbedaan Nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

H5 : Terdapat perbedaan Nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya.

H6 : Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Jumlah Waktu Kerja (Tabel 6.3).

Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai profesionalisme lulusan ditinjau dari gender (t 2,065; p 0,040). Dengan demikian maka hipotesis “H1: Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender” diterima. Lulusan perempuan mempunyai nilai profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan lulusan laki-laki.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada nilai profesionalisme lulusan ditinjau dari status perkawinan. Oleh karena itu hipotesis “H2: Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan” ditolak (Tabel 6.4). Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai profesionalisme lulusan ditinjau dari kelompok umur (t 5,534; p 0,000). Dengan demikian hipotesis “H3: Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur” diterima. Menurut tes Games-Howell, salah satu tes Post-Hoc yang dilakukan, perbedaan ini terlihat antara kelompok berusia di bawah 44 tahun dan berusia 55–64 tahun, serta antara rentang usia 45–54 tahun dan 55 rentang usia 64 tahun. Kedua perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa mereka yang berusia antara 55–64 tahun memiliki nilai kerja yang lebih profesional.

Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai profesionalisme lulusan ditinjau dari tingkat pendidikan (t 5,439; p 0,005). Dengan demikian maka hipotesis “H4: Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan” diterima. Hasil tes Games-Howell Post Hoc menunjukkan bahwa perbedaan ini

terjadi antara kelompok sarjana dan pascasarjana, dan kelompok terakhir memiliki nilai kerja profesional yang lebih tinggi.

Tabel 6.3 Uji T untuk perbandingan nilai profesionalisme ditinjau dari gender dan status perkawinan

		N	Rata-rata	St. Deviasi	T	P
Jenis kelamin	Perempuan	171	4.1844	0,79427	2.065	0,040
	Pria	429	4.0256	0,97669		
Status pernikahan	Telah menikah	520	4.0713	0,93979	0,029	0,977
	Lajang	80	4.0683	0,87312		

Tabel 6.4 Uji Anova untuk perbandingan nilai profesionalisme ditinjau dari kelompok umur, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja

Karakteristik demografi		N	Rata-rata	St. Deviasi	F	P
Kelompok umur	Di bawah 44	135	4.1550	0.68164	5.534	0,000
	45–54	300	4.1882	0.82636		
	55–64	132	3.8124	1.15911		
	65–74	24	3.7115	1.35821		
	Di atas 75	9	6.6496	1.37556		
Jenjang pendidikan	Sekolah menengah atas	20	3.5731	1.33012	5.439	0,005
	Sarjana	463	4.0455	0.95177		
	Pascasarjana	117	4.2564	0.93048		
Profesi	Petugas pemerintah	323	4.0105	0.97860	1.276	0,253
	Bankir	22	4.5804	0.33211		
	IFA-CFA1	129	4.0990	0.99769		
	Konsultan	6	4.0128	0.71405		
	Pendidik2	32	4.2620	0.58838		
	Bekerja sendiri	29	3.9841	0.88792		
	Perwira militer	3	4.0769	0.00000		
	Pengacara3	30	4.1718	0.76808		
	Pensiun	26	4.0089	0.87742		
Jumlah waktu kerja	Kurang dari 9 tahun	2	4.1538	0.97907	3.432	0,005
	10–19 tahun	28	3.8654	0.74686		
	20–29 tahun	231	4.2155	0.72656		
	30–39 tahun	252	4.0653	0.98472		
	40–49 tahun	81	3.7464	1.20535		
	50 tahun dan lebih	6	4.0513	1.18338		

hal <0,05

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada nilai profesionalisme lulusan ditinjau dari profesinya. Oleh karena itu hipotesis “H5: Terdapat perbedaan nilai

Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesi” ditolak. Meskipun tampaknya ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam nilai profesionalisme lulusan dalam hal total waktu kerja, tes Post Hoc Games-Howell yang relevan tidak dapat menentukan perbedaan tersebut pada kelompok mana. Oleh karena itu, dianggap bahwa perbedaan distribusi frekuensi kelompok dapat menyebabkan hal tersebut dan hipotesis “H6: Terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Total Waktu Kerja” ditolak.

Pertanyaan Penelitian Kedua

Hasil analisis pertanyaan penelitian kedua dan enam hipotesis terkait diberikan di bawah ini.

RQ2: Apakah terdapat perbedaan nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

H1: Terdapat perbedaan Sentralisasi nilai-nilai Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender.

H2 : Terdapat perbedaan Nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan.

H3 : Terdapat perbedaan Sentralisasi nilai Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur.

H4: Terdapat perbedaan Sentralisasi Nilai Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

H5 : Terdapat perbedaan Nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya.

H6 : Terdapat perbedaan nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Total Waktu Kerja (Tabel 6.5 dan 6.6).

Nilai sentralisasi lulusan tidak memberikan perbedaan yang signifikan menurut faktor demografi apapun. Oleh karena itu, enam hipotesis terkait ditolak. Kemudian, tidak terdapat perbedaan nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari karakteristik demografinya.

Tabel 6.5 Uji T untuk perbandingan nilai sentralisasi ditinjau dari gender dan status perkawinan

		N	Rata-rata	St. Deviasi	T	P
Jenis kelamin	Perempuan	171	2.4164	0.68614	- 1.236	0.217
	Pria	429	2.5147	0.76237		
Status pernikahan	Telah menikah	520	2.5085	0.74187	1.935	0.056
	Lajang	80	2.3450	0.73328		

Tabel 6.6 Uji Anova untuk perbandingan nilai sentralisasi ditinjau dari kelompok umur, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja

Karakteristik demografi		N	Rata-rata	St. Deviasi	F	P
Kelompok umur	Di bawah 44	135	2.4756	0.70133	0,058	0.994

	45–54	300	2.4920	0.70966		
	55–64	132	2.4848	0.77720		
	65–74	24	2.5250	1.0336		
	Di atas 75	9	2.4000	0.74221		
Jenjang pendidikan	Sekolah menengah atas	20	2.5200	0.87636	0,052	0.949
	Sarjana	463	2.4894	0.74138		
	Pascasarjana	117	2.4701	0.72745		
Profesi	Petugas pemerintah	323	2.5121	0.71554	1.577	0.128
	Bankir	22	2.3273	0.73172		
	IFA-CFA1	129	2.4884	0.79565		
	Konsultan	6	2.2000	0.66933		
	Pendidik2	32	2.3125	0.66805		
	Bekerja sendiri	29	2.4690	0.80228		
	Perwira militer	3	3.4000	0.00000		
	Pengacara3	30	2.3067	0.12005		
	Pensiun	26	2.7000	0.17231		
Jumlah waktu kerja	Kurang dari 9 tahun	2	2.3000	0.98995	1.059	0.382
	10–19 tahun	28	2.6286	0.79389		
	20–29 tahun	231	2.4130	0.67708		
	30–39 tahun	252	2.5405	0.76128		
	40–49 tahun	81	2.4691	0.81496		
	50 tahun dan lebih	6	2.7000	1.00200		

hal <0,05

Pertanyaan Penelitian Ketiga

Hasil analisis pertanyaan penelitian ketiga dan enam hipotesis terkait diberikan di bawah ini.

RQ3: Apakah Ada Perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan Dilihat dari Karakteristik Demografinya?

Tabel 6.7 Uji T untuk perbandingan rasa munafik ditinjau dari jenis kelamin dan status perkawinan

		N	Rata-rata	St. Deviasi	T	P
Jenis kelamin	Perempuan	171	1.5056	0.53339	- 1.522	0.129
	Pria	429	1.5826	0.61869		
Status pernikahan	Telah menikah	520	1.5649	0.61815	0.585	0.559
	Lajang	80	1.5327	0.42886		

hal <0,05

H1 : Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender.

H2: Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Pernikahan.

H3 : Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur.

H4: Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

H5 : Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya.

H6 : Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Total Waktu Kerja (Tabel 6.7).

Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam Rasa kemunafikan lulusan ditinjau dari gender dan status perkawinan. Oleh karena itu, hipotesis “H1: Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender” dan “H2: Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan” ditolak. (Tabel 6.8).

Terdapat perbedaan secara statistik Rasa kemunafikan lulusan hanya ditinjau dari segi profesinya (t 2,025; p 0,042). Oleh karena itu, hanya hipotesis “H5: Terdapat perbedaan Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan Dilihat dari Profesinya” yang diterima. Perbandingan berpasangan menunjukkan bahwa Rasa Kemunafikan perwira militer lebih tinggi dibandingkan profesi lain kecuali konsultan.

Pertanyaan Penelitian Keempat

Hasil analisis pertanyaan penelitian keempat dan enam hipotesis terkait diberikan di bawah ini.

RQ4: Apakah terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

Tabel 6.8 Uji Anova untuk perbandingan rasa munafik ditinjau dari kelompok umur, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja

Karakteristik demografi		N	Rata-rata	St. Deviasi	F	P
Kelompok umur	Di bawah 44	135	1.5179	0.51978	0.603	0.661
	45–54	300	1.5523	0.59128		
	55–64	132	1.6037	0.67660		
	65–74	24	1.6798	0.66855		
	Di atas 75	9	1.5299	0.36578		
Jenjang pendidikan	Sekolah menengah atas	20	1.7654	0.67314	1.350	0.260
	Sarjana	465	1.5473	0.60122		
	Pascasarjana	117	1.5786	0.55979		
Profesi	Petugas pemerintah	323	1.5568	0.62901	2.025	0.042
	Bankir	22	1.3706	0.46315		
	IFA-CFA1	129	1.5325	0.51535		
	Konsultan	6	1.6282	0.53164		
	Pendidik2	32	1.3750	0.29421		

	Bekerja sendiri	29	1.6844	0.57393		
	Perwira militer	3	2.2308	0.00000		
	Pengacara ³	30	1.6410	0.54142		
	Pensiun	26	1.8136	0.88356		
Jumlah waktu kerja	Kurang dari 9 tahun	2	1.5769	0.81589	0.547	0.740
	10–19 tahun	28	1.6648	0.50124		
	20–29 tahun	231	1.5221	0.54271		
	30–39 tahun	252	1.5763	0.67307		
	40–49 tahun	81	1.5698	0.53054		
	50 tahun dan lebih	6	1.7692	0.32271		

hal <0,05

H1 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender.

H2 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan.

H3 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur.

Tabel 6.9 Uji T untuk perbandingan nilai rasionalisme ditinjau dari gender dan status perkawinan

		N	Rata-rata	St. Deviasi	T	P
Jenis kelamin	Perempuan	171	4.3571	0.78737	2.704	0.007
	Pria	429	4.1546	0.92249		
Status pernikahan	Telah menikah	520	4.2044	0.89435	- 0.573	0.568
	Lajang	80	4.2642	0.86601		

hal <0,05

H4 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

H5 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya.

H6 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Total Waktu Kerja (Tabel 6.9).

Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada nilai Rasionalisme lulusan ditinjau dari gender (t 2,704; p 0,007). Dengan demikian hipotesis “H1: Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender” diterima. Lulusan perempuan mempunyai nilai Rasionalisme yang lebih tinggi dibandingkan lulusan laki-laki. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai Rasionalisme lulusan ditinjau dari status perkawinan. Oleh karena itu, hipotesis “H2: Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan” ditolak (Tabel 6.10).

Terdapat perbedaan secara statistik nilai Rasionalisme lulusan ditinjau dari gender (t 7,316; p 0,000). Oleh karena itu, hipotesis “H3: Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan Ditinjau dari Kelompok Umur” diterima. Perbandingan berpasangan

menunjukkan bahwa nilai-nilai Rasionalisme pada kelompok umur 45–54 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai Rasionalisme Pemahaman Kerja pada kelompok umur 55–64 tahun. Meskipun tampaknya ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam nilai-nilai Rasionalisme para lulusan dalam hal total waktu kerja, tes Post Hoc Games-Howell yang relevan tidak dapat menentukan perbedaan antara kelompok mana. Oleh karena itu, dianggap bahwa perbedaan distribusi frekuensi kelompok dapat menyebabkan hal tersebut dan hipotesis “ H_6 : Terdapat perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Total Waktu Kerja” ditolak.

Pertanyaan Penelitian Kelima

Hasil analisis pertanyaan penelitian kelima dan enam hipotesis terkait diberikan di bawah ini.

Tabel 6.10 Uji Anova untuk perbandingan nilai rasionalisme ditinjau dari kelompok umur, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja

Karakteristik demografi		N	Rata-rata	St. Deviasi	F	P
Kelompok umur	Di bawah 44	135	4.2183	0.72736	7.316	0.000
	45–54	300	4.3616	0.69664		
	55–64	132	4.0025	1.15990		
	65–74	24	3.6417	1.38715		
	Di atas 75	9	3.7481	1.40862		
Jenjang pendidikan	Sekolah menengah atas	20	3.8700	1.27348	2.932	0.054
	Sarjana	463	4.1932	0.90414		
	Pascasarjana	117	4.3464	0.72826		
Profesi	Petugas pemerintah	323	4.1775	0.92885	1.172	0.314
	Bankir	22	4.5545	0.34999		
	IFA-CFA1	129	4.1364	1.01451		
	Konsultan	6	4.4000	0.58727		
	Pendidik2	32	4.5188	0.46858		
	Bekerja sendiri	29	4.2138	0.74565		
	Perwira militer	3	3.9333	0.00000		
	Pengacara3	30	4.3000	0.74376		
	Pensiun	26	4.2410	0.91430		
Jumlah waktu kerja	Kurang dari 9 tahun	2	4.2667	1.03709	2.706	0.020
	10–19 tahun	28	4.0714	0.87769		
	20–29 tahun	231	4.2638	0.74569		
	30–39 tahun	252	4.2817	0.85655		
	40–49 tahun	81	3.8947	1.23711		
	50 tahun dan lebih	6	4.2444	1.24127		

hal $<0,05$

RQ5: Apakah ada perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?

H1 : Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender.

H2 : Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan.

H3 : Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur.

H4: Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

H5 : Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya.

H6 : Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Jumlah Waktu Kerja (Tabel 6.11).

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai mistik lulusan ditinjau dari gender. Oleh karena itu, hipotesis “H1: Terdapat perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Gender” ditolak.

Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai Mistik lulusan ditinjau dari status perkawinan (t 2,119; p 0,036). Oleh karena itu, hipotesis “H2: Terdapat perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Status Perkawinan” diterima. Terlihat nilai mistik lulusan menikah lebih banyak dibandingkan nilai mistik asal muasal lulusan lajang (Tabel 6.12). Meskipun tampaknya ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam nilai-nilai Mistik para lulusan dalam hal total kelompok umur, tes Post Hoc Games-Howell yang relevan tidak dapat menentukan perbedaan antara kelompok mana.

Oleh karena itu, dianggap bahwa perbedaan distribusi frekuensi kelompok dapat menyebabkan hal tersebut dan hipotesis “H3: Terdapat perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Kelompok Umur” ditolak. Terlihat tidak terdapat perbedaan nilai Mistik lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Profesi serta hipotesis “H4: Terdapat perbedaan Nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Tingkat Pendidikan” dan “H5: Ada perbedaan nilai Mistik Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Profesinya” ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan pada total waktu kerja (t 2,820; p 0,016). Terlihat nilai Mistik pada mereka yang bekerja 20–29 tahun lebih tinggi dibandingkan nilai Mistik Asal pada mereka yang bekerja 40–49 tahun.

Tabel 6.11 Uji T perbandingan nilai mistik ditinjau dari jenis kelamin dan status perkawinan

		N	Rata-rata	St. Deviasi	T	P
Jenis kelamin	Perempuan	171	3.0789	0.79177	0.453	0.651
	Pria	429	3.0455	0.87738		
Status pernikahan	Telah menikah	520	3.0801	0.87012	2.119	0.036
	Lajang	80	2.8917	0.71850		

Tabel 6.12 Uji Anova untuk perbandingan nilai mistik ditinjau dari kelompok umur, tingkat pendidikan, profesi dan total waktu kerja

Karakteristik demografi		N	Rata-rata	St. Deviasi	F	P
Kelompok umur	Di bawah 44	135	3.1802	0.90398	4.209	0.002

	45–54	300	3.1083	0.77483		
	55–64	132	2.9167	0.91993		
	65–74	24	2.6181	0.93313		
	Di atas 75	9	2.5926	0.73177		
Jenjang pendidikan	Sekolah menengah atas	20	2.9250	0.97554	0.391	0.677
	Sarjana	463	3.0497	0.87627		
	Pascasarjana	117	3.6988	0.73570		
Profesi	Petugas pemerintah	323	3.1120	0.88977	1.786	0.077
	Bankir	22	3.0227	0.89575		
	IFA-CFA1	129	2.8230	0.80465		
	Konsultan	6	2.9444	1.14827		
	Pendidik2	32	3.1667	0.63075		
	Bekerja sendiri	29	3.0747	0.81234		
	Perwira militer	3	3.0000	0.00000		
	Pengacara3	30	3.1389	0.69905		
	Pensiun	26	3.3013	0.88697		
Jumlah waktu kerja	Kurang dari 9 tahun	2	2.0000	1.41421	2.820	0.016
	10–19 tahun	28	3.1786	0.92065		
	20–29 tahun	231	3.1371	0.83114		
	30–39 tahun	252	3.0642	0.82631		
	40–49 tahun	81	2.7942	0.92168		
	50 tahun dan lebih	6	2.8056	0.77110		

hal <0,05

6.5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Nilai-nilai kerja yang mempengaruhi preferensi, perilaku dan prestasi individu dalam kehidupan kerja dipengaruhi oleh karakteristik demografi serta karakteristik keluarga, sekolah dan budaya daerah. Oleh karena itu, ini merupakan konsep yang penting untuk diperhitungkan dalam kehidupan kerja. Berdasarkan data 600 partisipan penelitian, terlihat bahwa nilai-nilai kerja lulusan Sekolah Keuangan dalam kehidupan kerjanya masing-masing terbentuk dalam kerangka Rasionalisme, Profesionalisme, Mistik, Sentralisasi, dan Rasa Kemunafikan. Lima pertanyaan penelitian dibuat dalam kerangka karakteristik demografi dengan mempertimbangkan jenis nilai kerja lulusan. Setiap pertanyaan penelitian diuji dengan enam hipotesis yang dibuat secara terpisah, dan diamati bahwa hanya nilai Sentralisasi yang tidak membuat perbedaan.

Dari pertanyaan penelitian tersebut, jawaban atas pertanyaan “RQ1: Apakah terdapat perbedaan nilai Profesionalisme Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografinya?”, adalah perbedaan yang diamati dari segi gender, kelompok umur dan pendidikan. tingkat. Berdasarkan analisis, lulusan perempuan memiliki nilai profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengambilan risiko, melakukan pekerjaan dengan baik, kewirausahaan dan kerja sama lebih tinggi dibandingkan lulusan laki-laki. Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa perempuan

memiliki nilai kerja yang lebih tinggi, sementara studi lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, terutama dalam dimensi profesionalisme. Dalam hal kelompok umur, penelitian ini menunjukkan bahwa lulusan berusia antara 55–64 tahun yang sudah matang dan mendekati masa pensiun lebih profesional dalam kehidupan kerja. Banyak penelitian di masa lalu mengungkapkan bahwa kelompok usia berbeda menurut generasi dan nilai-nilai seperti prestise dan tanggung jawab, yang dipandang sebagai elemen profesionalisme, lebih tinggi pada generasi baby boomer (56–74 tahun). Dari segi tingkat pendidikan, mereka juga menunjukkan bahwa lulusannya menjadi lebih profesional dan setiap pengetahuan baru menjadikan mereka semakin ahli, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa literatur telah menunjukkan nilai-nilai profesionalisme (visi, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dll) (ketika dianggap menerima teknologi dan ide-ide baru) menjadi lebih mudah seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan (Li et al. 2008: 878 sebagaimana dikutip dalam Chai dan Mo 1997). Jawaban dari pertanyaan penelitian kedua, “RQ2: Apakah terdapat perbedaan nilai Sentralisasi Lulusan Sekolah Keuangan ditinjau dari Karakteristik Demografisnya?”, apakah tidak terdapat perbedaan. Artinya, nilai-nilai seperti pangkat dan wewenang, ketergantungan, represif, dan submisif tidak berubah sesuai dengan karakteristik demografi. Namun, banyak penelitian dalam literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti status, pangkat dan otoritas, loyalitas, dll. sebenarnya berbeda dalam kaitannya dengan status perkawinan.

Hipotesis ketiga, “RQ3: Adakah perbedaan nilai Rasa Kemunafikan Lulusan Sekolah Keuangan Dilihat dari Karakteristik Demografinya?”, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut terlihat dari segi profesi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin militer lebih ketat, lebih protektif, lebih tidak toleran dan lebih mencolok dibandingkan dengan konsultasi yang lebih bebas dan independen. Untuk Rasa Kemunafikan yang sebagian besar melibatkan materialisme, kesombongan, kemewahan dan kepentingan pribadi, literatur juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam hal gender, usia dan pengalaman.

Jawaban dari pertanyaan keempat “RQ4: Adakah perbedaan nilai Rasionalisme Lulusan Sekolah Keuangan Dilihat dari Karakteristik Demografinya?”, apakah terdapat perbedaan dari segi gender dan kelompok umur. Terlihat bahwa perempuan vs. laki-laki dan kelompok usia 45–54 tahun versus kelompok usia 55–64 tahun mempunyai lebih banyak pertukaran informasi, lebih ilmiah, lebih sukses, lebih pekerja keras, lebih jujur, lebih disiplin dan lebih adil. Literatur juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki hubungan yang lebih bersahabat dibandingkan laki-laki, dan bahwa kaum muda lebih peduli pada faktor kepercayaan dibandingkan dengan mereka yang lebih tua.

Jawaban dari pertanyaan kita yang terakhir, “RQ5: Adakah perbedaan nilai-nilai Asal Usul Mistik Lulusan Sekolah Keuangan Ditinjau dari Karakteristik Demografinya?”, bisa jadi perbedaan tersebut terlihat dari status perkawinan dan kelompok umur. Meskipun orang-orang yang menikah lebih tradisional, lebih pantang menyerah dan memiliki ikatan keluarga yang lebih erat dibandingkan dengan mereka yang lajang, mereka yang berada dalam kelompok usia 20–29 tahun terlihat lebih afektif, lebih fatalistis, dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang lebih kuat dibandingkan mereka yang berada dalam kelompok usia 40–49

tahun. Literatur (Cherrington et al. 1979: 621) juga menunjukkan bahwa orang yang lebih tua lebih peduli terhadap aspek moral pekerjaan dibandingkan orang yang lebih muda.

Hasilnya, lulusan Sekolah Keuangan dinilai memiliki nilai-nilai rasionalisme paling banyak seperti keilmuan, hak dan kebebasan individu, kesuksesan, keadilan dan ketekunan, dll. Kemudian nilai-nilai profesionalisme seperti persaingan, pengambilan risiko, intuisi, kewirausahaan dan kerjasama, dll. dalam kehidupan kerja mereka. Di sisi lain, terlihat bahwa nilai-nilai kerja berbeda menurut beberapa karakteristik demografis dalam lingkup sub-dimensi (tidak termasuk sentralisasi). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran lulusan Sekolah Keuangan yang memiliki nilai-nilai Profesionalisme dan Rasionalisme dalam kehidupan kerjanya dapat efektif dalam pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa sekolah keuangan yang ditutup dan jumlah lulusan yang terus menurun penting untuk kehidupan kerja dan menciptakan masyarakat yang maju.

BAB 7

PRIORITAS ORGANISASI DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

7.1 PENDAHULUAN

Ada banyak alasan potensial bagi organisasi untuk mengadopsi atau menerapkan kode tata kelola perusahaan ke dalam bisnis mereka, namun konsep ini muncul ketika organisasi mulai menghadapi penipuan dan aktivitas terkait yang melibatkan manajemen eksekutif dan dewan direksi. Kode yang dikembangkan oleh banyak negara dan otoritas menetapkan beberapa tujuan dari kode ini; namun semuanya konsisten dalam mengidentifikasi alasannya, yaitu;

- (a) memaksimalkan keberhasilan jangka panjang organisasi;
- (b) membangun perekonomian nasional yang kuat;
- (c) perlindungan pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Terlepas dari kenyataan bahwa kode tersebut dikembangkan, diterapkan dan dikontrol dengan ketat namun penipuan masih terjadi dan dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya.

Dengan meningkatnya tingkat penipuan, pemangku kepentingan dan khususnya pemegang saham menuntut perlindungan mereka yang tentunya tidak diberikan oleh kode tata kelola perusahaan dan inovasi diperlukan. Beberapa penipuan baru-baru ini yang mengejutkan dunia usaha termasuk penipuan 1MDB di Malaysia, penipuan NMC Health Care, runtuhnya grup Abraaj, penipuan emisi karbon Volkswagen, penipuan Wells Fargo, dan penipuan Formosa Plastics.

Perlu dicatat bahwa semua organisasi ini sepenuhnya mematuhi kode tata kelola perusahaan dan bahkan beberapa dari mereka juga mendapat penghargaan untuk proyek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Sifat dari semua penipuan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan lingkungan, penipuan sosial, penipuan ekonomi, penipuan politik, penipuan tujuan teritorial, dan penipuan tata kelola perusahaan.

Disebutkan di atas adalah beberapa contoh kegagalan tata kelola perusahaan. Alasan kegagalan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan, fungsi audit internal yang tidak efisien, lemahnya dewan direksi, anggota dewan yang tidak memenuhi syarat, korupsi, kepemimpinan yang tidak etis, dan visi organisasi jangka pendek. Kemungkinan mitigasi terhadap kegagalan ini dan inovasi yang diperlukan dalam tata kelola perusahaan dapat disebut sebagai tata kelola perusahaan berkelanjutan (SCG) dan integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di SCG.

Hanya sedikit akademisi dan praktisi yang menggunakan terminologi SCG dan ESG secara bergantian; Namun, ada perbedaan di antara keduanya dan hal ini diperlukan untuk keberhasilan organisasi. SCG merupakan hasil dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Terdapat tujuh belas

tujuan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PBB. Ketujuh belas bidang ini saling terkait dan berupaya untuk keberlanjutan masyarakat termasuk organisasi juga.

Tujuan berkelanjutan ini difokuskan pada strategi jangka panjang suatu negara dan menekankan pada peningkatan kualitas hidup, melindungi ekosistem, dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang (UNESCO 2015). Agar implementasi tujuan-tujuan ini berhasil, setiap negara memerlukan korporasi/organisasi, perusahaan yang menguntungkan, pemimpin yang berorientasi masa depan, dan organisasi yang kaya akan uang. SCG memastikan bahwa organisasi tidak mencari keuntungan jangka pendek, berusaha untuk menjadi mandiri dan membantu masyarakat untuk tumbuh juga. Kelangsungan bisnis bergantung pada SCG.

Menurut survei terbaru, 66% organisasi menyadari bahwa SCG itu penting; namun, 82% anggota dewan direksi tidak memberikan kontrol dan pertimbangan yang tepat kepada SCG. Beberapa negara tidak memasukkan/mencakup SCG dalam kode tata kelola perusahaan mereka, dan ini bukan bagian dari seluruh proses bisnis. Kegagalan pasar dan peraturan berkontribusi terhadap masalah yang disebabkan oleh tidak diterapkannya SCG.

Dewan direksi dan manajemen eksekutif seharusnya bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan, namun mereka fokus pada pengambilan keuntungan jangka pendek, yang menyenangkan pemegang saham. Selain itu, kompensasi dewan dan bonus manajemen eksekutif didasarkan pada profitabilitas jangka pendek, bukan pertumbuhan berkelanjutan. Kegagalan seperti ini disebabkan oleh kurangnya tata kelola perusahaan dan SCG adalah satu-satunya faktor mitigasi yang dapat mencegah kegagalan tersebut dan memaksa perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

Sampai saat ini, belum ada kriteria yang jelas untuk SCG. Tanpa adanya pedoman yang jelas ini, keberlanjutan bisnis menjadi tidak pasti dan sulit untuk memastikan bahwa kinerja organisasi harus dipromosikan sebagai upaya berkelanjutan atau diturunkan peringkatnya menjadi sekadar upaya ramah lingkungan (greenwash). Ada beberapa contoh dimana organisasi memanfaatkan klaim yang berlebihan untuk memposisikan diri mereka sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

Selain itu, keberlanjutan telah disalahpahami karena kurangnya langkah-langkah yang jelas. Banyak organisasi yang tidak yakin akan makna keberlanjutan dan aspek apa saja yang harus mereka fokuskan karena adanya redefinisi yang terus menerus. Dalam kasus seperti ini, keberlanjutan tiba-tiba berarti mengatasi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan gender.

Aspek lain dalam mencapai keberlanjutan adalah ESG yang merupakan salah satu faktor tata kelola dan membantu dalam mewujudkan SCG. ESG mendorong organisasi untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan berdasarkan evaluasi dampak lingkungan dan komponen sosial-kemanusiaan jangka panjang. ESG juga menekankan pada tujuan jangka panjang dibandingkan inisiatif profitabilitas jangka pendek. ESG berevolusi dari keberlanjutan bisnis. Perbedaan utama antara ESG dan SCG adalah bahwa ESG telah menetapkan dan menetapkan aturan-aturan yang dirumuskan oleh badan-badan pembuat standar seperti

International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation Trustees dan International Sustainability Standards Board (ISSB).

Standar-standar ini mengidentifikasi bagaimana suatu produk investasi mempertimbangkan isu-isu LST dalam tujuan, strategi investasi, dan aktivitas pengelolaannya (Courtneil 2021; ISSB 2021). Perbedaan lainnya adalah bahwa ESG berfokus pada dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak tata kelola yang dapat terjadi pada periode saat ini atau dalam periode waktu yang lebih singkat, sedangkan SCG memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Dalam lingkungan bisnis saat ini, ESG merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan pemberi pinjaman/lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau memberikan perpanjangan pinjaman. ESG mendorong lembaga keuangan untuk melakukan investasi yang bertanggung jawab. Sesuai dengan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh United States Sustainable Investment Foundation (US SIF) disebutkan bahwa terdapat pertumbuhan sebesar 42% dalam pengelolaan aset untuk perusahaan-perusahaan strategis ESG dan investasi tumbuh dari Rp. 12 triliun menjadi Rp. 17 triliun (USSIF 2020). ESG menyoroti beberapa risiko yang dapat dikategorikan ke dalam kategori berikut, dan risiko ini berbeda dengan risiko yang diidentifikasi oleh SCG.

Jelas dari Tabel 7.1 bahwa dampak lingkungan ESG lebih terfokus pada faktor eksternal sedangkan risiko organisasi hanya ditanggung dari sudut pandang tata kelola. Perlu disebutkan bahwa lingkungan pengendalian yang tersedia dalam organisasi tidak dapat dicakup dalam risiko tata kelola dan harus diperlakukan berdasarkan risiko lingkungan. *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mengembangkan kerangka risiko yang secara jelas menyebutkan risiko lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dapat didefinisikan sebagai pentingnya pemberian dewan dan manajemen eksekutif terhadap pengendalian internal (COSO 2022).

Selain itu, terdapat beberapa sektor bisnis yang tidak memberikan dampak terhadap lingkungan eksternal seperti sektor pendidikan, sektor telekomunikasi, dan pengembang perangkat lunak. Organisasi yang tidak memberikan dampak terhadap lingkungan akan selalu mencapai nilai tertinggi untuk pengungkapan lingkungan terlepas dari buruknya pengendalian lingkungan mereka. Untuk melengkapi pengungkapan ESG, diperlukan penyertaan lingkungan pengendalian. Pengungkapan ini akan membantu pemegang saham dan regulator untuk mengidentifikasi keberlanjutan organisasi dan juga akan menegakkan standar etika tertinggi.

SCG dan ESG adalah dua faktor tata kelola utama dan keduanya penting untuk keberlanjutan organisasi. Bab ini akan menyoroti bahwa terdapat perbedaan antara SCG dan ESG dan kedua faktor tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara bersamaan. Bab ini akan menyoroti faktor lingkungan pengendalian yang akan dimasukkan dalam ESG agar dianggap lengkap dan ringkas. Bab ini juga akan mengidentifikasi teori-teori yang berkaitan dengan SCG dan ESG dan akan meningkatkan pengetahuan yang sudah ada.

Sejauh pengetahuan para peneliti, belum ada penelitian yang dilakukan yang membandingkan SCG dan ESG serta menyoroti perbedaan antara kedua faktor tata kelola ini;

lebih jauh lagi, tidak ada penelitian yang mempertimbangkan lingkungan pengendalian berdasarkan ESG. Bab ini akan berguna dan bermanfaat bagi regulator dan organisasi dalam mengubah dan memasukkan SCG dan ESG ke dalam kode tata kelola perusahaan dan kebijakan organisasi. Bab ini juga akan bermanfaat bagi badan profesional dan organisasi internasional seperti PBB dan yayasan IFRS.

Tabel 7.1 Risiko ESG

Risiko lingkungan	Risiko sosial	Risiko tata kelola
Perubahan iklim	Ketimpangan	Remunerasi dewan
Keamanan air	Keberagaman dan inklusi	Remunerasi manajemen eksekutif
Limbah	Hubungan karyawan	Keberagaman dan struktur dewan
Polusi	Kesehatan dan keselamatan	Sumbangan dan lobi politik
Penggundulan hutan	Kondisi kerja	Suap dan korupsi
Hilangnya keanekaragaman hayati	Diskriminasi	Kebijakan dan standar

7.2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan mencakup literatur terkait SCG, ESG dan teori terkaitnya. Bagian ini juga akan menyoroti sejarah, latar belakang SCG dan ESG serta potensi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap SCG dan ESG.

Latar Belakang Sejarah Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan dan ESG

Bagian ini akan menjelaskan dan menyoroti latar belakang sejarah SCG dan ESG secara rinci.

Sejarah Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

SCG adalah istilah yang lebih baik untuk tata kelola perusahaan di mana organisasi diminta untuk bekerja dengan cara yang berkelanjutan bagi organisasi dan pemegang sahamnya. Sebagai hasil dari Laporan Brundtland tahun 1987, pembangunan berkelanjutan telah menjadi komponen inti sistem manajemen yang memungkinkan mereka meningkatkan nilai jangka panjang organisasi mereka. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam Laporan Brundtland sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang”. Definisi ini memberikan visi jangka panjang bagi organisasi dan memaksa organisasi untuk melakukan mitigasi atau mengembangkan tindakan mitigasi terhadap ketidakpastian tingkat tinggi.

Keberlanjutan telah dimasukkan ke dalam kerangka legislatif melalui laporan Brundtland. Laporan ini memberikan dasar bagi pengembangan tujuan berkelanjutan dan dapat dianggap sebagai konsep mendasar dan penting dari SDG saat ini (Mondini 2019). Namun, pelaporan sosial dimulai pada tahun 1970an sebagai bagian yang melekat pada pelaporan keuangan. Pelaporan sosial memberikan informasi terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Aspek-aspek ini juga dapat dianggap sebagai dimensi SCG. Dimensi tersebut diperluas lagi dengan menambahkan dua aspek lagi yaitu dimensi politik

dan teritorial. Pada tahun 2019 ditambahkan dua dimensi tambahan yaitu tata kelola perusahaan dan sifat produk.

Keberlanjutan perusahaan dapat dicapai dengan mengintegrasikan ketujuh dimensi pembangunan berkelanjutan. Namun, beberapa ahli percaya bahwa dimensi ekonomi memberikan landasan keuangan yang paling kuat dan juga mencegah organisasi dari keruntuhan karena masalah keuangan. Melalui praktik tata kelola organisasi dan pembangunan ekonomi, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan tata kelola perusahaan.

Sejarah ESG

Ide ESG lahir dari investasi yang bertanggung jawab secara sosial (Socially Responsible Investment/SRI) yang dapat ditelusuri kembali ke abad kesembilan belas, ketika faktor dan batasan sosial dipertimbangkan ketika mengambil keputusan investasi, terutama oleh organisasi berbasis agama. Karena peristiwa sejarah seperti Perang Vietnam dan isu-isu sosial kontemporer seperti hak-hak perempuan, lingkungan hidup dan hak-hak sipil, kekhawatiran ini mendapat perhatian dan menjadi lebih sering dipertimbangkan oleh orang-orang yang terlibat secara politik ketika membuat keputusan investasi.

Beberapa dekade kemudian, inisiatif SRI berfokus pada divestasi perusahaan yang memiliki hubungan dengan apartheid Afrika Selatan dan perdagangan senjata (misalnya Sudan). Situasi ini mengilhami pembentukan organisasi seperti Ethical Investment Research Services Ltd. di London, yang bertujuan untuk membekali lembaga keagamaan dan organisasi non-pemerintah dengan informasi penelitian independen yang mereka perlukan untuk membuat keputusan investasi yang etis.

Pada tahun 2004 ketika istilah ESG pertama kali disebutkan dalam laporan Global Compact PBB bertajuk *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*. Fokus utama laporan ini adalah untuk membuat kebijakan dan mengusulkan cara yang lebih baik untuk mengintegrasikan keprihatinan LST ke dalam layanan perantara efek, manajemen aset, dan fungsi penelitian terkait. Laporan ini didukung oleh lembaga keuangan yang mencakup manajer aset, pemilik aset, bank besar, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2005, Inisiatif Pembiayaan Program Lingkungan PBB menerbitkan sebuah laporan yang disebut kerangka hukum untuk memasukkan isu-isu LST ke dalam investasi institusional.

Laporan ini menyoroti kewajiban fidusia untuk menggunakan informasi LST ketika mengambil keputusan investasi dan memberikan bukti penting mengapa isu-isu LST penting dari sudut pandang keuangan. Kedua laporan ini menjadi dasar peluncuran Prinsip-Prinsip PBB untuk Investasi yang Bertanggung Jawab pada tahun 2006, yang mendorong lembaga-lembaga keuangan global dan pihak-pihak lain untuk berjanji memasukkan ESG ke dalam keputusan investasi mereka. Selama dekade terakhir, aset yang dikelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor ESG sangatlah besar dan semakin besar, dan jumlah penandatanganan Prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab, yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah meningkat lima kali lipat.

Di dunia saat ini, semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaporan LST dan berupaya untuk memberikan dampak terhadap isu-isu LST melalui berbagai inisiatif lain

yang terkait erat satu sama lain. Beberapa inisiatif tersebut antara lain Inisiatif Pelaporan Global (GRI), Tujuan Universal Perusahaan dalam Revolusi Industri Keempat yang dituangkan dalam Manifesto Davos 2020 Forum Ekonomi Dunia (WEF), Proyek Pengungkapan Karbon (CDP) dan Proyek Keberlanjutan Dewan Standar Akuntansi (SASB). ESG saat ini mulai populer di negara-negara berkembang setelah bertahun-tahun digunakan secara aktif di Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Selain itu, beberapa pencapaian, seperti terciptanya sistem penilaian ESG, persyaratan pengungkapan ESG, dan sistem indeks ESG, telah mendukung pertumbuhan dan kematangan komponen lingkungan, sosial dan tata kelola serta ESG secara keseluruhan.

Tata Kelola Perusahaan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai SCG dan ESG, ada baiknya kita membahas tata kelola perusahaan karena tata kelola perusahaan merupakan landasan bagi organisasi mana pun dan tanpa kehadiran tata kelola perusahaan, organisasi publik tidak dapat beroperasi. Pengenalan dan penerapan tata kelola perusahaan yang tepat adalah hasil dari aktivitas penipuan yang dilakukan oleh organisasi. Alasan lain ditegakkannya tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan kepuasan dan keamanan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat kebijakan dan aturan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Regulator seperti otoritas pasar modal (CMA) atau komisi bursa sekuritas (SEC) suatu negara wajib memastikan kepatuhan terhadap kode etik ini. Tujuan dari kode etik tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan investor. Kode mencakup perilaku organisasi dan menetapkan standar bagi dewan dan komite terkait, manajemen eksekutif, auditor internal, dan auditor eksternal.

Beberapa negara memperkenalkan kode tata kelola perusahaan pada tahun 2002 dan membuat beberapa amandemen terhadap kode tersebut. Perlu disebutkan bahwa kode etik perlu dipatuhi; namun, tidak ada otoritas penjaminan yang tepat yang dapat memberikan jaminan untuk implementasi yang tepat dari kode etik ini. Auditor eksternal memberikan pendapat yang lebih mengarah pada verifikasi lembar kepatuhan yang disediakan oleh organisasi, dan mereka tidak memverifikasi rinciannya. Pendapat yang diberikan lebih bersifat menyelamatkan hak hukumnya dibandingkan memberikan kepuasan kepada pemegang saham.

Auditor internal dianggap sebagai garis pertahanan ketiga dan diharuskan memberikan rincian kepatuhan terhadap aturan dan regulasi; namun, kecurangan yang dilakukan oleh dewan dan manajemen eksekutif sulit diidentifikasi karena mereka adalah pembuat kebijakan dan memiliki pengaruh penuh terhadap sistem dan orang-orang termasuk auditor internal khususnya auditor yang dialihdayakan. Kondisi tersebut memerlukan tambahan kepraktisan tata kelola perusahaan yang dapat dianggap berkelanjutan dan memastikan organisasi berpikir jangka panjang demi keberlanjutan organisasi dan memberikan manfaat jangka panjang kepada pemegang saham.

Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Tata kelola perusahaan berkelanjutan (SCG) merupakan akibat dari kegagalan tata kelola perusahaan yang ada dan juga untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan PBB.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

Dengan 17 tujuan, 169 target dan 232 indikator, agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 mewakili pendekatan pembangunan berkelanjutan yang paling komprehensif hingga saat ini. Oleh karena itu, keberlanjutan dimodelkan dengan fokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan global. Tabel 7.2 menentukan tujuan, uraian singkat dan target serta dampak terhadap organisasi terhadap SCG dan ESG.

Dampak yang disebutkan pada Tabel 7.2 diambil dari rincian yang diberikan oleh UNESCO. Terbukti bahwa dari 17 tujuan, tiga diantaranya terkait dengan SCG, dan enam lainnya terkait dengan ESG yang terkait langsung dengan organisasi. Tujuan-tujuan lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan serikat pekerja atau kelompok internasional. UNESCO mengakui bahwa tujuan 8, 9 dan 17 tidak dapat dicapai kecuali organisasi terlibat dan bekerja untuk pencapaian SCG. Untuk itu, beberapa sesi penyadaran dilakukan dan banyak reformasi dilakukan. Untuk tujuan-tujuan yang terkait dengan LST, upaya serupa juga dilakukan oleh UNESCO dan hal ini diidentifikasi sebagai tanggung jawab organisasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Integrasi Keberlanjutan ke dalam Tata Kelola Perusahaan

Merupakan tanggung jawab organisasi untuk mengurangi penipuan, memberikan kepuasan kepada pemegang saham dan membantu mencapai tujuan berkelanjutan PBB. Untuk itu, integrasi keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan sangat diperlukan. Keberlanjutan dalam arti yang lebih luas mengacu pada pembangunan masyarakat dengan menciptakan keseimbangan antara atribut ekonomi, sosial dan lingkungan. Integrasi ketiga atribut tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan atribut ekonomi sebagai motor penggerak.

Atribut ekonomi dari keberlanjutan memberikan kekuatan finansial dan membantu dalam keadaan yang semakin berkurang yang dapat menyebabkan organisasi menuju penutupan/penutupan bisnis karena alasan keuangan. Ada atribut lain yang juga diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan yaitu komunitas, kelompok pekerjaan, pemerintah, budaya dan fisiologi. Dengan kombinasi atribut-atribut tambahan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa untuk mencapai keberlanjutan dibutuhkan delapan atribut.

Keberlanjutan mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan keberlanjutan perusahaan mengacu pada organisasi yang melakukan aktivitas perusahaan yang menciptakan pengembangan bisnis berkelanjutan. Organisasi dapat mengembangkan bisnis yang berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik tata kelola mereka, mendukung masyarakat lokal dalam bentuk penciptaan lapangan kerja dan distribusi keuntungan dalam bentuk dividen, pembayaran pensiun, dan dukungan serupa lainnya kepada masyarakat. Organisasi harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang harus sejalan dengan visi jangka panjang dan objektivitas perusahaan yang berkelanjutan. Agar organisasi dapat

mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam fokus tata kelola perusahaan, aspek-aspek berikut ini disebutkan dalam Tabel 7.3.

Tabel 7.2 Tujuan, penjelasan singkat dan target pembangunan berkelanjutan PBB

Sasaran	Domain tujuan pembangunan berkelanjutan	Uraian singkat dan sasaran	Organisasi yang berdampak pada	
			SCG	ESG
1	Tidak ada kemiskinan	Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur dengan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp.30.000 per hari	Tidak	Ya
2	Nol kelaparan	Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.	Tidak	Tidak
3	Kesehatan dan kesejahteraan yang baik	Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Tidak	Tidak
4	Kualitas pendidikan	Pada tahun 2030, memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas sehingga menghasilkan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.	Tidak	Ya
5	Kesetaraan gender	Akhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana pun	Tidak	Tidak
6	Air bersih dan sanitasi	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Tidak	Tidak
7	Energi yang terjangkau dan bersih	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	Tidak	Ya
8	Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, pertumbuhan produk domestik bruto minimal 7% per tahun di negara-negara kurang berkembang	Ya	Tidak
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan berketahanan, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan	Ya	TIDAK

		kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan adil untuk semua		
10	Mengurangi kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan kelompok 40% penduduk terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Tidak	Ya
11	Kota dan komunitas yang berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau serta memperbaiki kawasan kumuh	Tidak	Tidak
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Melaksanakan Kerangka Program 10 Tahun Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju sebagai pemimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara-negara berkembang	Tidak	Ya
13	Aksi Iklim	Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Tidak	Ya
14	Kehidupan di bawah air	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi laut, khususnya dari aktivitas di darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	Tidak	Tidak
15	Kehidupan di darat	Pada tahun 2020, memastikan konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar darat dan darat serta jasa-jasanya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Tidak	Tidak
16	Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat	Mengurangi secara signifikan segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun	Tidak	Tidak
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri dalam hal perpajakan dan pengumpulan pendapatan lainnya	Ya	Tidak

Sumber UNESCO (2015)

Tabel 7.3 Aspek-aspek yang diperlukan dalam integrasi keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan

Aspek integrasi	Keterangan
Proses bisnis secara keseluruhan	Keberlanjutan harus tertanam dalam semua kebijakan dan proses organisasi
Manajemen kinerja	KPI organisasi harus dikembangkan dengan cara yang mendorong keberlanjutan
Metrik kinerja bisnis	Identifikasi tujuan keberlanjutan spesifik industri dan gabungkan tujuan tersebut sebagai tujuan organisasi

Hanya sedikit badan profesional yang berupaya mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan; Namun, hasilnya masih belum terlihat. Dalam tinjauan terbaru yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terdaftar di Singapura, terungkap bahwa 74% perusahaan yang menunjukkan pengungkapan keberlanjutan masih belum menghubungkan remunerasi dewan direksi dan manajemen eksekutif mereka dengan pencapaian keberlanjutan dan keberlanjutan masih dianggap sebagai hal yang tidak jelas dan sepele.

Keberlanjutan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan berkelanjutan (SCG) digambarkan sebagai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Uni Eropa (UE) sebagai “Keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan mencakup mendorong dunia usaha untuk mempertimbangkan dampak lingkungan (termasuk iklim, keanekaragaman hayati), sosial, manusia dan ekonomi dalam keputusan bisnis mereka dan untuk fokus pada penciptaan nilai berkelanjutan jangka panjang daripada dampak keuangan jangka pendek. nilai”. SCG menegaskan bahwa semua kebijakan yang terkait dengan organisasi terfokus pada visi jangka panjang, bertanggung jawab secara sosial, dan tidak boleh bertujuan untuk keuntungan jangka pendek. Pandemi yang terjadi saat ini menyoroti masalah ini lebih jauh karena banyak perusahaan yang menutup operasinya sepenuhnya dan banyak pemerintah yang terjebak dalam perangkap utang yang tidak ada habisnya. Ada banyak faktor yang merumuskan SCG dan membangun kerangka implementasinya. Faktor-faktor ini dibahas di bawah ini.

Tanggung jawab sosial perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) biasanya disebut sebagai tugas organisasi terhadap masyarakat luas dan karyawan pada khususnya. Seperti namanya, merupakan tanggung jawab perusahaan untuk aktif secara sosial guna mendukung para pemangku kepentingannya. CSR menciptakan tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang adil, lingkungan, praktik operasi, perspektif pelanggan, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

CSR mendorong dukungan dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan tidak ada pelanggaran lingkungan kerja dan tidak ada kerja paksa. Dalam lingkungan bisnis saat ini, CSR umumnya dipandang sebagai pengungkapan catatan dalam laporan keuangan di mana organisasi menyoroti berapa banyak mereka menganggarkan CSR dan rencana yang

dimaksudkan. Mayoritas organisasi masih menganggap CSR sebagai amal yang diberikan kepada beberapa panti asuhan, untuk mendanai pendidikan seseorang dan untuk mendukung beberapa partai politik. Namun, ketika CSR digabungkan ke dalam SCG, praktik-praktik ini dapat dihindari karena organisasi akan dipaksa untuk mengembangkan kebijakan jangka panjang dengan dampak yang bertahan lama dan stabil.

CSR mempromosikan kesetaraan di antara karyawan dan menghilangkan diskriminasi. Hal ini juga bertanggung jawab atas dampak lingkungan positif dari organisasi. Ada beberapa contoh dimana organisasi memberikan CSR namun masih memberikan dampak pada masyarakat dengan limbah beracun dan polusi seperti perusahaan Formosa Plastics. CSR saja tidak dapat memitigasi risiko ini dan integrasi SCG diperlukan. CSR juga mendorong praktik bisnis yang jujur termasuk tindakan anti-penipuan dan mekanisme pelapor pelanggaran (whistle-blower). CSR bermaksud untuk fokus pada rantai pasokan organisasi dan menegakkan tanggung jawab terhadap operasi pihak ketiga meskipun mereka tidak terkait langsung dengan organisasi.

Ekonomi Hijau

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi menyebabkan berkembangnya praktik ekonomi hijau di akhir abad ke-20. Sebuah laporan penting yang diterbitkan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada tahun 2011 mendefinisikan ekonomi hijau sebagai “ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi”. Ekonomi hijau dimotivasi oleh dua faktor utama yaitu (a) motivasi organisasi dan (b) memperoleh peningkatan citra publik.

Ekonomi hijau dapat dikaitkan dengan SCG karena ada beberapa potensi penipuan yang disebut sebagai green washing. Green washing mengacu pada penipuan yang diciptakan untuk menghindari atau menyesatkan pemegang saham terhadap SCG. Organisasi yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan seperti sektor energi dan ketenagalistrikan menerima tekanan besar dari para pemangku kepentingan untuk memproduksi komoditas berkelanjutan dan energi ramah lingkungan. Bisnis ramah lingkungan mulai mendapatkan kesadaran di kalangan investor dan organisasi terpaksa mengadopsi praktik ramah lingkungan. Dengan integrasi ekonomi hijau ke dalam SCG, penipuan dapat dihilangkan dan organisasi akan mengembangkan kebijakan yang memiliki dampak nyata dalam jangka panjang.

Strategi Berkelanjutan

Strategi berkelanjutan adalah strategi keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi yang mengutamakan tindakan yang akan mendorong kinerja dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Dunia usaha memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang mereka. Hal ini melibatkan pendefinisian serangkaian pernyataan, program, rencana, tindakan, dan tujuan keberlanjutan yang menguraikan bagaimana suatu bisnis akan bersaing di pasar tertentu secara berkelanjutan.

Agar organisasi dapat mencapai SCG, mereka diharuskan mengembangkan strategi yang berkelanjutan. Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan ini; namun, niat organisasi dan

kemauan dewan diperlukan. Undang-undang dan peraturan harus dibuat dengan menekankan pada strategi berkelanjutan sehingga dunia usaha dapat mengadopsi dan menerapkannya. Strategi berkelanjutan harus dirancang dengan cara yang memungkinkan kemudahan pengoperasian pada periode saat ini dan menghasilkan keberlanjutan untuk masa depan.

Rencana dan Program Berkelanjutan

Strategi keberlanjutan suatu organisasi mencakup program keberlanjutan. Program ini memberikan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti yang menyoroti langkah-langkah dan aktivitas terkait yang berkontribusi terhadap kisah keberlanjutan dan mendorong hasil. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, inisiatif yang terdefinisi dengan baik, dan rencana implementasi yang spesifik disertakan dalam program ini. Program keberlanjutan harus menjadikan strategi berkelanjutan sebagai sebuah kontinum agar bisa efektif. Ini bukanlah program yang statis, dan memerlukan penyesuaian dan perubahan terus-menerus jika diperlukan agar tetap berkelanjutan. Untuk mengoordinasikan berbagai proyek dan rencana, program keberlanjutan bergantung pada serangkaian tujuan dan sasaran keberlanjutan.

Rencana keberlanjutan dirancang terlebih dahulu untuk memenuhi tujuan tertentu dari program keberlanjutan. Strategi keberlanjutan menetapkan serangkaian tujuan dan tindakan. Rencana keberlanjutan yang dapat ditindaklanjuti kemudian dibuat berdasarkan program keberlanjutan tersebut. Untuk mencapai strategi keberlanjutan utama, program keberlanjutan akan mencakup lebih dari satu rencana berkelanjutan.

Kerangka Keberlanjutan

Kerangka kerja dikembangkan untuk menilai kinerja. Setelah strategi, program dan rencana SCG dikembangkan, faktor terakhir adalah menilai SCG melalui kerangka kerja. Kerangka kerja ini dibangun untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan diterjemahkan ke dalam kemajuan ilmiah/teknis. Perkembangan ini menentukan posisi organisasi dan potensi kesenjangan dalam pencapaian tujuan SCG-nya.

Penilaian keberlanjutan berbasis kerangka kerja adalah salah satu metodologi penilaian yang paling kompleks. Selain aspek multidisiplin, hal ini juga menyangkut aspek budaya dan berbasis nilai. Kerangka kerja keberlanjutan biasanya dibangun untuk mendukung pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penilaian keberlanjutan menjadi lebih umum dalam penilaian produk, kebijakan dan kelembagaan. Untuk memberikan perspektif baru mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SCG, penilaian keberlanjutan diperkenalkan.

Untuk pengembangan kerangka apapun, diperlukan atribut/prinsip, tingkat pencapaian dan kriteria. Untuk SCG, atribut yang memungkinkan adalah visi panduan, pertimbangan penting, ruang lingkup, indikator SCG, transparansi, komunikasi efektif, pemantauan dan pelaporan. Penilaian dapat dilakukan melalui skenario “bagaimana jika”, mengidentifikasi situasi saat ini dan mengenali potensi kesenjangan melalui pengukuran kinerja yang dirasakan.

Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social and Governance/ESG) telah lama dibahas, namun saat ini telah menjadi kata kunci bagi dunia usaha dan banyak pemerintahan. Meskipun ESG sudah ada sejak lama, namun masih belum ada satu pun definisi ESG yang diterima. Menurut Lim dkk. (2022), ESG dikonseptualisasikan dalam empat cara berbeda seperti;

- (i) kerangka kerja, ideologi, atau paradigma yang memiliki tiga komponen: lingkungan, masyarakat dan tata kelola;
- (ii) konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mencakup menggabungkan “tindakan dan kebijakan bisnis yang mengevaluasi, memantau dan mengelola akuntabilitas dan implikasi organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (iii) jenis penilaian dampak sosial yang mempertimbangkan nilai sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh tindakan atau operasi organisasi mana pun. Tions;
- (iv) suatu bentuk keuangan dan investasi berkelanjutan. Sementara itu, Aldowaish dkk. (2022) menyoroti dua posisi ESG dalam literatur saat ini, perspektif pertama dikenal sebagai investasi yang bertanggung jawab secara sosial (socially responsive investment/SRI), dan mengkaji ESG dari sudut pandang investasi dan perspektif kedua, yang dikembangkan dari pembangunan berkelanjutan (SD), mengkaji ESG dari sudut pandang operasi bisnis. Oleh karena itu, terdapat pemahaman umum mengenai ESG dalam tiga dimensi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.4, yang mendefinisikan isu-isu lingkungan, sosial atau tata kelola yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan atau solvabilitas suatu organisasi, negara, atau individu.

Tabel 7.4 Kerangka ESG

Dimensi	Keterangan
Lingkungan (E)	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi GRK • Konsumsi dan efisiensi energi • Polutan udara • Penggunaan dan daur ulang air • Produksi dan pengelolaan limbah (air, padat, berbahaya) • Dampak dan ketergantungan terhadap keanekaragaman hayati • Dampak dan ketergantungan pada ekosistem • Inovasi produk dan layanan ramah lingkungan
Sosial (S)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan berserikat bagi pekerja • Pekerja anak • Kerja paksa dan wajib • Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja • Kesehatan dan keselamatan pelanggan • Diskriminasi, keberagaman dan kesetaraan • Peluang • Kemiskinan dan dampaknya terhadap masyarakat • Manajemen rantai persediaan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendidikan • Privasi pelanggan • Dampak terhadap komunitas
Tata Kelola (G)	<ul style="list-style-type: none"> • Kode etik dan prinsip bisnis • Akuntabilitas • Transparansi dan keterbukaan • Gaji eksekutif • Keberagaman dan struktur dewan • Penyuapan dan korupsi • Keterlibatan pemangku kepentingan • Hak pemegang saham

Saat ini, baik entitas, individu maupun negara telah mengalami pertumbuhan yang intensif dalam mengadopsi ESG. Misalnya, terdapat lebih banyak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaporan ESG dan bertujuan untuk memberikan dampak ESG melalui berbagai program yang terkait erat seperti *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Carbon Disclosure Project (CDP)*, Manifesto Davos 2020, Forum Ekonomi Dunia. Selain itu, investasi ESG telah tumbuh secara signifikan selama dekade terakhir, dan epidemi COVID-19 telah mempercepat tren ini.

Dengan menyatukan aspek, permasalahan dan peluang keuangan dan ESG, integrasi ESG memberikan kesempatan kepada investor reguler sekalipun untuk memberikan manfaat (atau setidaknya mengurangi dampak buruk) terhadap masyarakat dan bumi melalui investasi mereka. Sementara itu, negara-negara yang menggunakan otoritas terkait untuk menerapkan peraturan dan standar tersebut, seperti Uni Eropa dan banyak negara maju, telah mewajibkan laporan ESG untuk diungkapkan oleh perusahaan. Meskipun praktik-praktik ESG masih dalam tahap awal di negara-negara berkembang seperti Malaysia, regulator mendorong perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, untuk mengungkapkan laporan-laporan ESG. Oleh karena itu, negara-negara berkembang diperkirakan akan secara bertahap memajukan prinsip pengungkapan wajib ESG bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa di masa depan, mengikuti jejak negara-negara Eropa dan Amerika.

Perspektif yang berbeda mengenai manfaat ESG juga dibahas secara luas. Beberapa kelompok berpandangan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham karena penerapan ESG memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan manfaat yang dihasilkan oleh praktik ESG. Kelompok lain percaya bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, bukan hanya kepada pemegang saham. Kelompok ini berpendapat bahwa perusahaan tidak boleh fokus hanya pada peningkatan kekayaan pemegang saham tetapi harus menekankan dan memasukkan unsur sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya.

Manfaat yang didapat dari praktik ESG lebih besar daripada biayanya. Contoh manfaatnya adalah imbalan finansial melalui efek seperti peningkatan kinerja dan penilaian perusahaan, peluang pengembalian dan pengurangan biaya, sedangkan dari segi non-

finansial seperti peningkatan transparansi, peningkatan nilai merek, peningkatan reputasi dan legitimasi, mitigasi risiko, peningkatan loyalitas pelanggan. dan motivasi karyawan, praktik bisnis dan proses pengendalian yang lebih baik, serta peningkatan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, makalah tinjauan sistematis oleh Lim et al. (2022) menyoroti tiga keuntungan:

- (i) Pelaporan ESG memitigasi asimetri informasi antara organisasi dan investornya serta antar investor.
- (ii) ESG memberikan manfaat pasar modal yang nyata seperti peningkatan likuiditas, return saham yang lebih tinggi, biaya modal (hutang dan ekuitas) yang lebih rendah, pengambilan keputusan perusahaan yang lebih baik, preferensi investor yang lebih menguntungkan, harga aset atau nilai organisasi yang lebih tinggi dan pengurangan risiko organisasi.
- (iii) Penerapan ESG juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis karena mendukung indeks perekonomian dan kesejahteraan sosial nasional seperti kesehatan, konsumsi non-materi, kesejahteraan materi yang memadai, dan kesetaraan pendapatan.

Saat ini, terdapat banyak penelitian ESG. Namun sayangnya, sebagian besar penelitian terkait dengan negara-negara maju di kawasan seperti Eropa, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada, meskipun tantangan ESG secara signifikan jauh lebih besar di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ada banyak ruang untuk kontribusi dari berbagai disiplin ilmu dan bidang dalam penelitian ESG karena sebagian besar penelitian dipublikasikan di bidang akuntansi dan keuangan, keberlanjutan umum, atau kedua bidang tersebut.

Selain itu, penelitian ESG berfokus terutama pada satu aspek elemen ESG, dan literatur mengenai faktor lingkungan dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, didorong untuk melakukan lebih banyak penelitian ESG di negara-negara berkembang, perusahaan UKM dan fokus pada ESG di bidang multidisiplin seperti budaya, agama, kualitas audit, pengendalian internal, manajemen kualitas total, ideologi politik dan lain-lain. Sementara itu, penelitian ESG telah dirumuskan dari banyak lensa teoritis seperti teori keagenan, teori ketergantungan sumber daya, teori legitimasi, teori biaya transaksi, teori eselon atas, teori berbasis sumber daya alam, teori identitas sosial, teori sinyal, teori keterikatan tempat, pembenaran sistem. Teori dan seterusnya namun, teori yang lebih banyak digunakan dalam studi ESG adalah teori pemangku kepentingan.

Masih ada harapan bahwa ESG akan segera digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu, meskipun beberapa penelitian telah menjadi landasan bagi tren perkembangan ini. ESG akan menjadi semakin penting di masa depan, karena organisasi yang menaruh nilai tinggi pada pengembangan ESG akan mempunyai posisi yang lebih baik dalam memanfaatkan prospek pertumbuhan, sementara perusahaan yang tidak mengadopsi ESG dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Lebih lanjut, praktik-praktik ESG merupakan batu loncatan bagi negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

7.3 PERBEDAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL

SCG dan ESG merupakan faktor tata kelola dan keduanya diperlukan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang matang. SCG mendefinisikan visi dan tujuan jangka panjang organisasi, sedangkan ESG memastikan bahwa organisasi tidak hanya mendukung peningkatan keuntungan dan pemegang saham tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas. Tidak ada standar atau kepatuhan yang tersedia untuk SCG, sedangkan ESG didukung oleh standar dan dukungan para pemimpin dunia. Ada banyak lembaga keuangan yang menerapkan ESG untuk pemberian pinjaman atau untuk mendukung investasi masa depan.

Ada tujuan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PBB dan diadopsi oleh banyak negara. Tujuan-tujuan ini menekankan organisasi untuk memiliki tata kelola perusahaan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan aspek sosial masyarakat dan mungkin berdampak positif terhadap lingkungan. Di sisi lain, ESG menegakkan undang-undang yang tidak mendorong organisasi untuk memiliki visi jangka panjang mengenai tata kelola perusahaan, namun memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Faktor tata kelola ESG juga rentan terhadap tata kelola terkait aspek sosial organisasi dengan penekanan pada dampak lingkungan.

SCG memberikan informasi yang memberikan kepuasan kepada pemegang saham bahwa organisasinya berada pada jalur yang benar; sedangkan ESG memastikan bahwa organisasi mencapai salah satu tujuan dan tidak mencapai pencapaian visi dan misinya. Tidaklah bijaksana untuk mengatakan bahwa tanpa SCG, penerapan ESG akan sulit dan tidak dapat dikelola. Salah satu contoh terbaru adalah penipuan Volkswagen yang berdampak pada lingkungan karena tata kelola yang buruk. Mungkin ada banyak contoh lain di mana organisasi memberikan dampak terhadap aspek lingkungan dan sosial, namun hal ini disebabkan oleh tata kelola yang buruk dan strategi jangka pendek.

Kebijakan organisasi berbasis ESG tidak jelas. Mereka kehilangan banyak aspek seperti transparansi dalam pelaporan keuangan, kepuasan dan perlindungan pemegang saham, dorongan investasi asing, mitigasi risiko terkait konflik kepentingan, praktik organisasi ilegal dan tidak etis. Selain itu, ESG lebih fokus pada eksternalitas organisasi dan tidak berfokus pada lingkungan internal organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan kebutuhan pertama dan terpenting bagi organisasi mana pun dan aspek ini sama sekali tidak ada dalam kebijakan LST.

SCG memastikan bahwa organisasi mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab secara sosial yang meningkatkan visi jangka panjang organisasi. Pandemi yang terjadi baru-baru ini menyoroti isu SCG. Organisasi yang berada di jalur SCG dan menerapkannya dengan benar akan mampu bertahan dan memulihkan kerugiannya serta mampu melanjutkan bisnisnya. Banyak pakar percaya bahwa ESG diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis organisasi; Namun SCG-lah yang dapat memberikan kepuasan dan perlindungan kepada pemegang saham.

Di antara banyak perbedaan tersebut, terdapat satu kesamaan, yaitu SCG dan ESG, keduanya tidak terdapat dalam kode tata kelola perusahaan yang dikembangkan di banyak negara. Dibutuhkan banyak upaya dari negara, regulator, dan organisasi untuk menerapkan

kebijakan SCG dan ESG. Kebijakan-kebijakan ini harus dirancang untuk melindungi pemegang saham, sehingga berfokus pada mitigasi risiko penipuan, meningkatkan nilai perusahaan dan mendukung masyarakat.

7.4 TEORI TERKAIT

Terdapat beberapa teori yang terkait dengan SCG dan ESG; namun, teori yang paling dapat mendefinisikan hubungan antara SCG dan ESG untuk keberlanjutan adalah teori pemangku kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menjawab kekhawatiran para pemangku kepentingan terkait penciptaan nilai, perdagangan, etika kapitalisme, dan pola pikir/nada dewan direksi.

Teori pemangku kepentingan mengemukakan hubungan antara suatu organisasi dan sekelompok individu atau organisasi lain yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh keprihatinan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Dari perspektif pemangku kepentingan, teori pemangku kepentingan mendefinisikan serangkaian hubungan antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Hubungan ini adalah tentang bagaimana manajer organisasi (dewan dan manajemen eksekutif), komunitas, penyandang dana, karyawan, pemasok dan pelanggan menciptakan nilai dan mengembangkan perdagangan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa pemahaman tentang hubungan ini membantu untuk memahami dan mengelola bisnis.

Lebih jauh lagi, jika terjadi konflik kepentingan, perusahaan harus mendefinisikan ulang penciptaan nilai tidak hanya untuk satu kelompok pemangku kepentingan tertentu namun untuk seluruh pemangku kepentingan. Misalnya, untuk menyenangkan para penyandang dana, nilai bagi pelanggan atau karyawan tidak boleh diabaikan. Merupakan tugas moral dari manajer organisasi untuk meningkatkan bisnis dalam sistem kapitalis dan mengembangkan hubungan pemangku kepentingan tanpa menimbulkan kerugian bagi pemangku kepentingan lainnya dan menghindari kegagalan moral.

Dari sudut pandang etika, teori pemangku kepentingan mencakup penerimaan gagasan berikut: Pemangku kepentingan adalah organisasi atau individu yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sah, otentik, dan sah dalam aspek prosedural dan/atau mendasar dari kegiatan organisasi. Pemangku kepentingan diakui berdasarkan kepentingannya dalam organisasi dan bukan berdasarkan kepentingan organisasi terhadap pemangku kepentingan tersebut.

Keputusan pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan mendefinisikan pertimbangan mereka sendiri, dan hal ini mungkin terkait atau tidak dengan pertimbangan kelompok lain. Teori pemangku kepentingan mendorong para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa organisasi memberikan nilai tambah kepada pelanggannya, memperlakukan karyawan sebagai aset, melakukan hubungan yang adil dengan pemasok, mendukung masyarakat dan menghasilkan nilai jangka panjang. Kebijakan-kebijakan ini diperkenalkan untuk mendukung investasi para pemegang saham, untuk menarik investor lain, tumbuh dan berinovasi serta memberikan kesuksesan masa depan bagi organisasi, komunitas dan negara.

SCG dan ESG memaksa organisasi untuk mengembangkan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan berdampak pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan organisasi. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk seluruh pemangku kepentingan dan untuk memastikan bahwa organisasi memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sosial, lingkungan, komunitas, kelompok pekerjaan, pemerintah, budaya dan fisiologi. SCG dan ESG tidak dapat didefinisikan hanya untuk satu kelompok tertentu, melainkan berdampak pada seluruh masyarakat. SCG memastikan tata kelola perusahaan pada organisasi yang juga dapat mencakup ESG.

7.5 KESIMPULAN

Tata kelola perusahaan diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi. Namun karena beberapa kegagalan perusahaan, pemangku kepentingan memerlukan perlindungan lebih dan menuntut keberlanjutan dalam operasional organisasi. SCG dan ESG merupakan faktor tata kelola yang diperkenalkan untuk meningkatkan nilai organisasi, memberikan perlindungan kepada pemangku kepentingan dan kepuasan kepada pemegang saham. SCG memastikan bahwa organisasi bekerja menuju tujuan jangka panjang dan tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga mengurangi risiko penipuan dan malpraktik. Inklusi ESG memastikan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada profitabilitas atau keberlanjutan organisasi namun juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori pemangku kepentingan mengidentifikasi bahwa hubungan suatu organisasi dengan individu atau organisasi lain yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kekhawatiran para pemangku kepentingannya. Menurut teori pemangku kepentingan, organisasi dan berbagai pemangku kepentingan memiliki serangkaian hubungan. Manajer, anggota masyarakat, pemodal, karyawan, pemasok dan pelanggan mengembangkan hubungan ini untuk menciptakan nilai dan mengembangkan perdagangan. Menurut teori pemangku kepentingan, memahami hubungan ini sangat penting untuk memahami dan mengelola bisnis. Sebagai akibat dari SCG dan ESG, organisasi terpaksa mengembangkan kebijakan yang akan berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Pembuatan kebijakan ini memastikan bahwa organisasi memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, komunitas, kelompok pekerjaan, pemerintah, budaya dan fisiologi. SCG dan ESG berdampak pada seluruh masyarakat dan tidak dapat didefinisikan hanya untuk satu kelompok tertentu.

Bab ini menyoroti potensi SCG dan ESG dan mengidentifikasi bahwa SCG diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi, sedangkan ESG dapat dimasukkan dalam operasional organisasi sebagai pendukung SCG tetapi bukan sebagai unsur utama SCG. SCG mendefinisikan keberlanjutan organisasi yang diwajibkan oleh pemegang saham dan tercermin dalam misi dan visi organisasi. Tata kelola perusahaan mendefinisikan peraturan dan regulasi bagi organisasi, kecuali jika peraturan ini tidak berkelanjutan maka akan sulit bagi organisasi untuk bertahan dan tidak mampu mewujudkan karakteristik LST.

Bab ini dapat diubah menjadi studi empiris dan dapat bermanfaat bagi regulator, pembuat kebijakan, badan dan organisasi pembuat standar. Bab ini menjelaskan pentingnya

SCG dan ESG serta menyoroti bahwa SCG adalah faktor utama tata kelola perusahaan dan ESG dapat menjadi bagian dari SCG untuk mencapai keberlanjutan

BAB 8

MODEL KEWIRAUSAHAAN DAN STRUKTUR KEMITRAAN DI ERA KLASIK

8.1 PENDAHULUAN

Pada era klasik di Indonesia, model kewirausahaan dan struktur kemitraan cenderung didasarkan pada pola-pola tradisional dan budaya lokal yang telah ada sejak zaman dahulu. Model kewirausahaan pada masa itu mungkin lebih terkait dengan kegiatan ekonomi yang bersifat subsisten, seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan lokal yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau komunitas tertentu.

Struktur kemitraan dalam konteks ini dapat mencakup bentuk-bentuk seperti kerjasama antara keluarga atau komunitas dalam memanfaatkan sumber daya alam atau modal yang dimiliki bersama. Hal ini bisa berupa praktik kerjasama dalam bidang pertanian, pembuatan produk kerajinan, atau sistem perdagangan yang berbasis pada pertukaran barang dan jasa antara berbagai komunitas atau daerah.

Namun, perlu diingat bahwa model kewirausahaan dan struktur kemitraan di era klasik sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan budaya masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, praktik kewirausahaan dan kemitraan pada masa tersebut mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kondisi lokal dan tradisi yang ada.

Banyak penelitian mengenai kewirausahaan yang juga mengacu pada sejarah perkembangan konsep kewirausahaan. Disebutkan bahwa konsep kewirausahaan pertama kali didefinisikan oleh Richard Cantillon yang hidup pada awal abad kedelapan belas. Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, pemikir seperti Jean Baptise Say dan Schumpeter membawa perspektif baru terhadap konsep kewirausahaan. Tampaknya tidak ada diskusi dalam literatur tentang sejarah perkembangan konsep kewirausahaan. Namun, ketika kewirausahaan dipertimbangkan dalam periode sejarah tertentu atau dalam proses sejarah suatu negara, studi-studi yang bersifat anakronistik dalam literatur muncul di hadapan kita. Kajian-kajian tersebut di atas membahas dan mengevaluasi periode sejarah dengan paradigma kewirausahaan saat ini. Namun, permasalahan ini dianggap lebih tepat jika disikapi dengan paradigma kewirausahaan pada periode sejarah yang diteliti.

Kajian sastra Turki berkaitan dengan sejarah perkembangan konsep kewirausahaan yang sejalan dengan sastra asing. Namun, sangat sedikit penelitian yang membahas kewirausahaan di Kekaisaran Ottoman. Terlihat bahwa sebagian besar kajian mengenai kewirausahaan sebelum proklamasi Republik Indonesia jatuh ke dalam anakronisme yang disebutkan di atas dan mengabaikan atau mengabaikan kegiatan kewirausahaan pada periode-periode sebelumnya. Salah satu kesalahan paling umum adalah memandang keseluruhan periode pra-Republik dengan pendekatan kewirausahaan berorientasi produksi massal pada revolusi industri. Dengan perspektif seperti itu, terlihat bahwa tidak ada aktivitas

kewirausahaan di Kesultanan Utsmaniyah, kecuali beberapa contoh pada abad kesembilan belas. Namun, jika dilihat dari sudut pandang serupa, pada abad kedelapan belas, ketika Cantillon mendefinisikan kewirausahaan, tidak ada aktivitas kewirausahaan di dunia, dan kesimpulan yang salah dapat diambil. Berdasarkan semua hal tersebut, ternyata salah jika kita melihat sejarah kewirausahaan dari sudut pandang masa kini atau masa lalu kita.

Terlihat bahwa kesalahan lain yang ditemui dalam penanganan kewirausahaan di Kesultanan Utsmaniyah adalah karena agama dan ras para pengusaha. Terlihat bahwa kelompok ras dan agama yang muncul di beberapa sektor pada periode terakhir Kesultanan Utsmaniyah telah meluas ke semua sektor dan semua periode. Dengan poin yang salah ini, ada klaim bahwa non-Muslim berwirausaha di Kesultanan Ottoman, dan Muslim Turki tidak melakukan aktivitas wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman yang disebutkan di atas melalui model kewirausahaan dan struktur kemitraan yang disukai oleh sebagian besar Muslim Turki di Era Klasik Kesultanan Ottoman.

8.2 KEWIRAUSAHAAN DI ERA KLASIK

Pada Zaman Klasik, konsep kewirausahaan berkaitan erat dengan gagasan ekonomi klasik yang dipelopori oleh para pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Pengertian kewirausahaan pada periode ini lebih menekankan pada peran pengusaha dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum, kewirausahaan pada Zaman Klasik dipahami sebagai kemampuan atau tindakan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya dengan efisien untuk menciptakan nilai ekonomi.

Adam Smith, dalam karyanya "*The Wealth of Nations*," menyoroti peran pengusaha dalam mengorganisir faktor produksi dan menciptakan kekayaan bagi masyarakat. Smith menggambarkan pengusaha sebagai individu yang bertindak atas motivasi untuk mencari keuntungan, namun pada saat yang sama juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui produksi dan penawaran barang dan jasa. David Ricardo juga menyumbangkan pandangan penting tentang kewirausahaan dalam teori nilai dan distribusi ekonomi. Menurut Ricardo, pengusaha memainkan peran kunci dalam proses alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan melalui investasi modal dan pengelolaan usaha.

John Stuart Mill menyoroti pentingnya inovasi dan risiko dalam kegiatan kewirausahaan. Mill memandang kewirausahaan sebagai faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkenalkan teknologi baru. Secara keseluruhan, pengertian kewirausahaan pada Zaman Klasik menekankan peran penting pengusaha dalam menciptakan nilai ekonomi melalui inovasi, investasi, dan pengelolaan sumber daya dengan efisien.

Pengertian Kewirausahaan pada Zaman Klasik

Pengusaha Cantillon pada abad kedelapan belas didefinisikan sebagai struktur pasar di desa dan kota yang berlokasi di pusat kota, dengan harga yang terbentuk sejalan dengan penawaran dan permintaan. Sekali lagi, ia mendefinisikan struktur yang mengeksport produk

yang dihasilkan di desa sebagai “pengusaha dan pedagang.” Cantillon menyatakan bahwa pengusaha kota beroperasi di berbagai lini bisnis seperti toko roti dan toko daging dengan membangun atau menyewa gedung.

Cantillon, dalam karyanya “*Essai Sur La Nature Du Commerce En Général* (An Essay on Economic Theory),” terkadang menggunakan “wirausahawan dan/atau pedagang”, terkadang “wirausahawan dan/atau pengrajin”, dan terkadang hanya “wirausahawan”. Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut, tidak salah jika dikatakan bahwa definisi kewirausahaan pada abad kedelapan belas mencakup berbagai macam perajin, produsen kecil, dan pedagang. Terlihat bahwa ciri utama yang ditekankan ketika mendefinisikan kewirausahaan adalah “risiko.” Menurut Cantillon, wirausaha adalah orang-orang yang mendirikan dan menyelenggarakan usaha di berbagai sektor, bahkan terkadang mempertaruhkan kebangkrutan, demi memperoleh keuntungan.

Kewirausahaan Sebelum Zaman Klasik

Sebelum Zaman Klasik dalam konteks Indonesia, konsep kewirausahaan tidak secara eksplisit terdokumentasikan seperti pada zaman kemudian. Namun, prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, seperti inovasi, perdagangan, dan pengelolaan usaha, sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Di Indonesia, sebelum Zaman Klasik, aktivitas kewirausahaan sering terjadi dalam bentuk perdagangan dan pertukaran barang antar-pulau yang telah berlangsung selama berabad-abad. Komunitas-komunitas lokal, seperti pedagang dan nelayan, telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan pertukaran barang.

Kewirausahaan pada masa lalu Indonesia juga tercermin dalam praktik pertanian, kerajinan, dan kerajinan tangan tradisional. Para petani, pengrajin, dan pedagang kecil secara aktif mengelola usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka. Selain itu, beberapa kerajaan dan kesultanan di Nusantara memiliki sistem ekonomi yang maju, yang melibatkan perdagangan internasional, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur.

Pemimpin dan pedagang kelas atas di kerajaan-kerajaan tersebut dapat dianggap sebagai wirausahawan dalam arti yang lebih luas karena mereka mengorganisir dan mengelola aktivitas ekonomi yang kompleks. Meskipun tidak ada istilah “kewirausahaan” seperti yang kita kenal hari ini, prinsip-prinsip dasar kewirausahaan telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum Zaman Klasik. Perdagangan, pertanian, kerajinan, dan manajemen usaha telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia sejak zaman kuno.

Sebagai contoh lain dari Kegiatan wirausaha yang dilakukan di Anatolia sebelum Zaman Klasik dapat terungkap dengan dokumen yang terbatas hingga saat ini. Namun, sumber utama yang mengungkap wirausahawan dan struktur wirausaha pada masa itu dengan fenomena sosial adalah catatan perjalanan dan kronik. Pada awal sumber tersebut terdapat catatan perjalanan yang ditulis oleh Ibnu Batutah. Ibnu Batutah berbicara tentang pengusaha yang disebut “ahi (atau ahi)” selama perjalanannya ke Anatolia.

Ahis terlibat dalam berbagai kegiatan kerajinan tangan, membangun bangunan keagamaan dengan keuntungan yang mereka peroleh, dan menyambut semua tamu, terutama penumpang. Dilaporkan bahwa para ahis yang tinggal di hampir setiap kota (atau bahkan desa mereka) di Anatolia mempunyai argumen yang serius untuk menerima tamu yang datang dari perjalanan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tidak salah jika dikatakan bahwa para ahis yang membuka tempat usaha dengan mengambil risiko selama kurun waktu tersebut telah mencapai tingkat keuntungan yang mampu membiayai kegiatan pembangunan dan bantuan dengan nyaman.

Selain itu, terlihat terdapat pengusaha yang berpenghasilan tinggi di Anatolia. Contohnya adalah keluarga Köyökog'lu, yang anggotanya ditemui Ibnu Batutah di waktu dan tempat yang berbeda. Keluarga yang berdomisili di Alanya dan dikabarkan berasal dari Turki Muslim ini kabarnya membangun jaringan perdagangan yang tersebar hampir di seluruh Mediterania. Bahkan disebutkan bahwa keluarga tersebut memberikan pinjaman kepada sultan pada masa itu.

Berdasarkan semua hal tersebut, ditentukan bahwa kegiatan wirausaha tersebar luas di Anatolia dan sekitarnya pada masa Orhan Bey, yang dianggap berada dalam masa berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh para pengusaha Muslim dan Turki, mulai dari kerajinan tangan hingga perdagangan antarbenua.

Kewirausahaan di Anatolia pada Zaman Klasik

Pada Zaman Klasik Kekaisaran Ottoman, alat tenun kapas, yang dianggap sebagai industri pada masa itu, memainkan peran penting di Anatolia dan sekitarnya. Dilaporkan bahwa alat tenun di masa Kesultanan Utsmaniyah tidak kalah dengan India yang merupakan produsen dan eksportir kapas nomor satu pada masa itu. Terlihat juga para empuk Turki meniru beberapa barang India dan menawarkannya ke pasar dalam dan luar negeri. Disebutkan bahwa kain katun Turki menduduki posisi dominan di pasar dalam negeri pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas dan merupakan barang ekspor penting ke Eropa bahkan Amerika Tengah. Bahkan dilaporkan bahwa teknik yang digunakan di rumah pewarnaan kain berkelompok di Edirne dimaksudkan untuk ditiru oleh Perancis dan Belanda pada abad kedelapan belas.

Banyak produk yang dibutuhkan di pasar dalam negeri, seperti sampel kain wol, diproduksi dan dijual oleh pengusaha di Anatolia. Tidak ada informasi bahwa tambang tersebut diimpor pada Zaman Klasik. Produsen kulit Ottoman berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan produsen kulit Eropa dan sekitarnya. Meskipun produk-produk seperti kulit diekspor secara berlebihan di pasar dalam negeri, ekspor logam seperti tembaga tanpa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dilarang. Berdasarkan semua itu, terlihat bahwa pengusaha Anatolia dan Rumelian pada Zaman Klasik berada pada level yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, khususnya pada produk-produk kebutuhan pokok. Berdasarkan informasi mengenai tradisi ahi-order yang diwarisi dari Seljuk, dilaporkan bahwa pengusaha Muslim Turki sebagian besar memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Perdagangan Internasional yang Dilakukan oleh Muslim Turki pada Zaman Klasik

Dilaporkan bahwa pengusaha Muslim Turki yang merupakan warga Ottoman pada abad keenam belas memiliki hubungan komersial yang erat dengan India dan sekitarnya. Menurut para pelancong Barat, empat ratus pengusaha Turki Ottoman terus-menerus berdagang di Gujarat pada abad keenam belas. Situasi serupa dilaporkan terjadi di Balkan. Dinyatakan bahwa pengusaha Muslim Turki berperan aktif di bidang kain wol di Balkan dan khususnya di Dubrovnik, tempat perdagangan berlangsung secara intensif pada abad keenam belas.

Demikian pula, terlihat bahwa orang Turki Anatolia dan Rumelia mendominasi perdagangan di dalam dan sekitar Laut Hitam pada Zaman Klasik. Dinyatakan bahwa pedagang grosir adalah orang asing di Kairo, yang merupakan salah satu titik perdagangan penting di Mediterania. Dilaporkan bahwa sebagian besar pengusaha ini, yang bukan berasal dari Kairo namun beragama Islam, adalah orang Turki Anatolia dan Rumelian, yang dikenal sebagai "Rumis".

Bukti lain bahwa beberapa pengusaha aktif yang mengarahkan perdagangan antara Eropa dan Anatolia pada Zaman Klasik adalah Muslim Turki adalah "Fondaco dai Turchi" di Venesia. Struktur ini, yang dilaporkan dibangun pada abad kedelapan belas dan menyerupai karavan dalam masyarakat Ottoman, diperuntukkan bagi akomodasi para pedagang Muslim. Struktur ini, yang disediakan oleh Republik Venesia untuk menampung komunitas wirausaha Turki, mulai digunakan oleh umat Islam dari negara lain ketika mereka menganut agama yang sama dan berpikir mereka akan merasa nyaman. Dilaporkan bahwa "fondaco" serupa diberikan kepada orang Turki mulai abad keenam belas. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa pedagang Turki dan hasa Anatolia dan Rumelia terlibat dalam aktivitas komersial intensif dengan Venesia dan, oleh karena itu, Eropa.

Akibatnya, dari abad keenam belas hingga pertengahan abad kedelapan belas, para pedagang Muslim Turki membangun jaringan mereka sendiri di pasar internal Kesultanan Ottoman dan di jalur darat dan laut di bawah kendali kekaisaran. Bahkan pada abad kedelapan belas, dilaporkan ada pengusaha kaya Ottoman yang melakukan inisiatif besar melawan pengusaha Inggris di Aleppo. Berdasarkan semua ini, sangat sulit untuk berargumentasi bahwa kewirausahaan tidak ada atau lemah di Era Klasik Kesultanan Utsmaniyah. Sebaliknya, terlihat bahwa terdapat pengusaha-pengusaha Muslim Turki (Anatolia dan Rumelian) yang bersaing dengan dan terkadang melampaui pengusaha-pengusaha Eropa, India, dan Rusia di dalam dan sekitar Kesultanan Utsmaniyah. Para pengusaha ini tersebar di berbagai pusat perdagangan dan jumlah serta modalnya relatif besar.

Kewirausahaan pada Pejabat Publik dan Tentara di Kesultanan Utsmaniyah

Ketika menggambarkan kegiatan wirausaha pada masa Kesultanan Utsmaniyah, disebutkan bahwa wirausaha sebagian besar dilakukan oleh non-Muslim. Sebagai dasar dari hal ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim Turki lebih memilih dinas militer dan sipil. Dervis, Mehmet Pasha, yang hidup pada abad ketujuh belas dan menjabat sebagai wazir agung, adalah salah satu contoh paling menonjol yang menunjukkan hal

sebaliknya. Darwis Mehmet Pasha memulai aktivitas kewirausahaannya di banyak sektor selama masa jabatan gubernurnya di Damaskus dan Bagdad dan memperoleh kekayaan yang cukup besar. Dilaporkan bahwa Dervis, Mehmet Pasha memiliki investasi pertanian yang luas di Irak dan memiliki perwakilan di pusat perdagangan seperti India, Basra, dan Aleppo. Contoh serupa adalah Rustem Pasha, yang merupakan wazir Suleiman Agung.

Rustem Pasha dikabarkan adalah seorang pengusaha sukses. Sedemikian rupa sehingga status negarawan menjadi wirausaha atau wirausahawan menjadi negarawan dikritik oleh para ulama baik sebelum maupun selama periode tersebut. Sebelum Zaman Klasik, Ibnu Khaldun dan Koçi Bey pada abad ketujuh belas berbicara tentang dampak buruk aktivitas kewirausahaan negarawan terhadap negara Mustafa Ali, yang juga hidup pada abad ketujuh belas, dalam bukunya yang berjudul "*Kitab-ı Müsteab*" dan mengungkapkan kekurangannya. pengusaha diklasifikasikan sebagai negarawan. Berdasarkan informasi ini, jelas bahwa pada Zaman Klasik Kesultanan Utsmaniyah, negarawan beralih ke wirausaha, sedangkan wirausaha beralih ke politik. Kritik dari banyak sarjana mengenai hal ini dapat dianggap sebagai bukti terbesar.

Terdapat informasi bahwa golongan militer melakukan kegiatan wirausaha pada Zaman Klasik Kesultanan Utsmaniyah. Dalam perintah yang diterbitkan pada abad keenam belas, disebutkan bahwa berbagai kelas militer terlibat dalam aktivitas seperti pedagang dan pedagang, yang dilarang. Terlepas dari semua larangan tersebut, terutama tentara janisari yang terlibat dalam kegiatan wirausaha militer, dan dengan menggunakan hak istimewanya, mereka berada di luar kendali kadi dan muhtesi.

Pengusaha lain terus-menerus menggugat tentara yang tidak mematuhi nrah, membuka tempat kerja di tempat yang mereka inginkan, dan menawarkan produk berkualitas rendah ke pasar. Namun, kasus-kasus tersebut seringkali diselingi dengan perilaku istimewa kelas militer. Sehubungan dengan hal ini, banyak keluhan dari pemerintah provinsi juga disampaikan ke Istanbul. Selain itu, terdapat situasi yang berlawanan, seperti partisipasi pengusaha dalam korps janisari. Dalam praktik yang terlihat di Kairo, berbagai pengusaha membayar mahal untuk mendaftar ke serikat tentara dan mendapatkan keuntungan dari hak istimewa yang diberikan oleh kelas militer.

8.3 PEMODELAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEMITRAAN BISNIS DI ERA KLASIK

Di era klasik Indonesia, pemodelan kewirausahaan dan kemitraan bisnis dapat dilihat dalam berbagai konteks ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa contoh pemodelan kewirausahaan dan kemitraan bisnis di era klasik Indonesia:

1. Sistem Pertanian Subsisten dan Kerajinan Tangan: Di era klasik, masyarakat Indonesia umumnya mengadopsi sistem pertanian subsisten, di mana petani mengelola lahan mereka sendiri untuk memproduksi makanan dan keperluan sehari-hari. Selain itu, kerajinan tangan seperti pembuatan kain tradisional, anyaman, dan kerajinan logam juga menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Kewirausahaan dalam konteks ini terlihat dalam upaya petani dan pengrajin untuk mengelola produksi mereka sendiri dan menjual hasilnya di pasar lokal.

2. Sistem Perdagangan Tradisional: Perdagangan antar-pulau telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi Indonesia sejak masa klasik. Kewirausahaan terlihat dalam aktivitas pedagang lokal yang berlayar dari satu pulau ke pulau lain untuk memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, kain, logam, dan barang-barang lainnya. Kemitraan bisnis dalam perdagangan ini terbentuk melalui jaringan pedagang dan kerjasama antar-komunitas untuk memfasilitasi pertukaran barang.
3. Sistem Perekonomian Kerajaan dan Kesultanan: Di era klasik, Indonesia memiliki berbagai kerajaan dan kesultanan yang mengelola sistem ekonomi yang maju. Pemimpin kerajaan dan pedagang kelas atas berperan sebagai wirausahawan dengan mengorganisir perdagangan internasional, mengelola sumber daya alam, dan membangun infrastruktur. Kemitraan bisnis terbentuk antara pemimpin kerajaan dan pedagang untuk mengelola kegiatan ekonomi yang kompleks.
4. Pertukaran Budaya dan Penyebaran Agama: Selain aktivitas ekonomi, kewirausahaan juga terlihat dalam pertukaran budaya dan penyebaran agama di era klasik. Pedagang dan misionaris melakukan perjalanan lintas pulau untuk memperdagangkan barang-barang dan menyebarkan agama seperti Islam dan Hinduisme. Kemitraan bisnis terbentuk antara pedagang dan pemimpin agama untuk mendukung pertukaran budaya dan agama ini.

Secara keseluruhan, pemodelan kewirausahaan dan kemitraan bisnis di era klasik Indonesia mencerminkan keberagaman aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, yang meliputi pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, perekonomian kerajaan, dan pertukaran budaya

Pada Zaman Klasik, pinjaman komersial berbunga dianggap dilarang di hampir seluruh dunia Islam, khususnya di Kekaisaran Ottoman. Cara-cara alternatif juga telah ditemukan dari waktu ke waktu untuk mengatasi hambatan dalam mengeluarkan pinjaman berbunga. Namun, dalam lingkungan di mana bunga dianggap tidak sah dan dilarang, struktur kemitraan telah dikembangkan di mana risiko investasi dibagi dalam tingkat yang berbeda-beda. Unsur utamanya adalah *mudharabah*, *mufavada* (*mufavaza*) dan *inan*. Struktur kemitraan baru telah diciptakan dengan membawa inovasi ke dalam kemitraan yang terdaftar dari waktu ke waktu.

Sekilas Mengenai Jenis-Jenis Perseroan dan Perseroan Dalam Hukum Islam

Larangan langsung pinjaman berbunga dan instrumen investasi sejenis dalam agama Islam mengakibatkan semua aliran memusatkan perhatian pada kemitraan perusahaan secara detail. Mungkin alasan paling kuat atas pentingnya isu perusahaan dan jenis perusahaan adalah perselisihan yang terjadi antar mitra. Kewenangan (biasanya kadi) untuk menyelesaikan perselisihan memerlukan yurisprudensi agama dan sektarian. Untuk itu, para ulama fikih yang menganut tradisi Hanafi, Hanbali, Syafii, dan Maliki, terkadang mengemukakan ketentuan serupa dan terkadang berbeda mengenai kemitraan perusahaan. Tampaknya juga denominasi yang tercantum di atas mengelompokkan jenis perusahaan secara berbeda.

Diketahui bahwa aliran dominan di Kesultanan Utsmaniyah adalah Hanafi. Namun, sekte lain dapat meminta agar pendapat ulama sekte mereka sendiri disengketakan. Pada titik ini, ketika mengkaji jenis-jenis perusahaan di Kesultanan Ottoman, sebagian besar evaluasi

akan dilakukan dari perspektif tradisi Hanafi. Perusahaan-perusahaan dalam aliran Hanafi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut “perusahaan properti”, “perusahaan kontraktor”, dan “perusahaan ibaha”. Selain ketiga jenis utama tersebut, bentuk peralihan, yaitu perusahaan amel-mal (modal tenaga kerja), juga dianggap sebagai kelompok tersendiri.

Perusahaan properti timbul dari percampuran benda-benda (properti) yang tidak dapat dipisahkan karena berbagai sebab. Di antara alasan-alasan ini adalah situasi seperti warisan dan pembelian. Contohnya adalah perusahaan persekutuan yang didirikan karena pewarisan sebagai perusahaan izdirari (wajib) dan perusahaan ihtiyari (sukarela) yang didirikan karena perolehan. Dalam perusahaan kontraktor, para sekutu mempunyai kontrak yang menyatakan bahwa mereka adalah sekutu dalam hal modal dan keuntungan. Perusahaan kontraktor dibagi menjadi dua kelompok dalam hal modal dan keuntungan yang sama atau tidak sama.

Dari kedua jenis ini, meskipun ada modal dengan persamaan mutlak dalam mufavada, namun tidak ada persamaan dalam jenis inan. Baik itu kesetaraan atau tidak, perusahaan kontraktor dapat didirikan dengan berfokus pada modal, tenaga kerja, dan reputasinya. Perusahaan kontraktor yang didirikan atas dasar modal disebut perusahaan komoditas. Apabila didirikan atas dasar buruh maka disebut perseroan akta. Jika didirikan berdasarkan reputasi, maka disebut perusahaan vüch. Perusahaan Ibaha adalah suatu persekutuan yang didirikan atas barang-barang umum yang diterima sebagai milik seluruh umat manusia. Perlu dicatat bahwa kemitraan seperti itu tidak cocok, dan barang-barang ini adalah milik pihak pengakuisisi, bukan milik mitra.

Sedangkan pada perusahaan amel-mal (modal tenaga kerja), terdapat sub-perusahaan yang berjenis mudharabah (mukarada), muzaraa, dan musakat. Dalam mudarebede, satu pihak memperlihatkan kerja kerasnya, satu pihak memperlihatkan barang-barangnya, dan keuntungannya dibagi. Dalam müzaraa, pihak yang satu menyerahkan tanahnya, dan pihak yang lain menyerahkan tenaga kerjanya, dan hasil yang dihasilkan dibagi-bagi sesuai proporsi yang ditentukan. Dalam musakat, pihak yang satu memberikan kebun yang menghasilkan buahnya, sedangkan pihak yang lain mengurus kebun itu dengan tenaganya. Buah yang dihasilkan dibagi dalam proporsi tertentu.

Struktur Kemitraan Pilihan dalam Kewirausahaan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, menurut definisi kewirausahaan pada Zaman Klasik, banyak pengusaha Muslim Turki yang menasar pasar dalam dan luar negeri Kesultanan Utsmaniyah. Jumlah dan distribusinya tidak mungkin diketahui berdasarkan sumber yang digali. Seperti di belahan dunia lainnya pada Zaman Klasik, tidak semua aktivitas wirausaha dapat dicatat di Kesultanan Utsmaniyah. Terlihat bahwa aktivitas wirausaha di Kesultanan Utsmaniyah dan struktur kemitraan yang disukai para wirausahawan tersebut dapat dipahami dari catatan arsip yang terbatas (catatan adat istiadat, buku kadi, yaitu catatan syari'i, buku amunisi). Misalnya dalam fatwa Syekh al-Islam disebutkan bahwa sekutu yang mendirikan perusahaan komoditi (commodity company) untuk memperdagangkan buah-buahan dengan menaruh modal harus menanggung kerugian sesuai dengan modalnya. Sekali lagi, banyak catatan ekonomi ditemukan dalam kasus kemitraan dan catatan syariah.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan catatan arsip (terutama register s,er'iyye), terlihat bahwa beberapa jenis perusahaan lebih disukai dalam beberapa profesi. Misalnya, nakhoda kapal dan investor kebanyakan mendirikan perusahaan mudharabah. Kabarnya para perajin seperti penjahit lebih memilih perusahaan amel. Dalam kegiatan komersial, dilaporkan bahwa perusahaan barang lain, khususnya perusahaan Inan, lebih diutamakan. Di Kekaisaran Ottoman, dan bahkan di semua negara Islam yang didirikan sejak abad ketujuh dan kedelapan, mudharabah adalah kemitraan yang paling disukai para pengusaha.

Pengusaha yang mengungkapkan pengetahuan komersial, geografis, dan tenaga kerja serta investor yang mengungkapkan modalnya menyepakati keuntungan menurut metode mudharabah. Terlihat bahwa keuntungan ini umumnya dibagi menjadi $\frac{3}{4}$ untuk investor dan $\frac{1}{4}$ untuk pengusaha. Penentuan tarif ini, yang disepakati sejak awal kerjasama, diserahkan kepada pengusaha dan investor, dan tidak ada paksaan lain yang dilakukan selain adat. Jika kegiatan tersebut menghasilkan hasil negatif, kerugian dibagi antara investor dan pengusaha sesuai dengan tarif yang ditentukan sejak awal. Pada titik ini, kemungkinan kerugian terbesar bagi investor adalah karena banyaknya modal yang ditanam. Kerugian yang dialami pengusaha adalah tenaga dan waktu yang belum berubah menjadi keuntungan.

Sistem mudharabah umumnya menawarkan berbagai kebebasan kepada pengusaha. Investor dapat membatasi kebebasan ini jika dia mau. Namun di Zaman Klasik, ketika komunikasi masih sangat terbatas, lebih masuk akal bagi investor untuk membebaskan pengusaha. Karena pengusaha dapat mengumpulkan modal dari banyak investor dalam mudharabah, maka dalam arti tertentu, kemungkinan pendapatan pengusaha dapat diterima oleh investor dalam bentuk saham. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa struktur ini merupakan perusahaan saham gabungan, seperti yang terlihat di Eropa.

Pada Zaman Klasik, terlihat bahwa sebagian pengusaha di Anatolia dan Rumelia lebih menyukai beberapa jenis perusahaan secara bersamaan. Bahkan terlihat bahwa beberapa pengusaha mengambil peran sebagai pengusaha dan investor secara bersamaan. Abdülgani Bey, yang merupakan kepala suku Liva-i Homs dan pedagang besar, dapat dijadikan contoh. Terlihat Otak Abdülgani melakukan kewirausahaan dan investasi secara bersama-sama. Pria tersebut membangun jaringan perdagangan yang besar dan melakukan perdagangan barang lunak dengan kuasanya di banyak kota, terutama di Istanbul.

Informasi ini diperoleh dari catatan syariah tentang pembagian harta Abdülgani Bey yang gugur dalam perang di antara ahli waris. Dapat dipahami dari catatan ini, Abdülgani Bey melakukan perdagangan dalam jumlah besar dengan metode mudharabah. Pada periode yang sama, ziarah lainnya, Seydi b. Kekayaan Haji Hasan berjumlah lebih dari satu juta akçe, dan dilaporkan bahwa seperempat dari kekayaan ini diperoleh melalui berbagai inisiatif seperti pertanian pajak mudharabah dan mukataa. Selain kemitraan yang disebutkan di atas dan sebagian besar terjalin antar individu, ada juga kemitraan yang terjalin antara lembaga dan pengusaha. Dilaporkan bahwa para pengusaha yang mencari modal untuk melakukan kegiatan komersial dengan menggunakan pengetahuan dan tenaga mereka terkadang didanai oleh yayasan uang.

Meskipun penekanannya terutama pada pinjaman berbunga yang diberikan oleh yayasan uang, namun terlihat bahwa yayasan ini memberikan modal kepada pengusaha dengan menjalin kemitraan perusahaan. Pedagang itu bernama Hacı Abdi b. Sinan dapat dijadikan contoh situasi ini. Pedagang tersebut diadukan kepada kadı karena menggunakan uang yayasan untuk jangka waktu 4–5 bulan hingga 1 tahun. Alasan utama dari keluhan tersebut adalah klaim bahwa yayasan uang tersebut tidak mendapatkan bunga apa pun karena modal yang digunakan oleh pedagang.

Jenis kemitraan juga berbeda-beda tergantung pada pengusaha dan penyedia tenaga kerja. Ada juga struktur yang lebih menyerupai kemitraan dibandingkan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang menghasilkan upah. Contoh paling mencolok yang dapat diberikan mengenai hal ini adalah perjanjian mukataba antara pengusaha dan budaknya. Secara umum, mukataba muncul sebagai sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa jika budak memberikan sejumlah uang, produk, atau tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu, maka ia akan menjadi pengusaha bebas, sebaliknya, menuntut praktik mukataba lebih sebagai tenaga kerja atau produk. Ada banyak perjanjian mukataba yang dibuat oleh para pengusaha yang memiliki alat tenun kain dan sutra di Bursa. Sebagai hasil dari perjanjian ini, terlihat bahwa para budak pertama-tama memperoleh kebebasannya dan kemudian, dengan didukung oleh pemiliknya sebelumnya, mereka memiliki alat tenun sendiri. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa metode mukataba merupakan suatu cara yang memberikan transisi dari perbudakan ke kewirausahaan.

8.4 PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Pada Zaman Klasik, terlihat bahwa wirausahawan memperoleh manfaat dari bunga dan struktur bebas bunga untuk menyediakan modal. Ketika pinjaman berbunga yang diberikan oleh lembaga keuangan atau rentenir tidak disertakan, terlihat bahwa sistem penyediaan modal lainnya didasarkan pada kemitraan. Kemitraan ini, yang dilakukan dengan mengungkapkan barang, tenaga kerja, pengetahuan, reputasi, dan bahkan kebebasan, memperkirakan pembagian keuntungan dan kerugian antara kedua pihak pada tingkat yang berbeda-beda. Terlihat bahwa struktur kemitraan ini memberikan contoh bagi para pedagang Eropa di Zaman Klasik dan setelahnya dan bahkan dikembangkan dan diadopsi oleh para pengusaha dan investor di abad kedua puluh satu.

Struktur perusahaan, yang didirikan melalui kerja sama tenaga kerja-modal, yang dikenal sebagai mudharabah atau mukarada dalam tradisi Islam, sering kali disukai oleh pengusaha Muslim Turki di Kekaisaran Ottoman. Bahkan dikatakan bahwa sistem yang dikenal dengan sebutan "*commenda*" di Eropa sejak abad kesepuluh ini dipelajari dari umat Islam. Saat ini, kita melihat struktur yang mirip dengan struktur mudharabah antara pengusaha/start-up dan modal ventura. Hubungan yang sebelumnya terjalin sebagai modal tenaga kerja kini muncul sebagai modal paten, modal ide bisnis/model bisnis.

Mengingat dokumen-dokumen yang dibuat pada Zaman Klasik dan data dalam dokumen-dokumen ini, kewirausahaan di Kekaisaran Ottoman perlahan-lahan mulai dipahami. Berdasarkan informasi tersebut, ternyata anggapan bahwa tidak ada kelas

wirausaha di Kesultanan Utsmaniyah atau mayoritas berada di tangan non-Muslim adalah salah. Terlihat bahwa pedagang Muslim Turki yang mempunyai posisi dominan di pasar domestik dan Laut Hitam pada Zaman Klasik, bersaing dengan pedagang Eropa di Mediterania hingga akhir abad kedelapan belas. Namun, karena penyerahan tersebut, pedagang asing memperoleh keistimewaan penting, terutama di Mediterania, seiring berjalannya waktu dan melampaui pedagang Muslim Turki.

Oleh karena itu, kewirausahaan di Era Klasik Kesultanan Utsmaniyah dan struktur kemitraan yang disukai para wirausahawan diperkirakan dapat menjelaskan masa kini. Terlihat adanya struktur yang dapat disesuaikan dengan masa kini dalam penciptaan sumber pembiayaan selain pinjaman berbunga untuk pembiayaan ide bisnis para wirausahawan dan start-up. Pengembangan model yang sesuai dengan budaya kewirausahaan nasional dan daerah diperkirakan akan lebih berkontribusi terhadap iklim kewirausahaan dibandingkan model pembiayaan yang diambil dari budaya lain dan dicoba untuk diadaptasi.

BAB 9

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI BISNIS

9.1 PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ekonomi bisnis di Indonesia sangatlah luas dan kompleks, namun dapat disajikan dalam beberapa tahapan penting:

1. **Era Pra-Kemerdekaan:** Pada periode ini, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor agraris, dengan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bisnis-bisnis lokal kebanyakan bersifat tradisional dan terpusat di sekitar perdagangan lokal.
2. **Era Kemerdekaan dan Pembangunan Awal:** Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam membangun ekonomi yang mandiri. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan swasta besar yang mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Pada masa ini, pemerintah memainkan peran dominan dalam mengendalikan sektor ekonomi.
3. **Era Orde Baru:** Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang didorong oleh kebijakan pembangunan nasional yang kuat. Pemerintah mendorong investasi asing dan domestik dalam sektor industri, pertambangan, dan infrastruktur. Banyak konglomerat besar muncul dan menjadi kekuatan ekonomi yang dominan.
4. **Krisis Finansial Asia:** Pada tahun 1997, krisis finansial Asia mengguncang perekonomian Indonesia secara serius, mengakibatkan krisis moneter, ekonomi, dan politik. Krisis ini mengungkapkan kerentanan ekonomi Indonesia yang bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar. Pemerintah terpaksa melakukan reformasi ekonomi yang signifikan, termasuk penghapusan subsidi dan deregulasi sektor keuangan.
5. **Era Reformasi dan Globalisasi:** Pasca-Reformasi, Indonesia berusaha untuk membangun kembali ekonominya dengan mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi dan membuka diri terhadap investasi asing. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang kompleks, dan infrastruktur yang kurang berkembang, ekonomi Indonesia terus tumbuh dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Seiring berjalannya waktu, ekonomi bisnis di Indonesia terus berkembang dan bertransformasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti politik, teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim investasi.

Memahami sejarah ekonomi bisnis dapat membantu membuat visi tentang pengembangan usaha di masa depan. Meskipun perekonomian/perdagangan, sama tuanya

dengan masyarakat manusia modern, dan telah diatur oleh hukum yang berbeda dari zaman kuno hingga saat ini. Dengan demikian, ekonomi bisnis mencerminkan perubahan sosial dan politik seiring dengan evolusi teknologi. Dalam hal ini, sangat penting untuk menjawab tiga pertanyaan:

- (1) Bagaimana keadaan teori bisnis saat ini?
- (2) Bagaimana jadinya seperti ini? Dan;
- (3) Apa langkah evolusi selanjutnya dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi bisnis?

Jawaban-jawabannya akan mengungkap landasan dasar sistem ekonomi kontemporer: perusahaan. Karena perusahaan adalah sel perekonomian kontemporer, maka perusahaan dibangun menjadi struktur sosial dan ekonomi yang stabil. Basisnya adalah keuntungan dan perkembangan ekonomi bisnis menunjukkan betapa efektifnya dari awal hingga saat ini. Seiring dengan semakin besarnya peluang bisnis, maka ekonomi kewirausahaan pun mulai memperbesar usahanya. Siklus ekonomi bisnis yang sama yang diterapkan pada perusahaan di masa lalu juga berlaku saat ini:

Nilai tambah/Keuntungan usaha/ = penjualan /harga/ - input /biaya/ (Rumus 1)

Jadi, perusahaan didorong untuk meningkatkan penjualan /harga/ dan/atau mengurangi input /biaya/. Dalam sudut pandang tersebut, kami menemukan bahwa evolusi ekonomi bisnis hanya mengikuti satu aturan substitusi: *“Jika suatu input /biaya/ menjadi mahal maka ditukar dengan yang lebih murah.”*

Pengetahuan ini diterapkan pada penelitian ekonomi bisnis dari awal abad ke-20 hingga saat ini dalam bidang ekonomi politik, ekonomi kewirausahaan, teori pertumbuhan dan pembangunan, dll. Namun, ekonomi bisnis telah menemukan terobosan yang “tersembunyi” yaitu masyarakat. Jadi, ketika masyarakat telah “dilahirkan” ekonomi bisnis, maka ia mempunyai kekuatan untuk menghancurkannya!

Selain itu, bisnis tidak tersebar atau berkembang secara merata di seluruh dunia, sehingga menarik bagaimana sebuah negara berkembang, misalnya Bulgaria, telah melakukan perubahan dalam masyarakat ekonomi bisnis. Meskipun terjadi perubahan politik dan kemasyarakatan, aturan-aturan ekonomi terlihat seperti perekonomian universal dan regional, selain fluktuasi sosial dan politiknya, mengikuti sungai ekonomi bisnis yang sama.

9.2 TERBENTUKNYA EKONOMI BISNIS KONTEMPORER

Ekonomi bisnis kontemporer di Indonesia terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, dinamika pasar global, kebijakan pemerintah, serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan ekonomi bisnis kontemporer di Indonesia termasuk:

1. **Teknologi dan Inovasi:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bisnis dilakukan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, mencapai pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

2. **Pasar Global:** Ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional membuatnya rentan terhadap perubahan dalam ekonomi global. Bisnis-bisnis di Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika pasar global, termasuk persaingan yang semakin ketat dan fluktuasi harga komoditas.
3. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan ekonomi dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak besar terhadap ekosistem bisnis di Indonesia. Inisiatif untuk mendorong investasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi telah memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi bisnis kontemporer.
4. **Peningkatan Daya Saing:** Persaingan dalam pasar domestik dan global mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi produk, efisiensi operasional, dan penetrasi pasar yang lebih luas.
5. **Perubahan Sosial dan Demografi:** Perubahan dalam pola konsumsi, preferensi pelanggan, dan struktur demografi masyarakat juga mempengaruhi perkembangan ekonomi bisnis kontemporer. Perusahaan harus memahami tren ini dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut.
6. **Pemberdayaan UMKM:** Pemerintah Indonesia telah memperhatikan peran penting UMKM dalam ekonomi dan terus mendorong pemberdayaan mereka melalui berbagai program dan insentif.
7. **Kesadaran Lingkungan:** Semakin meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan mendorong bisnis-bisnis di Indonesia untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
8. **Ketidakpastian Global:** Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, seperti perang dagang dan krisis finansial, juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi bisnis kontemporer di Indonesia.

Dengan memahami dan merespons faktor-faktor ini, bisnis-bisnis di Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di era ekonomi bisnis kontemporer.

Selanjutnya kita akan melihat Sejarah bisnis dari Eropa kuno hingga hukum perdagangan modern. Menganalisis perkembangan ilmu ekonomi bisnis dan landasannya, lahirlah tesis bahwa perubahan ilmu ekonomi bisnis selalu dapat diprediksi. Kita hanya perlu memahami tonggak utama pertumbuhannya seperti halnya manusia: dari lahir hingga mati. Karena ekonomi bisnis adalah struktur sosial buatan, maka ia “dibuat” menurut gambar dan rupa manusia. Jadi, ia mulai berdiri pada abad ke-16-18, masa remajanya meningkat pesat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pertumbuhan masa mudanya pesat pada abad ke-20, dan permulaan kematangannya pada awal abad ke-21.

Selain itu, pengetahuan tentang perkembangan teori ekonomi bisnis dapat membantu menjelaskan apa yang disebut revolusi industri. Tapi bagaimana hal itu membutuhkan waktu secara singkat. Ekonomi bisnis telah muncul sebagai konsep teoretis yang meneliti fungsi dan organisasi suatu perusahaan pada awal abad kedua puluh. Meskipun demikian, lembaga “perusahaan” sosial dan ekonomi telah berdiri berabad-abad sebelumnya. Landasan usaha kontemporer adalah ekonomi rumah tangga.

Sebagaimana Aristoteles mendefinisikan ilmu ekonomi (oikonomie/oikos) sebagai seni kegiatan ekonomi rumah tangga, kegiatan utama rumah tangga (oikos) ditetapkan sebagai: aktivitas produktivitas dan aktivitas konsumsi. Artinya, prinsip utama perekonomian rumah tangga adalah memperoleh barang-barang pembelian yang dibutuhkan dengan cara yang paling efektif (lihat Rumus 1).

Pada abad-abad berikutnya, dasar-dasar teori ekonomi difokuskan pada rumah tangga dan bagaimana memperoleh lebih banyak produksi pertanian dalam keterbatasan lahan rumah tangga. Setelah itu, kita dapat menemukan cukup banyak alasan terjadinya perang kuno untuk eksplorasi daratan baru, termasuk eksplorasi Amerika Utara pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Upaya pertama untuk beralih dari perekonomian rumah tangga ke perekonomian bisnis dapat ditemukan pada abad kelima belas dan keenam belas di Venesia. Untuk menjaga pengetahuan perdagangan dari Serikat Buruh Venesia, efisiensi perdagangan dijelaskan dengan kepribadian pedagang /resp. kepala rumah tangga/ dan keterampilan akuntansi dan manajerialnya.

Beberapa buku pegangan untuk pendidikan mandiri bagi para pedagang muda telah muncul pada abad ketujuh belas. Dan kematangan ilmu perdagangan ditentukan pada abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas ketika kita menemukan penyelesaian pengetahuan perdagangan sebagai praktik terbaik ekonomi rumah tangga. Pembentukan “struktur sosial” dari usaha tunggal sebagai upaya untuk mendiversifikasi perekonomian rumah tangga dari perekonomian bisnis ditemukan pada akhir abad kesembilan belas. Diketahui bahwa definisi pertama dari badan usaha diberikan oleh A. Lindwurm 1869, di mana ia mendefinisikan keuntungan wirausaha dari kegiatan ekonomi-perdagangan. Hal ini tidak hanya mencakup fungsi rumah tangga pertanian, namun juga perusahaan perdagangan dan rumah tangga pengrajin. Di Inggris, Alfred Marshall mendefinisikan “prinsip modern” Ekonomi Industri sebagai institusionalisasi sebagai perusahaan sekaligus wirausaha dalam ekonomi pasar persaingan.

Pemahaman terakhir mengenai ekonomi bisnis telah ditemukan pada awal abad ke-20 ketika ilmu ekonomi bisnis tidak hanya mencakup satu perusahaan saja namun juga sekumpulan perusahaan yang bersaing satu sama lain di pasar. Dengan demikian, perusahaan tidak terisolasi dari struktur sosial dan ekonomi, namun merupakan bagian dari struktur ekonomi yang lebih besar seperti ekonomi regional (politik) nasional. Dalam pengertian ini, peran pengusaha bisnis dan pembelian keuntungannya berbeda dari kebutuhan rumah tangga atau masyarakat.

Langkah selanjutnya dalam pengembangan ekonomi bisnis ditemukan dalam keragaman penelitian rasionalitas untuk manajemen dan organisasi suatu perusahaan. Pemahaman ilmu ekonomi bisnis saat ini didasarkan pada buku dasar: H. Devenport, *Economics of Enterprise*. 1924; R. W. Taylor, *Prinsip Manajemen Ilmiah*, 1911; S. Oliver, *Filsafat Menagement*, 1923; H. Fayol, *Administrasi industrielle et generale* 1925, dan lain-lain. Meskipun demikian, peran pendiri perusahaan wirausahawan menjadi penting seiring berkembangnya ilmu-ilmu sosial pada pertengahan tahun 1950-an. Melihat kembali pemilik

bisnis setelah satu abad pemahaman institusional ekonomi bisnis didasarkan pada analisis faktor-faktor penyebab revolusi industri.

Periode sebelumnya berakhir pada pertengahan tahun 1960an ketika peran wirausahawan-manajer profesional mengambil tempat utama dalam penelitian ekonomi. Pada saat itu “lebih besar berarti bagus”. Ada banyak praktik “bisnis yang baik” dalam perekonomian dan organisasi bisnis yang menjelaskan keberhasilan perusahaan. Chandler, Alfred D., Amatori, Franco dan Hikono, Takashi (1997), *Bisnis Besar dan Kekayaan Bangsa*. Chandler, Alfred D. (1990), *Skala dan Ruang Lingkup: Dinamika Kapitalisme Industri*. Peningkatan volume ekonomi bisnis dijelaskan oleh Chandler sebagai hasil dari penskalaan dan pelingkupan produksi: mekanisme inti “kapitalisme manajerial kompetitif/ekonomi pasar kompetitif a.n./” (di AS) serta “kapitalisme manajerial kooperatif/ekonomi pasar sosial - sebuah.” (di Jerman) dan “kapitalisme pribadi” (di Inggris).

Langkah selanjutnya dalam perkembangan ekonomi bisnis dapat dilihat pada perkembangan sejarah ekonomi pada tahun 1990-an, yaitu era perusahaan inovatif. Ketika proses skala dalam “kapitalisme manajerial kompetitif” mencapai puncaknya, sekali lagi peran wirausaha menjadi lebih signifikan dalam teori ekonomi bisnis. Berdasarkan model kompetisi Porter (Porter M.E., 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, Drucker, P.F., 1985, *Innovation and Entrepreneurship; Practice and Principles*, New York: Harper and Row.), pembangunan ekonomi dimungkinkan dengan tambahan inovasi pengembangan nilai: peran wirausaha eksternal dan internal. Terlebih lagi, proses pengembangan “pengusaha” ditemukan dalam dokumen strategis Eropa (Strategi Lisbon, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/lisbonstrategybn/lisbonstrategybn_en.pdf).

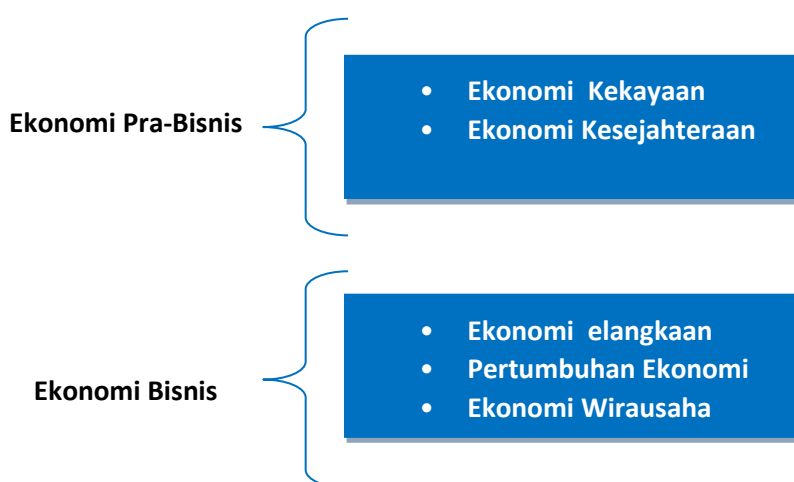
Kelahiran kembali para wirausahawan didefinisikan sebagai akibat dari Perampingan Perusahaan yang “memicu seruan pengkhianatan dan kurangnya kesadaran sosial di pihak perusahaan-perusahaan besar”. Dalam hal ini, aspek sosial (tidak hanya di negara-negara ekonomi pasar sosial) dari ekonomi bisnis telah terungkap pada awal tahun 2000an. Seperti yang dinyatakan Lazonic (2003): perusahaan inovatif secara efektif menggunakan karakter kolektif dari proses inovasi dan transformasi. (Lihat. Gartner, W. B., 1989, “Siapakah Pengusaha?” adalah Pertanyaan yang Salah’, *Teori dan Praktik Kewirausahaan* 13, 47–68; Audretsch, D. B. dan A. R. Thurik, 1999, ‘Kapitalisme dan Demokrasi di Abad 21 : From the Managed to the Entrepreneurial Economy’, *Journal of Evolutionary Economics*; Sander Wennekens dan Roy Thurik, *Linking Entrepreneurship and Economic Growth*, *Small Business Economics* 13: 27–55, 1999).

Meringkas evolusi landasan ekonomi bisnis, kita dapat menunjukkan tahapan utama sebagai berikut. 10.1: Sudut pandang kekayaan: Ini adalah sudut pandang klasik yang diberikan oleh Adam Smith: tujuan utama dari semua kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya. Sudut pandang kesejahteraan: Ini adalah sudut pandang neo-klasik yang diberikan oleh Alfred Marshall: “*Ekonomi adalah studi tentang manusia dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ia menanyakan bagaimana dia memperoleh penghasilannya dan bagaimana dia menggunakannya.* Jadi, di satu sisi ilmu ini merupakan

ilmu yang mempelajari kekayaan, dan di sisi lain yang lebih penting, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari tentang manusia”.

Sudut pandang kelangkaan: Merupakan pemikiran pra-Keynesian yang dikemukakan oleh Lionel Robins (1932): *“Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana yang langka yang memiliki kegunaan alternatif”*. Sudut pandang pertumbuhan: Ini adalah perspektif modern dalam ilmu ekonomi yang terutama diberikan oleh Paul Samuelson (2006): *“Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka yang dapat mempunyai kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi, saat ini dan di masa depan kepada berbagai orang dan kelompok masyarakat”*.

Sudut pandang kewirausahaan: Ini adalah perspektif terbaru perkembangan ekonomi yang diberikan oleh Glancey dan McQuaid (2000): *“Ekonomi Kewirausahaan berkaitan dengan peran wirausaha, dan sifat serta ruang lingkup kewirausahaan dalam perekonomian”* yang menghubungkan sejumlah wirausahawan terhadap pembangunan ekonomi.



Gambar 9.1 Perkembangan Teori Ekonomi Bisnis (Sumber Berdasarkan Pratibha Bagga 2016, Business Economics, NMIMS Global Access)

9.3 SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN

Di Indonesia, siklus hidup perusahaan memiliki ciri khas yang mencerminkan dinamika ekonomi dan bisnis di negara tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang siklus hidup perusahaan dengan konteks Indonesia:

Pertama, tahap pembentukan perusahaan sering kali dimulai dengan proses yang kompleks dan memakan waktu. Ini disebabkan oleh berbagai regulasi pemerintah dan birokrasi yang harus diatasi oleh para pendiri bisnis. Proses pendirian perusahaan di Indonesia melibatkan prosedur hukum yang ketat, termasuk pembuatan akta pendirian, pengajuan izin usaha, dan pendaftaran di instansi pemerintah yang relevan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kedua, pada tahap pertumbuhan, perusahaan di Indonesia sering kali mengalami tantangan unik terkait infrastruktur, regulasi, dan akses ke pasar. Meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, namun tantangan infrastruktur seperti transportasi dan distribusi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis. Selain itu, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga dapat mempengaruhi rencana pertumbuhan perusahaan. Ketiga, ketika perusahaan mencapai tahap kematangan, mereka seringkali berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat, terutama dengan adanya perusahaan multinasional dan domestik yang telah mapan. Perusahaan di Indonesia harus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk tetap bersaing, sambil memperhatikan perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar.

Keempat, pada tahap penurunan, perusahaan di Indonesia dapat mengalami tantangan tambahan terkait dengan perubahan kondisi ekonomi domestik dan global. Faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kenaikan suku bunga, atau ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan menyebabkan penurunan pendapatan atau laba. Terakhir, jika perusahaan tidak mampu bertahan dalam menghadapi tantangan, mereka mungkin mengalami penyusutan atau penutupan. Proses penyusutan atau penutupan perusahaan di Indonesia sering kali melibatkan prosedur hukum yang rumit dan dapat memakan waktu, terutama terkait dengan likuidasi aset dan penyelesaian utang.

Dengan demikian, siklus hidup perusahaan di Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi, regulasi, dan kondisi pasar yang unik di negara tersebut. Perusahaan yang berhasil navigasi melalui siklus hidup ini secara efektif biasanya didukung oleh inovasi, manajemen yang baik, dan adaptabilitas terhadap perubahan yang terjadi.

Selanjutnya pembaca akan menyimak pembahasan mengenai praktik bisnis/industri/ekonomi di Bulgaria tidak berbeda dengan teori-teori utama terkemuka di dunia. Meskipun demikian, kondisi politik dan sosial di Bulgaria dari abad ke-16 hingga ke-21 menentukan sejarah ekonomi bisnis Bulgaria yang agak berbeda. Berdasarkan tinjauan pustaka, dapat dibagi menjadi empat periode.

A. Bentuk ekonomi bisnis Bulgaria melewati perdagangan umum

Kemunculan perusahaan komersial Bulgaria pertama /berdasarkan kepemilikan/ diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad keenam belas dan ketujuh belas. Ini adalah hasil aktivitas perusahaan komersial dari Dubrovnik di tanah Bulgaria. Maka, pada tahun 1567, orang Bulgaria dari Razgrad membentuk perusahaan bersama dua orang dari Dubrovnik untuk mengekspor kulit sapi ke Dubrovnik. Semua modal awal pembelian kulit untuk usaha patungan adalah milik Bulgaria, dan mitra Dubrovnik mereka berpartisipasi dalam pembagian biaya transportasi. Peran mereka penting untuk penjualan barang di Dubrovnik dan untuk ekspor lebih lanjut ke Italia. Keuntungannya dibagi rata di antara para mitra. Perusahaan tersebut berdiri selama kurang lebih satu tahun, dan setelah keberhasilan pelaksanaan operasi ekspor, perusahaan tersebut dilikuidasi pada tahun 1568 (Spisarevska 1998: 237–243). Perusahaan serupa lainnya juga terdaftar, yang terlibat dalam aktivitas komersial Dubrovnik di Balkan pada paruh kedua abad keenam belas.

Pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, perdagangan Balkan di Dubrovnik secara bertahap menurun. Koloni perdagangan Balkan juga dibentuk di kota Nezhin, Ukraina. Semua pedagang Ortodoks—Yunani, Bulgaria, dan Serbia—mendapatkan nama umum “Yunani” di sana. Orang-orang “non-Yunani” Bulgaria mendirikan perusahaan komersial untuk mengatur kegiatan mereka. Informasi paling awal mengenai hal tersebut berasal dari paruh pertama abad kedelapan belas. Kerabat dekat (ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, dll.) paling sering terlibat dalam pendirian mereka, dan kebanyakan dari mereka bersifat jangka pendek dan diorganisir untuk melakukan transaksi tertentu. Hubungan ekonomi antara Eropa Tengah dan provinsi Ottoman di Balkan menjadi semakin erat. Pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, perusahaan dagang Bulgaria didirikan di kota Brasov dan Sibiu /Rumania modern/. Peneliti mereka menunjukkan adanya dua jenis perusahaan komersial: perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan transaksi komersial tunggal dan perusahaan dengan jangka waktu lebih lama dan struktur yang lebih rumit.

Pada abad kedelapan belas hingga awal abad kesembilan belas, 23 perusahaan dagang Bulgaria didirikan, yang berdagang di sepanjang jalur Danube – Transylvania - Austria. Barang utama yang diekspor dari provinsi Kesultanan Utsmaniyah di Bulgaria adalah wol dan kapas, sedangkan impornya berupa barang mewah dan koin. Sungguh luar biasa bahwa menjelang akhir abad kedelapan belas, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pertukaran perdagangan dengan Austria memperoleh karakteristik perseroan terbatas. Hal ini dianggap sebagai tanda meningkatnya kemampuan material para pedagang Bulgaria.

Pada akhir abad kedelapan belas, perusahaan besar Bulgaria pertama yang berkantor pusat di wilayah Bulgaria muncul. Pendiri salah satunya adalah pengusaha Hristo Rachkov dari Gabrovo. Dia mengatur jaringan komersial yang luas untuk pembelian dan ekspor produk Bulgaria di utara Danube. Pedagang lokal dari Kazanlak, Tarnovo, Dryanovo, Lovech, Sliven, Sevlievo, Ruse, dll., serta pedagang Gabrovo yang menetap di Rusia, di Rumania /Bucharest/, dll., tertarik pada jaringan ini. Kabarnya Hristo Rachkov tidak hanya mengekspor produk tradisional seperti tepung, pastrami, pastrami, kulit, dll, tetapi juga produk seperti sutra dan minyak mawar. Karya-karya ini relatif baru dalam struktur produksi perekonomian Bulgaria dan mulai mendapat tempat dalam daftar ekspor dari tanah Bulgaria pada paruh kedua abad kedelapan belas.

Inovasi penting dalam praktik bisnis Bulgaria, yang perlu diperhatikan, adalah bahwa Rachkov tidak bertindak sebagai pedagang independen, tetapi mengatur kegiatan produksi dan komersialnya terutama berdasarkan kemitraan. Hubungan kemitraan diatur oleh kontrak komersial. Bentuk perkumpulan yang paling umum dilakukan disebut “na ortak”. Para ahli mengidentifikasi jenis asosiasi ini dengan kemitraan umum, di mana para mitra secara bersama-sama terlibat dalam suatu kegiatan dengan partisipasi tenaga kerja dan modal.

Pada paruh pertama abad kesembilan belas, periode modernisasi nyata dimulai di Kesultanan Ottoman. Hal ini juga mempengaruhi dasar hukum pendirian dan berfungsinya berbagai perusahaan. Yang paling penting dalam hal ini adalah berlakunya Hukum Dagang Ottoman pada tahun 1850, yang dipinjam hampir secara harfiah dari “*Code de Commerce*”

Perancis tahun 1807. Hukum ini mengatur sejumlah hal baru dalam praktik ekonomi kekaisaran seperti: perusahaan komersial, bunga.

Selama tahun-tahun hingga Pembebasan Bulgaria, urusan komersial dan hukum kekaisaran dilengkapi dengan peraturan lainnya. Kemajuan ekonomi di tanah Bulgaria sejak pertengahan abad kesembilan belas diilustrasikan dengan berdirinya banyak perusahaan sukses dengan profil aktivitas berbeda. Pada tahun 1849, perusahaan besar pertama yang menangani operasional perbankan didirikan di Sliven. Pemegang saham perusahaan ini adalah pedagang lokal yang kaya, dan dengan sedikit gangguan, perusahaan telah beroperasi dengan sukses selama hampir 20 tahun. Likuidasinya disebabkan oleh persaingan yang dialaminya sejak pembentukan Dana Umum, yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga lebih rendah.

Sebagian besar perusahaan yang sukses bersifat komersial dan menangani ekspor produk pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan dari tanah Bulgaria. Kerabat dekat terus berpartisipasi di banyak perusahaan, dan perusahaan yang paling sukses menghasilkan keuntungan yang patut ditiru. Dengan demikian, dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa untuk periode 1855 hingga 1875, rata-rata laba tahunan perusahaan Sliven "R. V. Mirkovic dan kawan-kawannya" adalah 28,83%. Perusahaan percetakan, perbankan, dan industri dibentuk. Tidak semuanya berhasil. Pada tahun 1862, langganan diluncurkan untuk penjualan saham di Perusahaan Kapal Uap Komersial Bulgaria "*Providenia*".

Perusahaan tersebut bermaksud untuk terlibat dalam perdagangan maritim dan membeli kapal uap dari Inggris secara kredit, namun karena kurangnya pengalaman dalam bisnis ini, usaha tersebut berakhir tanpa keberhasilan. Nasib serupa juga dialami perusahaan saham gabungan yang direncanakan Ivan Bogorov untuk membuka pabrik tekstil kapas di Plovdiv.

B. Ekonomi bisnis Bulgaria dari awal pada abad kesembilan belas hingga perusahaan kontemporer.

Setelah pemulihan negara Bulgaria merdeka pada tahun 1878, kondisi di mana perusahaan-perusahaan Bulgaria didirikan dan dioperasikan berubah dibandingkan dengan periode ketika tanah Bulgaria menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Undang-undang disahkan di parlemen Bulgaria yang menjamin kepemilikan pribadi tidak dapat diganggu gugat, sistem keuangan publik yang relatif modern sedang dibangun, industri didorong, kontrak dan konsesi pemerintah menjamin pasar yang aman bagi perusahaan-perusahaan Bulgaria yang kurang kuat, dll.

Yang paling penting adalah penerapan Hukum Dagang pada tahun 1897. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum Dagang Hongaria dan Rumania. Undang-undang mengatur kemungkinan pembentukan dua jenis perusahaan: kolektif dan saham gabungan. Pendirian perusahaan saham gabungan di dalam negeri relatif terbatas dan tidak lepas dari tindakan spekulatif. Oleh karena itu, menjelang akhir Perang Dunia Pertama (1914–1918), ibu kota Sofia dilanda demam spekulatif. Stoyan Bochev, yang sezaman dengan peristiwa tersebut, menulis bahwa "ada orang-orang yang beruntung dan tidak bermoral yang mendirikan perusahaan untuk menjual saham. Kami sendiri mengamati pada langganan

tahun 1917 dan 1918 di mana masyarakat berebut merugikan diri mereka sendiri untuk berlangganan saham. Ini adalah pola pikir khusus yang mengandalkan pendapatan besar melalui perusahaan-perusahaan baru dan perbedaan harga saham". Baru pada tahun 1924 undang-undang khusus perseroan terbatas disahkan.

Pemerintah Bulgaria sedang mencoba untuk mempercepat industrialisasi di negaranya dengan mengadopsi undang-undang yang mendorong. Selama periode 1894 hingga 1928, empat undang-undang untuk memajukan industri lokal dipilih dan mulai berlaku di negara tersebut. Bersama mereka, pengusaha industri diberikan keringanan pajak, pengurangan bea masuk, keringanan tarif kereta api, dan lain-lain. Setelah dimulainya Depresi Besar pada tahun 1929, undang-undang stimulus yang berpihak pada industri tidak lagi berpengaruh. Beberapa sektor industri lokal dinyatakan jenuh dan pembukaan usaha baru dibatasi di sana, dan industri lainnya di negara tersebut sebagian besar dilindungi dalam bentuk proteksionisme bea cukai .

Undang-undang insentif menciptakan kondisi "rumah kaca" bagi industri Bulgaria. Perusahaan industri lokal sulit bersaing di pasar internasional. Namun, perlu dicatat bahwa perusahaan industri yang paling simbolis seperti pabrik gula, pabrik penggilingan, tempat pembuatan bir muncul dan berfungsi berkat dorongan negara. Hal yang sama juga berlaku pada perusahaan produksi semen "Zlatna Panega" dan "Granitoid", dua perusahaan pertambangan terbesar perusahaan milik negara "Mini Pernik" dan tambang swasta (dengan investasi Perancis) "Plakalnitsa" dan lain-lain.

Salah satu sektor industri yang dinamis sebelum Perang Dunia Pertama adalah industri tekstil wol. Setelah tahun 1878, pabrik modern didirikan di Gabrovo, Sliven, Kazanlak, Tryavna, dll., tetapi pada akhir abad kesembilan belas, sektor ini mengalami penurunan. Dari sekitar tahun 1902 hingga pecahnya Perang Balkan Pertama (1912–1913), industri tekstil wol Bulgaria pulih dan menunjukkan pertumbuhan. Selama periode ini, bisnis ini muncul sebagai bisnis yang modern dan terorganisir dengan baik dengan tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada dekade pertama abad kedua puluh lebih dari 11%. Informasi mengenai pengelolaan perusahaan-perusahaan tekstil wol utama selama tahun-tahun ini relatif terbatas, namun secara umum, pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut diserahkan ke tangan para pengusaha generasi kedua biasanya anak laki-laki dan kerabat dekat para pendiri, tetapi dengan pendidikan ekonomi atau teknik universitas khusus, dengan pengetahuan yang lebih luas tentang metode produksi dan manajemen modern.

Setelah Perang Dunia Pertama, beberapa perusahaan tembakau menjadi faktor ekonomi yang signifikan. Salah satunya adalah Plovdiv "Kutsooglu Brothers and Sons". Dari tahun 1919 hingga 1923, perwakilan perusahaan ini setiap tahun membeli sekitar 5 juta kilogram daun tembakau, yang ditempatkan di pasar Jerman. Karena panen tembakau yang buruk, pada tahun 1924 perusahaan tersebut pindah ke Turki, tempat perusahaan tersebut juga membeli dan mengekspor sekitar 5–6 juta kilogram tembakau per tahun. Negara Turki memfasilitasi kegiatan perusahaan karena melaluinya pasar tembakau Turki di Eropa dipulihkan. Peran penting dalam ekspor tembakau dimainkan oleh perusahaan saham gabungan "Orienttabako", yang didirikan oleh Krum Chaprashikov. Bank Italia "Commerciale"

juga berpartisipasi di dalamnya dengan modalnya sendiri. Druzhestvoti membeli tembakau dari wilayah Dupnitsa, Gorna Jumaya, Haskovo, dll., tetapi juga dari Turki. Ekspor mereka terutama ditujukan ke Polandia. Namun, perusahaan tersebut terdaftar di Swiss (Lugano) untuk menghindari pajak yang berat di Bulgaria, yang menghambat perkembangan perusahaan Bulgaria.

Di negara bagian Bulgaria yang baru didirikan, terdapat hal-hal spesifik yang memperlambat kemunculan dan perkembangan perusahaan modern. Kaum intelektual Bulgaria memiliki pengalaman dan pengetahuan yang terbatas tentang fungsi pasar internasional, struktur organisasi, dan fitur teknis berbagai perusahaan industri. Pasar lokal Bulgaria terbatas baik dari sudut pandang modal yang tersedia maupun dari sudut pandang permintaan akan pekerjaan industri. Pemerintahan di negara bagian Bulgaria berkembang terlalu cepat. Hal ini menawarkan kaum muda pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi, dan bisnis swasta, yang dikaitkan dengan risiko, ternyata tidak menarik.

Pesatnya pertumbuhan aparaturnya menempatkan perkembangan dunia usaha pada posisi ketergantungan dan menjadi sumber korupsi. Hal ini berdampak pada inisiatif bisnis pertama yang lebih signifikan di negara ini. Kasus awal korupsi langsung diungkap oleh Konstantin Irecek. Pada tahun 1881, orang Prancis Hippolyte Bergier memperoleh konsesi industri pertama di negara itu untuk pembangunan pabrik penyulingan di dekat Sofia. Total modal perusahaan ini tidak sedikit untuk Bulgaria sebesar 1 juta franc emas. Dari jumlah tersebut, 250.000 didatangkan oleh Ivan Hadjienov dari Bulgaria dan sisanya oleh investor Prancis. Seperempat modal perusahaan dibagikan sebagai suap kepada menteri.

Beberapa perusahaan saham gabungan besar Bulgaria yang didirikan pada akhir abad kesembilan belas memiliki hubungan dekat dengan partai politik yang ada saat itu. Para eksekutif di perusahaan adalah kerabat dari tokoh-tokoh terkemuka dalam kehidupan politik atau terkadang berpartisipasi langsung di dalamnya sebagai deputi, menteri, dll. Girdap—bank swasta pertama yang didirikan di Bulgaria setelah tahun 1878—memiliki hubungan politik dan bisnis yang erat dengan para pemimpin berpengaruh. Partai Liberal Rakyat Barat. Tokoh-tokoh terkemuka dari kekuatan politik ini terlibat langsung dalam pengelolaannya. Mungkin, contoh paling nyata dari hubungan erat antara bisnis dan politik adalah Bank Komersial Bulgaria yang didirikan pada bulan Januari 1895 di Ruse. Pendirinya dekat dengan Partai Rakyat yang berkuasa saat itu. Perlindungan partai memainkan peran positif dalam peningkatan modal awal, namun hal ini menimbulkan kecurigaan korupsi di masyarakat.

Perusahaan dan pengusaha Bulgaria selama periode yang disebut kapitalisme Bulgaria pertama (1878–1944) bekerja dalam kondisi budaya bisnis tertentu. Dalam Jurnal Masyarakat Ekonomi Bulgaria (1899) Iv. Tsonev menerbitkan daftar pelanggaran paling umum yang terjadi ketika mendirikan perusahaan saham gabungan di negara tersebut. Anggaran dasar perusahaan menetapkan bahwa para anggota dewan direksinya menerima, selain gaji, persentase tertentu dari keuntungannya. Kecurangan akuntansi sering terjadi, sehingga memberikan gambaran positif palsu tentang keadaan perusahaan saham gabungan, dan dengan demikian, para wali mendistribusikan sejumlah besar uang di antara mereka sendiri. Dalam hal hasil positif dari kegiatan perusahaan saham gabungan, harga sahamnya

meningkat, yang memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui keadaan sebenarnya untuk menjual sahamnya dengan keuntungan yang signifikan. Dalam praktiknya, Dewan Manajemen mengurus perusahaan saham gabungan dengan memusatkan “keuntungan” di tangan mereka dan menyerahkan kerugian kepada pemegang saham biasa (Tsonev 1899: 186–190).

Beberapa perusahaan tabungan berfungsi dengan cara yang sama. Berbeda dengan perusahaan saham gabungan, perusahaan-perusahaan ini, setidaknya secara resmi, menetapkan tujuan mulia saling mendukung anggotanya dan membatasi pengaruh rentenir. Niat baik tidak menjamin hasil yang baik. Di wilayah yang lebih terpencil di Bulgaria, dimana tingkat melek huruf lebih rendah dan penduduknya bergantung pada pemimpin lokal, dewan lembaga tabungan menyalahgunakan dana mereka untuk keuntungan mereka sendiri dan melakukan berbagai penipuan. Terkurasnya dana menyebabkan kebangkrutan beberapa di antaranya di Belovo, Stanimuka (sekarang Asenovgrad), desa Chervena Voda, dan lain-lain.

Menurut ketentuan Undang-undang Dana Pertanian tahun 1893, pembentukan dana pedesaan di kota-kota di negara tersebut diperkirakan mengikuti model dana Raiffeisen Jerman. Beberapa tahun setelah berlakunya undang-undang normatif ini, manajer mesin kasir Manushov menyatakan bahwa pendirian mesin kasir semacam itu tidak mungkin dilakukan. Alasannya, menurutnya, berkaitan langsung dengan masalah kejujuran *“sama sekali tidak ada satu orang pun yang baik di desa-desa yang bisa menjadi ketua asosiasi”*.

Aspek lain dari praktik serupa dalam budaya ekonomi Bulgaria yang merdeka terungkap dari pengamatan orang asing yang cukup mengenal detail fungsi sistem ekonomi. Pengamatan pertama dilakukan oleh perwakilan pemegang obligasi pinjaman pemerintah Bulgaria di Bulgaria, Georges Bousquet. Pada bulan Desember 1910, ia menulis kepada kuasa usaha Perancis di Sofia: “...setiap orang yang pernah berurusan dengan transaksi di Bulgaria terpaksa mengakui bahwa gagasan tentang kontrak dan kekuatan konvensi formal telah memasuki mentalitas terlalu dangkal” (Bank nasional Bulgaria 1999, butir II: 527).

Dua dekade kemudian, pada tahun 1930, menteri berkuasa penuh Perancis di Sofia, A. Cambon, melaporkan kepada menteri luar negeri negaranya tentang niat pemerintah Bulgaria untuk mengedarkan penerimaan pajak. Cambon mencatat bahwa para petani di negara tersebut tidak mempunyai niat untuk membayar tunggakan pajak mereka. Menurutnya, konsep legalitas di kalangan masyarakat Bulgaria terlalu dangkal (Balgarska narodna banka 2004, item IV: 308). Kedua pendapat pengamat asing tersebut juga dapat direduksi menjadi penerimaan yang tidak tulus dan ketaatan yang jujur terhadap kewajiban yang diemban oleh berbagai entitas ekonomi.

C. Ekonomi bisnis Bulgaria dari agribisnis hingga teknologi tinggi.

Pada tanggal 9 September 1944, setelah kudeta di Bulgaria, pemerintahan koalisi Front Patriotik dibentuk, dipimpin oleh K. Georgiev. Dalam beberapa tahun berikutnya, kediktatoran satu partai sayap kiri didirikan di negara tersebut. Monopoli kekuasaan diakuisisi oleh Partai Komunis Bulgaria. Perubahan politik mengarah pada transformasi radikal dalam struktur ekonomi. Uni Soviet menjadi model perubahan tersebut. Kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar dihapuskan atau dibatasi secara ketat.

Keputusan ekonomi yang strategis menjadi tugas badan-badan partai yang lebih tinggi. Melalui perencanaan terpusat, negara pihak mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan visinya sendiri untuk membangun masyarakat industri. Dalam kerangka perekonomian yang direncanakan secara terpusat, dengan tidak adanya kepemilikan pribadi dan pasar, kewirausahaan klasik telah dilikuidasi di Bulgaria dalam jangka waktu yang lama. Namun, kondisi untuk manifestasi kewirausahaan tertentu tetap dipertahankan.

Sangatlah penting untuk memahami sikap rezim sosialis terhadap kewirausahaan untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar ideologinya. Elemen terpenting dari ideologi resmi ini adalah keyakinan bahwa sosialisme adalah sistem sosio-ekonomi yang lebih unggul dibandingkan kapitalisme, dan oleh karena itu sosialisme dimaksudkan untuk menyelamatkan umat manusia dari kemiskinan, kesenjangan, dan penyakit sosial lainnya. Keyakinan ini dipadukan dengan pandangan bahwa kapitalisme (ekonomi pasar) telah melewati tahap di mana ia berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan menunjukkan banyak tanda-tanda pembusukan dan kemunduran. Penerapan gagasan umum ini dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa sosialisme menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh anarki pasar dengan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, sehingga memungkinkan dilakukannya perencanaan yang rasional.

Hal ini harus memungkinkan penghapusan krisis kelebihan produksi, penghapusan pengangguran, pemotongan biaya iklan yang tidak perlu, penghapusan persaingan yang menyebabkan kebangkrutan banyak produsen, duplikasi biaya administrasi, dan lain-lain. pekerja sosialisme tidak dieksploitasi oleh pemilik tetapi bekerja untuk dirinya sendiri, mereka akan bekerja lebih teliti dan antusias, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya kontrol terhadap pekerja itu sendiri. Dalam hal ini, semangat dan hati nurani para pekerja harus menggantikan beberapa fungsi yang dilakukan oleh para pengusaha. Terakhir, perlu dicatat bahwa sosialisme ditampilkan sebagai sistem yang lebih murni, lebih mulia, dan lebih etis yang menjamin keadilan sosial.

Nasionalisasi cabang-cabang utama perekonomian merupakan kunci penting dalam konsolidasi model ekonomi Stalinis. Serangan terhadap properti pribadi dalam berbagai bentuk dimulai sejak musim gugur tahun 1944. Properti mereka yang dihukum oleh Pengadilan Rakyat (dibentuk untuk mengadili para penguasa yang bersalah karena melibatkan Bulgaria dalam Perang Dunia Kedua di pihak Jerman pimpinan Hitler) disita. atau properti yang diyakini diperoleh melalui aktivitas spekulatif.

Pada tahun 1946, bisnis asuransi dinasionalisasi, dan tahun berikutnya, monopoli negara atas perdagangan luar negeri didirikan. Bagian negara dalam perekonomian meningkat melalui pendirian perusahaan-perusahaan besar milik negara seperti "Pabrik Garam Negara", "Hutan Negara". Akhir logis dari proses ini adalah disahkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan industri, pertambangan, dan bank pada bulan Desember 1947. Dalam dua tahun berikutnya, sekitar 7000 perusahaan, sebagian besar berukuran kecil, dinasionalisasi. Dengan realisasi praktis dari nasionalisasi kewirausahaan swasta di semua sektor utama perekonomian di luar pertanian, hal ini telah berakhir.

Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, kepemilikan tanah pribadi terbatas, dan pada awalnya proses penciptaan pertanian kolektif dimulai dengan lambat. Pada tahun 1948, kolektivisasi di bidang pertanian meluas. Undang-undang sebenarnya menasionalisasi peralatan pertanian skala besar, dan sewa swasta dihapuskan. Sarana terpenting yang memaksa penduduk desa untuk memasuki TKZS (Trudovo Kooperativn Zemedelsko Stopanstvo unit pertanian tipe Soviet) adalah sistem pasokan wajib negara. Dengan demikian, sebagian besar produksi pertanian swasta disita oleh negara dan dibayar dengan harga yang tidak berarti. Dengan paksaan, banyak rumah tangga di pedesaan bahkan kehilangan sarana penghidupan mereka.

Beberapa terpaksa membeli gandum, susu, dan lain-lain, untuk meneruskan pasokan pemerintah. Mereka yang disebut kulak atau petani kaya berada dalam tekanan khusus. Sebagai akibat dari tekanan negara yang sangat besar pada musim gugur tahun 1950, kolektivisasi meningkat pesat. Pada akhir tahun 1951, hal ini mencakup 52% rumah tangga pedesaan dan lebih dari 60% lahan pertanian. Kolektivisasi paksa untuk sementara dihentikan atas saran tegas Stalin. Dari tahun 1956 hingga 1959, gelombang kolektivisasi kedua terjadi. Setelah selesai, 95% rumah tangga pedesaan masuk ke TKZS. Kolektivisasi dan pengenalan mesin tidak meningkatkan efisiensi produksi pertanian. Pada tahun 1953, saat panen dengan mesin pemanen, 10% gandum tersebar.

Sejak akhir tahun 1950-an, industri menjadi semakin penting dalam menentukan bentuk perekonomian Bulgaria. Pada tahun 1960, volume produksi industri di negara ini meningkat enam kali lipat dibandingkan tahun 1948. Kapasitas produksi yang kuat mulai dioperasikan di bidang metalurgi, produksi listrik, teknik mesin, dan industri kimia. Namun, usaha industri dibangun tanpa ketersediaan bahan lokal yang cukup untuk pengolahan dan tanpa memperhitungkan sumber energi yang tidak mencukupi.

Produksi industri secara umum seringkali tidak terkoordinasi dengan baik dengan pasar Bulgaria dan negara-negara CIS, dan tidak ada studi mendalam yang dilakukan mengenai kemungkinan pendapatan dan pengeluaran. Contoh tipikal mengenai cara pelaksanaannya dan kelemahan industrialisasi sosialis adalah Pabrik Metalurgi "Kremikovtzi". Bahkan sebelum dioperasikan, pendapat yang masuk akal telah dikemukakan bahwa bijih lokal di daerah tersebut tidak mencukupi, bahwa impor yang mahal dari Uni Soviet akan diperlukan, bahwa jumlah pekerja akan terlalu besar, dll. Semua ini berarti bahwa produksi kombinasi tersebut dianggap terlalu mahal.

Karena peralatan teknis untuk pabrik tersebut berasal dari Uni Soviet, perusahaan tersebut dibangun karena kemungkinan penolakan akan dianggap sebagai posisi yang tidak bermoral. Akibatnya, sejak awal, gabungan tersebut mengumpulkan akumulasi kerugian yang ditutupi oleh subsidi negara. Subsidi negara juga diarahkan ke banyak industri lain yang merugi. Dalam perekonomian yang direncanakan secara terpusat dan bertipe sosialis, membiarkan kebangkrutan dianggap tidak mungkin terjadi.

Pada awal tahun 1960-an, laju pertumbuhan ekonomi di Bulgaria yang sosialis tampak melambat. Sejumlah masalah organisasi perusahaan di berbagai sektor perekonomian juga menjadi jelas. Baik para pemimpin partai maupun ekonom di Bulgaria melaporkan adanya

kelemahan serius dari model perekonomian yang diterapkan kurangnya minat pekerja untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak dan berkualitas lebih baik, defisit, produksi yang stagnan, sejumlah besar konstruksi yang belum selesai, akumulasi stok dalam jumlah besar di negara-negara tersebut perusahaan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak, rendahnya efisiensi investasi baru, kurangnya hubungan antara gaji dan hasil kerja, dll.

Hal ini memerlukan upaya untuk memperkenalkan reformasi pasar. Arti utamanya adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada masing-masing perusahaan dan menjadikan pekerja dan manajemen bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian. Setelah penindasan Musim Semi Praha pada tahun 1968, antusiasme terhadap reformasi pasar dalam perekonomian Bulgaria secara bertahap mereda. Sejak sekitar pertengahan tahun 1980-an, upaya kedua dilakukan dalam reformasi pasar untuk memaksa perusahaan-perusahaan sosialis menjadi lebih efisien, tidak terlalu birokratis, dll. Akhir dari “antusiasme” reformasi dalam kondisi rezim sosialis adalah dengan dikeluarkannya keputusan untuk memperkenalkan tentang organisasi perusahaan dan terutama Keputusan N56 Januari 1989 yang terkenal. Di dalamnya, dengan banyak syarat, pendirian perusahaan swasta warga negara dan perusahaan dengan penyertaan asing diperbolehkan.

Negara menjamin bahwa “Harga barang dan jasa ditetapkan sesuai dengan harga pasar internasional serta penawaran dan permintaan dalam negeri”. Bahkan secara tekstual, keputusan tersebut terkesan radikal: kata pasar dan turunannya disebutkan sebanyak 9 kali. Reformasi yang dilakukan dilakukan secara setengah hati dan terlambat, serta gagal memitigasi dampak krisis. Sampai batas tertentu, mereka memfasilitasi arus keluar modal dari perusahaan milik negara ke perorangan dan pengayaan nomenklatur komunis (yang disebut privatisasi tersembunyi). Faktor terakhir dalam penderitaan model ekonomi sosialis adalah moratorium pembayaran utang luar negeri yang diumumkan pada bulan Maret 1990. Dengan demikian, krisis utang ketiga di Bulgaria yang sosialis berakhir dengan kebangkrutan dan runtuhnya model ekonomi Soviet secara de facto.

9.4 EKONOMI BISNIS KONTEMPORER DAN MASA DEPANNYA

Ekonomi bisnis kontemporer di Indonesia saat ini tercermin dalam transformasi yang sedang berlangsung, didorong oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika pasar yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi bisnis kontemporer di Indonesia dan pandangan terhadap masa depannya:

1. **Digitalisasi dan Teknologi:** Indonesia sedang mengalami lonjakan digitalisasi di berbagai sektor ekonomi. Bisnis-bisnis di Indonesia semakin mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar, dan menciptakan model bisnis baru. Masa depan ekonomi bisnis di Indonesia akan terus didorong oleh inovasi teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan teknologi blockchain.
2. **Peningkatan Daya Saing Global:** Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saingnya di pasar global melalui reformasi struktural, investasi dalam infrastruktur, dan promosi investasi. Masa depan ekonomi bisnis di Indonesia akan dipengaruhi oleh

kemampuan negara untuk menarik investasi asing, memperluas pasar ekspor, dan bersaing di pasar global yang semakin terintegrasi.

3. **Pemberdayaan UMKM:** Pemerintah Indonesia terus mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi. Masa depan ekonomi bisnis di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan UMKM untuk berkembang, mengadopsi teknologi, dan berintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4. **Kehijauan dan Keberlanjutan:** Indonesia semakin menyadari pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bisnis-bisnis di Indonesia diharapkan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasi mereka. Masa depan ekonomi bisnis di Indonesia akan diwarnai oleh pertumbuhan sektor-sektor yang berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan.
5. **Inklusi Keuangan:** Peningkatan inklusi keuangan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia. Masa depan ekonomi bisnis di Indonesia akan melibatkan peran yang lebih besar dari fintech dan layanan keuangan digital dalam memperluas akses keuangan, memajukan inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi masa depannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi pusat ekonomi regional yang kuat. Namun, tantangan seperti ketidakpastian global, ketimpangan ekonomi, dan masalah sosial masih perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam era bisnis kontemporer.

Walaupun terdapat perbedaan antara sejarah ekonomi bisnis di Bulgaria dibandingkan dengan perekonomian Inggris, Amerika Serikat, atau Jerman, kami dapat menguraikan garis titik yang sama yang membuat analisis sejarah menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, sejarah ekonomi global dan perkembangan industri adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, teori-teori ekonomi merangkum perubahan-perubahan utama dalam sistem perekonomian/industri/dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut.

Kita dapat menemukan kekuatan yang sama yang mempengaruhi penjelasan sejarah ekonomi bisnis Bulgaria. Oleh karena itu, perbandingan antara perkembangan ekonomi bisnis Bulgaria dan dunia, terdapat dua definisi utama yang perlu dijelaskan:

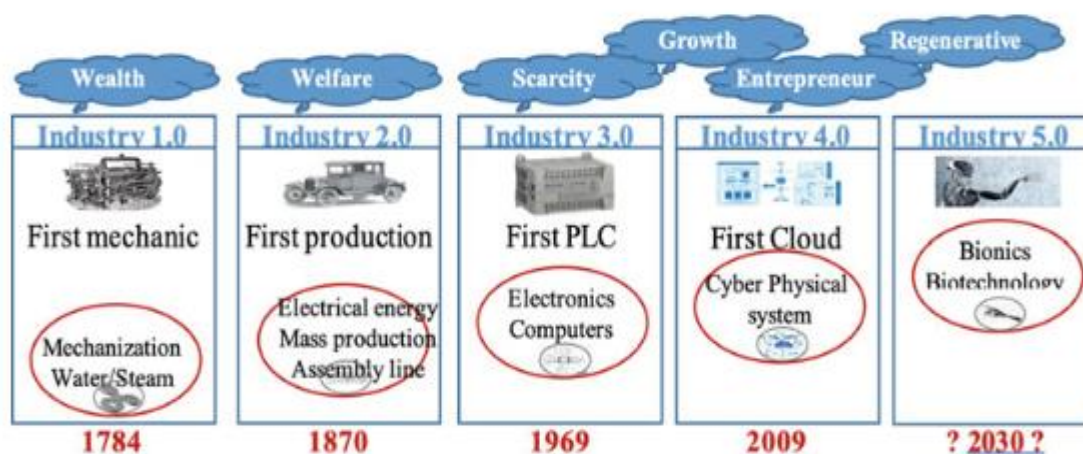
- **Industri:** setiap usaha, perdagangan, usaha, manufaktur atau pemanggilan pemberi kerja dan termasuk pemanggilan, pekerjaan, kerajinan tangan atau pekerjaan industri atau kegemaran pekerja (D.W. Wadegaonkar, CONCEPT OF INDUSTRY, Journal of the Indian Law Institute, Vol. 23, No .3 (Juli–September 1981), hlm. 400–420)
- **Revolusi industri:** periode perubahan cepat yang mengubah struktur ekonomi dan sosial. Selama Revolusi Industri, terjadi perubahan teknologi yang mempengaruhi

dasar-dasar pekerjaan dan kehidupan serta mendorong transformasi sosial yang mendasar.

Paragraf berikutnya menjelaskan definisi revolusi industri dan pengaruhnya terhadap industri, ekonomi, dan pembangunan Bulgaria.

A. Perkembangan industri dari Industri 1.0 ke Industri 4.0 dan Industri 5.0

Pilar-pilar utama dalam pembangunan industri dapat ditemukan dengan menganalisis perubahan-perubahan besar dalam praktik-praktik industri yang didefinisikan sebagai revolusi industri. Dengan demikian, poin-poin penting yang digunakan dalam penilaian perkembangan industri adalah berkaitan dengan perubahan (atau lebih tepatnya revolusioner) metode, pendekatan, atau alat dalam pembentukan dan/atau penyelenggaraan usaha industri dan/atau subsektor industri.



Gambar 9.2 Tahapan Revolusi Industri

Berdasarkan hal ini, peristiwa-peristiwa “penting” yang mengarah pada perubahan dalam perkembangan produksi industri dapat disoroti. Contohnya adalah penciptaan jaringan global Internet, yang saat ini mengubah industri dan proses manufaktur serta manajemen-organisasinya dari dalam ke luar. Berdasarkan hal ini, lima “revolusi industri” besar (yaitu empat masa lalu dan satu masa depan) dapat diidentifikasi, yang membawa perubahan pada seluruh industri dunia (Gambar 9.2).

Menganalisis karakteristik utama dari setiap perubahan dalam produksi industri, terkait dengan perubahan “revolusioner” dalam industri dan keterkaitan antara produksi dasar dan faktor organisasi-manajerial, kita dapat merangkum lima tahap evolusi dalam perkembangan ekonomi bisnis, yang diberi nama “Industri x.0” atau “Revolusi Industri x”.

- **Industri 1.0:** Revolusi Industri Pertama, terkait dengan mekanisasi tenaga kerja dan pengenalan angin, air, dan uap (mesin uap) ke dalam teknologi produksi. Hal ini didasarkan pada teori bisnis pertama yang membedakan ekonomi rumah tangga dengan ekonomi bisnis. Industri yang paling merasakan manfaat dari perubahan produksi ini adalah industri tekstil.

o Industri Bulgaria mulai berkembang pada paruh pertama abad kesembilan belas dengan berdirinya pabrik industri pertama di Bulgaria: pabrik tekstil, pada tahun 1834. Berdasarkan

sumber daya nasional di Bulgaria saat ini, jumlah total lokasi industri Bulgaria yang didirikan bervariasi antara 11 dan 40 pabrik yang menggunakan tenaga uap, air, atau hewan selama 50 tahun ke depan. Sebagian besar pabrik Bulgaria adalah milik negara (Resp. Kekaisaran Ottoman) dan dibangun untuk melayani kebutuhan tentara. Kehadiran yang paling signifikan dalam perekonomian Bulgaria adalah perekonomian rumah tangga yang memasok kebutuhan pasar lokal dan regional akan makanan dan pakaian (Iliev, Sterev dan Blagoev 2018).

- **Industri 2.0:** Revolusi Industri Kedua, terkait penggunaan listrik (mesin listrik) dan penggunaan “Organisasi Baru” Produksi Massal. Perubahan radikal dalam perusahaan bisnis didasarkan pada penemuan material: unsur kimia baru dan penambangan sumber daya baru, reaksi kimia baru, pengembangan material baru yang lebih ringan, dan lain-lain. Periode setelah Revolusi Industri Kedua ini diikuti dengan elektrifikasi yang cepat, kimiasasi, dan metalisasi.

o Pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, terjadi perkembangan pesat industri Bulgaria karena produsen industri didorong melalui berbagai perlindungan tarif dari persaingan asing. Periode ini bertepatan dengan Liberalisasi Bulgaria (pada tahun 1878) dan bisnis negara dengan cepat digantikan oleh perusahaan swasta.

Sebagai negara muda dan perekonomian muda, industri Bulgaria perlu dikembangkan secepat mungkin. Dengan demikian, undang-undang perlindungan industri pertama diadopsi di Bulgaria pada tahun 1894. Setelah itu, 72 pabrik industri dengan 3.027 karyawan didirikan dan industri Bulgaria berkembang beberapa kali hingga tahun 1912: mendirikan 389 lokasi industri dengan 15.560 karyawan.

Hal yang sangat penting adalah adanya titik awal diversifikasi sub-sektor industri seiring berkembangnya: produksi pertambangan, produksi pangan, produksi tekstil dan pakaian, produksi tembakau, dll. Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, industri pembangunan berlanjut dengan kecepatan yang dipercepat, dengan berdirinya bisnis baru karena terdapat 3.815 perusahaan (kebanyakan kecil dan menengah) dengan 87.442 karyawan pada tahun 1934. Menurut data resmi, pertumbuhan industri ini didasarkan pada pengembangan sektor energi, industri dan peralatan perusahaan pembangkit tenaga listrik.

- **Industri 3.0:** Revolusi Industri Ketiga memperkenalkan komputer untuk membantu manufaktur pada tahun 1950an dan 1970an. Periode ini dikenal sebagai revolusi digital. Berdasarkan pengembangan material baru, peralatan komputerisasi pertama telah muncul serta pengembangan robot pertama. Jadi, Otomatisasi produksi tercapai. Perubahan ini mempersingkat waktu produksi dengan lebih sedikit malfungsi, dan pada dasarnya pekerjaan manusia sudah mulai tergantikan dengan mesin. Di akhir Era Industri ini, konsumsi massal dan produksi massal membutuhkan teknologi yang semakin maju untuk transfer informasi.

o Restrukturisasi industri Bulgaria berikutnya dimulai pada tahun 1947 setelah nasionalisasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1947. Saat ini terdapat 4.628 perusahaan dengan 158.127 karyawan. Hasilnya, “konsolidasi” usaha-usaha industri dalam kepemilikan negara tercapai, dengan penutupan hampir 40% dari perusahaan-perusahaan industri yang

ada. Sebuah rencana untuk mempercepat industrialisasi dan pengembangan industri berat: industri kimia, metalurgi, dan pertambangan juga diadopsi.

Setelah tahun 1966, Bulgaria melanjutkan program percepatan industrialisasi, namun penekanannya adalah pada modernisasi produksi, serta mekanisasi dan otomatisasi proses produksi, termasuk penggunaan mesin pembelajaran elektronik di bidang manufaktur. Landasannya adalah percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Industri 3.5:** Memperkenalkan transfer data digital tidak hanya antar mesin tetapi juga antar manusia pada periode ini. Pembentukan teknologi logika digital, yang mencakup komputer dan World Wide Web (www), sangat penting untuk sub-periode ini. Memaksa pertukaran informasi yang cepat, memaksa pembukaan ekonomi lokal menjadi global sekaligus. Pada akhir tahun 1980-an, proses relokasi produksi sesuai dengan efisiensi produksi dimulai. Hal ini ditandai dengan “ekspor” produksi dari negara-negara maju ke negara-negara terbelakang.

o Perubahan berikutnya dalam struktur industri Bulgaria dimulai pada tahun 1989 dengan perubahan politik di negara-negara Tengah dan Timur. Pada akhir tahun 1989, terdapat 2.593 perusahaan industri dan 1,58 juta orang yang bekerja. Sejumlah besar perusahaan didirikan, dan dengan diadopsinya Undang-Undang Kontrol Privatisasi dan Pasca-Privatisasi pada tahun 1992. Sebagian besar perusahaan milik negara dijual melalui privatisasi massal dan tunai. Dalam sebagian besar transaksi, terutama dalam kasus privatisasi tunai, perusahaan industri Bulgaria menjadi milik investor asing. Dengan perubahan industri ini, industri Bulgaria menjadi bagian integral dari industri Eropa sebagai elemen “penting” dalam rantai produksi Eropa (Industri 3.5).

- **Industri 4.0:** Revolusi Industri Keempat, terkait dengan pengenalan teknologi Internet ke dalam produksi. Berdasarkan teknologi komputer Industri 3.0 terkini, proses manufaktur diperluas melalui koneksi jaringan dan dengan demikian memiliki mitra fisik di Internet. Mereka mengizinkan penggunaan berbagai teknologi cloud, yang mengarah pada apa yang disebut big data yang merupakan inti keunggulan organisasi. Teknologi TIK ini memungkinkan produksi mandiri, mobil tanpa pengemudi, dan lain-lain. Dengan demikian, jaringan semua sistem produksi mengarah pada “sistem manufaktur siber-fisik” yang membangun pabrik cerdas. Namun produk cerdas, pabrik pintar menyebabkan perampangan bisnis, bahkan terlahir kembali dari perusahaan “satu orang” (wirausaha).

o Dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2000, penekanan khusus dalam perkembangan industri adalah pengembangan teknologi Internet. Menyusul perkembangan global dari Internet 1.0 ke Internet 4.0, perusahaan industri Bulgaria semakin mengandalkan penggunaan teknologi cloud dan data besar dalam operasi mereka. Menurut para ahli, lebih dari 40% perusahaan industri menggunakan jaringan sosial, Internet of Things (IoT), dan teknologi Internet lainnya dalam bisnis mereka.

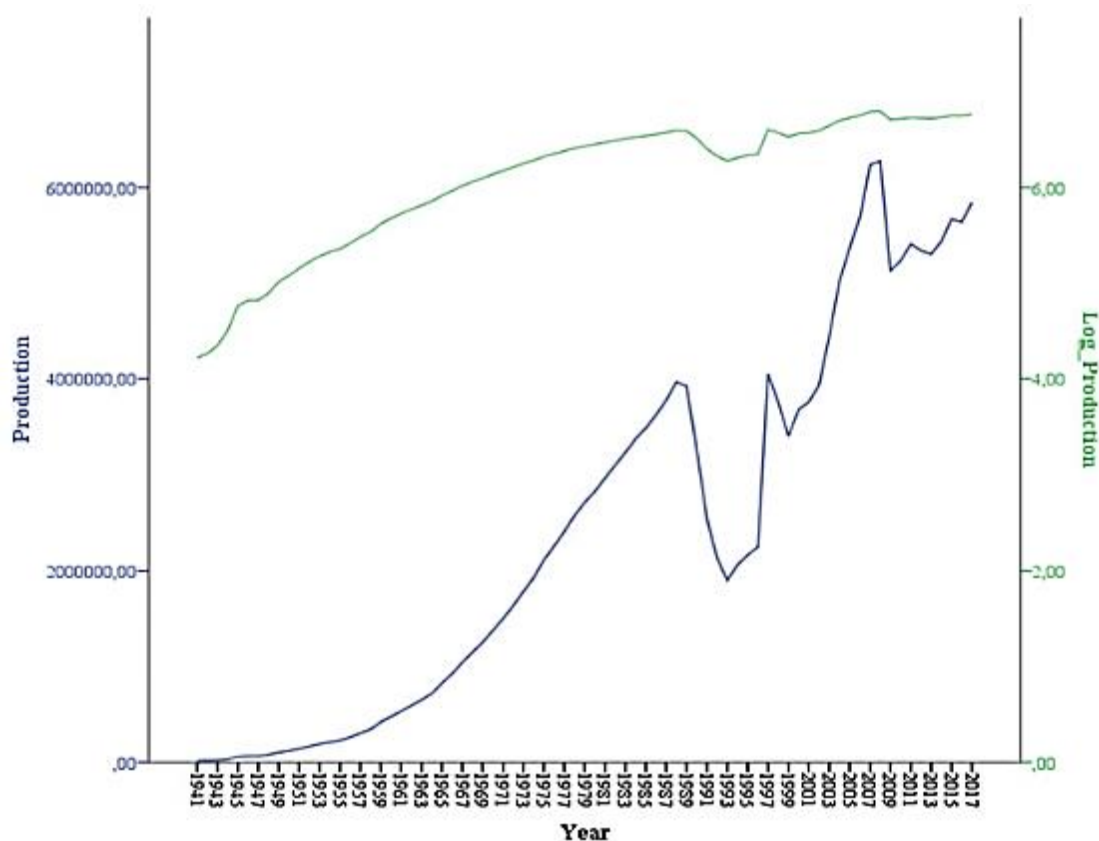
Industri 4.0 mengubah bisnis secara mendalam, karena perusahaan-perusahaan “terbesar” berbasis pada teknologi ICT dan AI: misalnya, dua perusahaan Bulgaria diakui sebagai perusahaan miliarder pada tahun 2021. Namun teknologi IoT, AI, dan komputasi

awan menimbulkan satu masalah besar: keamanan siber, dan masa depan bisnis Industri 4.0 adalah menyelesaikan masalah bisnis utama dalam teknologi siber.

- **Industri 5.0:** (Generasi Berikutnya) Revolusi Industri Kelima, terkait dengan pengenalan Bionik dan Bioteknologi ke dalam produksi. Memungkinkan penggunaan sensor biologis untuk mengontrol dan mengatur produksi. Tantangannya adalah menggunakan bahasa biologis sumber terbuka yang sesuai untuk memungkinkan penggunaan sel biologis/sintetis dalam produksi industri. Semua ini mengatur permasalahan ekonomi bisnis mulai dari penyelesaian permasalahan individu hingga penyelesaian permasalahan kemasyarakatan. Revolusi industri sebelumnya didasarkan pada hukum dasar ekonomi bisnis: memaksimalkan keuntungan bisnis, namun pabrik cerdas, sistem IoT kolektif berfokus pada memaksimalkan kebutuhan global: ekonomi hijau, ekonomi biru, keberlanjutan ekonomi, dll.

o Industri Bulgaria telah berfokus pada Revolusi Industri Generasi Berikutnya karena IoT, sistem komputasi pintar, teknologi cloud, dan teknologi AI ditetapkan sebagai prioritas bagi perekonomian Bulgaria melalui rencana nasional (Bulgaria) untuk pemulihan dan keberlanjutan. Artinya: lebih banyak investasi pada teknologi digital baru, lebih banyak investasi pada pengetahuan digital dan pendidikan digital, serta lebih banyak investasi pada regeneratif dan ekonomi sosial.

Ringkasan pergeseran antara berbagai era perkembangan industri Bulgaria dapat ditemukan pada gambar berikut yang mewakili dinamika produksi yang dihasilkan di Industri selama hampir satu abad (Gambar 9.3).



Gambar 9.3 Perkembangan industri di Bulgaria

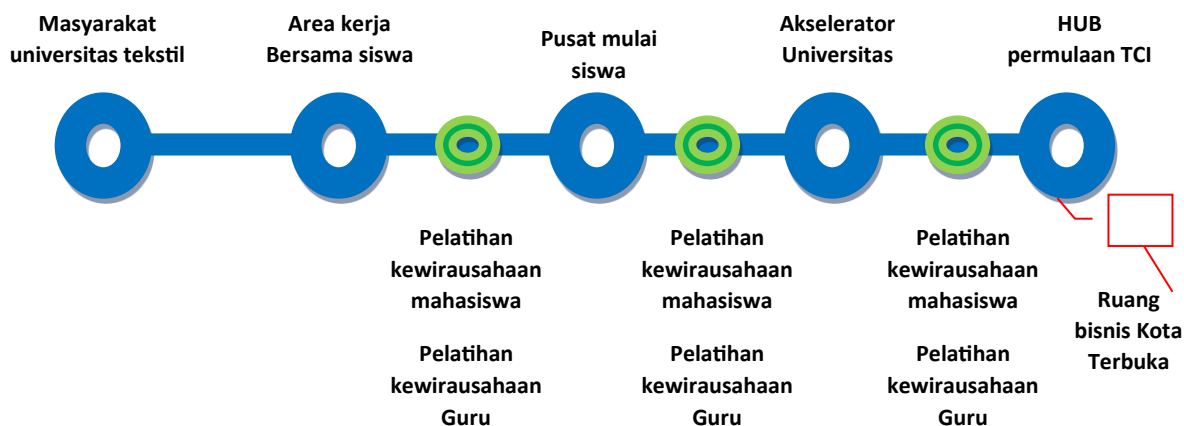
B. Jejaring bisnis [sosial] dan kewirausahaan akademis untuk menerima Industri 5.0

Revolusi Industri 5.0 akan menjadi “perang” antara kecerdasan manusia dan efisiensi mesin (komputer). Jadi, teori-teori ekonomi yang berpusat pada manusia akan menempatkan kreativitas kewirausahaan sebagai pusat pengembangan, namun bukan kreativitas seorang MAN, melainkan kreativitas kelompok (sosial) /resp. Jaringan/orang-orang kreatif. Dengan demikian, fokus pola pikir kolektif memunculkan perspektif pembangunan masa depan. Hal ini didasarkan pada dua fenomena:

- **Co-creation:** Muncul dalam pemasaran pada tahun 1990an, namun melampaui definisi utamanya. Pada dasarnya, kreasi bersama adalah tempat bersama (misalnya dunia maya) di mana berbagai peserta saling berbagi pengetahuan untuk membangun nilai tambah yang cukup baru. Saat ini, hal ini digunakan untuk menciptakan inovasi terbuka yang berlawanan dengan proses inovasi tradisional. Kokreasi hanya akan berhasil jika orang-orang yang memenuhi syarat mau bekerja sama dan secara terbuka berbagi ide dan pengetahuan mereka dengan orang lain serta secara jujur mengevaluasi teknologi, produk, dan ide-ide baru yang ada. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai crowdsourcing, karena perusahaan menggunakan pemangku kepentingannya (yaitu crowdsourcing) untuk menemukan solusi baru atau meningkatkan nilai tambah yang ada dari proses bisnis, teknologi, atau produk.
- **Co-working:** Muncul dalam manajemen sumber daya manusia pada pertengahan tahun 2000-an sebagai sebuah proses di mana individu-individu yang bekerja berkumpul di suatu tempat untuk menciptakan nilai baru sambil saling berbagi informasi dan kebijaksanaan dengan bekerja sama dalam kondisi pilihan mereka. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan otonomi individu dengan kolaborasi dengan orang lain dalam pekerjaan.

Menggabungkan kreasi bersama dan bekerja bersama dalam ekonomi sosial akan mengarah pada pembentukan banyak jaringan bisnis berdasarkan dasar-dasar koperasi di mana orang-orang akan bekerja sama dalam menciptakan ide-ide baru dan teknologi baru dengan menggunakan layanan IoT, AI, dan cloud. teknologi. Dengan demikian, setiap pria/wanita lajang akan menjadi wiraswasta yang akan bekerja sama dengan orang lain tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tetapi untuk mencari keputusan yang memaksimalkan nilai kolektif/resp. menjadi bagian dari ekonomi sosial.

Ketika Revolusi Industri Pertama telah dimulai dalam industri tekstil, kita dapat menunjuk co-creation dan co-working dalam industri yang sama. Jadi, Revolusi Industri Kelima didasarkan pada penerimaan PETA JALAN berikutnya yang menetapkan kreasi bersama dan kerja sama antar pemangku kepentingan tekstil yang berbeda untuk membangun teknologi tekstil baru, produk tekstil baru, dan nilai tambah tekstil baru. Peta Jalan ini menunjukkan kombinasi kemungkinan jaringan yang berfokus pada pembentukan nilai tambah koperasi baru (Gambar 9.4).



Gambar 9.4 Contoh peta jalan bisnis kewirausahaan TCI

Berdasarkan peta jalan yang diberikan, terdapat tiga perhentian utama yang mencakup proses kreasi bersama dan kerja bersama:

1. Pusat Penelitian Material Baru

- Kustomisasi dan produksi bersama konsumen: Perusahaan mengizinkan pemangku kepentingan untuk mempersonalisasi berbagai elemen desain untuk tekstil.
- Tekstil Cerdas dan Inovasi Produk Cerdas: Keberhasilan mungkin bergantung pada kolaborasi yang efektif (misalnya, dengan sektor lain, universitas, dll.)
- Teknologi manufaktur digital dan cerdas: Perusahaan tekstil dapat mendukung pengembangan manufaktur digital dengan menyoroti perusahaan-perusahaan rintisan (start-up) tekstil yang cerdas.

2. Pembelajaran Wirausaha Pakaian dan Tekstil

- Pendidikan kewirausahaan bagi perusahaan: Hal ini mencakup pengetahuan dan keterampilan kooperatif dan kolektif yang penting yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan perusahaan.
- Pendidikan kewirausahaan melalui perusahaan: Ini mencakup pendidikan yang menggunakan proses pendirian usaha baru.
- Pelatihan kewirausahaan fokus pada: kreativitas; inovasi; mengidentifikasi peluang dalam iklim perubahan, dll.

3. Pusat Permulaan TCI

- Pembentukan rantai pasokan siber-fisik: Fleksibel dalam rantai pasar pemasok independen yang memiliki kemampuan mengendalikan integrasi simpul rantai.
- Perusahaan tekstil dan pakaian jadi ramah lingkungan: Pabrik tekstil modern yang terotomatisasi dan konsumsi finishing tekstil serta produksi pakaian jadi dalam jumlah besar harus mampu memenuhi tidak hanya peningkatan permintaan namun juga peningkatan efek ramah lingkungan global.

9.5 KESIMPULAN

Perkembangan industri, baik di Bulgaria maupun global, melewati tahapan evolusi yang berbeda: dari Industri 1.0 pada tahun 1784 (untuk Bulgaria—1836) hingga Industri 4.0 pada tahun 2010-an. Ciri utama dari evolusi ekonomi bisnis ini adalah pencapaian pertumbuhan industri yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan didasarkan pada penciptaan keunggulan organisasi dan mendekatkan produksi dan penjualan melalui digitalisasi bisnis setelah tahun 2010.

Atas dasar ini, perekonomian bisnis pada umumnya sepertinya akan segera berakhir. Karena nilai utama rumah tangga/perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan produksi/penjualan dan menurunkan sumber daya/biaya, maka perekonomian bisnis pada umumnya adalah perekonomian yang berpusat pada perusahaan/rumah tangga. Namun, teknologi baru, termasuk. Teknologi IoT, AI, dan Cloud menjadikan siapa pun sebagai bagian produktif dalam rantai nilai.

Oleh karena itu, maksimalisasi keuntungan tunggal akan segera digantikan oleh maksimalisasi nilai kelompok sosial. Dengan demikian, revolusi Industri berikutnya adalah revolusi sosial dan ekonomi kewirausahaan akan bergeser ke arah sosial, kelompok/jaringan, ekonomi. Artinya, Industri 5.0 akan didasarkan pada kreasi bersama dan kerja sama berbagai jaringan orang. Dan upaya untuk menerima jenis usaha baru adalah dengan melatih para pemangku kepentingan agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan inovasi serta pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan sosial yang semakin meningkat.

Selain itu, pelatihan kewirausahaan sosial memberdayakan peralihan pengetahuan yang lebih cepat dari bangku studi/resp. sekolah tinggi atau universitas/untuk proposal nilai tambah bisnis. Dengan demikian, Industri 5.0 akan mendorong berdirinya Universitas Start-up untuk memberikan transisi pengetahuan yang kompetitif dalam jaringan sosial-kewirausahaan dari HUB start-up Universitas/Universitas/ke HUB start-up Masyarakat/Bisnis Terbuka.

BAB 10

PROSES PENDIRIAN BANK SENTRAL

10.1 PENDAHULUAN

Proses pendirian bank sentral merupakan langkah penting dalam pembangunan sistem keuangan suatu negara. Proses ini dimulai dengan penetapan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, yang biasanya dituangkan dalam undang-undang atau peraturan khusus. Kebijakan ini menetapkan peran, fungsi, dan kewenangan bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan kebijakan moneter serta mengawasi sistem keuangan. Setelah penetapan kebijakan, langkah selanjutnya adalah proses legislasi. Ini melibatkan pembahasan dan pengesahan undang-undang pendirian bank sentral oleh badan legislatif atau parlemen. Proses legislasi ini penting untuk memberikan legitimasi hukum bagi bank sentral dan menetapkan dasar hukum bagi operasinya.

Setelah undang-undang pendirian disahkan, bank sentral akan dibentuk sebagai badan hukum yang independen. Biasanya, bank sentral memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan gubernur atau dewan direksi sebagai pimpinan, serta staf dan departemen yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi bank sentral seperti kebijakan moneter, pengawasan bank, dan pengelolaan mata uang. Selanjutnya, bank sentral mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Ini termasuk pengembangan sistem pembayaran, peraturan keuangan, dan kerja sama internasional dengan bank sentral lainnya. Bank sentral juga akan mengembangkan kebijakan moneter yang sesuai dengan tujuan ekonomi nasional dan kondisi pasar yang ada.

Keseluruhan proses pendirian bank sentral ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, badan legislatif, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga yang kuat dan independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses pendirian bank sentral di Indonesia merupakan langkah penting dalam pembangunan sistem keuangan negara. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Proses ini dimulai dengan pembentukan kebijakan oleh pemerintah Indonesia yang kemudian diimplementasikan melalui proses legislasi. Pembentukan bank sentral ini mencakup penetapan tugas, fungsi, dan wewenang Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan bank sentral negara. Setelah legislasi disahkan, langkah berikutnya adalah pembentukan struktur organisasi dan penunjukan pimpinan bank sentral yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, bank sentral akan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka, termasuk pengembangan sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Proses ini melibatkan kerjasama antara bank sentral, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memastikan keberhasilan dan

efektivitas bank sentral dalam menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Saat ini, fungsi yang dijalankan oleh Bank Sentral di hampir setiap negara terbagi dalam empat bagian utama. Mengatur jumlah uang beredar dalam negeri, yaitu pasar uang, menjadi pemimpin sistem perbankan dengan mengatur volume dan penyaluran kredit, mengelola cadangan emas dan devisa negara, serta menjalankan fungsi bendahara negara. , atau dengan kata lain lembaga keuangan. Pengalaman yang berbeda dari masing-masing negara di masa lalu telah mengungkapkan perbedaan dalam fungsi yang dilakukan oleh bank sentral dan alat yang mereka gunakan. Negara-negara yang merdeka pada abad ke-20 menjadikan bank sentral negara-negara maju sebagai lembaga acuan dalam mendirikan bank sentralnya. Selain itu, target kebijakan keuangan yang disampaikan kepada negara lain oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia telah menyebabkan terbentuknya struktur yang mengarah pada kesamaan instrumen kebijakan moneter.

Munculnya bank sentral dalam pengertian modern merupakan fenomena unik pada abad ke-20. Perdebatan dan reformasi mata uang nasional pada abad kesembilan belas sebelumnya mempunyai peranan penting dalam hal ini. Secara politis, indikator ekonomi dari proses bernegara adalah diperkenalkannya mata uang nasional, yang merupakan simbol kedaulatan politik. Diskusi mengenai konvertibilitas, jumlah cadangan yang harus disimpan di bank, jumlah penerbitan uang kertas, dan cara mencegah penerbitan berlebihan terus berlanjut sepanjang abad ini. Prosesnya, yang dimulai dengan reformasi mata uang di Inggris menjelang pertengahan abad kesembilan belas, diikuti oleh negara-negara lain.

Pengumpulan kewenangan penerbitan uang kertas di satu tangan untuk mengendalikan jumlah uang beredar merupakan titik balik terbentuknya bank sentral pada abad kesembilan belas. Dengan diberlakukannya Peel Act pada tahun 1844, hak istimewa penerbitan uang kertas terkonsentrasi di tangan Bank of England. Tren ini diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya, dan bank-bank sentral yang baru didirikan mulai didirikan dengan hak istimewa ini. Perkembangan penting lainnya memungkinkan bank sentral untuk meningkatkan posisi suportifnya dibandingkan bank lain. Krisis keuangan yang terjadi seiring dengan bangkrutnya sebuah bank besar (Overend, Guerny & Co.) di Inggris pada tahun 1866 mengungkap dimensi intervensi Bank of England terhadap sistem pada saat krisis. Tingkat diskonto, suku bunga, dan operasi pasar terbuka mulai digunakan sebagai alat kebijakan oleh bank sentral pada periode ini. Reformasi keuangan merupakan bagian penting dari reformasi Tanzimat dan Islahat, yang termasuk dalam upaya inovasi di Kesultanan Utsmaniyah. Inisiatif reformasi yang ditujukan pada pembentukan lembaga keuangan dan penggunaan instrumen keuangan, seperti di negara-negara Eropa, menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menciptakan pasar uang dan modal yang maju, yang merupakan indikator penting dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pada tahun 1856, Bank Ottoman (Bank-ı Osmanî) didirikan selama Perang Krimea tahun 1854 untuk bertindak sebagai perantara pembayaran utang luar negeri Pemerintah Ottoman, yang merupakan negara pertama yang meminjam dari luar negeri. Akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh Ratu Victoria bertanggal 24 Mei 1856. Dokumen ini

dikeluarkan untuk Layard, Bruce, Clark, Cummins, Glyn, Hankey, dan Kingscote. Kekuasaan bank milik Inggris ini, yang berkantor pusat di London, terbatas pada pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, memberikan uang muka kepada pemerintah dan mendiskontokan beberapa tagihan Treasury. Dengan demikian, Ottoman Bank adalah sebuah perusahaan keuangan sederhana, tanpa konsesi dan perintah hak istimewa, namun dengan ketentuan yang kuat.

Upaya untuk mendirikan “bank nasional” dengan monopoli penerbitan uang kertas, yang termasuk dalam reformasi pasar uang, mengakibatkan pemberian konsesi bank nasional kepada Bank-ı Osmanî-i Şahane, yang didirikan pada tahun 1863 dengan Ibukota Inggris-Prancis. Peran bank dalam keuangan negara jelas terlihat dalam dekret tanggal 4 Februari 1863. Bank ini mempunyai monopoli penerbitan uang kertas selama 30 tahun dan juga menjalankan tugas sebagai perbendaharaan negara. Ia juga bertugas melakukan pembayaran Perbendaharaan, mendiskontokan obligasi, melakukan pembayaran bunga dan pokok utang dalam dan luar negeri.

Di Kekaisaran Ottoman setelah tahun 1871, investasi infrastruktur publik seperti kereta api dan trem menciptakan vitalitas di pasar modal dan lembaga keuangan kecil bermunculan satu demi satu. Depresi di pasar saham Wina pada tahun 1873, penangguhan pembayaran utang oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1875, dan tekanan perang tahun 1876–77 mengakibatkan likuidasi bank-bank kecil ini. Pada tahun 1875, Bank-ı Osmanî-i Şahane naik ke posisi baru dan lebih berkuasa. Dengan partisipasi Bank Austria-Utsmaniyah, modalnya ditingkatkan menjadi 10 juta pound, setengahnya telah dibayarkan, dan masa konsesi diperpanjang selama 20 tahun berikutnya. Proses dilanjutkan dengan perluasan hak istimewa Bank-ı Osmanî-i Şahane. Didirikan pada tahun 1917, bank İttihâd-ı Milli digabungkan dengan “İs Bankası” pada tahun 1926 ketika transformasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan dan Kekaisaran Ottoman meninggalkan Perang Dunia Pertama dengan kekalahan. Hingga tahun 1931, “Bank Nasional” masih merupakan konsesi di tangan modal asing (Al dkk. 2014: 20).

Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya posisi Bank Sentral Republik Türkiye (CBRT) dalam kerangka undang-undang tahun 1930, dan laporan keuangan 5 periode akuntansi pertama, dengan judul “Laporan Dewan Administratif dan Laporan Auditor, Neraca dan Rekening Laba-Rugi”, akan diperiksa pada periode mulai tahun 1932. Berbagai aspek akuntansi bank sentral akan diperiksa. Selain judul-judul yang disebutkan dalam laporan dan pandangan umum perekonomian dunia dan Turki, neraca akhir tahun (periode 15 bulan untuk tahun 1932) dan data akun laba-rugi akan dianalisis dengan penjelasan deskriptif.

Ada banyak sumber referensi berharga tentang CBRT dalam literatur (Kayla 1981; Zarakolu 1987; Tekeli dan İlkin 1997; Kazgan dkk. 2000; Bakır 2007; Parasız 2009; Parasız 2011). Selain itu, laporan keuangan yang kami akses dari situs web perusahaan CBRT merupakan data bagian penting kedua dari penelitian ini. Sekali lagi, tesis dan hasil penelitian yang diakses dari website bank menjadi salah satu sumber referensi kami.

Pada tahun 1930an, rezim Republik menerapkan anggaran berimbang dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada uang. Kebijakan-kebijakan ini dan rezim nilai tukar yang

bertujuan untuk stabilitas nilai tukar membawa serta pengaturan kelembagaan penting yang diperlukan dalam upaya melawan inflasi. Stabilitas dan independensi fiskal juga diadopsi oleh para politisi dan negarawan pada masa itu sebagai prinsip yang menjamin stabilitas rezim Republik. Pada periode ini, instrumen kebijakan fiskal khususnya pajak mempunyai tempat yang penting dalam rangka menjamin stabilitas moneter dan keseimbangan anggaran. Pengaturan kelembagaan pada tahun-tahun ini memungkinkan Bank Sentral untuk memantau stabilitas harga (Bakir 2007: 65). Kajian ini memberikan kesempatan untuk mengamati jejak situasi tersebut melalui laporan keuangan CBRT. Kami percaya bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi kecil di samping penelitian-penelitian di bidang literatur.

10.2 KEBIJAKAN MONETER ABAD KESEMBILAN BELAS HINGGA TAHUN PERTAMA

Kebijakan moneter pertama Republik Indonesia dimulai sejak masa awal kemerdekaan pada tahun 1945. Pada periode tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sistem keuangan yang stabil dan membangun kembali perekonomian pasca-kemerdekaan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan mendirikan bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1946. Kebijakan moneter pertama Republik Indonesia pada masa itu terfokus pada stabilisasi mata uang dan pengendalian inflasi yang tinggi. Langkah-langkah yang diambil termasuk pengaturan nilai tukar mata uang, pengendalian suplai uang, dan pengaturan suku bunga. Bank Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Juli 1953 dan langsung mengambil peran dalam mengelola kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selama periode tersebut, kebijakan moneter Republik Indonesia juga mencakup upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan kredit kepada sektor-sektor produktif. Bank Indonesia juga memainkan peran dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan industri nasional. Namun, tantangan yang dihadapi pada masa tersebut termasuk ketidakstabilan politik, perubahan pemerintahan, dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Hal ini membuat kebijakan moneter pertama Republik Indonesia menjadi kompleks dan beragam dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi.

Meskipun demikian, kebijakan moneter pertama Republik Indonesia membentuk dasar yang kuat untuk pengelolaan sistem keuangan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan kebijakan moneter di masa mendatang. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya akan membahas contoh mengenai peran dan implementasi pajak sebagai sumber pendapatan utama Kekaisaran Ottoman serta dampaknya terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat pada masa itu

Alat Pembiayaan Periode Ottoman

Rezim koin digunakan pada periode klasik dalam sistem ekonomi Ottoman. Antara tahun 1326 dan 1757, akche digunakan sebagai uang untuk rekening, meskipun akche telah menyusut dan kehilangan arti pentingnya dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tahun

1757, kurus menggantikan akche sebagai uang rekening. Pada periode Tanzimat, sistem uang perwakilan bertambah kuat. Pada akhir abad kesembilan belas, basis lira diadopsi.

Pada Periode Tanzimat,1 uang esham baru yang berbentuk “uang tunai” mulai diedarkan pada tahun 1840 pada masa pemerintahan Sultan Abdulmecid (1839–1861), dan merupakan cikal bakal pertama dari praktik token. uang kertas, yang mulai berlaku sebagai salah satu jenis pinjaman dalam negeri pada tahun 1775 dan diedarkan di kalangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Saham yang disebut “kaime (token money)” atau “evrak-ı nakdiye (treasury note)” sebenarnya adalah obligasi pemerintah. Kita bisa menerimanya sebagai uang kertas, bukan sebagai uang perwakilan, karena tidak berbalas. Perbedaan antara kaime dan koin, yang tidak dihormati oleh para pedagang dan masyarakat di provinsi, cukup besar.

Pada tahun 1844, sistem koin direorganisasi, dekret “Usul-ı cedide üzre taksim- i ayar” dikeluarkan, dan koin-koin dengan pengaturan standar yang tidak dapat dipotong diedarkan. Medjidie perak sebanyak 20 kurus, dan uang emas sebanyak 100 kurus diterima sebagai mata uang dasar. Pemerintah ingin melarang peredaran koin selain koin yang akan dikeluarkannya dan untuk menstabilkan nilai mata uang Ottoman terhadap pound Inggris dengan menerapkan stabilitas valuta asing untuk sementara karena situasi defisit perdagangan luar negeri saat ini. Hingga Perang Dunia Pertama, nilai tukar koin tetap pada level 110 kurus, 1 Pound Inggris.

Setelah tahun 1875, perak mulai terdepresiasi di pasar dunia. Situasi ini membatalkan rasio emas/perak sebesar 1/15,36 (16) dalam bimetalisme Utsmaniyah dan pertukaran pun terputus. Pengumpulan penerimaan negara dengan uang perak dan pengeluarannya dengan emas menyebabkan kerusakan pada perbendaharaan. Dalam menghadapi situasi ini, pertama-tama, pembentukan Mecidiye dihentikan. Pada tahun 1881, lira emas Ottoman diadopsi sebagai mata uang. Meskipun demikian, permintaan masyarakat akan meci diye dan uang kecil terus berlanjut di provinsi-provinsi dan di Istanbul. Awalnya, emas mulai diperdagangkan dengan harga 108 kurus, secara tidak resmi di Istanbul. Premi emas ini menjadi lebih nyata di luar ibu kota. Hal ini menyebabkan tersebarnya lembaga penukaran uang. Menurut Kementerian Perdagangan (statistik Negara-i Âliye 1313), terdapat 805 penukaran uang dan broker di Istanbul pada tahun 1894. Untuk mencegah situasi ini, Undang-Undang Penyatuan Meskukat diberlakukan pada tahun 1916, dan tarif 1 lira 100 kurus, diadopsi. Keberhasilan undang-undang ini masih terbatas. Karena uang kertas yang dipasarkan untuk memenuhi biaya yang semakin meningkat akibat perang menyebabkan tercabutnya uang logam dan uang kecil dari peredaran.

Pada tahun 1860, jumlah uang kertas mencapai 1,1 miliar. Koin non-emas ini tidak dimiliki oleh publik dan nilainya langsung turun. Meskipun pemerintah mencoba beberapa kali untuk menghapusnya dari peredaran, dengan bantuan Bank Ottoman, pemerintah menebus 40% dari nilai nominal kepada para dermawan dalam bentuk tunai dan 60% dengan membayar mereka dalam bentuk obligasi yang diterbitkan atas nama “esham”. -saya menyerah”. Setelah kaimes pertama ini ditarik dari peredaran pada tahun 1862 pada masa

pemerintahan Sultan Abdulaziz (1861–1876), Sultan II. Hingga masa pemerintahan Abdulhamid (1876–1909), kaime tidak diciptakan lagi.

Bank Ottoman (Bank-ı Osmanî-i Şahane) didirikan pada tahun 1863 atas meningkatnya kebutuhan kredit negara. Bank diberi kewenangan untuk mengeluarkan uang kertas, dengan kata lain identitas “bank sentral”. Uang token dipasarkan untuk kedua kalinya di bawah kendali Bank Ottoman, terutama untuk pembiayaan perang Ottoman-Rusia tahun 1877–78 (1876–77). Uang kertas ini kehilangan 90% nilainya dalam waktu yang sangat singkat dan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyadari bahwa kaimen (uang token) tidak mempunyai nilai selain pembayaran pajak, maka pemerintah menyatakan bahwa uang kertas akan diterima sampai dengan 20% dari jumlah yang harus dibayar dan seperempat dari nilai nominalnya dalam pembayaran ke kasir negara.

Setelah kaime ini dihapuskan, kaime ini dikeluarkan untuk ketiga kalinya pada tahun 1915 pada masa pemerintahan Sultan Mehmed V. (1909–1918). Kaimes ini secara harafiah mempunyai fungsi sebagai uang perwakilan. Seperti halnya emas yang setara, juga jelas kapan akan ditarik dari peredaran. Kaimes ini, yang dikeluarkan sebagai 7 perintah dalam kerangka kebijakan moneter ketat yang diikuti oleh Bank Ottoman, berlanjut hingga era Republik. Perang Dunia I sebagian besar dibiayai oleh emisi uang kertas. Pada periode ini, jumlah uang beredar meningkat hampir 4 kali lipat dan lingkungan inflasi muncul.

Pencarian Bank Negara dan Pendirian Bank Ottoman

Sistem moneter dan keuangan Ottoman pada periode klasik didasarkan pada sistem koin seperti dalam perekonomian tradisional. Dasar dari sistem ini adalah penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar dan meminimalkan penggunaannya sebagai barang. Ottoman mendorong masuknya logam mulia ke negaranya agar jumlah uang beredar mencukupi untuk volume pertukaran, dan melarang keluarnya mereka. Kadang-kadang, mereka mengirimkan barang-barang emas dan perak yang ditemukan di istana dan di tangan individu ke percetakan uang dan memotong uang. Negara meningkatkan jumlah uang beredar dan membiayai pengeluarannya dengan mencetak koin baru dari logam mulia dan koin lama dalam bentuk permen. Setelah Sultan Suleiman I yang baru naik takhta, kebijakan ini ditinggalkan ia melarang peredaran uang logam kuno dan memotong uang logamnya sendiri. Kadang-kadang pengaturan koin diubah dan depresiasi mata uang digunakan sebagai alat pembiayaan. Penggunaan uang menjadi sangat luas, terutama pada abad keenam belas, karena melimpahnya logam mulia dan menguatnya hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan. Jaringan kredit berskala kecil namun padat dengan institusi seperti yayasan, serikat pekerja, dan lembaga janisari juga berkembang di kota-kota Ottoman dan sekitarnya (Pamuk 2014: 26). Yayasan kas sudah cukup berpengaruh sehingga disebut sebagai bank yayasan.

Penukar uang Galata mengadakan transaksi bank dan kredit di Kekaisaran Ottoman sampai bank tersebut didirikan. Mereka tidak hanya mengelola uang orang lain, membeli dan menjual surat berharga, dan menangani transaksi valuta asing; mereka juga terlibat dalam peminjaman uang ke perbendaharaan dan istana. Mendiskontokan obligasi negara, mengambil keuntungan dari selisih agio yang timbul dari peredaran emas, perak, dan kaimen,

memotong gaji pegawai negeri, melakukan pertanian pajak dan mengumpulkan pendapatan pajak negara merupakan beberapa transaksi utama.

Sebuah kesepakatan dicapai dengan bankir Galata A. Baltazzi dan J. Alleon untuk melaksanakan reformasi mata uang pada tahun 1844 dan untuk menjaga nilai tukar uang stabil terhadap sterling dalam pembayaran luar negeri yang dilakukan dengan kebijakan, dan Banque de Constantinople didirikan pada tahun 1847. Bank ini tidak memiliki modal tertentu, kebijakan yang diambil oleh para pendiri karena reputasi komersialnya diterima.

Ketika pemerintah menunda pembayaran utang jangka pendeknya kepada bank, bank tersebut mengalami masalah, bangkrut pada tahun 1852 menjelang Perang Krimea, dan menyebabkan kerugian sebesar Rp.60.000.000 pada perbendaharaan Ottoman. Defisit anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembiayaan Perang Krimea yang dimulai pada tanggal 3 Juli 1853 berusaha dipenuhi melalui pinjaman dalam dan luar negeri. Keuangan Ottoman meminjam dari pasar keuangan Eropa seperti London, Paris, dan Wina pada tahun 1854 dengan menerbitkan obligasi jangka panjang.

Pemerintahan Ottoman menerima tawaran dari investor Inggris dan Perancis untuk mendirikan bank dengan bantuan modal asing. Pada tahun 1856, Bank-ı Osmanî (Ottoman Bank) didirikan dengan modal Rp.50.000.000 untuk menangani simpanan, diskon, dan transaksi komersial. Bank tersebut mengambil nama Bank-ı Osmanî-i S, ahane dengan partisipasi para bankir dan pengusaha Perancis pada tahun 1873, 7 tahun setelah didirikan, dan menjadi bank emisi. Modalnya, yang berjumlah Rp.67,5 juta pada saat didirikan, menjadi Rp.520 juta, pada tahun 1875, setengahnya telah disetor. Penebusan uang kertas, yang sampai saat itu tidak dapat diedarkan, dapat dilakukan.

Kantor pusat bank tersebut berada di Istanbul, namun pengelolaannya berada di tangan komite-komite di London dan Paris. Bank juga berperan sebagai semacam bank sentral yang mempunyai hak istimewa dan monopoli dalam mencetak uang. Bank meminjam dari pasar Eropa dengan bunga rendah dan mengumpulkan cadangan emas, mencetak uang 3 kali lebih banyak dari cadangan tersebut dan memberikan uang muka kepada pemerintah dengan imbalan bunga. Pemerintah Ottoman tidak dapat ikut serta dalam keuntungan bank ini. Masa konsesi bank ditentukan 30 tahun pada kontrak pertama, dan jangka waktu ini diperpanjang sampai Maret 1952 dengan amandemen berikutnya (Kayla 1981: 25). Bank Ottoman mengemban tugas yang lebih seperti bank komersial karena uang kertas yang diterbitkannya terbatas fungsinya sebagai bank negara, pemerintah membatasi penerbitan uang dan surat perbendaharaan, dan memprioritaskan profitabilitasnya sendiri selain memenuhi kebutuhan perbendaharaan negara.

Fakta bahwa bank tersebut tidak mendukung Kesultanan Utsmaniyah dalam menerbitkan uang kertas menyebabkan utang dalam dan luar negeri negara dibuat dengan bunga dan biaya yang semakin meningkat setelah didirikan. Dengan demikian, bank memperoleh sebagian besar keuntungan finansial yang dihasilkan oleh hutang Ottoman. Selain bank yang didirikan di Thessaloniki pada tahun 1888, banyak juga bank lain yang didirikan. Bank seperti Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Dresdener Bank, Deutsch Orientbank, Winer Bank Verein, yang merupakan salah satu bank terkemuka di dunia, telah membuka

cabang di seluruh negeri. Deutsche Bank, salah satu bank tersebut, juga berpengaruh secara politik dan ekonomi. Bank memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan jalur kereta api Anatolia-Baghdad.

Pada bulan Oktober 1875, Negara Ottoman menyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban utang luar negerinya dengan mengambil keputusan moratorium. Pada bulan Desember 1881, Administrasi Düyün-ı Umumiye didirikan untuk pengelolaan hutang. Pada tahun fiskal 1875–76, dua pertiga pendapatan pemerintah dicadangkan hanya untuk pembayaran utang. Setelah II. Monarki Konstitusional, di antara bank-bank yang bersifat perbankan nasional adalah Ziraat Bank (didirikan pertama kali pada tahun 1863 dengan nama “Memleket Funds”) dan “Emniyet Fund”, yang didirikan oleh Mithat Pasha pada tahun 1808. Upaya untuk mendirikan sebuah bank negara nasional dimulai pada tahun 1914, pertama Evkaf dan kemudian İtibar-ı Milli Banks didirikan. Pedagang Anatolia, yang kekuatan ekonominya meningkat secara bertahap, mendirikan bank dan koperasi kredit di berbagai kota di Anatolia setelah tahun 1909.

Perlunya Bank Sentral dalam Perang Kemerdekaan

Ketidaksepakatan yang dimulai dengan penolakan Bank Ottoman untuk menanggapi secara positif tuntutan pemerintah untuk uang muka dan penerbitan uang kertas selama Perang Dunia Pertama diatasi ketika bank tersebut mengumumkan bahwa mereka melepaskan hak istimewanya untuk mencetak uang kertas selama perang dan bebas mencetak kaime. untuk pemerintah. Selama perang, Kekaisaran Ottoman mencetak 7 pesanan, totalnya lebih dari Rp.160.000.000.000.

Pejabat pemerintah mengajukan permohonan kepada Administrasi Düyün-u Umumiye agar uang yang dikeluarkan dapat membangkitkan gengsi di kalangan masyarakat. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, pemerintah membuat komitmen untuk dibayar dengan emas pada akhir perang, dengan uang yang akan dikeluarkan sebagai imbalan atas emas yang akan diberikan kepadanya. Emas senilai Rp.500 juta yang akan digunakan diperoleh dari Jerman. Selain emas yang dikeluarkan untuk persiapan perang, uang muka emas juga diterima dari Jerman dan Austria dan sebagian lagi sebesar Rp.6.519.179 dari jumlah tersebut disimpan di Reichbank dan Bank Austro-Hungaria oleh Direktorat Jenderal Dunia. Pada tahun 1915, jumlah uang kertas yang sama dengan komitmen pemerintah dicetak. Setara dengan uang kertas yang diterbitkan kembali untuk biaya perang ditentukan sebagai obligasi negara Jerman. Pada akhir perang, Rp.158.748.563 tersisa di pasar dari koin-koin ini.

Koin-koin yang diambil alih sebagai alat pembayaran ketika Pemerintah Nasional didirikan adalah koin-koin yang diterbitkan atas komitmen Pemerintah Ottoman kepada Düyün-u Umumiye. Setelah Perang Dunia Pertama, ketika emas Jerman dan Austria dikirim ke negara-negara sekutu melalui perjanjian Versailles dan Saint Germain, koin-koin ini tetap tidak terbalas. Salah satu ciri terpenting dari Perang Kemerdekaan Turki adalah bahwa perang tersebut dibiayai tanpa adanya bank negara di belakangnya. Pemerintah Ankara mendanai perang ini seperti sebuah keajaiban.

Namun, orang-orang Yunani membiayai perang tidak hanya dengan senjata mereka, tetapi juga dengan drachma yang disetor oleh bank sentral. Selama Perang Kemerdekaan, depresiasi uang kertas Utsmaniyah terhadap emas dan mata uang negara yang menang pada Perang Dunia Pertama terus-menerus memberikan tekanan besar pada Pemerintah Ankara. Menurut Vedat Eldem, yang memperkirakan total pengeluaran Perang Kemerdekaan sebesar 147 juta, 63,9% pembiayaan ini berasal dari pendapatan anggaran, 6,8% dari sumber non-anggaran, dan 15,7%. Dari penyitaan tersebut, 4,8% dari sumbangan, 8% dari bantuan Uni Soviet. Selain langkah-langkah penghematan seperti kenaikan pajak yang berbeda selama perang, tidak membayar gaji pegawai negeri secara hukum selama satu bulan, dan pengurangan gaji dan upah sebesar 20%, sumber daya pinjaman dalam negeri wajib diterapkan pada tahun 1921 dengan “tekalif-i miliye”² perintah.

Sumber daya asing dari Perang Kemerdekaan terdiri dari Rp.125.000.000 Inggris yang dikirim oleh Muslim India, bahan yang ditinggalkan oleh Prancis setelah gencatan senjata, dan 11 juta rubel emas dan 100.000 batangan emas Ottoman yang dikirim oleh Uni Soviet.

Tahun Pertama Republik, Kongres Ekonomi İzmir

Republik Türkiye yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1923 mempunyai permasalahan dan permasalahan politik yang berbeda dengan sebuah negara-bangsa yang baru berdiri. Pembentukan pasar nasional, penyediaan barang, jasa, dan aliran uang di tingkat nasional, pembentukan aturan umum dalam industri dan perdagangan, dan pembentukan sistem pembayaran nasional adalah beberapa di antara permasalahan tersebut. Perekonomian yang diambil alih oleh Republik Türkiye sebagian besar bertumpu pada pertanian. 52% Produk Nasional Bruto pada tahun 1907 dan 54% pada tahun 1914 diproduksi di sektor pertanian. Pada Kongres Ekonomi İzmir, yang diadakan tak lama setelah proklamasi Republik, prinsip-prinsip mengenai penghapusan Pajak Persepuluhan, penghentian monopoli tembakau, keamanan, mekanisasi, dan transportasi diadopsi dalam kaitannya dengan sektor pertanian. Dari komposisi impor pada periode yang sama, produksi industri tidak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri.

Dalam kongres tersebut, dicapai konsensus mengenai prinsip-prinsip melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing melalui tembok bea cukai, memberikan pengecualian bea cukai dalam pembelian mesin dan peralatan, menata ulang “UU Tesvik-i Sanayi”³, yang menetapkan bank untuk pembiayaan industri, dan ruang pengorganisasian untuk pendidikan industri. Dalam konteks ini, bank didirikan pada tahun 1924 dan “Sanayi dan Maadin Bank”⁴ didirikan pada tahun 1925. Pada tahun 1927, Tesvik-i Sanayi Undang-undang direorganisasi dan mulai berlaku. Tahun 1920-an adalah tahun ketika modal asing masuk ke dalam perekonomian Turki dan secara khusus diundang.

Trauma sejarah akibat hilangnya kemandirian ekonomi dan politik nasional di masa lalu membentuk kebijakan ekonomi rezim Republik. Rezim Republik menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan anggaran berimbang, prinsip moneter yang sehat, kontrol devisa dan perdagangan luar negeri, menghindari defisit dan utang luar negeri, dan tidak berkompromi dalam pengumpulan pajak

10.3 PEMBENTUKAN BANK SENTRAL

Pembentukan bank sentral di Indonesia merupakan langkah strategis dalam pembangunan sistem keuangan negara yang stabil dan efektif. Proses ini dimulai pada tahun 1953, ketika Bank Indonesia didirikan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia. Pembentukan bank sentral ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan akan otoritas moneter yang independen dan kuat untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan moneter serta mengawasi sistem keuangan nasional.

Langkah pertama dalam pembentukan bank sentral adalah penetapan kebijakan oleh pemerintah Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam undang-undang pendirian bank sentral. Proses legislasi ini melibatkan pembahasan dan pengesahan undang-undang oleh badan legislatif atau parlemen. Setelah Undang-Undang Bank Indonesia disahkan, bank sentral Indonesia menjadi lembaga yang independen dengan peran dan kewenangan yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Setelah pembentukan secara hukum, bank sentral membangun struktur organisasi yang efisien dan efektif. Ini melibatkan penunjukan pimpinan bank sentral seperti Dewan Gubernur dan Dewan Komisiner, serta pengaturan staf dan departemen yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi bank sentral seperti pengaturan moneter, pengawasan perbankan, dan pengelolaan cadangan devisa.

Selanjutnya, bank sentral mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Ini termasuk pengembangan sistem pembayaran yang modern dan efisien, implementasi kebijakan moneter yang sesuai dengan tujuan ekonomi nasional, serta membangun kerja sama dengan bank sentral dan lembaga keuangan internasional lainnya. Pembentukan bank sentral di Indonesia adalah langkah penting dalam pembangunan sistem keuangan negara yang stabil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun landasan yang kuat bagi pengaturan keuangan dan moneter yang efektif, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan selanjutnya mengenai perlunya bank sentral nasional, yang menjadi satu hal penting dalam sebuah perekonomian di negara Türkiye.

Perlunya Bank Sentral

Kurangnya bank sentral nasional, yang merupakan elemen penting dalam kemandirian perekonomian, merupakan salah satu permasalahan terbesar Pemerintah Republik. Bank Ottoman milik asing tidak memberikan uang muka dan emisi untuk membiayai Perang Dunia Pertama. Kehancuran yang disebabkan oleh tingginya inflasi pada masyarakat pada periode ini dan depresiasi Lira Turki yang terus-menerus membuat republik baru ini perlu mendirikan bank sentralnya sendiri. Keinginan pertama mengenai pendirian Bank Sentral diungkapkan pada Kongres Ekonomi Izmir. Implementasi gagasan ini berlangsung dalam tiga tahap dari pertengahan tahun 1926 hingga 1930.

Otoritas emisi Bank Ottoman dengan keputusan konsesi yang dikeluarkan pada tahun 1863 dan 1875 diperbarui oleh pemerintah pada tahun 1925. Namun, klausul ditambahkan ke dalam perjanjian yang menyatakan bahwa bank tidak akan menentang pendirian bank emisi terpisah di masa depan. Selain itu juga diambil pendapat para ahli dalam dan luar negeri.

Pada tahun 1927, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Menteri Keuangan Abdulhalik Renda tentang pendirian bank sentral diterima. Dalam laporannya, Dr. G. Vissering, Anggota Dewan Direksi Bank Sentral Belanda, yang diundang ke Türkiye pada tahun 1928, menekankan perlunya bank sentral independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Pada tahun 1929, Count Volpi, mantan Menteri Keuangan Italia, menyatakan bahwa pembentukan bank sentral sangat penting untuk stabilitas mata uang Turki. Setelah itu, rancangan undang-undang tentang Bank Sentral disusun atas kontribusi Prof. Leon Morf dari Universitas Lausanne yang mengkaji rancangan undang-undang tentang bank sentral. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 1567 tentang Perlindungan Nilai Mata Uang Turki disahkan pada tanggal 20 Februari 1930. Dampak negatif depresi ekonomi dunia tahun 1929 mulai terasa di Türkiye, dan spekulasi nilai tukar mata uang asing. transaksi tidak dapat dicegah.

Negosiasi yang diadakan di Majelis Agung Nasional Turki, pembentukan bank sentral, stabilisasi mata uang Turki dan harapan bank-bank nasional untuk berperan dalam meningkatkan kapasitas kredit mereka disambut dengan sangat antusias oleh media (Kazgan et al. .2000: 91). Dalam lingkungan seperti itu, rancangan tersebut diterima oleh Majelis Agung Nasional Turki pada tanggal 11 Juni 1930 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Resmi pada tanggal 30 Juni 1930 dengan nama Undang-Undang Bank Sentral Republik Turki No. 1715. CBRT mengambil alih tanggung jawab pemerintah. pembayaran internal dan eksternal, valuta asing, dan transaksi perbendaharaan. Bank ini mulai beroperasi pada tanggal 3 Oktober 1931 sebagai Bank Sentral ke-38 di dunia.

Mengambil hak istimewa dan monopoli pencetakan uang dari Bank Ottoman, yang telah menjalankan tugas mengumpulkan "Administrasi Düyün-ı Umumiye",⁵ ke CBRT, melambangkan kemandirian ekonomi. Perkembangan perbankan nasional, prevalensi dan validitas pandangan bahwa setiap negara harus memiliki bank sentral, negara-negara yang berpartisipasi dalam Administrasi Dunia Universal berada dalam depresi ekonomi setidaknya sama seperti Türkiye. Konsorsium Bank yang didirikan pada tahun 1930 memberikan stabilitas di pasar valuta asing dan alasan lain pendirian bank tersebut adalah masa persiapan yang panjang untuk pendirian Bank Sentral Nasional di negara tersebut.

Undang-Undang Pendirian Bank Sentral Republik Turkiye

CBRT didirikan sebagai perusahaan saham gabungan yang memiliki hak istimewa untuk menerbitkan uang kertas di Türkiye. Sifat hukum bank ini merupakan pilihan sadar pembuat undang-undang serta kondisi keuangan yang sulit pada masa itu. Kehati-hatian dilakukan untuk memastikan bahwa modal bank tidak seluruhnya menjadi milik negara; Hal ini berkontribusi pada struktur kelembagaan CBRT yang mendukung independensi hukumnya. Inilah alasan mengapa bank tersebut diberi nama "Bank Sentral Republik Turkiye". Tujuannya adalah untuk membantu pembangunan ekonomi negara. Tugasnya adalah menentukan tingkat diskonto, mengatur pasar uang dan peredarannya, melaksanakan pekerjaan perbendaharaan, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin stabilitas masa depan mata uang Turki bersama dengan pemerintah.

Menurut undang-undang baru, Rp.79 T, yang dikeluarkan oleh negara dengan undang-undang no. 701 tanggal 30 Desember 1924 menjadi tanggung jawab bank. Dengan diberlakukannya undang-undang stabilitas di masa depan, bank telah berkomitmen untuk membayar nilai uang ini melebihi nilai yang akan diberikan ke Lira Turki. Sebagai imbalan atas komitmen Bank Dunia ini, Pemerintah juga berhutang uang kepada Bank Dunia. Pemerintah menerbitkan obligasi negara dengan bunga 1%. Hingga undang-undang stabilisasi diberlakukan, bank diwajibkan mengedarkan dokumen tersebut secara tunai. Selain itu, jumlah ini tidak dapat ditingkatkan. Namun, pembelian emas atau uang muka yang dilakukan terhadap emas sebenarnya dapat menghasilkan diskon ganda atas valuta asing dan surat berharga yang dapat diikatkan pada emas. (Diskon Ulang) Modal bank harus disetor penuh agar surat berharga dapat diterbitkan sebagai imbalan atas diskon ganda. Selain itu, jumlah uang kertas yang dapat diterbitkan hingga berlakunya undang-undang stabilitas akan ditentukan oleh komisi yang terdiri dari perwakilan bank-bank dengan modal disetor minimal 4 juta.

Mata uang Turki direncanakan dapat ditukar dengan emas, namun keputusan ini dibatalkan karena dipahami bahwa tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan (Kayla 1981:28). Modal bank adalah Rp.7,4 miliar, dibagi menjadi 150.000 lembar saham masing-masing Rp.49.785. Saham bank dibagi menjadi 4 kelompok. Saham golongan A merupakan milik lembaga pemerintah dan tidak boleh melebihi 15% dari seluruh modal. Ini akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Sentral dalam bentuk emas murni dengan harga pada tanggal penyeteroran. Saham Kelas B diperuntukkan bagi bank nasional yang beroperasi di Turkiye. Maksimal 1,5 juta saham Kelas C telah dialokasikan kepada bank dan perusahaan istimewa selain bank nasional. Saham Kelas D dicadangkan untuk Perusahaan Komersial Turki dan badan hukum dan nyata Turki.

Dana cadangan bank diperkirakan akan disediakan dari tiga sumber. Yang pertama adalah "*Adi l'htiyaç Akçesi*". Itu akan dibentuk dengan alokasi 20% dari keuntungan setiap tahun. Ketika jumlah cadangan ini mencapai 75% dari modal, dana cadangan 10% akan mulai disisihkan dari keuntungan. Yang kedua adalah "*Fevkalade l'htiyat Akçesi*". Itu akan dibentuk dengan alokasi 10% dari sisa laba setelah alokasi cadangan biasa dan saham tertentu kepada pemegang saham dari laba bersih. Yang ketiga adalah "*Hususî l'htiyat Akçesi*". Itu akan terdiri dari sejumlah keuntungan luar biasa yang menguntungkan bank, misalnya 50% dari uang kertas yang sudah kadaluarsa.

Organisasi bank yang didirikan sebagai perusahaan saham gabungan ini terdiri dari Majelis Umum Pemegang Saham, Direksi, Auditor, Komite Diskon dan Kredit, Direksi, Direktorat Jenderal dan manajer cabang. Seperti halnya di setiap perusahaan saham gabungan, Majelis Umum akan mengambil keputusan dasar mengenai keberadaan bank. Seperti memeriksa laporan tahunan, memberhentikan Direksi, menambah modal, melakukan perubahan peraturan pokok, dan mengambil keputusan likuidasi bank. Namun Majelis Umum tidak bebas dalam mengambil keputusan likuidasi. Hal ini tunduk pada ketentuan bahwa bank memenuhi seluruh komitmennya dan disetujui oleh Dewan Direksi (Tekeli dan İlkin 1997: 291–293). CBRT tidak ditujukan untuk menghimpun simpanan swasta, karena merupakan

lembaga penerbit uang kertas dan mempunyai kewenangan untuk menampung simpanan pemerintah tanpa bunga. Karena posisinya di atas bank, bunga yang dapat diberikan kepada simpanan swasta dibatasi hingga 2% menurut undang-undang.

Dalam pembagian laba bersih bank, 20% pertama akan dicadangkan untuk dana cadangan. Sisanya akan dipotong sebagai dividen pertama sebesar 6% dari nilai nominal saham. Maksimal 5% dari sisa keuntungan akan diberikan kepada PNS sebagai tantiem. 10% akan dicadangkan untuk cadangan luar biasa, 50% sisa keuntungan akan diberikan ke bendahara dan 50% kepada pemegang saham sebagai dividen. Bila jumlah sisa setelah 20% dari laba yang dicadangkan tidak cukup untuk membagikan 6% dividen kepada pemegang saham, maka selisihnya akan ditutupi dari dana cadangan luar biasa. Pengasuh Republik, yang ingin menjual sahamnya kepada banyak orang, ingin menjangkau banyak orang dengan menjamin dividen 6% kepada pemegang sahamnya.

Agar status rekening bank mudah diketahui oleh masyarakat, maka dalam undang-undang disebutkan bahwa neraca bank akan diumumkan dalam Berita Resmi, dan setiap minggu akan dibuat buletin yang memuat ikhtisar status rekening dan dikirim ke pers dan bank sentral asing. Di bawah judul neraca, dalam Pasal 80: Dituliskan bahwa neraca bank yang disusun secara jelas setiap tahun, disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan diumumkan dalam Berita Resmi sekurang-kurangnya satu setengah bulan sebelumnya. rapat majelis umum.

Dalam Pasal 81 disebutkan bahwa bank akan menerbitkan buletin yang merangkum posisinya setiap minggu, dan disebutkan bahwa buletin tersebut akan dikirimkan ke bank penerbit, bursa efek, kamar dagang, dan tempat lain di luar negeri melalui jalur resmi. dan surat kabar lainnya. Dalam buletin ini, kas bank, emas, situasi pertukaran emas, jumlah tagihan yang harus "tediye" (dibayar) di dalam, simpanannya di luar negeri, aset lain yang terutang, modalnya, dana cadangan, jumlah uang kertas di peredarannya, utang-utangnya dan harta-harta lain yang terutang harus diperlihatkan. Dengan Undang-Undang Nomor 1715, Kementerian Keuangan diberikan hak untuk mengaudit segala jenis transaksi dan rekening Bank setiap saat.

Bentuk pertama CBRT muncul dalam sistem yang sangat kompleks dalam hal organisasi dan kewenangan. Rancangan undang-undang baru disiapkan sebagai hasil dari perubahan undang-undang ini, yang disusun dengan prinsip pengeluaran uang untuk emas dan telah dilaksanakan selama hampir 40 tahun. Sebagian besar modal bank dipinjam dari American-Turki Investment Corporation (ATIC) mulai tanggal 1 Juli 1930, sebagai imbalan atas konsesi pertandingan, dengan tingkat bunga 6,5% dan jangka waktu 25 tahun, sebesar Rp. 160 juta. Sebagai imbalan atas hutang ini, pemerintah memberikan konsesi kepada ATIC untuk produksi, impor, ekspor dan penjualan korek api, korek api dan bahan-bahan mudah terbakar serupa.

Evaluasi Laporan Kegiatan Lima Tahun Pertama Bank Sentral, Neraca dan Laporan Laba Rugi

Struktur kelembagaan dan kebijakan Bank Sentral Republik Türkiye juga telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu tergantung pada kebutuhan perekonomian dan zamannya. Meskipun melakukan transfer selama 5 tahun pertama proses pendirian,

perkembangan selanjutnya dan peraturan dikeluarkan dari penelitian ini. Selama masa pendirian; untuk kelompok saham kelas (A), yang merupakan 15% dari total saham, lembaga pemerintah dapat membeli emas, saham, perhiasan, dll. Sebagai imbalannya, mereka membeli 2.250.000 saham. Perbankan nasional menunjukkan minat pada saham kelas (B). Ziraat Bank membeli Rp.1 miliar, Real Estate dan Eytam Bank Rp,497.853.000, I's, bank Rp.248.926.500, Dana Keamanan Rp.149.355.900, Bank Industri dan Maadin Rp.124.463.000, totalnya Rp.2 T. Kelas saham ini merupakan 34% dari total saham. Namun, ketika jumlah yang dibutuhkan tidak mencukupi pada hari terakhir untuk penjualan saham, Ziraat, Emlak dan Eytam, dan I's, Banks membentuk serikat perusahaan dan Rp.248.926.500 yang hilang telah diselesaikan. Dengan demikian, porsi saham Grup (B) meningkat menjadi sekitar 37%. Bagian sebesar Rp.746.779.500 dicadangkan untuk saham Kelas (C), 10% di antaranya dicadangkan. Ottoman Bank membeli saham senilai Rp,497.853.000, dan sisanya dibeli oleh Banca Commerciale Italiana dan Deutsche Bank. Akhirnya; Kampanye publisitas dilakukan agar masyarakat membeli saham kelas (D), dan pembelian saham bank oleh pejabat pemerintah didukung.

Menurut Undang-Undang Pendirian, tujuan utama Bank Sentral adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Bank telah ditempatkan pada posisi di mana ia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan uang kertas dari satu sumber. Bank juga berwenang untuk menetapkan tingkat diskonto ulang, mengatur pasar uang dan peredaran uang, melakukan transaksi perbendaharaan dan mengambil segala tindakan untuk melindungi nilai mata uang Turki. Selain itu, bank juga memikul tanggung jawab bendahara negara. Dalam rezim nilai tukar tetap yang diterapkan pada periode ini, kewenangan penentuan nilai tukar berada di tangan Pemerintah. Instrumen kebijakan utama Bank Sentral adalah rediscount rate. Tahun 1930-an adalah tahun-tahun ketika independensi Bank Sentral menjadi prioritas utama dan inflasi tetap berada pada tingkat rendah.

Laporan Periode Rekening ke-1 tahun 1932 dan 31.12. Neraca dan Laporan Laba Rugi 1932

Akuntansi Bank Sentral sangat berbeda dibandingkan dengan lembaga lain. Beberapa rekening yang tidak berada di bank komersial dimasukkan dalam catatan Bank Sentral. Jelas bahwa suatu bagian rekening yang terlihat pada rekening bank lain juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Uang, yang merupakan aset bagi setiap orang, merupakan tanggung jawab Bank Sentral. Oleh karena itu, neraca CBRT bekerja berlawanan arah dibandingkan neraca lembaga lain. Semua uang kertas di mesin kasir ditambahkan ke rekening uang kertas saat ini. Perbedaan lainnya adalah akun profit. Setelah laba yang dihasilkan sepanjang tahun dicadangkan sebagai cadangan dan dibagikan kepada pemegang saham, sisa T.C. ditransfer ke bendahara. Neraca Bank Sentral merupakan sumber informasi penting yang dibentuk oleh interaksi kebijakan moneter dan sistem keuangan. Oleh karena itu, neraca perlu disusun dengan cara yang jelas dan dapat dipahami dan hubungannya dengan agregat moneter yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter harus ditetapkan.

Pada periode pembukuan pertama tahun pertama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1932, laporan dewan administratif dan komisi audit disampaikan kepada rapat

umum. Dampak krisis ekonomi terus berlanjut dalam hubungan internasional. Keluarnya pound Inggris dari prinsip diubah menjadi emas pada tanggal 21 September 1931, 12 hari sebelum CBRT mulai beroperasi, tidak menimbulkan kerugian apa pun, tidak seperti Bank Sentral lainnya. Türkiye terlindungi dari kerugian seperti melimpahnya barang, rendahnya penjualan, dan pengangguran akibat Depresi Besar di negara lain, namun terkena dampak rendahnya harga produk pertanian. Dibandingkan tahun 1929, pada tahun 1932 harga kemiri dan opium turun 73%, gandum 63%, kapas 48%, dan tembakau 50%. Penurunan pendapatan ekspor dibarengi dengan kontraksi volume impor.

Menyusutnya perdagangan internasional dan memburuknya neraca pembayaran menunjukkan perlunya memanfaatkan peluang produksi di dalam negeri. Langkah-langkah ini didukung oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, diinginkan untuk mencapai tujuan keseimbangan mendasar dan permanen dalam kehidupan ekonomi. Namun karena menyusutnya volume perdagangan, uang yang beredar terakumulasi sebagai simpanan di bank, sebelum dapat menemukan lapangan kegiatan. Tidak ada permintaan diskon ulang untuk surat berharga selain surat utang negara.

Meskipun anggaran tahun 1931–32 berjumlah 186,7 juta lira, anggaran tahun 1932–33 yang dibuat berjumlah lebih dari 169,1 juta lira. Ada penurunan pendapatan pajak yang signifikan (Rp.201 juta). Akun-akun dalam aset neraca tanggal 31.12.1932 adalah: Kas, Koresponden Domestik, Koresponden Asing, Uang Muka, Surat Perbendaharaan Negara, Buku Esham dan Obligasi, Buku Diskon, Perlengkapan, Pemegang Saham, Lain-Lain, dan Rekening Luar Tugas. Akun-akun yang termasuk dalam kewajiban neraca adalah: Modal, Uang Kertas yang beredar, Deposito, Komitmen Mata Uang Asing, Lain-Lain, Laba, Rekening Luar Saldo.

Saldo rekening tunai adalah Rp.16.927.151.108.

Saldo transaksi emas akhir tahun sebesar Rp.8.964.162.000.

Uang kertas yang beredar: Rp.73.995.269.353.

Selama tahun akuntansi, Rp.1.951.708.227 dikumpulkan dari obligasi sebesar Rp.78.975.459.353 yang diserahkan oleh Departemen Keuangan ketika bank tersebut didirikan. Dengan demikian, saldo rekening pada akhir tahun adalah: Rp.1.651.479.019 dari Rp.1.951.708.227 dimana Rp.77.106.504.385 dikumpulkan pendapatan dari surat berharga wajib bank. Berdasarkan keterangan di laporan, akun Laba Rugi yang ditautkan ke neraca dibagi menjadi Penggelapan dan Debit. Dalam tabel yang dinyatakan sebagai Rp.10.961.232.372, 24 kuruş, laba bersih periode akuntansi pertama adalah Rp.733.010.482 dan 37 kuruş.

Ukuran neraca CBRT adalah Rp.112.848.839.400 pada akhir tahun 1932 (Total Akun Aset di Luar Rak: Rp.170.816.163.193, 06–Rp.57.391.594.-14 = Rp.170.873.554.767). Sebagian besar dari jumlah tersebut terdiri dari uang kertas yang beredar. Hingga akhir tahun, uang kertas yang beredar berjumlah Rp.81.424.471.500. Rp.7.420.334.100 di antaranya ada di brankas. Oleh karena itu, uang kertas yang dicetak dicetak dengan imbalan uang tunai, dokumennya diterima dari bendahara.

Kewajiban CBRT sebagian besar terdiri dari Rp.77.091.793.200 surat perbendaharaan, yang dokumennya diberikan kepadanya dengan imbalan uang tunai. Harta kekayaan CBRT terdiri dari surat perbendaharaan dan surat promes. Pada hari pendirian CBRT, Rp.79.034.028.300 obligasi (dokumen tunai: Uang Kertas) diserahkan ke CBRT dengan bunga 1%, dan Rp.1.942.235.100 dikumpulkan dalam tahun buku, dan saldo akhir tahun sebesar Rp.77.091.793.200 telah mengalami kemunduran. Bagian penting kedua dari aset tahun 1932 adalah portofolio sekuritas senilai Rp.14.043.853.800.

Laporan Akhir Tahun Periode Akuntansi Kedua Tahun 1933

Laporan tersebut diawali dengan penjelasan mengenai kondisi perekonomian secara umum dan bagaimana kondisi internal dan eksternalnya. Pada tahun 1933, meskipun terdapat beberapa perkembangan positif seperti berkurangnya pengangguran, berkurangnya stok barang dan meningkatnya harga beberapa barang, jejak krisis tahun 1929 masih terus berlanjut. Pemisahan dolar AS dari emas pada 19 April 1933, setelah pound dan beberapa mata uang lainnya, menambah masalah keuangan dalam perekonomian dunia. Dalam konteks ini, Konferensi Uang dan Ekonomi diadakan di London pada tanggal 12 Juni 1933, dengan partisipasi lebih dari 60 negara, mengenai isu-isu seperti mengambil tindakan yang diperlukan, kredit uang, kebijakan bea cukai, pergerakan modal, harga, dll.

Konferensi dibubarkan pada tanggal 27 Juli 1933, tanpa penyelesaian perselisihan. Perjanjian kliring, yang aslinya dibuat pada tahun 1931, semakin populer. Telah dinyatakan bahwa Türkiye sedang berupaya meningkatkan perdagangan luar negerinya dengan perjanjian ini. Volume perdagangan luar negeri juga mengalami kontraksi. Jumlahnya menurun menjadi Rp.204.681.699.000 pada tahun 1929, Rp.148.904.691.000 pada tahun 1930, Rp.126.444.485.100 pada tahun 1931, Rp.93.227.284.800 pada tahun 1932, dan Rp.85.059.937.200 pada tahun 1933.

Nilai mata uang nasional tetap terjaga tanpa guncangan sedikit pun sejak tahun 1930. Pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan sikap tegas pemerintah memberikan kepercayaan kepada para tabungan dan pemilik modal di negara tersebut. Anggaran tahun 1932–1933 ditutup tanpa defisit, dan prinsip ini diikuti ketika anggaran tahun 1934 sedang disusun. Dari obligasi Rp.5.976.108.000 yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur kereta api Ergani, porsi Rp.3.984.072.000 yang diekspor ke pasar pada tahun 1933 telah terjual seluruhnya. Undang-undang tentang peredaran uang logam baru seperti Rp.498,01 perak dan nikel diterbitkan.

Rendahnya tingkat harga bahan pertanian juga terus berlanjut pada tahun-tahun ini. Telah dinyatakan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk membangun dan memajukan industri dan melindungi pertanian. Di akhir uraian situasi ekonomi umum ini disebutkan bahwa cabang dibuka di Samsun dan Mersin, menyusul pembukaan cabang di Istanbul dan Izmir. Direksi dibebaskan dengan pernyataan bahwa transaksi dan kekayaan bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pos-pos neraca serta laporan laba rugi telah sesuai dengan catatan bank. Pada akhir tahun 1932, dengan penambahan Rp.11.121.960.000 pada tahun 1933 terhadap Rp.81.433.206.577 uang kertas yang beredar, termasuk uang kertas di brankas, totalnya mencapai Rp.92.555.241.574. Namun dari jumlah tersebut, pada

tahun 1933 terdapat Rp.12.526.082.729 uang kertas yang ditarik dari peredaran, dan sisanya Rp.80.014.641.885. Berdasarkan keterangan dalam laporan, total uang kertas yang beredar di pasaran adalah Rp.80.029.050.282, Rp.6.908.363.417 di brankas pada akhir tahun, dan Rp.71.115.685.200 lira jika dikurangi lira.

Uang kertas yang beredar sebenarnya, yaitu Rp.82.171.485.000 pada akhir tahun 1931 dan Rp.73.705.332.000 pada akhir tahun 1932, mencapai Rp.68.725.242.000 pada Agustus 1933 dan meningkat menjadi Rp.72.709.314.000 pada akhir tahun. Dengan emas baru ditambahkan pada tahun 1933 menjadi Rp.10.707.193.500 pada tahun 1932, totalnya mencapai Rp.12.395.444.010 pada akhir tahun. Penyimpanan valuta asing: Rp.2.843.631.390 di koresponden eksternal, Rp. 2.075.193.906 di dompet diskon, Rp. 861.545.062 di rekening uang muka, total Rp. 5.780.316.290. Dana pencegahan telah dimasukkan dalam pos-pos neraca sejak awal tahun 1933. Jumlah ini, yaitu Rp. 173.834.087, akan menjadi Rp. 330.586.017 pada tahun 1934 dengan persetujuan majelis umum pada pembagian dividen tahun 1933.

Dalam laporan tersebut disebutkan dalam laporan laba rugi bahwa terdapat dividen sebesar Rp. 671.863.695 untuk tahun 1933, dari jumlah tersebut, cadangan hukum dibagi menjadi 5% saham pegawai negeri dan 10% cadangan luar biasa, setelah itu Dividen 6% dipotong untuk pemegang saham. Separuh dari sisa Rp. 190.223.120 dicadangkan untuk saham treasury dan separuh lainnya sebagai dividen tambahan kepada pemegang saham (CBRT 1934).

Laporan Periode Rekening Ketiga Tahun 1934

1929 Pada tahun 1934, tahun ketika dampak Depresi Besar masih terasa, rendahnya harga bahan mentah, pengangguran dan kontraksi perdagangan internasional terus berlanjut. Tindakan-tindakan seperti tindakan proteksionis, larangan bea cukai, pengumuman moratorium, transaksi nilai mata uang, tidak memberikan mata uang asing, pajak, dan perubahan tarif barang ekspor, mempengaruhi perdagangan internasional.

Situasi di dalam negeri menjadi lebih positif. Dalam produksi pertanian, hasil beberapa produk lebih baik dibandingkan produk lainnya dibandingkan tahun sebelumnya. Ada dampak negatif dalam produksi jagung, gandum hitam, oat, wijen dan opium, anggur dan buah ara, namun ada hasil positif dalam produksi sereal, bit, kentang, mohair, dan minyak zaitun.

Dengan tindakan yang diambil negara, produk pertanian dijual dengan harga lebih baik. Fondasi industrialisasi diletakkan oleh negara. Fondasi pabrik tenun di Kayseri dan Ereglı, pabrik kertas di Izmit, botol dan kaca di Paşabahçe, belerang di Keçiborlu, dan pabrik batu bara kokas di Zonguldak diletakkan. Pabrik gula Turhal mulai bekerja. Pabrik minyak mawar Isparta dibuka dan pabrik susu bubuk didirikan di Kars. Pabrik kain Bakırköy diperluas dan direnovasi.

Diskon tarif yang dilakukan pada perkeretaapian efektif dalam meningkatkan volume perdagangan dalam negeri. Anggaran untuk tahun anggaran 1933–1934 ditutup secara seimbang. Pendapatan pajak yang luar biasa dan jumlah 4 juta milik pinjaman Ergani berkontribusi pada keseimbangan ini. Dengan perjanjian kliring yang dibuat dengan 13 negara, ekspor ke negara-negara tersebut mencapai 62% dari seluruh ekspor dan 69% impor.

Dengan pembelian emas pada tahun 1934, nilai saat ini Rp. 11.183.620.100 pada akhir tahun mencapai 19.522 kg. Beberapa dari emas ini terkadang disimpan sebagai cadangan untuk pasokan devisa. Utang yang segera dijamin dalam mata uang asing ini berjumlah Rp. 393.634.049 pada akhir tahun. Hutang ini juga meningkat menjadi Rp. 2.390.088.000 pada tahun 1933.

Uang kertas yang beredar pada akhir tahun 1933, bersama dengan yang ada di brankas, berjumlah Rp. 80.017.192.987 pada akhir tahun berjalan, dan Rp. 84.117.172.687 bila ditambahkan Rp. 4.481.415 pada tahun 1934. Ketika Rp. 2.532.202.134 ditarik dari peredaran adalah jika dikurangi dari jumlah tersebut, terdapat Rp. 81.966.716.066 uang kertas lira pada akhir tahun. Untuk mencapai jumlah uang kertas yang benar-benar beredar di pasaran, dari jumlah tersebut perlu dikurangi Rp. 3.214.858.571 uang kertas lira yang ada di brankas. Hasilnya, terdapat Rp. 78.751.857.993 uang kertas lira yang beredar pada tahun 1934. Dari tahun 1933 hingga 1934, lebih dari 11 juta uang kertas ditemukan beredar. Uang kertas ini dipasarkan terutama melalui buku diskonto dan obligasi serta transaksi di muka. Tahun ini disediakan dana sebesar Rp. 24.896.750 untuk biaya pencetakan ulang uang kertas lama dan usang.

Jumlah aset di neraca tanggal 31 Desember 1934: 403.198.964.96 lira. Di neraca, dana cadangan sebesar Rp. 330.586.017. Ketika usulan pembagian keuntungan tahun 1934 disetujui, jumlah ini akan meningkat menjadi Rp. 511.257.748. Pada rekening laba rugi yang terbagi atas penggelapan dan gadai, laba bersih tahun 1934 adalah Rp. 757.291.913. Bagiannya akan menjadi 20% sebagai dana cadangan dan 6% sebagai dividen kepada pemegang saham. Dari jumlah sisanya, 5% akan dialokasikan sebagai saham pegawai negeri dan 10% sebagai saham cadangan luar biasa, dan sisanya akan dibagi dua dan menjadi milik bendahara dan pemegang saham (CBRT 1935).

Laporan Periode Akun Keempat Tahun 1935

Situasi dunia secara umum, dengan tanda-tanda indeks produksi mulai bangkit, namun harga-harga meningkat, pengangguran menurun, dan perdagangan internasional mulai bangkit kembali; Selain pendapat positif bahwa dampak krisis dunia telah berkurang, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa krisis ini dapat dihilangkan dengan tindakan dan obat-obatan di mana-mana. Selain permasalahan ekonomi, permasalahan politik pun mulai bermunculan.

Situasi moneter, yang penting bagi Bank Sentral, tidaklah damai dan stabil. Dolar tetap stabil; sterling tetap stabil, namun franc Luksemburg, florin Danzig dan khususnya mark Jerman kehilangan nilainya. Karena kebijakan perak yang dianut Amerika Serikat, Tiongkok meninggalkan prinsip koin perak. Mata uang Perancis, Swiss, dan Belanda, yang tidak menyimpang dari emas, tetap menjaga stabilitasnya meskipun emas mengalami kerugian yang signifikan. Bank sentral dan negara bagian mulai mengumpulkan lebih banyak emas di brankas mereka, dan pada tahun 1935 angka ini mencapai 20.000 ton.

Produksi pertanian dalam negeri meningkat dan harga juga meningkat. Implementasi program industri lima tahun terus berlanjut. Kombinasi kain Kayseri Sümerbank diresmikan; pembangunan pabrik kapas Eregli dan kertas Izmit telah selesai. Fondasi pabrik kapas di Nazilli

dan pabrik kain wol di Bursa, Merino diletakkan. Pabrik minyak mawar dan belerang Keçiborlu di Isparta mulai beroperasi. Lembaga penelitian dan eksplorasi mineral serta direktorat jenderal survei sumber daya tenaga listrik dan administrasi pembangunan dibentuk untuk menyediakan listrik murah bagi negara. Etibank mulai beroperasi menjelang akhir tahun untuk membiayai dua isu penting ini.

Perkembangan pertanian dan industri Turki yang seimbang merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya mencoba menanam kapas berserat panjang yang dibutuhkan pabrik kain, serta memproduksi merino di Bursa dan Karacabey. Pajak bangunan dan hewan dikurangi, utang pertanian dicicil, undang-undang dibuat untuk pendirian koperasi penjualan pertanian, harga garam diturunkan, pembentukan unit untuk melindungi produksi anggur... telah menjadi indikator keberhasilan negara. Bantuan di bidang pertanian. Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan produksi dan konsumsi secara seimbang. Oleh karena itu, harga gula, batu bara, dan semen turun drastis.

Sebanyak 19.522 kg emas, yaitu Rp. 13.693.212.500 pada tahun 1934, meningkat menjadi Rp. 14.689.082.500 pada akhir tahun 1935. Sebagian dari emas tersebut digadaikan dan diperoleh mata uang asing. Terdapat Rp. 81.040.727.260 uang kertas lira yang beredar pada akhir tahun. Total aset di neraca tanggal 31.12.1935: Rp. 146.779.602.752.

Laporan Periode Akun Kelima Tahun 1936

Perang antara Italia dan Abyssinia serta revolusi di Spanyol menunjukkan gejolak yang terjadi di dunia. Kemampuan umat manusia untuk berjalan dengan percaya diri menuju perdamaian dan kemakmuran yang dibutuhkannya, serta keamanan yang dicari oleh tenaga kerja dan modal, juga tidak dapat diwujudkan pada tahun 1936. Volume perdagangan internasional mulai meningkat dan pengangguran semakin berkurang. Namun, situasi ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran negara untuk perlombaan senjata, kredit, dan pekerjaan umum. Selain Belgia, tidak ada lagi negara yang terikat dengan emas. Depresiasi franc Prancis menjadi emas berdampak pada mata uang Swiss dan Belanda, begitu pula lira Italia dan mata uang Cekoslowakia terdepresiasi. Mata uang Latvia dan Yunani terikat pada sterling. Menjauh dari ukuran emas mendukung formasi yang disebut koin pengontrol valuta asing.

Ini merupakan tahun yang baik dalam hal produksi pertanian di negara ini, dan perkembangannya sudah terlihat. Sebagai hasil dari keberhasilan implementasi rencana industri, produksi industri juga meningkat. Meskipun terjadi kenaikan harga grosir, biaya hidup tidak meningkat. Angka ekspor produk pertanian juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sebuah pabrik kertas memulai produksinya di Izmit. Pembangunan pabrik tekstil dan wol terus berlanjut. Kesepakatan dibuat dengan industrialis dan investor Inggris untuk mendirikan pabrik di Karabük.

Ketika Rencana Industri Lima Tahun Pertama dilaksanakan, prinsip-prinsip Rencana Lima Tahun Kedua ditetapkan. Ini akan diperuntukkan bagi industri pertambangan, tambang batu bara, pembangkit listrik, tanah, makanan, kimia, mekanik, dan maritim. Pada tahun 1936, nilai ekspor per ton meningkat. Pembangunan jalur kereta api terus berlanjut, dan Jalur Kereta Api Timur juga dibeli dan dinasionalisasi. Pada akhir tahun, total jaringan kereta api

mencapai 6.284 km. Untuk jalur Erzurum-Sivas yang menelan biaya Rp.30.000.000, dilakukan peminjaman pesanan ke-3 sebesar Rp.45.000.000

Dalam laporan bertajuk status emas itu tertulis total 21.103 kg emas pada akhir tahun adalah Rp. 6.881.424.577. Telah disebutkan bahwa devisa diperoleh dari emas tersebut dengan memberikan jaminan bila diperlukan. Dalam hal mata uang asing disebutkan bahwa daerah pertukaran dengan mata uang asing bebas kembali menyempit pada tahun 1936 dengan adanya perjanjian kliring dengan 3 negara. Devisa yang diperoleh melalui perjanjian kliring dengan 20 negara dan perdagangan dengan negara lain mengalami peningkatan. Namun, langkah-langkah penghematan yang diterapkan oleh pemerintah juga berkontribusi terhadap situasi ini. Pada tahun 1936, tingkat diskonto adalah 5,5%.

Uang kertas yang beredar berjumlah Rp. 99.009.683.206, dengan tambahan Rp. 13.444.245.000 ditambah dengan Rp. 99.009.683.206 uang kertas yang beredar pada tahun 1935. Sepanjang tahun ini, Rp. 5.555.274.567 uang kertas lira ditarik dari peredaran, dan sisa uang kertas Rp. 93.454.408.639 . Untuk mendeteksi uang kertas yang beredar di pasar sebenarnya, uang Rp. 3.448.172.986 perlu dikeluarkan dari brankas CBRT. Dengan demikian, hingga akhir tahun, uang kertas yang beredar sebanyak Rp. 90.006.235.652. Dana cadangan bank pada akhir tahun 1936 adalah Rp. 772.387.809. Jika usulan pembagian keuntungan disetujui, jumlahnya akan menjadi Rp.2,105,172,40. Sebagai hasil dari keputusan yang diambil dalam rapat Majelis Umum luar biasa pada tanggal 4 Februari 1937 dan perubahan undang-undang bank, cadangan khusus dimasukkan dalam dana cadangan setelah tahun 1937. Sejak awal tahun 1936, jumlah ini adalah Rp. 1.048.238.819 di akhir tahun.

Keuntungan dari transaksi tahun 1936 adalah Rp.2.203.535,27. 20% dari jumlah ini akan dipotong dari dana cadangan Rp.440,707,05 dan 6% kepada pemegang saham Rp.630,000, jumlah keduanya (Rp.1,070,707,05) akan dipotong dari Rp. 1.097.217,20. Dari sisa Rp. 564.074,70, Rp. 22.541,09, dan 10% dana cadangan luar biasa akan dialokasikan untuk pegawai negeri (Rp. 56.407,072). Jika dijumlahkan keduanya adalah Rp. 78.948,092, separuh dari sisa Rp. 485.126,120 adalah Rp. 242.563,060 untuk bendahara dan separuh lainnya adalah Rp. 240.552,000 untuk pemegang saham. Dinyatakan bahwa pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan Pasal 88 UU Bank dan Pasal 94 peraturan tersebut.

Ekonomi Turki, Kebijakan Ekonomi Statistik, dan CBRT

Dengan berdirinya Bank Sentral Republik Turkiye, Türkiye mendominasi mata uangnya sendiri. Undang-undang tentang Perlindungan Nilai Mata Uang Turki diterbitkan dalam Berita Resmi pada tanggal 25 Februari 1930 di tahun yang sama dan TL dipisahkan dari rezim pertukaran bebas. “Dalam laporan tahun 1933 disebutkan bahwa hal ini dilakukan dengan tindakan yang diambil sejak tahun 1930 dengan pernyataan bahwa “negara kita adalah salah satu negara yang berusaha menjaga kestabilan uangnya”. Pada tahun 1931, Türkiye menghubungkan impornya dengan sistem kuota, dan perdagangan luar negeri dengan perjanjian kliring yang dimulai dengan Perancis pada tahun 1932 diperluas ke perdagangan dengan negara lain. Berkat langkah-langkah yang diambil, nilai eksternal TL telah stabil. Suku bunga, yang tetap dalam sistem variabel bebas hingga tahun 1933, dialihkan ke sistem yang diawasi di mana bunga maksimum ditentukan oleh Undang-Undang Urusan Peminjaman,

yang diberlakukan pada tahun 1933. Jadi, meskipun Türkiye mempunyai hak atas hak milik, telah mengendalikan tingkat suku bunga, sistem valuta asing, modal keuangan dan perdagangan luar negeri; Negara ini mampu mengikuti jalan yang diikuti oleh negara-negara independen di dunia selama tahun-tahun krisis.

Pada tahun 1930-an, instrumen kebijakan moneter langsung seperti plafon bunga simpanan dan pinjaman serta kewenangan untuk menentukan cadangan wajib tidak berada di bawah kewenangan CBRT. Penerapan cadangan wajib dimulai pertama kali di Türkiye pada tahun 1868 dengan kewajiban untuk menyimpan setidaknya 10% dari uang yang dikumpulkan di brankas, yang termasuk dalam pasal 8 Peraturan Dana Keamanan Istanbul. Peraturan hukum pertama mengenai cadangan wajib (persyaratan cadangan simpanan) di Türkiye tertanggal 30.05.1933, yang terlihat seperti rasio likuiditas.

Diperkenalkan dengan UU No. untuk menyetor ke CBRT dikenakan. Bank wajib membeli Obligasi Pinjaman Dalam Negeri Negara atau surat berharga yang menghasilkan pendapatan seperti obligasi tersebut dengan cadangan wajib, ketentuannya ditetapkan sebesar 20%–30% untuk giro dan 10% untuk deposito berjangka sampai tahun 1936. 15% ditetapkan sebagai a suku bunga tunggal untuk giro. Menurut Pasal 26 undang-undang ini, kewajiban untuk menyetorkan cadangan yang disisihkan ke CBRT tidak diatur, dan bank diperbolehkan untuk menggunakan cadangan tersebut. Dalam konteks ini, penerapan persyaratan cadangan pada tahun 1930an dan tahun-tahun berikutnya bukan sebagai alat kebijakan moneter, melainkan dengan motif pembiayaan publik dan perlindungan penabung.

Tahun 1930-an adalah tahun ketika kebijakan ekonomi statis digunakan secara intensif. Namun, pada tahun-tahun awal, undang-undang pendirian CBRT secara signifikan membatasi pemberian pinjaman CBRT kepada masyarakat. UU Pendirian CBRT No. 1715 tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mencakup diskonto surat utang negara dan kewenangan perusahaan dan lembaga sektor publik untuk mendiskontokan kembali surat utang mereka dengan jaminan perbendaharaan atau memberikan uang muka sebagai imbalannya. Kekurangan-kekurangan tersebut masing-masing diatur kembali dengan menambahkan satu ayat pada pasal ke-38 UU Pendirian dengan UU Nomor 2062 yang diundangkan pada tahun 1931 dan dengan mengubah pasal ke-38 UU CBRT dengan UU Nomor 3492 yang diundangkan pada tahun 1938:

“Pasal 38- Surat utang pertanian yang jangka waktunya tidak lebih dari 9 bulan juga dapat diterima dengan potongan harga, seperti halnya surat utang komersial. Surat-surat pertanian dengan jangka waktu maksimum 9 bulan juga dapat diterima untuk didiskon, asalkan jumlahnya sama dengan 15% dari modal disetor kami dan tidak melebihi 15% dari dompet diskon (komersial) kami. Namun, Dewan Bank dapat meningkatkan modal disetor menjadi 25% jika “dianggap sesuai”. Sebagai hasil dari intervensi negara yang efektif dalam perekonomian pada tahun-tahun ini, pembatasan yang diperkirakan untuk surat utang negara dilonggarkan pada tahun 1936. Pada tahun 1938, Bank Sentral diberi wewenang untuk mendiskontokan surat utang negara yang dijamin oleh perbendaharaan perusahaan sektor publik dan lembaga atau memberikan pinjaman sebagai imbalan atas tagihan ini.

Pada periode 1930–1939, ketika kebijakan moneter dan anggaran berimbang diterapkan, tidak ada perilaku yang menyebabkan ekspansi uang dan kredit. Kesehatan keuangan dan anggaran berimbang dianggap sebagai prinsip yang menjamin stabilitas rezim. Ia memperoleh kekekalan garis “anggaran berimbang dan uang solid”, di sisi lain, dari kekekalan volume uang. Volume uang kertas hampir tidak berubah pada tahun 1930-an, dan hal ini sangat diperhatikan. Uang selalu mahal, suku bunga tinggi.

Pengaturan kelembagaan, termasuk UU CBRT tahun 1930, merupakan langkah yang diambil untuk menetapkan prinsip “anggaran berimbang dan uang yang sehat”. Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang berorientasi pada “anggaran berimbang” yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan membiayai pengeluaran serta menjaga pengeluaran pemerintah tetap terkendali. Kebijakan ini merupakan pengaturan kelembagaan formal yang mencegah ekspansi moneter yang akan berujung pada inflasi.

Legislator pada awalnya mengikat rezim emisi CBRT dengan peraturan yang sangat ketat karena takut terhadap inflasi. Pada tahun 1930-an, di satu sisi terdapat upaya untuk menghilangkan dampak krisis tahun 1929 dan sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan negara. Dalam menghadapi kontraksi permintaan domestik akibat kebijakan moneter yang ketat, pemerintah memaksa pegawai negeri untuk menggunakan barang-barang dalam negeri. Terhadap kenaikan harga yang mungkin disebabkan oleh penerapan tersebut, praktik pengendalian harga secara umum telah dikedepankan.

Sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk industrialisasi negara diwujudkan melalui cara lain, bukan melalui pembiayaan terbuka. Keseimbangan moneter dipertahankan dengan kebijakan keseimbangan pergerakan modal pada periode tersebut. Jumlah uang beredar hanya sedikit meningkat sejak awal tahun 1930-an hingga 1939. Dibandingkan dengan total pendapatan nasional yang meningkat sebesar 5–6% per tahun pada harga konstan, jumlah uang beredar sedikit meningkat. Pemahaman yang muncul pada tahun 1930-an ini menjelma menjadi kebijakan ekonomi dan membentuk kerangka umum kebijakan ekonomi Turki sepanjang sejalan dengan kondisi dunia dan dalam negeri selama setengah abad berikutnya (Tabel 10.1).

Tabel 10.1 Indikator dasar perekonomian periode 1932–1936

	1932	1933	1934	1935	1936
Mata Uang Cadangan	78.673	82.507	85.395	85.943	93.462
Penerbitan	73.943	73.096	78.673	81.014	90.026
Deposit bank	4.083	9.410	3.834	3.734	2.738
% Kenaikan Penerbitan	5.029	-846	1.195	2.190	4.581
Inflasi	-2.838	-7.917	248	5.527	2.489
Tingkat Pertumbuhan %	-5.327	7.867	2.987	-1.493	11.552
Paritas Dolar/TL	1.145	672	632	622	622
Bunga Diskon Ulang Jangka Pendek	3.983– 3.485	3.734– 2.987	2.738	2.738	2.738

10.4 KESIMPULAN

Bank Sentral merupakan salah satu lembaga keuangan terpenting yang melaksanakan transaksi pembiayaan penyelenggaraan negara. Bank Sentral adalah lembaga yang menghasilkan uang atas nama negara dan menjalankan kebijakan moneter. Kebutuhan sumber daya pendanaan perang oleh pemerintah telah berpengaruh dalam pembentukan bank sentral sebagai perusahaan saham gabungan di dunia.

Proses tersebut, yang ditunjukkan dengan alasan mengapa bank sentral tidak didirikan atau tidak dapat didirikan pada masa Kesultanan Utsmaniyah, dengan jelas mengungkapkan tujuan didirikannya Bank Sentral Republik Türkiye. Dalam sejarah proses perkembangannya, tugas dan fungsi dasar Bank serta pentingnya Bank dalam perekonomian negara sudah jelas. Tugas bank sentral mengalami peningkatan sepanjang sejarah. Berbeda dengan bank lain, bank ini didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan mencari keuntungan.

Kedaulatan Turki atas mata uangnya sendiri diwujudkan dengan berdirinya Bank Sentral pada tahun 1930. Fenomena ini juga menjadi indikator kemandirian perekonomian nasional. Pada tahun 1930-an, ketika kebijakan anggaran perimbangan uang diterapkan, nilai eksternal TL menjadi stabil berkat peraturan hukum dan langkah-langkah yang diambil. Sementara Türkiye mempunyai hak atas hak milik; Ia mengendalikan tingkat suku bunga, tatanan valuta asing, modal keuangan dan perdagangan luar negeri dan mengikuti jalur independensi dunia selama tahun-tahun krisis.

Undang-undang Bank Sentral pertama, bernomor 1715, diterapkan selama hampir 40 tahun. Kadang-kadang, karena kesulitan dalam implementasi (seperti uang kertas yang setara dengan emas), barang-barang terkait dihapus, dan perubahan dilakukan. Mengingat batasan kajiannya adalah tahun-tahun pertama berdirinya CBRT, maka kerangka perubahan tersebut disesuaikan dengan tahun-tahun yang dibahas.

BAB 11

PERSPEKTIF SEJARAH DENGAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI

11.1 PENDAHULUAN

Turki merupakan peserta yang sangat penting dalam sistem ekonomi internasional sejak lama. Seiring berjalannya waktu, kekuatan globalisasi mengharuskan negara ini semakin terintegrasi dengan dunia melalui berbagai jalur. Salah satu dan mungkin cara paling penting dari integrasi ini adalah perdagangan internasional yang berjalan dalam berbagai bentuk seperti perdagangan internasional, investasi asing langsung. Selain itu, kewajiban perpajakan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam semua kegiatan ekonomi. Tidak diragukan lagi, semakin berkembangnya integrasi ekonomi internasional di Turki, semakin besar pula kebutuhan untuk memahami rezim pajak di Turki. Dalam bab ini, pendekatan tradisional terhadap peraturan perpajakan Turki akan dijelaskan, dan lingkungan perpajakan saat ini akan diperkenalkan secara umum. Mengingat sifat hubungan perdagangan internasional, peran peraturan akuntansi diperkenalkan dalam kerangka peraturan perpajakan tersebut.

11.2 INFORMASI UMUM TENTANG PAJAK

Sebelum melihat rincian sistem perpajakan Turki, ada baiknya kita menyoroti beberapa informasi umum tentang pajak. Dengan memasukkan tiga karakteristik tersebut, pajak dapat didefinisikan sebagai “pungutan wajib yang dikenakan oleh suatu organ pemerintah untuk kepentingan publik.” Yang pertama dan terpenting, esensi penting di sini adalah keterpaksaan; hukum memberikan paksaan ini (Williams et al. 2000). Hakikat politik adalah tujuan umum. Selain itu, badan pemerintah membebankan pajak untuk keperluan publik tersebut. Tujuan umum utama pada dasarnya dapat diartikulasikan sebagai.

- A. Menyediakan pendapatan untuk menutupi pengeluaran pemerintah,
- B. Redistribusi kekayaan dan pendapatan melalui peningkatan tarif pajak dan layanan kesejahteraan secara progresif,
- C. Mengontrol perekonomian dengan mengenakan pajak atas permintaan (misalnya, bea masuk yang tinggi untuk melindungi beberapa produk dalam negeri)
- D. Tujuan kontrol sosial (misalnya mengenakan pajak terhadap minuman beralkohol dan produk tembakau)
- E. Memastikan masyarakat membayar harga penuh atas beberapa barang dan jasa (yaitu, gagasan utama di sini adalah membayar pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Misalnya, ketika membeli tas, konsumen juga harus membayar harga pencemaran tersebut).

Untuk menerapkan pajak untuk tujuan ini dengan cara yang terbaik, beberapa prinsip perlu diikuti. Adam Smith dalam bukunya yang terkenal "*Wealth of Nations*" menetapkan empat prinsip utama untuk pajak yang lebih baik.

1. Pajak harus diterapkan sebagai kontribusi terhadap tingkat pendapatan dan kekayaan pribadi.
2. Pajak harus pasti, tidak sembarangan.
3. Semua pajak harus dilaksanakan dengan cara yang paling nyaman.
4. Semua biaya harus ditekan seminimal mungkin dalam penegakan pajak.

Selain itu, dengan mempertimbangkan perdagangan internasional dan perekonomian global, disarankan agar perpajakan juga harus kompetitif (Williams dkk. 2000). Setelah informasi umum ini, sistem perpajakan Turki akan dijelaskan secara rinci dengan implikasi historis dan terkini serta hubungannya dengan peraturan akuntansi.

11.3 LATAR BELAKANG SEJARAH

Pada dasarnya, peraturan perpajakan Republik Turki diwarisi dari masa akhir Kekaisaran Ottoman. Oleh karena itu, tampilan terakhir struktur pajak Kesultanan Utsmaniyah harus disebutkan sebagai kata pengantar.

Periode Ottoman Akhir

Pada akhir masa Ottoman, perekonomian terutama didasarkan pada produksi pertanian. Karena pertanian merupakan sumber utama perekonomian, sistem pajak juga didasarkan pada hasil pertanian selain pajak agama (Ibrahim 1934). Faktanya, pada masa reformasi Tanzimat, hal ini juga bertujuan untuk mengalihkan beban pajak dari lahan ke perkotaan di cara pajak langsung mengikuti kemampuan membayar, namun hal itu sebagian tercapai pada saat itu (Shaw 1975). Untuk menunjukkan kerangka umum sistem perpajakan pada akhir era Ottoman, beberapa angka pendapatan dalam anggaran diberikan dalam persentase terhadap total pendapatan sebagai berikut.

Pada Tabel 11.1, pendapatan pemerintah disajikan dalam persentase terhadap total pendapatan. Seperti terlihat pada Tabel 11.1., sebagian besar penerimaan pajak didasarkan pada pajak pertanian (dijelaskan di bawah).

- ❖ *Asar* (Persepuluhan): Pajak dalam bentuk barang, yang umumnya dikenakan pada sepersepuluh hasil pertanian, memberikan seperempat pendapatan negara selama periode tersebut.
- ❖ Pajak Tanah: Pajak ini hanya dapat memberikan 10% pendapatan publik pada periode terakhir tetapi memberikan 20% pendapatan publik pada periode 1863–64. Meskipun rasio ini menurun seiring berjalannya waktu, tingkat kontribusi yang signifikan sebesar 10% masih dipertahankan.
- ❖ *Agnam* (Pajak ternak): Domba, kambing, lembu, kerbau, unta, dll. Ini adalah sejenis pajak hewan yang diterima dari hewan dan memberikan 8% pendapatan publik.

Dapat dikatakan secara singkat bahwa sekitar 60–70% pendapatan negara berasal dari pertanian pada periode ini. Hal penting lainnya adalah bahwa satu-satunya pajak fleksibel yang mengukur produksi pertanian sebesar 10 persen adalah *Asar*. Sebagai struktur

perpajakan primitif yang diwarisi dari zaman dahulu, tidak diragukan lagi sistem perpajakan Ottoman tidak dapat mencapai tujuan publik modern dan mengikuti prinsip perpajakan modern.

Tabel 11.1 Pendapatan anggaran pemerintah sebagai persentase pendapatan publik 1863–1864, 1874–1875, 1893–1894– 1902, 1911 (%) (dalam satuan Rp.X)

	1863–1864	1874–1875	1893–1894	1902	1911
As,ar (Sepuluh)	13.643	14.938	11.054	11.601	12.448
Pajak tanah	9.958	8.962	6.722	5.377	4.979
Ag,am (Pajak ternak)	3.286	4.481	4.979	5.477	3.983
Kompensasi untuk Dinas Militer	1.991	1.692	2.290	2.888	1.742
Pajak Royalti (Paten)	–	–	1.842	1.095	746
Berbagai Tugas	–	–	647	896	2.489
Pajak Bea Cukai	8.166	4.481	5.477	6.224	7.469
Pajak Tidak Langsung	7.767	8.614	7.469	7.568	9.560
Berbagai Pendapatan	4.979	6.622	9.311	8.664	6.373
Total	49.790	49.790	49.791	49.810	49.789

Tabel 11.2 Kontribusi pendapatan nasional berdasarkan persentase segmen produksi, 1923–1932(dalam satuan Rp.X)

	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
Pertanian	19.817	23.701	24.199	24.398	20.614	22.058	25.842	22.805	22.656
Industri	6.572	4.929	4.829	5.029	6.473	5.776	4.929	5.676	1.444
Perdagangan	3.883	3.535	3.585	3.485	3.983	3.634	3.136	3.236	3.435
Layanan Lainnya	19.519	17.626	17.477	16.531	18.722	18.324	15.884	18.075	17.278
Total	45.218	49.791	50.090	49.443	49.792	49.792	49.791	49.792	44.813

Struktur Sistem Perpajakan pada Tahap Awal Republik Turki

Perekonomian Republik Turki yang baru masih mengandalkan sektor pertanian. Tabel berikut menunjukkan proporsi sektor-sektor utama penyumbang PDB pada periode awal Republik Turki. Selama periode ini, pemerintah, bertentangan dengan sikap Kesultanan Utsmaniyah, mencoba mengembangkan industri dan mengarahkan investasi perusahaan pemerintah dengan menggunakan tarif protektif. Namun jenis usaha korporasi masih relatif jarang; investasi biasanya dilakukan langsung di real estat (Ibrahim 1934).

Perubahan utama pemahaman perpajakan dari masa Ottoman ke Republik adalah perpajakan berdasarkan kapasitas pembayaran pajak, bukan perpajakan berdasarkan agama dan adat istiadat (Miynat dan Tunçay 2014). Pada dasarnya, ada baiknya untuk terlebih dahulu memikirkan sejarah pajak penghasilan untuk membingkai struktur utama sistem perpajakan dari Ottoman hingga Republik Turki.

Meskipun undang-undang pertama Majelis Agung Nasional Turki tanggal 24 April 1920 adalah tentang penggantian pajak Aghnam, namun ciri utama kebijakan perpajakan saat itu adalah upaya meringankan beban pajak pada penduduk pertanian, yang kemampuannya untuk mengurangi pajak. gajinya sangat berkurang. Dalam konteks ini, Republik Turki sebagai negara yang melakukan reformasi mendasar pertama dalam sistem perpajakan, zakat (as,ar) telah dihapuskan pada tahun 1926. Karena dirasakan adanya tekanan dan beban, zakat merupakan salah satu isu utama. dalam program Kongres Ekonomi Izmir pada tahun 1923. Semua kelompok Kongres mencapai konsensus mengenai penghapusan Persepuluhan, dan beberapa kelompok mengenai penggantian pajak yang baru dan adil.

Pajak Temettu (pajak dividen—pajak yang dibebankan atas keuntungan) diperkenalkan pada masa reformasi Tanzîmât (tanggal 1840), dengan memperhitungkan pendapatan tahunan pedagang dan pengrajin. Belakangan, pendapatan tenaga kerja dan wiraswasta juga dimasukkan dalam subjek pajak. Pajak ini dipungut dengan nama pajak temettu sampai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (sampai tahun 1926). Faktanya, pajak temettu dihitung berdasarkan perkiraan keuntungan, bukan menghitung keuntungan riil melalui sistem pencatatan akuntansi. Namun, pajak ini telah menjadi dasar pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan saat ini.

Setelah pajak temettu, pajak penghasilan (tanggal 26.2.1926) menjadi undang-undang pertama yang memberikan informasi perpajakan yang benar dan memadai. Menurut undang-undang ini, perusahaan komersial dan industri, usaha jasa, wiraswasta dikenakan pajak. Para pembayar pajak ini diwajibkan untuk membukukan pembukuan berdasarkan neraca dan membayar pajak sebesar 11% dari penghasilan mereka. Namun, dalam penerapan pajak penghasilan, berbagai pos penghasilan wajib pajak dikenakan pajak secara terpisah. Cara perpajakan ini merupakan suatu cara yang menimbulkan ketidakadilan dalam perpajakan dengan tidak mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Di sisi lain, dalam penerapan pajak penghasilan kesatuan, situasi pribadi wajib pajak juga dapat diperhitungkan. Dengan cara ini, sistem ini mungkin bisa menghilangkan pajak yang berlebihan terhadap wajib pajak. Tujuan sosial ini merupakan salah satu tujuan reformasi perpajakan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Selain pajak penghasilan, pajak konsumsi selalu memegang peranan penting dalam perpajakan. Meski bukan pilihan yang tepat sejak periode pertama Republik Turki, pajak tidak langsung memegang peranan penting dalam sistem perpajakan Turki. Segera setelah Persepuluhan dihapuskan, pemerintah berupaya mengenakan pajak pada produk pertanian secara tidak langsung pajak untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan yang diakibatkannya (misalnya, pajak konsumsi khusus seperti pajak atas gula, minyak bumi; pendapatan monopoli negara).

Selain itu, pada tahun 1926, salinan pajak Perancis yang sifatnya sama diperkenalkan dengan pajak konsumsi umum. Di sisi lain, selain pajak pertanian dan pajak jalan raya, pajak hasil bumi dan pajak ekspor juga dikodifikasi pada periode ini. Namun, pajak konsumsi umum dihapuskan setahun kemudian, dan pajak transaksi diberlakukan pada tahun 1927. Pajak ini

dianggap sebagai bentuk pajak pertambahan nilai yang pertama. Sebaliknya, pajak hanya mencakup produksi industri.

Tabel 11.3 menunjukkan tokoh-tokoh terpenting sistem perpajakan selama ini. Seperti terlihat pada tabel, setelah upaya restrukturisasi perpajakan yang disebutkan di atas, sistem perpajakan kini sebagian besar didasarkan pada pajak tidak langsung.

Tabel 11.3 Pendapatan anggaran pemerintah pusat 1946–1950 (Rp.X.Juta)

	1946	1947	1948	1949
Pendapatan	4.455.024	5.084.912	5.554.962	6.233.150
Pendapatan Pajak	3.904.308	4.918.104	5.323.423	5.569.900
Pajak penghasilan	663.249	781.757	843.003	878.357
Pajak Agř nam (ternak).	134.442	136.434	154.359	159.339
Pajak transaksi	683.664	936.117	1.165.167	1.167.657

Reformasi Sistem Pajak Turki

Mengingat primitif dan kompleksitas struktur perpajakan pada saat itu, selalu ada kebutuhan akan sistem perpajakan Turki yang baru dan modern. Beberapa reformasi telah dilaksanakan secara bertahap untuk membentuk sistem perpajakan baru. Disarankan agar reformasi sistem pajak masa republik terdiri dari tiga tonggak sejarah:

1. Zakat (As,ar) dihapuskan pada tahun 1926;
2. Pajak penghasilan (Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan) dan Undang-undang Tata Cara Perpajakan diberlakukan pada tahun 1926. 1949;
3. Pajak Pertambahan Nilai diundangkan pada tahun 1984.

Seperti disebutkan sebelumnya, reformasi besar pertama dalam sistem pajak Turki adalah penghapusan persepuluhan pada tahun 1926. Secara umum, sistem perpajakan modern didasarkan pada pajak penghasilan, dengan pajak atas konsumsi dan properti. Namun di zaman modern ini, sistem perpajakan utama yang menjadi dasar dibangunnya sistem perpajakan adalah pajak penghasilan.

Pajak penghasilan ini terutama disebabkan oleh perang di Inggris melawan Napoleon. Pertama, pajak yang diterima sementara pada periode ini direvisi dan mulai diterapkan secara permanen. Sebelum perang Napoleon, perpajakan secara umum didasarkan pada pengumpulan pajak cukai atas barang-barang seperti tanah, pelayan, teh, dan rambut palsu. Pajak bea cukai juga sangat penting pada saat itu.

Untuk mencapai sistem perpajakan modern, isu yang paling signifikan adalah pajak penghasilan. Kedua, reformasi umum dalam sistem perpajakan Turki dimulai pada akhir tahun 1940an dan 1950an. Reformasi penting ini dimulai untuk membentuk sistem perpajakan Turki sebagai struktur dasar sistem saat ini. Pertama-tama, pada tahun 1949, pajak penghasilan (Pajak Penghasilan Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan) diundangkan sebagai pengganti pajak penghasilan sebelumnya (pajak penghasilan). Selain itu, untuk melaksanakan seluruh perpajakan dalam aspek teknis, diundangkan Hukum Acara Perpajakan. Ketiga pajak ini meniru sistem Jerman. Oleh karena itu, terjadi diskusi tentang apakah pajak ini pantas bagi

Turki. Karena pajak-pajak tersebut diklaim terutama dirancang untuk negara-negara maju dan industri. Permasalahan lain yang masih diperdebatkan adalah menempatkan pendapatan pertanian di luar cakupan pajak pada saat itu.

Mengikuti ketiga pajak tersebut, Pajak Pengumpulan Tunjangan Publik diundangkan pada tahun 1953 untuk menagih seluruh tagihan publik untuk menggantikan undang-undang pemungutan properti yang diwarisi dari Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian, Pajak Warisan dan Hadiah, yaitu pajak yang didasarkan pada pengalihan properti, diterbitkan dalam lingkup ini. Pada tahun 1957, Undang-Undang Pajak Konsumsi disahkan untuk menggantikan pajak transaksi. Dalam perpajakan ini, alih-alih basis pajak yang luas, persoalan pajaknya didasarkan pada penyerahan bahan baku yang sempit dan merupakan input utama produksi (Tabel 11.4).

Pada tahun 1970an, ketika pendapatan dari sektor pertanian dimasukkan ke dalam subjek pajak penghasilan, beberapa insentif pajak juga diperkenalkan. Pada periode yang sama, pajak-pajak tertentu atas kekayaan diberlakukan (yaitu, Pajak Properti diperkenalkan dan pajak mobil pribadi diubah menjadi Pajak Kendaraan Bermotor). Meskipun pajak penghasilan dibentuk ulang pada tahun 1980an untuk memasukkan beberapa hal baru, perubahan penting dalam sistem perpajakan Turki pada periode ini adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pertama pada tahun 1985. PPN berbeda dari pajak lainnya dalam hal pajak. menyebar lebih cepat ke seluruh dunia.

Perbedaan antara pajak transaksi dan PPN adalah bahwa pajak tidak hanya dipungut pada satu tingkat (misalnya, tingkat produksi atau penjualan kotor) namun juga mencakup setiap langkah rantai nilai berdasarkan harga jual. Kemudian pada tahun 2002, perubahan penting terbaru diperkenalkan sebagai pajak konsumsi khusus. Pada tahun 2007, perubahan baru terjadi pada penetapan harga transfer, kapitalisasi tipis, tindakan anti-penghindaran, pengecualian partisipasi asing, dan ketentuan khusus untuk perusahaan asing yang dikendalikan.

Salah satu perubahan paling nyata yang diperkenalkan oleh undang-undang baru ini adalah pengurangan tarif pajak perusahaan sebesar 10%, dari 30 menjadi 20%. Di sisi lain, tarif pemotongan pajak atas pembagian keuntungan meningkat dari 10 menjadi 15%.

Tabel 11.4 Pendapatan anggaran pemerintah pusat 1951–1960 (Rp.x.Juta,)

Bertahun-tahun	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Pendapatan	6.697.225	7.724.963	9.758.530	11.395.242	13.887.905	16.556.338	19.950.761	22.285.578	29.779.500	36.258.132
Pendapatan Pajak	6.269.997	7.244.954	9.212.295	10.654.315	12.740.662	15.209.922	16.687.793	19.080.371	28.135.319	34.415.773
Pajak penghasilan	1.294.631	1.344.424	1.792.566	2.414.984	3.087.197	3.858.996	4.780.176	5.726.252	7.319.644	8.962.830
Pajak perusahaan	149.380	159.339	348.554	448.141	547.728	597.522	657.274	722.005	796.696	1.717.875
Pajak Pedagang	124.483	134.442	149.380	164.318	164.318	149.380				
Pajak Agam (ternak).	129.463	139.421	151.870	144.401	159.339	149.380	151.870	154.359	164.318	179.256
Pajak Transaksi	1.120.353	1.603.350	2.190.914	2.290.501	2.564.365	3.161.887				

11.4 STRUKTUR SISTEM PERPAJAKAN SAAT INI

Dengan kerangka saat ini, sistem perpajakan Turki dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak kekayaan, dan pajak lainnya (pajak pemerintah daerah). Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan Pribadi-Pajak Badan): Meskipun penghasilan tahunan seseorang dikenai Pajak Penghasilan Pribadi, namun perusahaan wajib membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PIT): PIT dipungut atas penghasilan orang sungguhan selama satu tahun takwim. Pendapatan seseorang dapat terdiri dari satu atau lebih elemen pendapatan yang tercantum di bawah ini:

- Keuntungan bisnis (pendapatan komersial),
- Keuntungan pertanian (pendapatan),
- Gaji dan upah,
- Pendapatan dari layanan pribadi independen,
- Pendapatan dari harta tak bergerak dan hak (pendapatan sewa),
- Pendapatan dari penanaman modal (pendapatan dari harta bergerak),
- Pendapatan dan penghasilan lain-lain (capital gain dan pendapatan insidental).

Sistem pajak pendapatan kesatuan dengan beberapa pengecualian diterapkan pada Pajak Pendapatan Pribadi di Turki (yaitu, semua komponen pendapatan yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber ditambahkan kemudian dikenakan pajak dalam metode ini) (Bas, pınar 2011). Tarif dengan tarif pajak progresif diterapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terutang. Praktik ini memberikan dasar bagi perpajakan yang adil, dengan pengecualian yang juga mempertimbangkan situasi pribadi tertentu (misalnya, disabilitas, tunjangan hidup minimum).

Pajak Penghasilan Badan (CIT): CIT dipungut atas penghasilan dan penghasilan yang diperoleh perusahaan dan badan hukum. Wajib Pajak diatur sebagai berikut dalam Kode Pajak Perusahaan (undang-undang CIT pasal 2). Perusahaan Modal: Perusahaan Saham Gabungan—Perusahaan Terbatas—Asosiasi Kemitraan Terbatas, (dana, misalnya dana investasi, dana investasi pensiun, dana pembiayaan perumahan, dana pembiayaan aset, perwalian investasi) (dana dan perusahaan asing serupa)

- Koperasi,
- Perusahaan publik,
- Perusahaan yang dimiliki oleh yayasan dan asosiasi,
- Usaha patungan.

Penghasilan badan yang dikenakan PPh terdiri atas unsur-unsur penghasilan yang sama persis dengan PIT (ditetapkan dalam pasal 2 UU PPh Orang Pribadi). Namun unsur-unsur pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan perusahaan secara keseluruhan (Bas, pınar 2011) dan dikenakan pajak sebagai pendapatan komersial. Tarif tetap diterapkan untuk menghitung pajak perusahaan, tidak seperti PIT. Baik bagi PIT (pendapatan komersial) maupun pendapatan perusahaan untuk menghitung pendapatan kena pajak, pendapatan akuntansi (laba atau rugi) adalah titik awalnya. Mulai dari sini, peraturan perpajakan khusus

(pengeluaran dan pengecualian yang tidak dapat dikurangkan, dll) juga diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak (Pasal 38 PITL dan Pasal 6 dan 22 CITL).

Ketika membandingkan kedua pajak tersebut, PIT merupakan pajak langsung yang bersifat pribadi, subyektif, dan progresif, sedangkan CIT merupakan pajak non-pribadi, obyektif, dan tarif tetap (Mutluer dkk. 2001). Distribusi keuntungan merupakan titik signifikan antara PIT dan CIT. Apabila laba perusahaan dibagikan kepada pemegang saham perorangan, setelah dipotong pajak sebesar 15%, apabila setengah dari jumlah dividen melebihi golongan pajak kedua, setengah dari dividen tersebut menjadi dasar pengenaan pajak bagi PIT sebagai penghasilan dari penanaman modal. Pemotongan pajak akan dipotong dari perhitungan sistem imputasi parsial (PIT).

Pajak atas Konsumsi: Dalam penerapan pajak saat ini, sekitar sepertiga pendapatan pajak terdiri dari pajak konsumsi di negara-negara OECD. Pajak-pajak ini terutama diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) Pajak umum atas barang dan jasa (misalnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan), (2) pajak atas barang dan jasa tertentu (misalnya pajak cukai, bea masuk dan bea masuk, pajak atas barang dan jasa tertentu) premi asuransi dan jasa keuangan).

Sistem perpajakan Turki mencakup beberapa pajak konsumsi, namun yang paling penting adalah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak cukai (juga disebut pajak konsumsi khusus). Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Sebagai pajak umum, PPN merupakan pajak berbasis luas yang dipungut oleh pelaku usaha melalui proses bertahap. Proses ini mempunyai sistematika yang “mengimbangi pajak yang dibebankan atas masukan dengan pajak yang harus dibayar atas keluaran” (ITD 2005). Meskipun PPN diambil atas nilai tambah (nilai nominal tambah) pada setiap tahap, beban pajak sebenarnya ditanggung sampai konsumen akhir dengan cara tercermin dalam harga.

PPN dikenakan atas pengiriman barang dan jasa dalam lingkup kegiatan komersial, wiraswasta, dan pertanian di Turki. Pengiriman ini menghubungkan PPN dengan PIT dan CIT karena keduanya juga menghasilkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sistem offsetting PPN menimbulkan konflik kepentingan antar wajib pajak sehingga menimbulkan mekanisme kontrol dalam sistem perpajakan. Sistem kendali otomatis ini meningkatkan pendapatan PIT dan CIT. Namun, sistem penggantian kerugian dan peristiwa kenaikan pajak memiliki arti mutlak berdasarkan faktur (dan dokumen pengganti) di Turki (menerbitkan faktur menyebabkan pembebanan PPN bahkan sebelum pengiriman dan untuk mengimbangi pajak yang dikenakan, dokumen hukum merupakan persyaratan) (PPN, Pasal 10/b dan 29).

Sistem berbasis dokumen menyebabkan sebagian besar penipuan pajak berasal dari “faktur palsu.” Karena “prinsip tujuan”, pengiriman barang dan jasa akan dikenakan pajak di negara kedatangan untuk transaksi internasional. Menurut prinsip yang diterapkan secara internasional ini, barang dan jasa dikenakan pajak di tempat kedatangan. Oleh karena itu, penyerahan ekspor tidak termasuk PPN. Pajak cukai adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu, tidak seperti PPN. Pajak biasanya dipungut sekaligus, umumnya pada tahap pertama rantai pasokan (misalnya, tahap produksi, impor).

Terdapat empat kelompok produk yang dikenakan pajak cukai dengan jumlah atau tarif pajak yang berbeda (Kementerian Keuangan Republik Turki, Administrasi Pendapatan 2016).

“Daftar (I) berkaitan dengan produk minyak bumi, gas alam, minyak pelumas, pelarut dan turunan pelarut,

Daftar (II) berkaitan dengan kendaraan darat, udara dan laut (mobil dan kendaraan lainnya, sepeda motor, pesawat terbang, helikopter, kapal pesiar dll),

Daftar (III) berkaitan dengan minuman beralkohol dan soda cola, rokok dan hasil tembakau lainnya,

Daftar (IV) berkaitan dengan barang konsumsi lainnya (kaviar, bulu binatang, telepon seluler, barang putih dan mesin listrik rumah tangga lainnya, dll.)”

Dasar pengenaan PPN juga mencakup pajak-pajak termasuk cukai (PPN, Pasal 24). Oleh karena itu, kenaikan pajak cukai atas barang apa pun juga meningkatkan beban PPN. Pajak lain yang dikenakan atas transaksi perbankan dan asuransi adalah “Pajak Transaksi Perbankan dan Asuransi.” Pajak ini pada dasarnya setara dengan PPN yang diterapkan pada transaksi perbankan dan asuransi. Pajak Komunikasi Khusus: Jasa telekomunikasi dikenakan pajak komunikasi khusus. Pajak ini tidak termasuk dalam dasar PPN.

Pajak atas transaksi lainnya adalah Bea Materai, Pajak Bea Meterai, dan Pajak Bea Cukai yang pada dasarnya didasarkan pada transaksi yang lebih terbatas. Pajak atas Kekayaan: Pajak Warisan dan Hadiah terutama dikenakan untuk pengalihan non-komersial segala jenis properti antara orang yang meninggal pajak warisan) dan antara orang yang masih hidup (pajak hadiah).

Pajak lain yang dipungut atas kekayaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Lainnya (Pajak Administrasi Lokal): Pajak ini dipungut oleh otoritas kota. (Misalnya, Pajak Pengumuman dan Iklan, Pajak Hiburan, Pajak Komunikasi, Pajak Konsumsi Listrik dan Gas, Pajak Konsumsi Lingkungan Hidup, Biaya Pemerintah Daerah).

11.5 DUA MASALAH MENDASAR SISTEM PERPAJAKAN

Persoalan struktur pajak yang pertama dan paling signifikan di suatu negara adalah keseimbangan distribusi beban pajak. Setelah Perang Dunia II, pemerintah mulai meningkatkan pendapatan pajak untuk melaksanakan kebijakan ekonomi penting dan untuk memenuhi peningkatan pelayanan publik. Secara khusus, fungsi mekanisme negara untuk mendistribusikan kembali pendapatan sangat penting bagi negara-negara berkembang. Namun, untuk fungsi pemerintahan modern ini, sangat penting untuk merancang struktur pajak yang baik (distribusi beban pajak yang seimbang) serta pengeluaran publik yang efektif.

Sebagai negara berkembang, permasalahan mendasar struktur perpajakan di Turki adalah keseimbangan distribusi beban pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan proporsi pajak langsung dan tidak langsung terhadap total penerimaan pajak. Di Turki, pemerintah umumnya memecahkan masalah pembiayaan dengan menggunakan pajak tidak langsung yang mudah dipungut, dibandingkan meningkatkan efisiensi pajak yang sudah ada; akibatnya,

keseimbangan pajak tidak langsung-langsung yang sudah tidak seimbang menjadi semakin buruk. Tabel 11.5 menunjukkan pajak langsung dan tidak langsung dari tahun 2014 hingga 2019 serta porsi pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak. Perbedaan pajak langsung dan tidak langsung memberikan informasi mengenai sumber pendapatan dan keadilan sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan, peralihan pendapatan ke pajak tidak langsung, meskipun memberikan hasil yang menguntungkan dalam hal efisiensi, namun merugikan dalam hal menjamin keadilan. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa porsi pajak langsung pada periode pasca tahun 2004 rata-rata berada di bawah 34% dan menurun menjadi 31% dalam beberapa tahun.

Selain pilihan pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang mudah, alasan lain tingginya porsi pajak tidak langsung dalam pendapatan anggaran adalah persaingan pajak internasional. Khususnya, untuk menarik investasi langsung internasional, telah terjadi berbagai pengurangan tarif pajak penghasilan dan pajak perusahaan sejak tahun 1980an di Turki. Baru-baru ini, penurunan yang signifikan dilakukan pada tarif pajak pendapatan dan perusahaan pada tahun 2006. Namun, faktanya adalah bahwa negara ini menduduki peringkat ketiga di antara negara-negara OECD dalam hal harga listrik dan kenaikan harga energi lainnya karena penerapan pajak cukai yang tinggi. berdampak negatif terhadap daya saing para industrialis. Situasi ini berdampak buruk pada investasi asing langsung di Turki. Selain itu, tingginya tarif pajak yang tidak adil menyebabkan terkikisnya basis pajak, merusak tujuan utama perpajakan, dan menimbulkan informalitas dalam perekonomian.

Tabel 11.5 Distribusi pajak tidak langsung dan pajak langsung [2004–2019]

	Pajak Tidak Langsung	Pajak Langsung	Jumlah Penerimaan Pajak	(Miliar Rp.X)	
				Proporsi Penerimaan Pajak (%)	
				Pajak Tidak Langsung	Pajak Langsung
2004	30.911.804	13.940.686	44.852.491	34.307	15.485
2005	36.974.661	16.269.030	53.243.691	34.556	15.236
2006	46.916.431	21.539.672	68.456.103	34.108	15.684
2007	50.286.953	25.814.942	76.101.895	32.913	16.880
2008	54.317.737	29.389.617	83.707.354	32.315	17.477
2009	55.424.148	30.440.260	85.863.911	32.116	17.676
2010	71.700.150	33.145.541	104.845.193	34.058	15.734
2011	85.521.332	40.859.052	126.380.384	33.710	16.083
2012	92.730.932	46.068.946	138.799.879	33.262	16.531
2013	112.397.871	50.013.587	162.410.961	34.457	15.336
2014	118.554.837	56.974.718	175.529.058	33.610	16.182
2015	139.068.764	63.998.589	203.066.855	34.108	15.684
2016	153.772.784	74.779.878	228.553.160	33.511	16.282
2017	179.141.079	88.059.306	267.200.385	33.361	16.431
2018	194.246.933	115.237.594	309.484.528	31.270	18.523
2019	207.499.473	128.039.005	335.538.479	30.772	19.021

Sifat pajak pendapatan dan cukai yang tidak seimbang terlihat lebih jelas ketika tarifnya dibandingkan dengan rata-rata OECD. Tabel 11.6 menunjukkan statistik pendapatan tahun 2017 dibandingkan dengan rata-rata OECD.

Seperti terlihat pada tabel, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata porsi pajak penghasilan OECD di Turki. Di sisi pengeluaran, khususnya dalam pajak konsumsi Turki (cukai), pangasanya lebih dari 23%, hampir dua kali lipat rata-rata OECD. Bahkan jika kita hanya melihat angka-angkanya saja, agar sistem pajak Turki dapat mencapai struktur pajak yang adil, struktur pajak pendapatan-konsumsi harus hampir seluruhnya dibalik. Permasalahan lain yang perlu diatasi terkait penerimaan pajak penghasilan adalah sebagian besar penerimaan pajak penghasilan dipungut melalui pemotongan pajak. Bagian penting dari pemotongan tersebut adalah pemotongan upah dan gaji karyawan. Selain itu, tingginya beban pajak terhadap upah rata-rata di Turki dipandang sebagai hambatan terhadap lapangan kerja dan dianggap sebagai salah satu alasan terpenting munculnya lapangan kerja informal.

Masalah mendasar lainnya dalam perpajakan Turki adalah persaingan pajak. Setelah tahun 1980-an, sebagai akibat dari perdagangan bebas barang dan jasa, aliran modal bebas, dan kebijakan liberal lainnya (menciptakan lingkungan yang nyaman bagi investasi langsung internasional, dll.), persaingan pajak juga meningkat pesat. Dalam rangka persaingan pajak, pemerintah telah mengurangi pajak (yaitu menurunkan tarif pajak, pemotongan pajak). Pada saat yang sama, mereka telah melakukan upaya untuk mengkompensasi kerugian pajak dengan memperluas basis pajak (membatasi pengeluaran pajak, memerangi negara bebas pajak, mengendalikan perusahaan asing-CFC, dan peraturan transfer pricing).

Pengukuran lain terhadap persaingan pajak adalah dengan melakukan upaya bersama dengan pesaing lainnya untuk memerangi penghindaran pajak berdasarkan panduan OECD. Dalam kondisi seperti ini, Turki telah berjuang melawan dampak buruk persaingan usaha dan harus mencapai keseimbangan dalam lingkungan persaingan pajak internasional yang semakin meningkat. Sebagai anggota OECD, Turki harus bergabung dan mengambil tindakan balasan untuk menantang persaingan pajak yang merugikan. Oleh karena itu, Turki telah menurunkan tarif pajak penghasilan pribadi dan perusahaan. Pada tahun 2006, Undang-Undang Pajak Perusahaan yang baru diberlakukan, yang mencakup pengukuran keamanan pajak CFC dan transfer pricing. Selain itu, Turki telah mengambil beberapa langkah tambahan ke arah ini (misalnya, perluasan kerangka perjanjian pertukaran informasi perpajakan, memastikan akses terhadap informasi bank).

Tabel 11.6 Statistik pendapatan: gambaran umum

	Penerimaan pajak sebagai % dari PDB				Penerima pajak sebagai % terhadap total penerimaan pajak tahun 2017						
	2018	2017	2016	2000	Pajak atas penghasilan orang pribadi (PIT)	Pajak atas penghasilan, korporasi (CIT)	Kontribusi jaminan sosial (SSC)	Pajak atas properti	Pajak pertambahan nilai	Pajak konsumsi lainnya	Semua pajak lainnya
OECD	170.791	170.293	171.289	168.302	119.006	46.307	129.463	28.880	100.582	60.748	12.946
Rata-rata Turki	121.496	123.985	125.977	117.512	72.200	33.859	145.894	22.407	100.084	116.018	6.473

11.6 HUBUNGAN ANTARA PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI

Mengingat keseluruhan pengaturan di Turki, terlihat bahwa hukum komersial, hukum perpajakan, dan peraturan akuntansi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada tahap pertama, Hukum Dagang (misalnya, Hukum Dagang 1926, 1956 dan 2011) telah membentuk modal ekuitas untuk melindungi hak-hak mitra. Ia juga mengatur dan membina perusahaan saham gabungan dan lingkungan pasar modal. Di sisi lain, sistem informasi akuntansi telah berkontribusi terhadap hukum komersial dan perpajakan dalam hal verifikasi proses perhitungan dan transaksi dengan bukti. Selain itu, peraturan perpajakan juga mendapat manfaat dari modal ekuitas ini dalam hal menghitung piutang pajak (berdasarkan peningkatan modal antara awal dan akhir periode akuntansi).

Dengan diadopsinya undang-undang pajak penghasilan pertama (tanggal 26.02.1926) di Turki, terjalin hubungan erat antara akuntansi dan peraturan perpajakan. Menurut undang-undang, pembayar pajak adalah mereka yang melakukan pembukuan berdasarkan neraca pada perusahaan komersial dan industri, perusahaan jasa, dan wiraswasta. Selain itu, pajak yang terutang dihitung atas laba dengan melakukan pembukuan berdasarkan neraca untuk pertama kalinya di Turki. Selain itu, pembukuan berpasangan dan buku tambahan (misalnya buku besar, buku transaksi, buku harian, buku inventaris) diperkenalkan dengan undang-undang perpajakan ini.6 Periode yang dimulai dengan undang-undang ini dan diakhiri dengan reformasi perpajakan besar-besaran (dari tahun 1926 hingga tahun 1949) disebut periode buku ganda dalam sejarah akuntansi Turki. Neraca yang ditentukan dalam undang-undang ini terutama untuk tujuan perpajakan. Selain itu, neraca pajak tetap dominan sepanjang abad kedua puluh dalam penerapan akuntansi.

Undang-undang pajak penghasilan dibagi menjadi tiga undang-undang (UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Undang-undang Pajak Badan, dan Undang-undang Tata Cara Perpajakan) melalui reformasi perpajakan tahun 1949. Dalam hal pajak baru atas penghasilan (Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Badan), perpajakan pada neraca dasar telah diambil sebagai dasar selain metode buku operasi. Oleh karena itu, laba rugi dihitung dengan membandingkan jumlah ekuitas pada akhir periode dan awal periode. Selain itu, ketentuan penilaian UU Tata Cara Perpajakan juga akan diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasca reformasi perpajakan, baik Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perpajakan memuat penjelasan mengenai kewajiban pembukuan. Ada juga kewajiban tambahan dalam Hukum Acara Perpajakan seperti dokumen, penilaian dan hal-hal serupa. Reformasi pajak merupakan upaya penting untuk membawa pemikiran akuntansi Turki ke tingkat modern. Namun UU Tata Cara Perpajakan telah mengubah praktik akuntansi menjadi akuntansi perpajakan. Ketika Undang-Undang Tata Cara Perpajakan disusun kembali pada tahun 1961, undang-undang tersebut memberikan dampak yang besar terhadap akuntansi dengan berkembang dalam bingkai akuntansi perpajakan. Kemudian berdasarkan pasal 175 UU Tata Cara Perpajakan, Kementerian Keuangan menyusun rencana akuntansi umum yang seragam pada tahun 1992 dan mulai diterapkan pada tahun 1994. Pengaruh dominan UU Tata Cara Perpajakan terhadap akuntansi masih berlanjut hingga saat ini.

Delapan faktor disarankan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansi (yaitu, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya). Sistem hukum, perpajakan, dan budaya tampaknya lebih dapat diterapkan pada kasus Turki. Sistem perpajakan Turki sebagai bagian dari kelompok negara hukum kode didasarkan pada bentuk hukum yang memerlukan aturan yang sangat preskriptif dan prosedural. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, kode pajak Turki yang baru terinspirasi oleh peraturan pajak Jerman. Hal ini juga disarankan agar budaya akuntansi Turki tetap dekat dengan nilai-nilai seperti kontrol undang-undang, keseragaman, konservatisme, dan kerahasiaan (nilai-nilai yang berasal dari klasifikasi budaya Hofstede) sebagai bagian dari Kawasan Timur Dekat.

Sebagai rantai terakhir westernisasi dan akibat globalisasi di Turki, Undang-Undang Dagang Turki No.6102 diberlakukan pada awal abad kedua puluh satu (tanggal 14.12.2011). Dalam kerangka hukum, standar akuntansi internasional dan standar audit internasional telah menjadi bagian dari praktik akuntansi Turki secara luas dan mengubah pemikiran akuntansi menjadi globalisasi.

Peraturan perpajakan dan akuntansi pada dasarnya berbeda dalam hal tujuan dan cara pengaturannya. Meskipun prinsip akuntansi didasarkan pada prinsip, peraturan perpajakan adalah peraturan berdasarkan aturan. Menurut peraturan perpajakan, semua transaksi dan kejadian harus disahkan berdasarkan dokumen dan berdasarkan fakta yang jelas. Sebaliknya, peraturan akuntansi didasarkan pada prinsip yang memberikan ruang bagi pelaporan yang dibuat khusus untuk setiap entitas dan situasi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan semua pemangku kepentingan khususnya investor informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Namun, tujuan perpajakan dan akuntansi perpajakan adalah menyajikan informasi guna mengamankan dan mengumpulkan jumlah pajak yang benar.

11.7 KESIMPULAN

Untuk mencapai ruang lingkup penelitian ini, beberapa pengetahuan umum tentang dasar perpajakan, latar belakang sejarah pengalaman perpajakan Turki, reformasi undang-undang perpajakan, struktur perpajakan saat ini, dan hubungan antara peraturan pajak dan akuntansi diperiksa. Pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dirancang sesuai dengan beberapa prinsip dan tujuan umum. Prinsip pertama dan mungkin yang paling penting yang harus diterapkan adalah bahwa kontribusi harus sesuai dengan pendapatan dan kekayaan pribadi. Meskipun undang-undang perpajakan harus mengikuti beberapa prinsip dasar, terdapat beberapa dinamika sosial dan politik serta faktor globalisasi dan bisnis internasional yang mengarahkan dan menegakkan peraturan hukum.

Peraturan perpajakan pertama Republik Turki yang diwarisi dari zaman Ottoman sebelum berdirinya Republik Turki (tahun 1923). Mulai periode ini, ditinggalkannya pajak zakat fitrah (as,ar) yang bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi telah menyebabkan sistem perpajakan beralih ke pajak tidak langsung. Reformasi pajak besar-besaran dilakukan

pada tahun 1949 seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial di Turki. Namun, seperti yang dapat dipahami dari data yang disajikan dalam penelitian ini, struktur sistem perpajakan Turki yang pada dasarnya didasarkan pada pajak tidak langsung tidak berubah hingga saat ini. Beberapa pendekatan ekonomi dan politik juga perlu diubah untuk mengubah struktur ini (misalnya, pemerintah tidak boleh hanya mengikuti kebijakan perpajakan berdasarkan perubahan tarif PPN atau cukai).

Turki dengan struktur sistem perpajakan yang tidak adil dan merugikan juga harus memerangi persaingan pajak internasional. Turki harus menarik investasi asing langsung di satu sisi dengan mengurangi kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, sebagai anggota OECD, Turki harus bergabung dan mengambil tindakan balasan untuk menantang persaingan pajak yang merugikan. Turki hanya dapat menutupi kerugian pajak yang disebabkan oleh meningkatnya persaingan pajak dengan memperluas basis pajak dan perekonomian formal.

Selain peraturan perpajakan, praktik akuntansi juga mengikuti mata kuliah pengembangan ini. Sistem pencatatan ganda dan mulai diterapkan di Turki dengan pencatatan penerapan pajak penghasilan. Dengan demikian, praktik akuntansi melanjutkan perkembangannya dalam kerangka akuntansi pajak. Sebagai akibat dari globalisasi dan faktor perdagangan internasional di Turki, melalui Hukum Dagang Turki yang baru, standar akuntansi internasional dan standar audit internasional menjadi bagian dari penerapan akuntansi Turki dan mengubah pemikiran akuntansi menuju globalisasi. Dalam konteks ini, pemikiran dan praktik akuntansi harus melampaui akuntansi perpajakan dan mencapai fungsi utamanya yaitu memberikan informasi yang benar dan adil kepada semua pihak termasuk pemerintah.

BAB 12

TINJAUAN SEJARAH PARIWISATA

12.1 PENDAHULUAN

Konsep pariwisata dimulai pada masa awal ketika masyarakat berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Diketahui bahwa bangsa Sumeria memulai sejarah perjalanannya pada tahun 4000 SM dan kunjungan dilakukan ke Mesir Kuno pada tahun 3000 SM untuk melihat piramida dan kuil. Penemuan kompas, perkembangan navigasi dan kartografi, perkembangan jalan raya, penemuan mesin cetak, perkembangan komunikasi yaitu setiap langkah peradaban, kebutuhan masyarakat untuk melihat tempat-tempat baru, keingintahuan mereka untuk mempelajari hal-hal baru pencarian mereka akan petualangan, gerakan penaklukan dan kekuatan keagamaan telah meningkatkan kecenderungan orang untuk melihat negara lain.

Pada Abad Pertengahan, seiring dengan Renaisans, terdapat perkembangan dalam seni rupa dan sains, dan perkembangan ini menjadi penting dalam sains dan seni di Florence, Roma, dan Paris. Sama seperti perjalanan pertama Thomas Cook ke benua Eropa adalah ke Pameran Paris, perjalanan kolektif dan terorganisir pertama ke Kekaisaran Ottoman, atau dengan kata lain gerakan pariwisata modern pertama, dimulai dengan pameran semacam itu. Karena dibukanya pameran “Sergi-i Umum-i Osmani” pada tahun 1863, kelompok pariwisata dari berbagai tempat, khususnya Austria, datang ke Istanbul. Rombongan wisatawan pertama dari Kesultanan Utsmaniyah mulai berangkat ke luar negeri dengan berbagai pengaturan.

Pada periode pasca-republik, kemajuan pesat telah dicapai dalam pergerakan pariwisata. Pemahaman masyarakat mengenai perjalanan dan perjalanan waktu luang mereka telah meningkat seiring berjalannya waktu, dan jenis wisata alternatif serta wisata minat khusus telah berkembang.

12.2 PERIODE PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

Dalam studi yang berkaitan dengan perkembangan sektor pariwisata di Türkiye secara berkala disebutkan dua periode utama. Periode hingga tahun 1960 dianggap sebagai Periode yang Direncanakan dan periode dari tahun 1960 hingga saat ini sebagai Periode yang Direncanakan.

Periode yang Telah Direncanakan Sebelumnya

Dapat dikatakan bahwa pada Periode Pra-Rencana (1923–1950), terobosan serius di bidang pariwisata belum dapat dilakukan. Di satu sisi, di antara tahun-tahun ini, terdapat periode naik turunnya politik dan kehidupan sering kali dihabiskan dalam peperangan; di sisi lain, terdapat permasalahan ekonomi, politik dan sosial dalam dan luar negeri yang timbul akibat berdirinya Republik Türkiye yang baru; oleh karena itu, kegiatan pariwisata dicegah untuk dilakukan pada tingkat yang disyaratka. Dapat diterima bahwa gerakan pertama yang berkaitan dengan pariwisata di Türkiye dimulai dengan “Masyarakat Wisatawan Turki” pada tahun 1923. Saat ini, perkumpulan ini melanjutkan aktivitasnya dengan nama Asosiasi Tur dan

Otomotif Turki. Poster pertama, pemandu wisata pertama dan peta jalan pertama Türkiye dicetak, kursus bahasa pertama dibuka, ujian pemandu penerjemah pertama diadakan, tinjauan pariwisata pertama ditulis dan diterbitkan, dan kongres dan konferensi pariwisata pertama diadakan. dipegang. Mengorganisir tur pertama ke Istanbul dan Bursa, lembaga ini berkontribusi pada promosi warisan sejarah dan budaya.

Masalah mendorong investasi pertama yang terkait dengan sektor pariwisata di Türkiye ditangani pada tahun 1950 dengan Undang-Undang tentang Dorongan Lembaga Pariwisata, dan dana pinjaman pariwisata didirikan di Bank Kredit Real Estat Turki pada tahun yang sama. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing, pada tahun 1951 diundangkan Undang-Undang Pendorongan Penanaman Modal Asing yang kemudian disusul dengan Undang-undang Pendorongan Penanaman Modal Asing. Pada tahun 1953, Undang-Undang Dorongan Industri Pariwisata No. 6086 mulai berlaku, dan dengan undang-undang ini, pengusaha didorong untuk berinvestasi dan pembebasan pajak diberikan untuk investasi pariwisata selama 10 tahun. Pada tahun 1960, "TR Tourism Bank Inc.", 'Direktorat Jenderal Pariwisata Pers dan Penyiaran" dan "Dewan Penasihat Pariwisata" dibuka, dan penelitian tentang pariwisata dilakukan.

Periode yang Direncanakan

Periode yang Direncanakan mengacu pada periode panjang di mana sumber daya dikelola dengan tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran sosial dan ekonomi yang ingin dicapai masyarakat selama periode tertentu, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan politik yang sah dari sumber daya tersebut, Hal ini mulai dilaksanakan dengan rencana sementara pada tahun 1963 dan masih berlanjut. Di Türkiye, Periode Perencanaan telah dipraktikkan dengan rencana pembangunan lima tahun, yang kami sebut periode tengah. Di Türkiye, Periode Perencanaan dilaksanakan dengan rencana pembangunan lima tahun, dan ketika perencanaan ini tidak dapat dilaksanakan, program transisi telah dilaksanakan. 1978, 1984, 1995 dan 2006 adalah tahun-tahun pelaksanaan program transisi ini. Rencana tersebut memandu dan memuat konten penting untuk sektor publik, sekaligus mendorong konten untuk sektor swasta.

Dalam kerangka tiga rencana pembangunan pertama, antara tahun 1963 dan 1978, kegiatan promosi pariwisata tidak berhasil, rencana fisik dan investasi infrastruktur tidak memadai, dan pendidikan pariwisata tidak dianggap cukup penting. Dalam rencana pembangunan lima tahun keempat (1979–1983), perhatian diberikan pada sektor swasta, arus masuk modal asing, infrastruktur, rencana fisik, perlindungan lingkungan alam dan sejarah, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan alam. garis pantai, promosi dan pendidikan pariwisata. Pada periode ini, perkemahan dan fasilitas rekreasi yang dibangun untuk lembaga-lembaga publik dibuka untuk pariwisata asing, dan dipastikan tidak menyebar ke masyarakat yang lebih luas.

Dalam kerangka rencana pembangunan lima tahun kelima (1985–1989), negara mendukung hal-hal seperti pembangunan suprastruktur, peningkatan kapasitas tempat tidur, pelatihan manajemen dan memberikan insentif modal asing. Pada periode ini, Undang-Undang Penanaman Modal Asing mulai berlaku, investasi asing hingga 100% diperbolehkan

dalam proyek-proyek, dan hak untuk bermitra dengan Bank Pembangunan Turki dan perusahaan diberikan. Periode 1980–1990 merupakan tahun dimana sektor pariwisata berkembang paling pesat di Türkiye. Pada periode tersebut, kapasitas tempat tidur meningkat dari 56.000 menjadi 173.000 ribu, dan jumlah wisatawan yang datang ke negara tersebut meningkat dari 1,2 juta menjadi 5,3 juta. Pada periode ini diambil “Keputusan Kerangka Insentif Pariwisata” pada tanggal 20 Juni 1980, dan dalam keputusan tersebut dibentuk “Badan Koordinasi Pariwisata” untuk menentukan daerah-daerah yang akan dilakukan penanaman modal, mengambil keputusan pembiayaan baru bagi sektor tersebut. dan mengatur prinsip-prinsip mengenai dorongan modal asing.

Dalam rencana pembangunan lima tahun keenam (1990–1994), jenis pariwisata alternatif menjadi penting. Peningkatan tenaga kerja berkualitas, pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, perbaikan pengelolaan fasilitas wisata, peningkatan tingkat okupansi fasilitas dan perpanjangan musim pariwisata merupakan beberapa faktor yang diharapkan dapat direalisasikan dalam periode perencanaan ini. Selama periode ini, program sertifikasi diperkenalkan untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata. Di antara kampanye yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 1993, “Sertifikat dan Plakat Organisasi Ramah Lingkungan” diberikan kepada beberapa perusahaan sebagai hasil evaluasi yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran lingkungan di perusahaan dan untuk berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan.

Dalam rencana pembangunan lima tahun ketujuh (1996–2000), kegiatan promosi dan pemasaran dianggap penting. Sistem perizinan dan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kapasitas tempat tidur merupakan salah satu faktor yang diwujudkan pada periode ini. Dalam rencana kedelapan (2000–2005), memastikan pembangunan sektor pariwisata yang sehat dan jangka panjang serta mengupayakan kegiatan pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang diharapkan dapat terwujud pada periode ini.

Dalam kerangka rencana pembangunan kesembilan (2007–2013), wisata kesehatan menjadi penting jika jenis wisata alternatif didorong. Selain itu, kebijakan seperti peningkatan pendapatan per wisatawan dan penyediaan layanan bernilai tambah tinggi terlihat diterapkan. Tingkat pertumbuhan sektor ini menurun menjadi 1% pada tahun 2008 akibat terorisme, aktivitas alam, tingginya harga minyak dan fluktuasi nilai tukar dan mengalami kontraksi sebesar 3,5% pada tahun 2009. Diharapkan sektor ini akan tumbuh rata-rata tahunan. tingkat 4% dan menciptakan 6 hingga 8 juta lapangan kerja baru setiap tahun.

Pada rencana kesepuluh (2014–2018), ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, fasilitas dan layanan yang berkualitas di bidang pariwisata dan menjadikan pariwisata sebagai merek internasional. Dalam konteks ini, negara kita telah membuat kemajuan besar di sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan pariwisatanya selama sepuluh rencana pembangunan lima tahun. Diperkirakan perjalanan akan semakin meningkat dalam sepuluh tahun ke depan, mencapai 1,6 miliar pada tahun 2020 dan 2,6 miliar pada tahun 2050.

12.3 PENGEMBANGAN MANAJEMEN AKOMODASI

Pada masa Ottoman, penginapan di pemukiman besar dan karavan di jalan komersial diterima sebagai fasilitas akomodasi pertama di Anatolia. Meskipun sejarah manajemen hotel tidak menerima penginapan dan karavanserai sebagai hotel pertama dalam literatur, hal ini merupakan bukti bahwa manajemen hotel dengan dimensi komersial dan sosialnya dimulai di negeri kita pada saat itu. Pejabat negara yang dikirim ke negara bagian untuk urusan resmi ditampung di sini hingga tiga hari, bersama orang-orang dan barang-barang serta hewan mereka, tanpa membedakan antara penduduk lokal dan orang asing.

Sebagian besar penginapan di Istanbul digunakan bersama oleh negara-negara yang berbeda. Para pedagang dari negara yang sama berkumpul di penginapan tertentu. Auberge, hotel pertama yang dibuka di Edirne pada akhir tahun 1860-an, dibangun di atas struktur penginapan tradisional; kamar dilengkapi dengan sangat buruk dan hotel memiliki layanan makanan. Pertemuan Kesultanan Utsmaniyah dengan pergerakan pariwisata modern pada tahun 1863 dan dibukanya "Orient Express (Kereta Api Oriental)" yang menghubungkan Istanbul ke Paris pada tahun 1870 berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan selanjutnya. Pembangunan hotel pertama di Istanbul semakin mendorong hal ini. Orient Express membangun Pera Palace Hotel pada tahun 1892 untuk menampung pelanggannya. Sementara itu, untuk pertama kalinya, sektor pariwisata mulai terbentuk, dan hotel, restoran, penukaran uang, dan layanan bimbingan sedang dalam proses pengorganisasian di Pera.

Pera Palas, hotel pertama di Türkiye dalam pengertian modern, dan Hotel Tokatliyan dianggap sebagai salah satu hotel termewah di Eropa dan Timur Tengah pada saat itu. Istanbul diikuti oleh kota-kota Anatolia lainnya. Dengan Divan dan Hilton Hotel, yang mulai beroperasi di Istanbul pada tahun 1950-an, industri hotel Turki mengalami percepatan. Pada periode 1980 hingga 1990-an, peningkatan fasilitas akomodasi di Türkiye sebanyak 7 kali lipat, dan pada tahun 2000-an, terjadi peningkatan besar dalam fasilitas akomodasi dan jumlah wisatawan di Türkiye yang kaya akan warisan budaya, alam, dan sejarah.

12.4 PENGEMBANGAN LAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN

Industri makanan dan minuman memiliki sejarah yang bersamaan dengan industri akomodasi. Munculnya penginapan dan karavanserai untuk tujuan akomodasi menyebabkan munculnya manajemen hotel dan industri makanan dan minuman.

Pengembangan layanan makanan dan minuman dalam sektor pariwisata di Indonesia merupakan bagian integral dari pengalaman wisatawan yang berkualitas. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata, terjadi peningkatan permintaan terhadap variasi dan kualitas layanan makanan dan minuman yang disajikan kepada wisatawan. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dijelaskan mengenai pengembangan layanan makanan dan minuman di sektor pariwisata Indonesia:

1. **Variasi Menu:** Perkembangan layanan makanan dan minuman di sektor pariwisata di Indonesia mencakup penyediaan variasi menu yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan kuliner di seluruh nusantara. Restoran dan warung makan turut

memperkenalkan menu-menu tradisional dan lokal yang menarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi kuliner khas daerah yang mereka kunjungi.

2. **Inovasi Kuliner:** Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dengan adanya inovasi dalam penyajian makanan dan minuman. Penggunaan bahan-bahan lokal yang segar dan berkualitas menjadi fokus dalam menyajikan hidangan yang autentik dan berkualitas tinggi bagi wisatawan.
3. **Pengalaman Unik:** Pengembangan layanan makanan dan minuman juga mencakup penciptaan pengalaman unik bagi wisatawan. Contohnya, restoran dengan konsep alam terbuka atau pesisir pantai menawarkan pengalaman bersantap yang menarik dengan pemandangan yang indah, sementara kafe-kafe kreatif dan modern menawarkan suasana yang nyaman dan Instagrammable bagi para pengunjung.
4. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pengembangan layanan makanan dan minuman di sektor pariwisata juga berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya permintaan akan kuliner lokal, pelaku usaha kuliner lokal, seperti pedagang kaki lima, warung makan, dan UMKM makanan dan minuman tradisional, dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan mereka.
5. **Kualitas dan Kebersihan:** Pentingnya menjaga standar kualitas dan kebersihan dalam layanan makanan dan minuman juga menjadi perhatian utama. Pelaku usaha harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan berkualitas kepada pelanggan.

Dengan pengembangan layanan makanan dan minuman yang terus berlanjut, sektor pariwisata di Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sambil turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian warisan kuliner Indonesia.

Menurut Türksoy, alasan peningkatan layanan makanan dan minuman dikelompokkan dalam judul berikut;

- ❖ Meningkatkan waktu luang
- ❖ Peningkatan pendapatan dan perubahan standar hidup
- ❖ Meningkatkan jumlah usaha
- ❖ Perubahan pada menu
- ❖ Peningkatan kegiatan sosial
- ❖ Konsentrasi kegiatan usaha.

12.5 SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSPORTASI DALAM HAL PARIWISATA

Ini adalah salah satu kebutuhan terpenting manusia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain sejak zaman pertama sejarah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sistem transportasi telah memungkinkan berkembangnya pemahaman perjalanan sejak zaman dahulu. Pergerakan yang terjadi karena alasan seperti migrasi dan perang pada awalnya, diwujudkan untuk tujuan ekonomi, sosial, politik dan wisata pada periode-periode berikutnya.

Kegiatan perjalanan yang dilakukan pada masa abad pertengahan antara lain perjalanan bangsa Polinesia sejauh 2000 mil dengan perahu layar dari Kepulauan High Society ke Hawaii pada tahun 500-an, penjelajahan bangsa Viking di Amerika Utara yang mengembangkan perdagangan maritim, perjalanan Marco Polo ke Iran, Tibet, Burma, India, Siam dan tempat-tempat lain, 6 ziarah Ibnu Batutah antara tahun 1325–1354, memungkinkan orang-orang yang hidup pada periode ini mendapat informasi tentang dunia luar dan meningkatkan keinginan mereka untuk bepergian.

Dapat dikatakan bahwa penelitian yang memelopori perpindahan untuk tujuan pariwisata dimulai oleh Thomas Cook. Pada abad kesembilan belas, kereta api dan mobil pribadi, dan pada abad kedua puluh, transportasi udara memberikan perkembangan pariwisata nasional. Apalagi setelah masa perang, permintaan pariwisata mulai meningkat seiring dengan bertambahnya waktu senggang dan berkurangnya jam kerja.

Sama seperti perjalanan pertama Thomas Cook ke benua Eropa adalah ke Pameran Paris, perjalanan kolektif dan terorganisir pertama ke Kekaisaran Ottoman, atau dengan kata lain, gerakan pariwisata modern pertama, dimulai dengan pameran semacam itu. Karena dibukanya pameran “Sergi-i Umum-i Osmani” pada tahun 1863, kelompok pariwisata dari berbagai tempat, khususnya Austria, datang ke Istanbul. Kelompok wisatawan pertama dari Kesultanan Utsmaniyah mulai berangkat ke luar negeri dengan berbagai pengaturan.

12.6 KESIMPULAN

Pariwisata, seperti halnya negara-negara lain, telah dimobilisasi sejak Perang Dunia Pertama. Negara kita, yang sebagian besar dipandang sebagai titik transisi hingga tahun 1950-an, telah menempati posisi penting dalam statistik pariwisata dunia menjelang tahun 2020. Kajian tentang bea cukai, paspor, perjalanan, akomodasi, penerjemahan, bimbingan dan pendidikan pariwisata pada masa transisi dari Kesultanan Utsmaniyah ke Republik Türkiye telah menjadikan Türkiye sebagai pemimpin di bidang pariwisata dunia. Pada periode ini, terlihat bahwa Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Edirne dan Konya yang memiliki potensi pariwisata, peluang transportasi dan kondisi perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain, termasuk kawasan yang diprioritaskan dalam hal pariwisata dan akomodasi.

Penggalian arkeologi yang membentuk sejarah peradaban Anatolia, restorasi artefak dan tempat bersejarah, pembuatan museum, pencetakan dan publikasi materi promosi dan pemasaran, pameran nasional dan internasional, pekan raya dan pertemuan, kegiatan pendidikan pariwisata, khususnya bimbingan, telah dilakukan faktor yang mempercepat kegiatan pariwisata dan promosi di seluruh negeri. Dalam hal ini, upaya untuk memperluas dan mengembangkan jaringan dan sarana transportasi serta mendukung sektor akomodasi untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata perlu mendapat perhatian. Karena lokasinya yang strategis antarbenua, Türkiye telah mendapatkan citra negara yang layak dikunjungi dan dilihat di dunia dengan pendekatan promosi dan pemasaran destinasi secara makro dan mikro dan telah mendapatkan tempat yang layak dalam sejarah pariwisata dunia.

Sejarah Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Ekonomi

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-01-4 (PDF)

